



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 473 TAHUN 2024

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Gubernur Nomor 139 tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72040);
6. Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

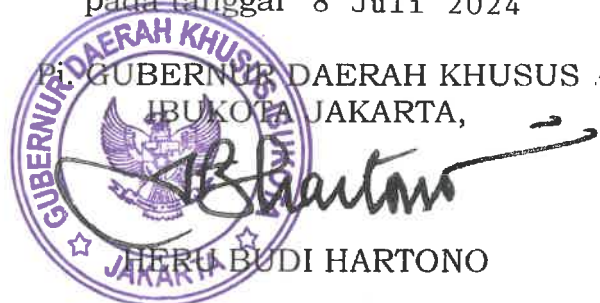
KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. Peta Proses; dan
- b. Peta Subproses.

KEEMPAT : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diakses melalui aplikasi Repositori SPBE pada laman <https://repositorispbe.jakarta.go.id/>.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024



Tembusan:

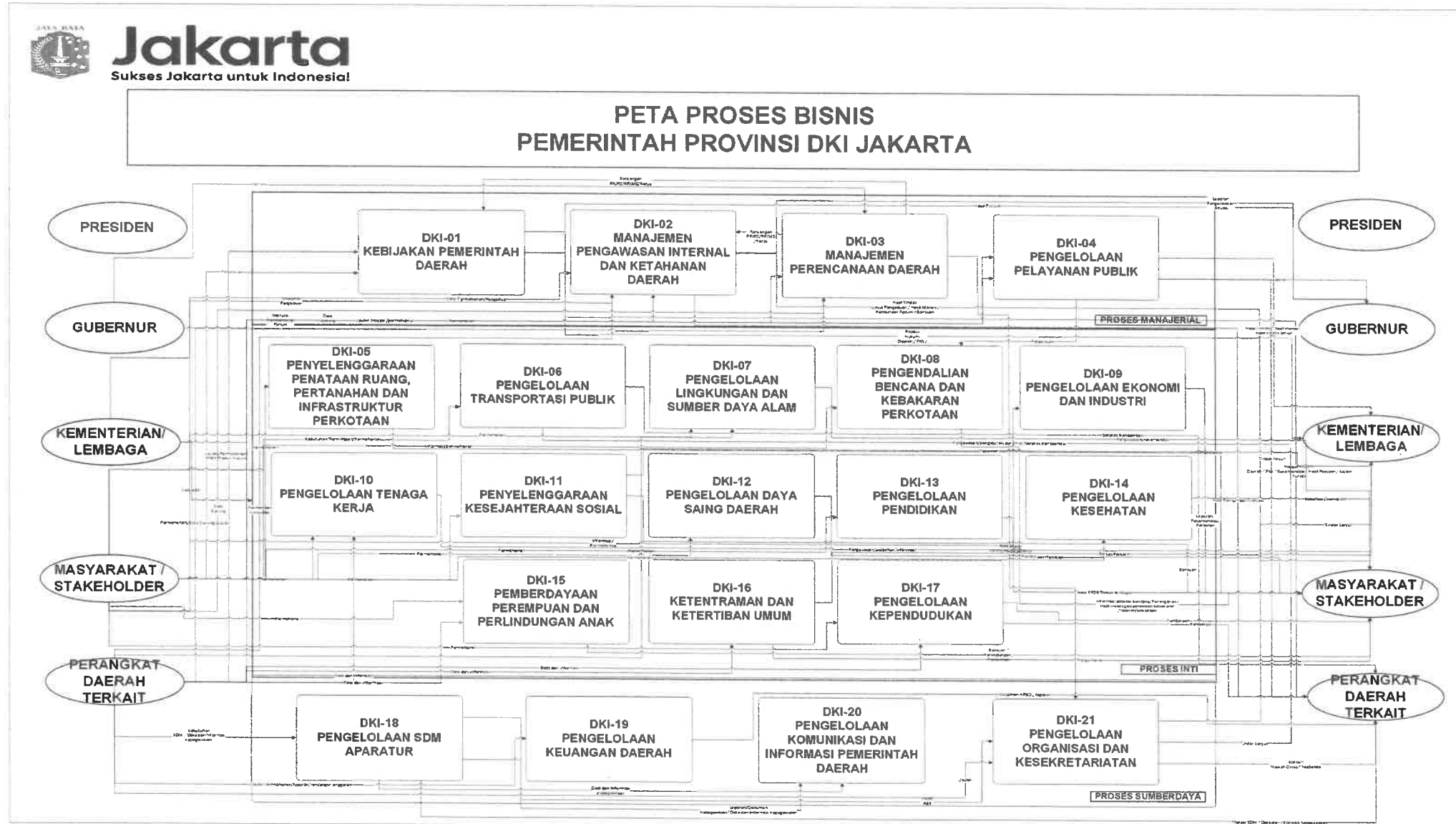
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 473 TAHUN 2024
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

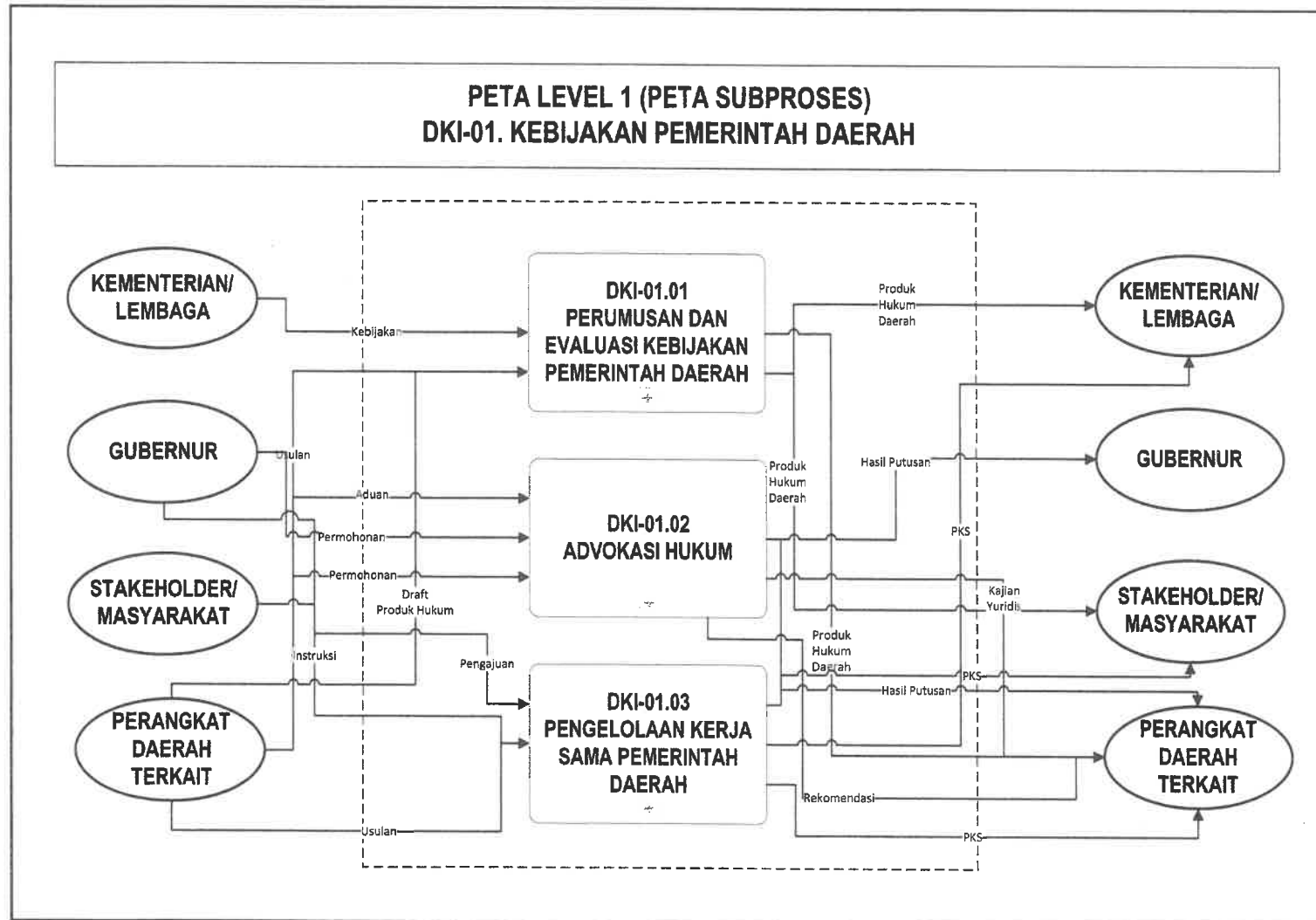
A. PETA PROSES



PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

B. PETA SUBPROSES

1. DKI-01 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

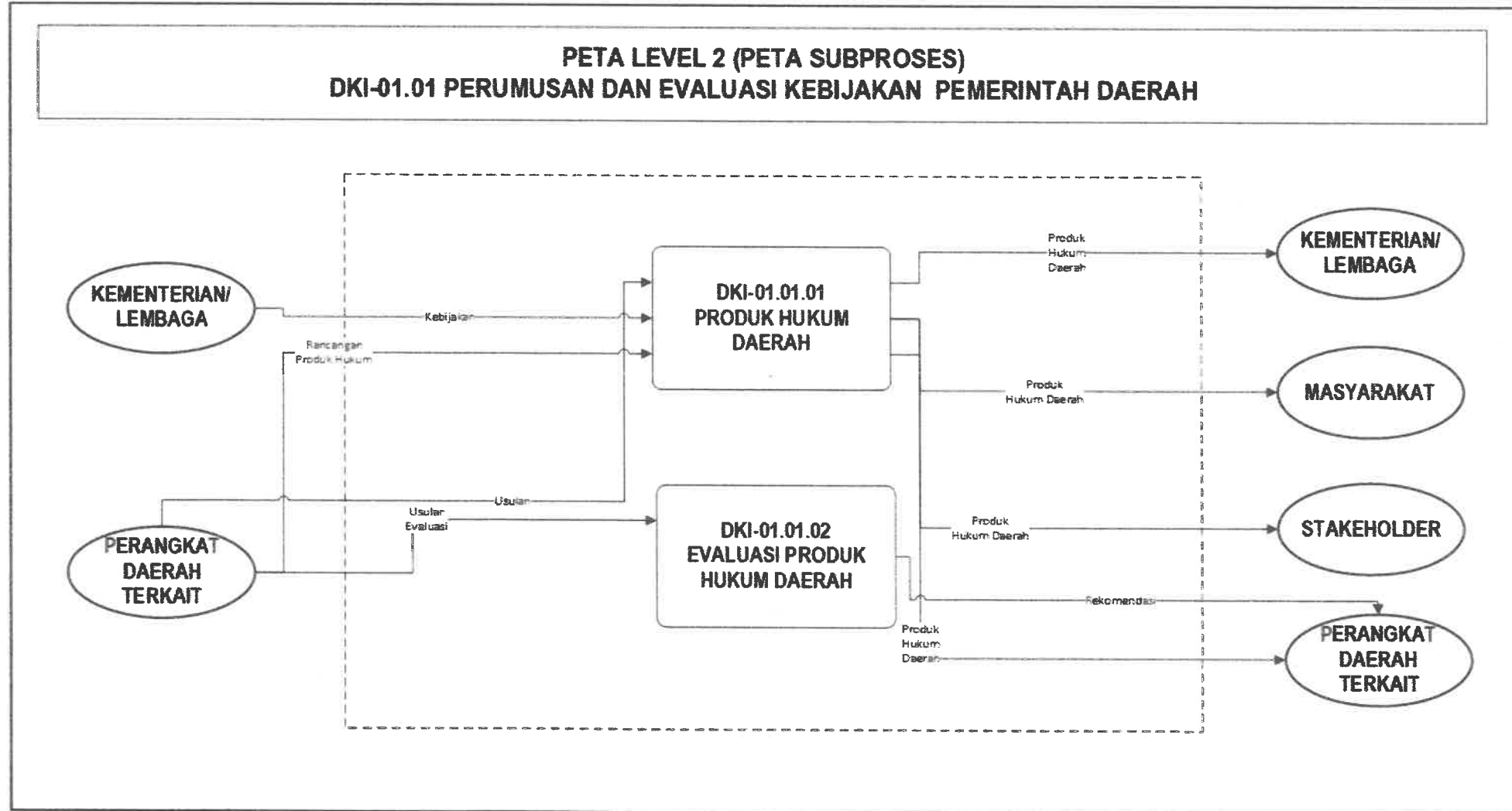


SUBPROSES DKI-01 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

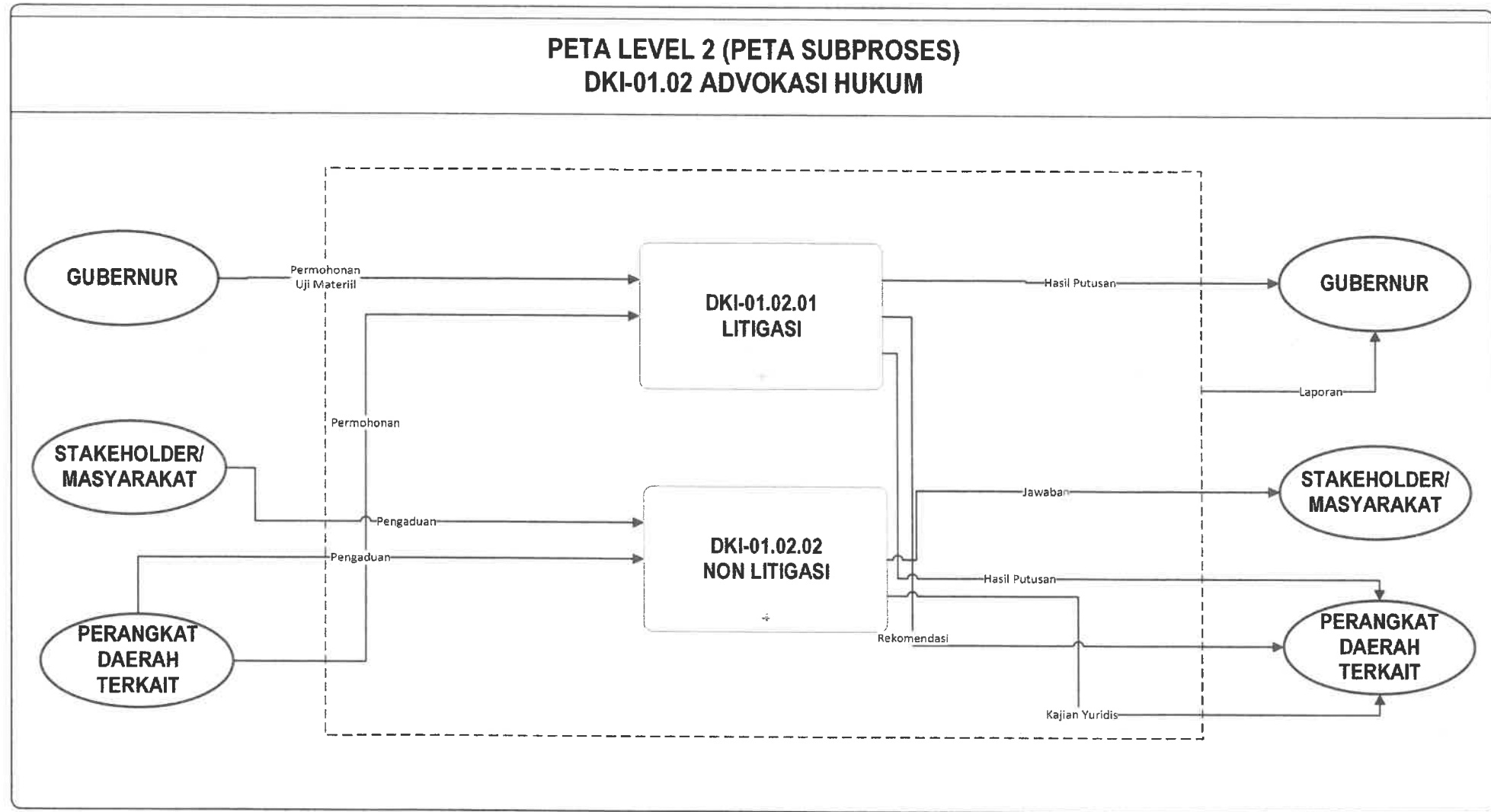
Penjelasan:

Proses ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam mengelola kebijakan pemerintah daerah Pemrov DKI Jakarta. Dimana proses ini meliputi :

- Perumusan dan evaluasi kebijakan yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk hukum daerah / kebijakan daerah
- Advokasi hukum adalah serangkaian tindakan pemberian Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian Pembinaan Hukum
- Pengelolaan kerja sama pemerintah daerah adalah proses yang mengatur kegiatan kerja sama dalam maupun luar negeri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta

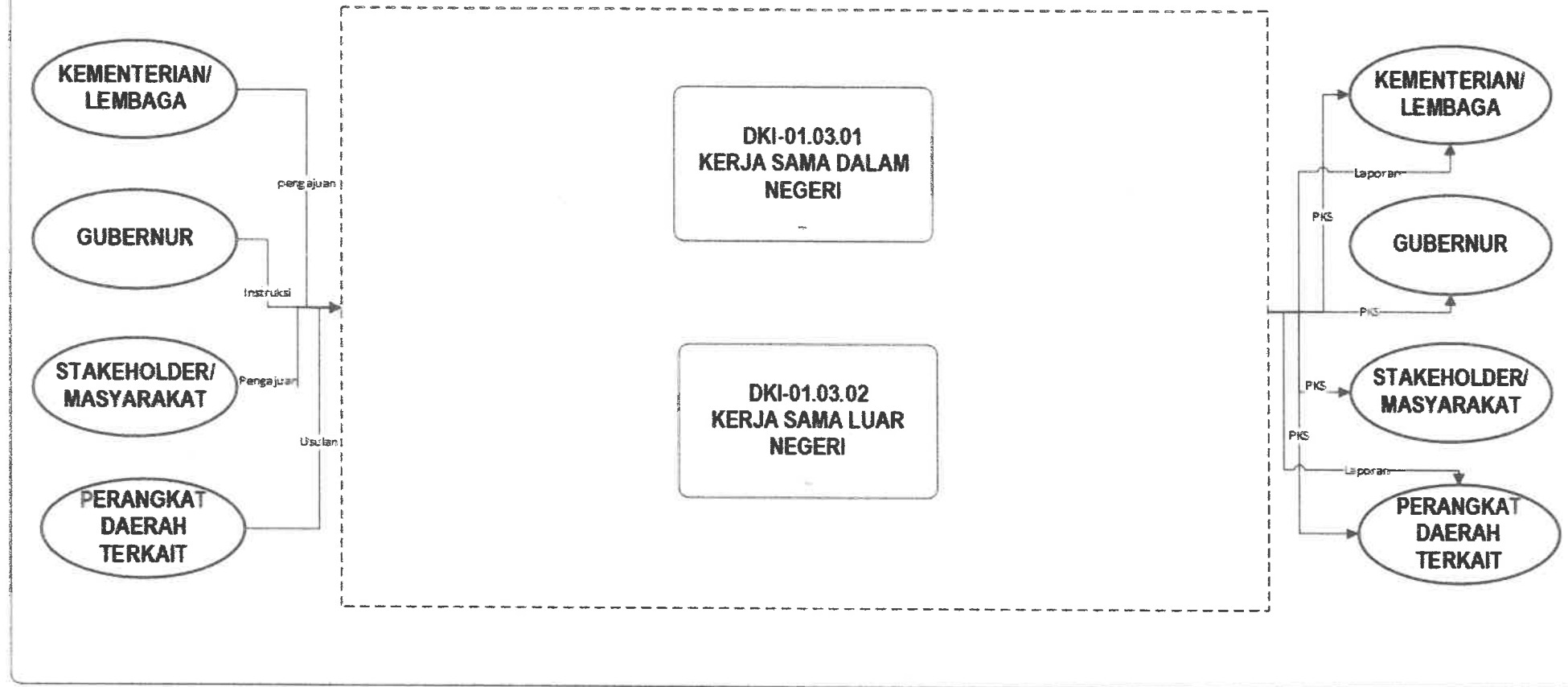


SUBPROSES DKI-01.01 PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH



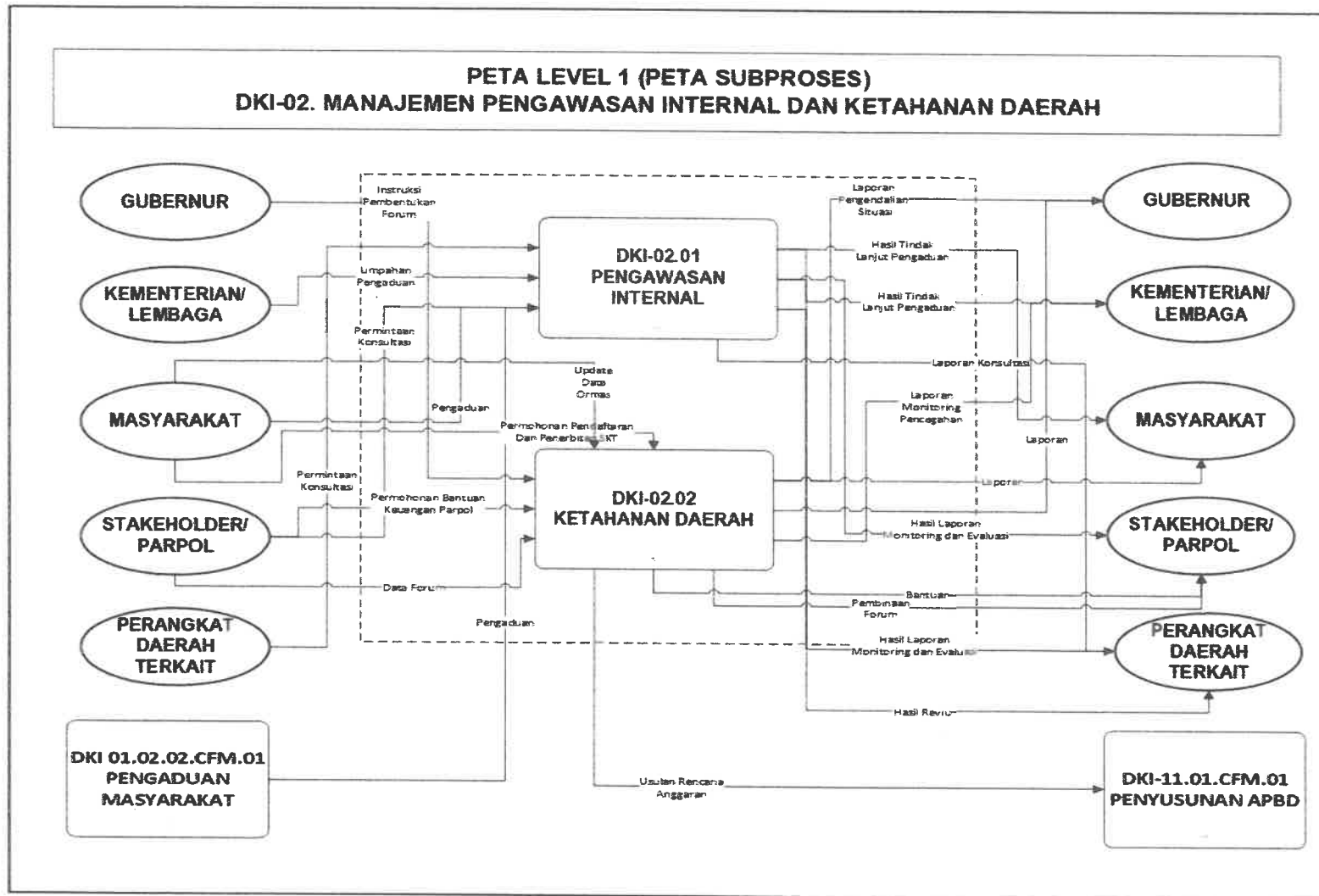
SUBPROSES DKI-01.02 ADVOKASI HUKUM

PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-01.03 PENGELOLAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH



SUBPROSES DKI-01.03 PENGELOLAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH

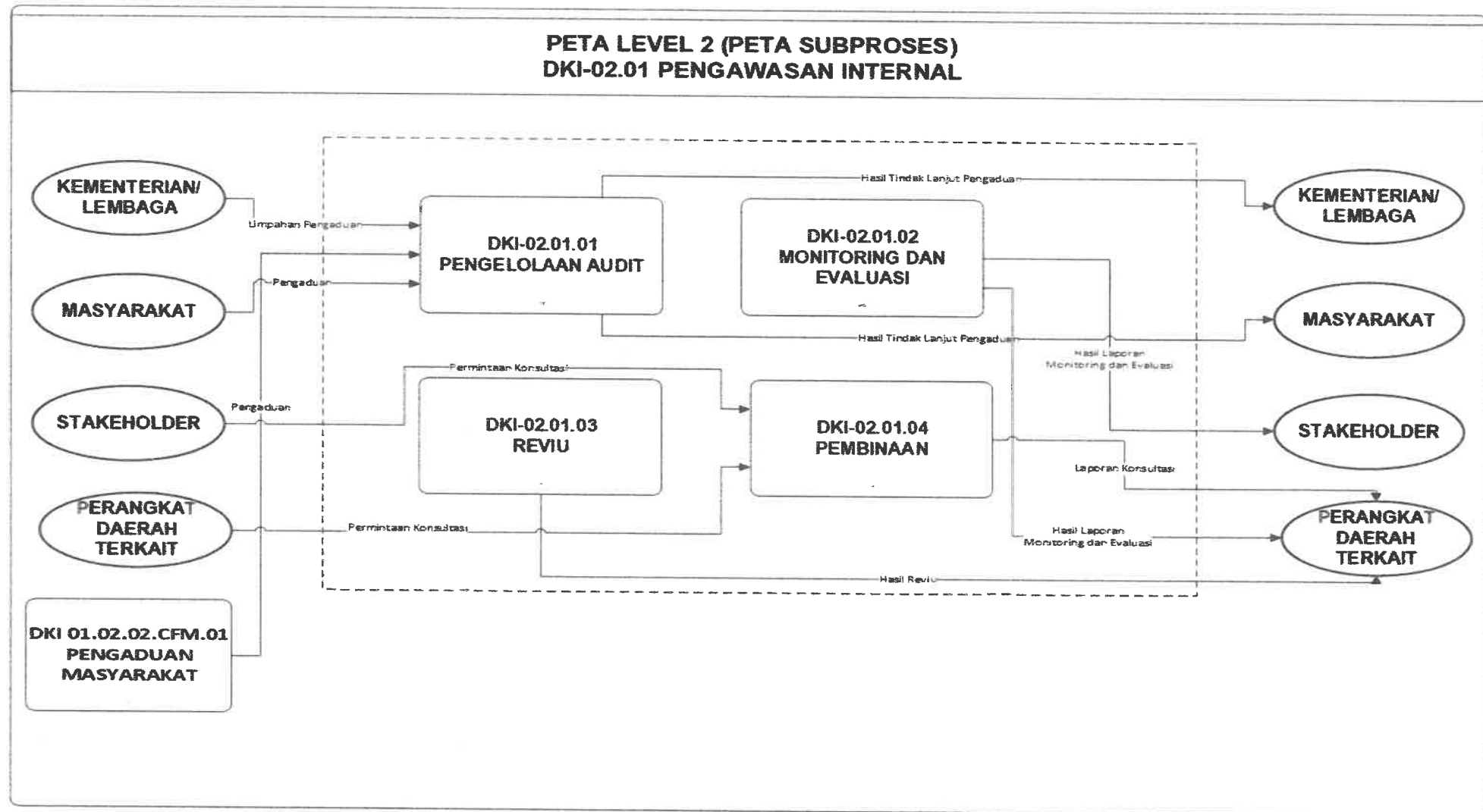
2. DKI-02 MANAJEMEN PENGAWASAN INTERNAL DAN KETAHANAN DAERAH



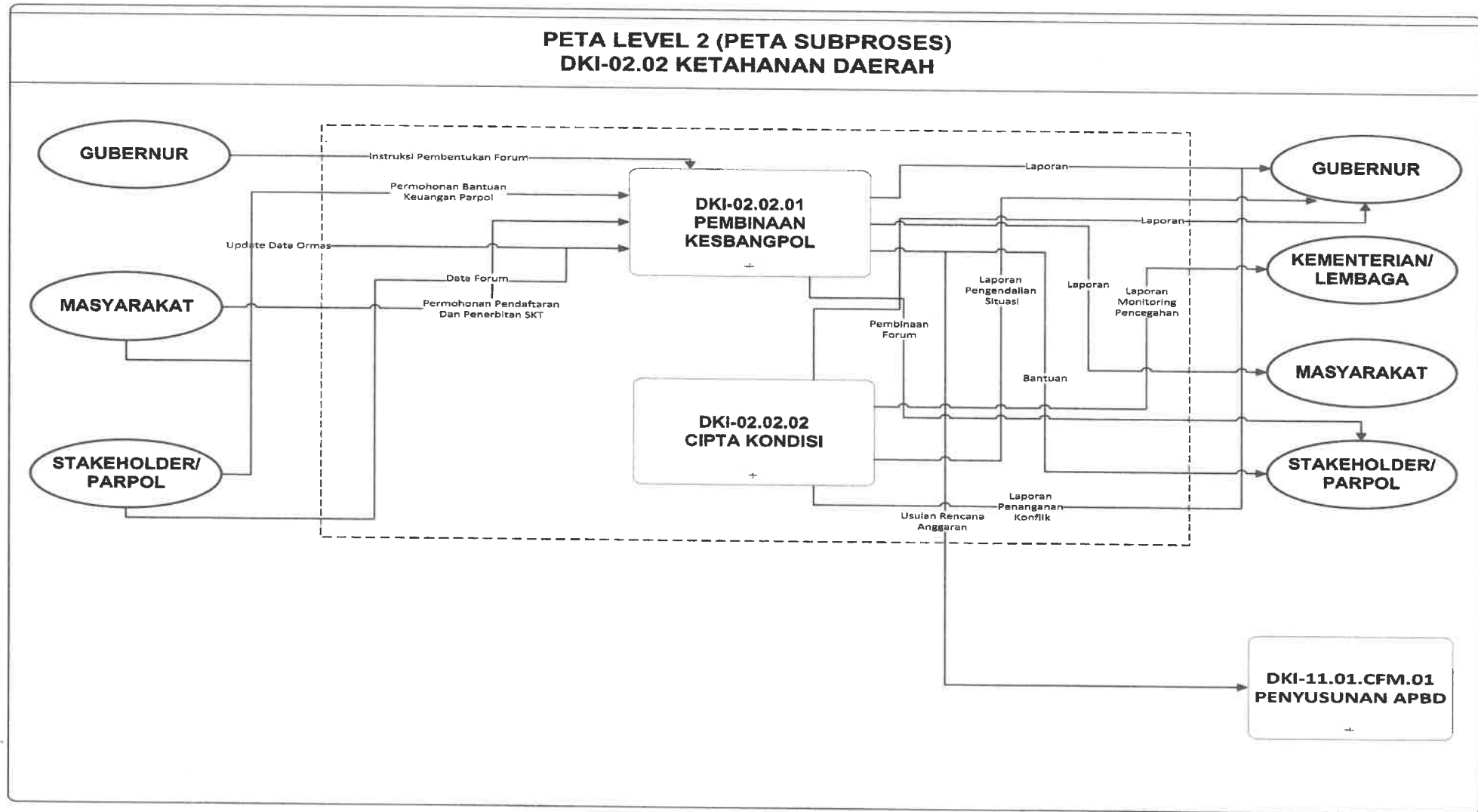
Penjelasan
Proses ini merupakan penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergi.

- Pengawasan internal merupakan rangkaian kegiatan pengawasan internal melalui audit review evaluasi dan lain-lain.
- Ketahanan Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesatuan bangsa dan politik, serta menciptakan kondisi aman di lingkungan Pempov DKI Jakarta

SUBPROSES DKI-02 MANAJEMEN PENGAWASAN INTERNAL DAN KETAHANAN PANGAN

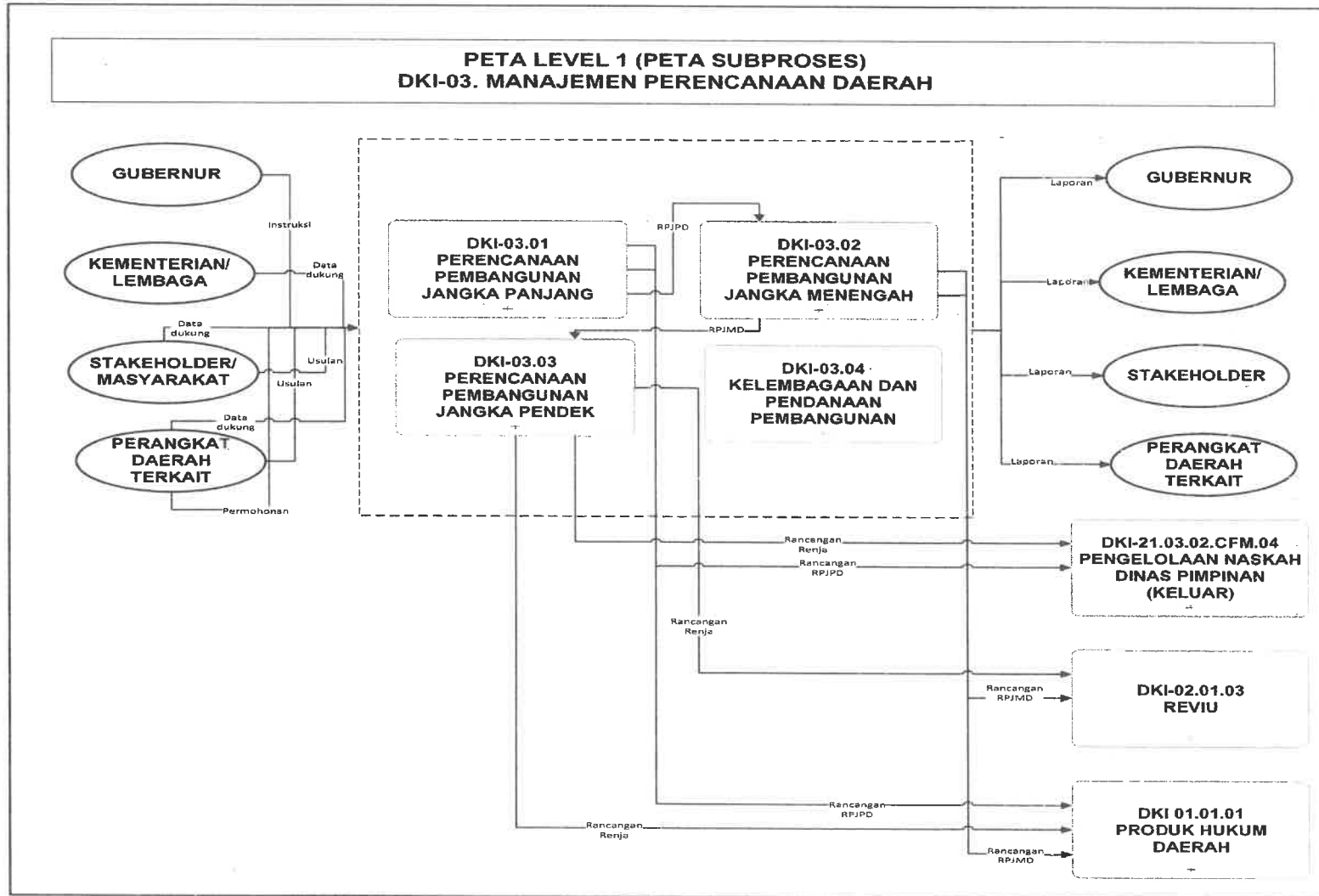


SUBPROSES DKI-02.01 PENGAWASAN INTERNAL



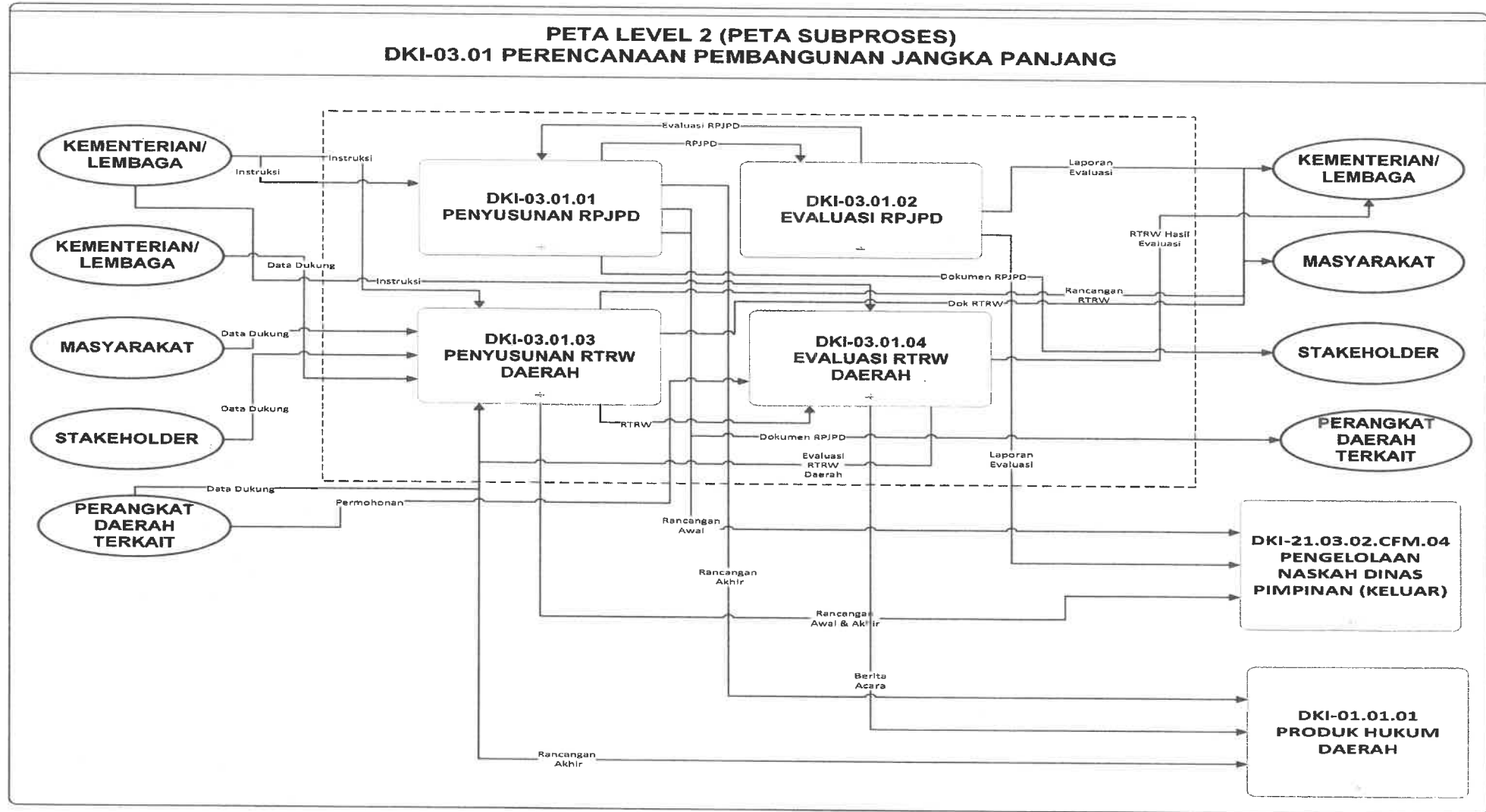
SUBPROSES DKI-02.02 KETAHANAN DAERAH

3. DKI-03 MANAJEMEN PERENCANAAN DAERAH

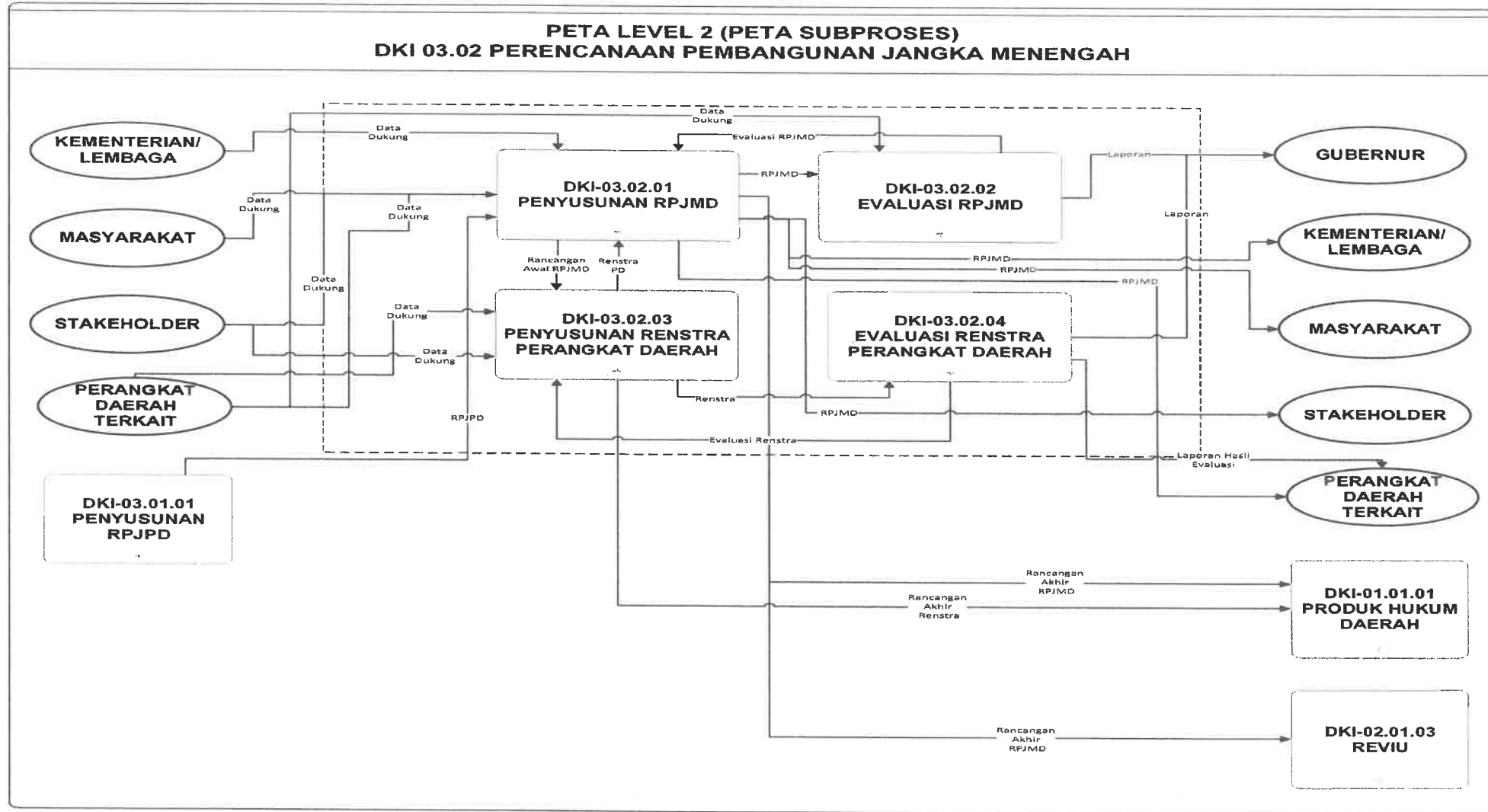


Penjelasan:
Proses ini merupakan aktivitas perencanaan yang dilakukan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek hingga kelembagaan dan pendanaan pembangunan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta

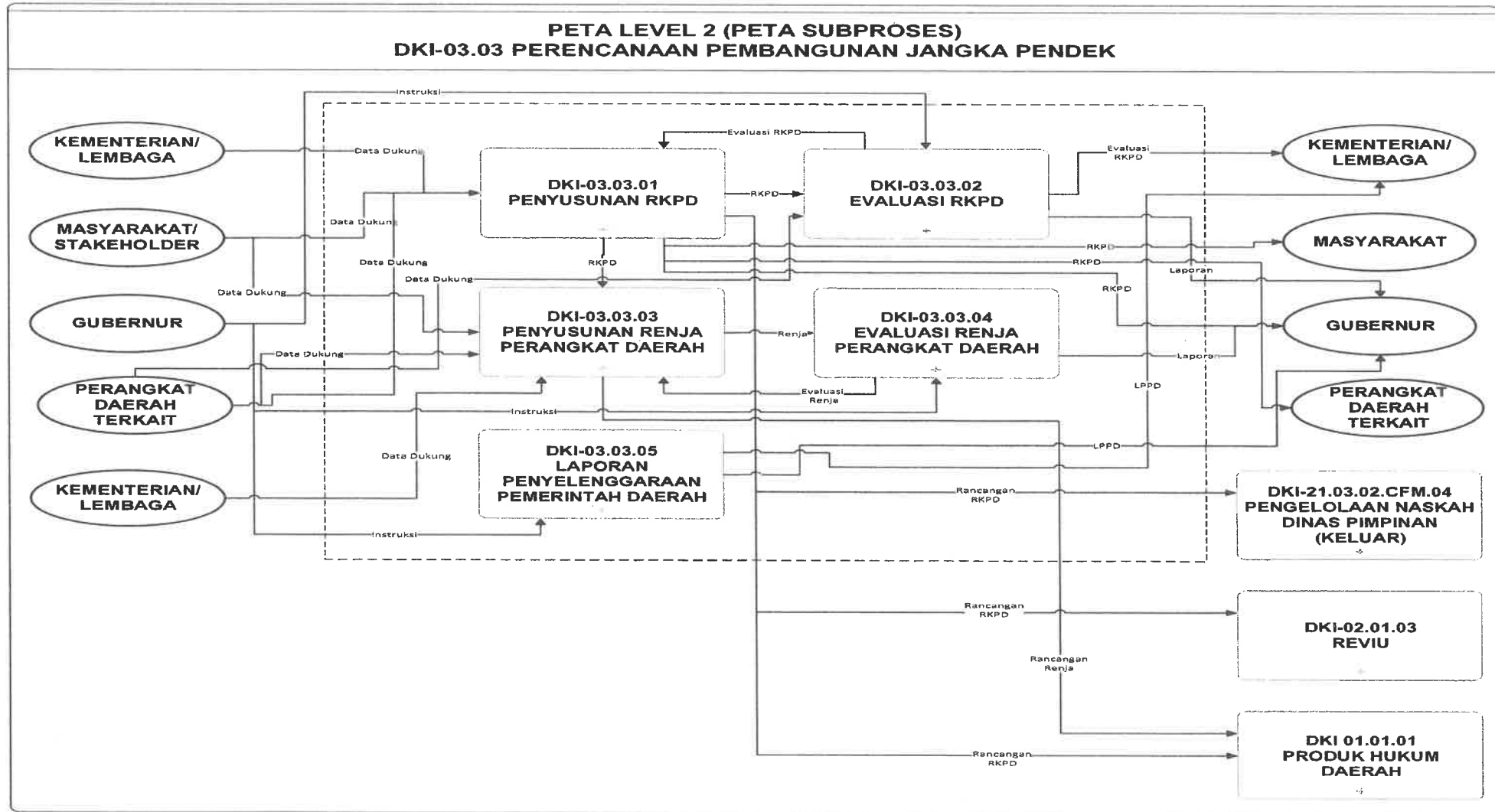
SUBPROSES DKI-03 MANAJEMEN PERENCANAAN DAERAH



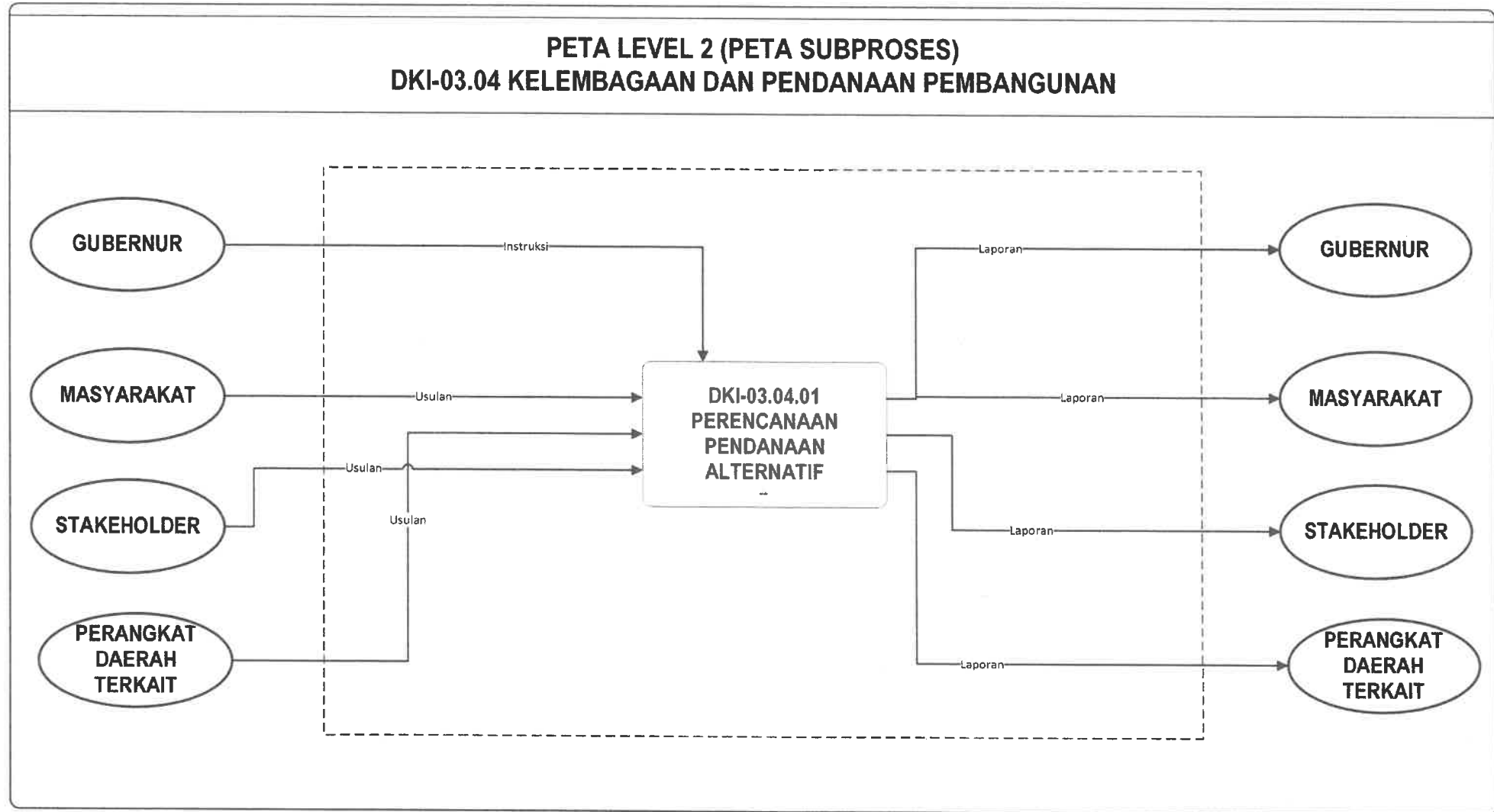
SUBPROSES DKI-03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG



SUBPROSES DKI-03.02 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

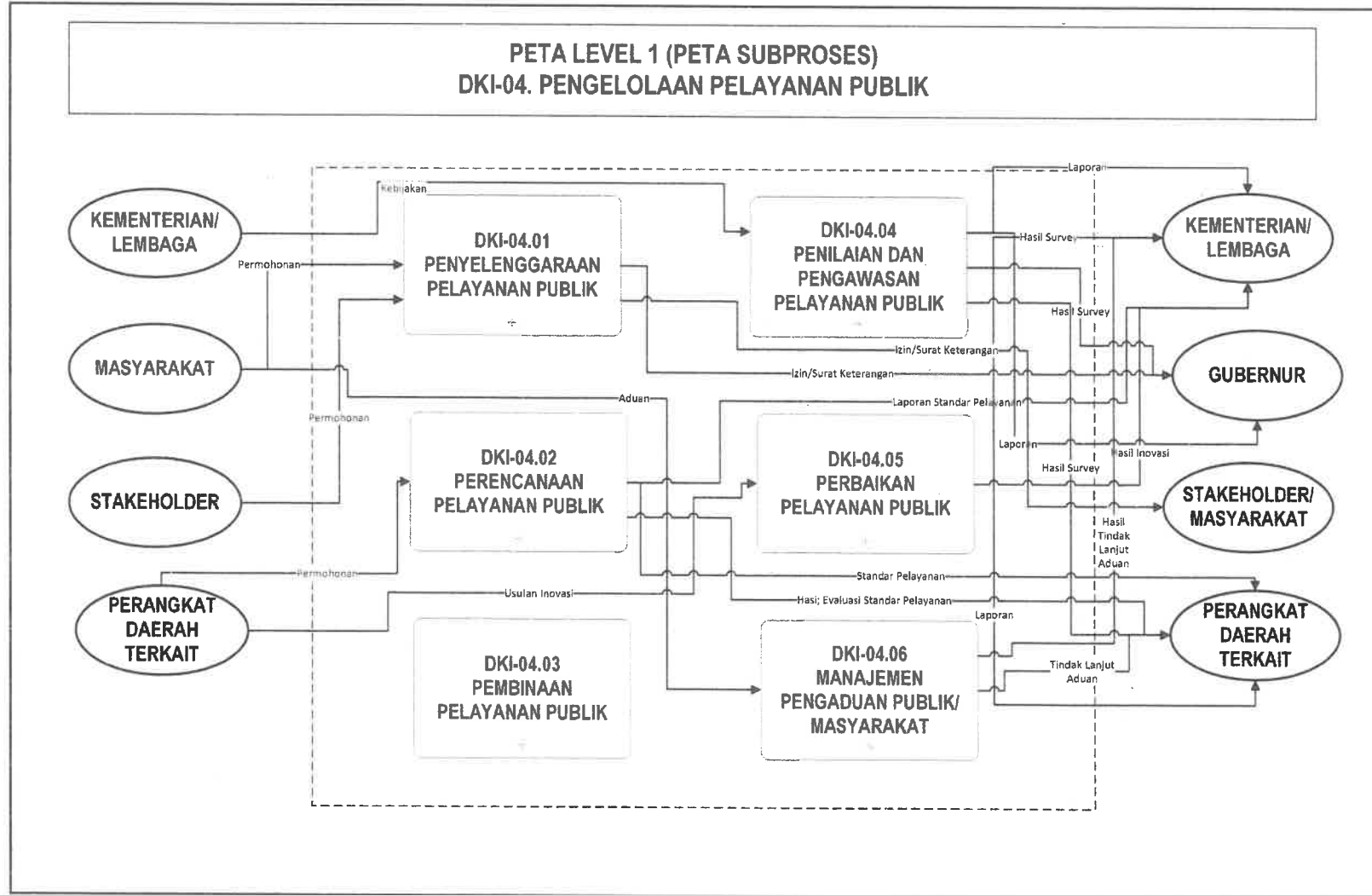


SUBPROSES DKI-03.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK



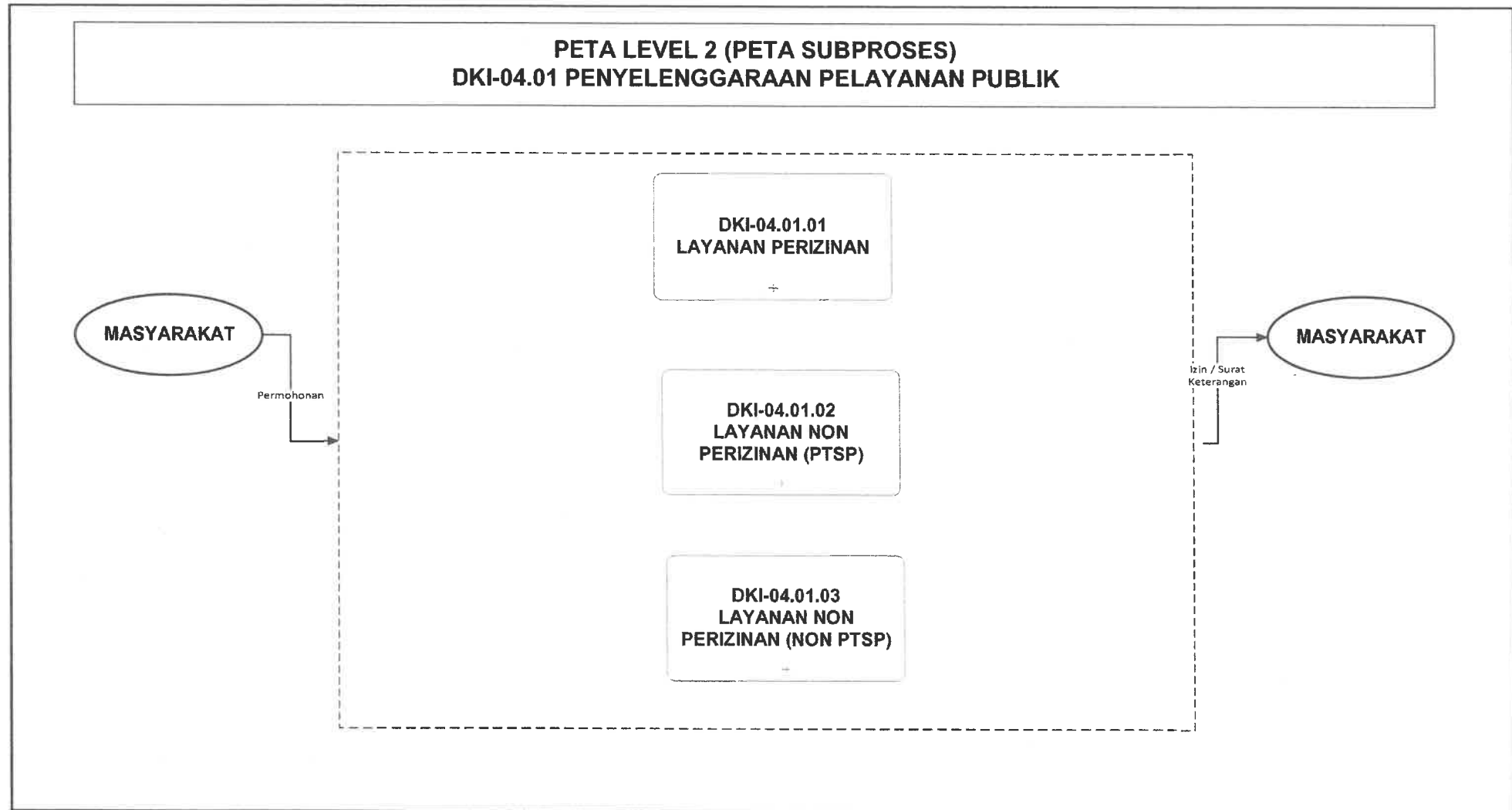
SUBPROSES DKI-03.04 KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN

4. DKI-04 PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK

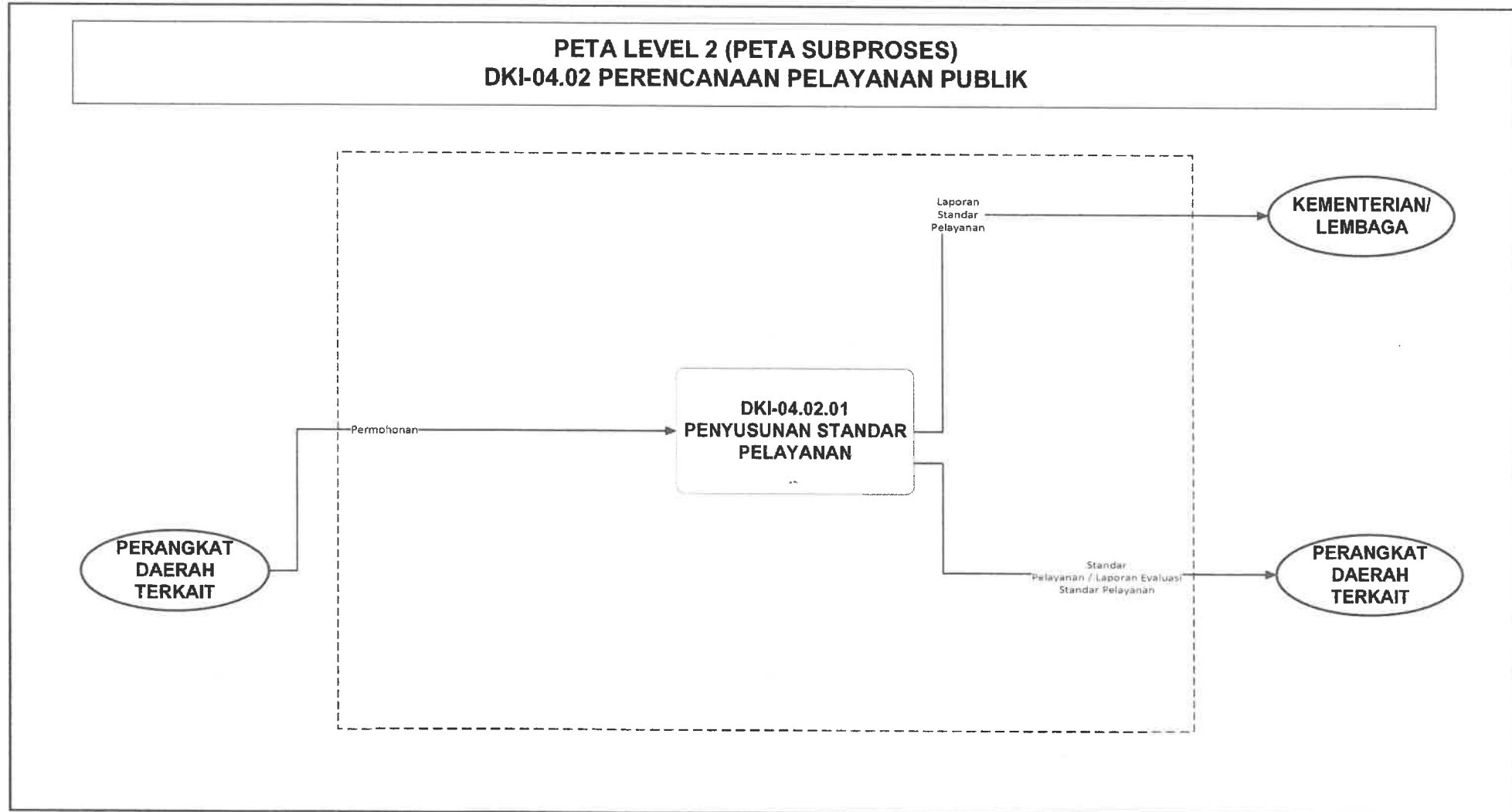


Penjelasan:
 Proses ini merupakan aktivitas pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Dimana aktivitas yang dilakukan pada proses ini mulai dari perencanaan pelayanan publik, pembinaan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik, penilaian dan pengawasan pelayanan publik, perbaikan pelayanan publik, hingga bagaimana pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dikelola.

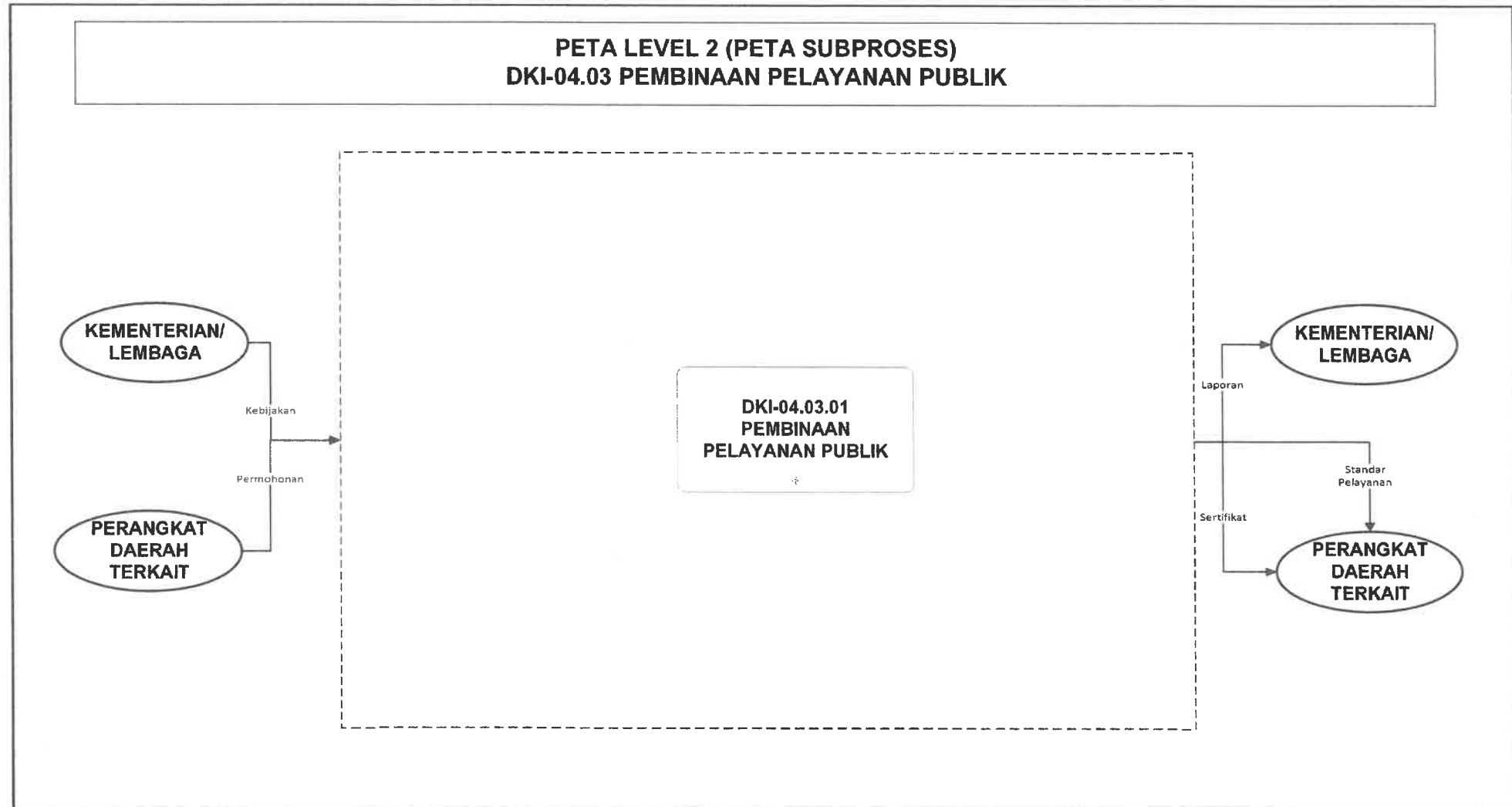
SUBPROSES DKI-04 PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK



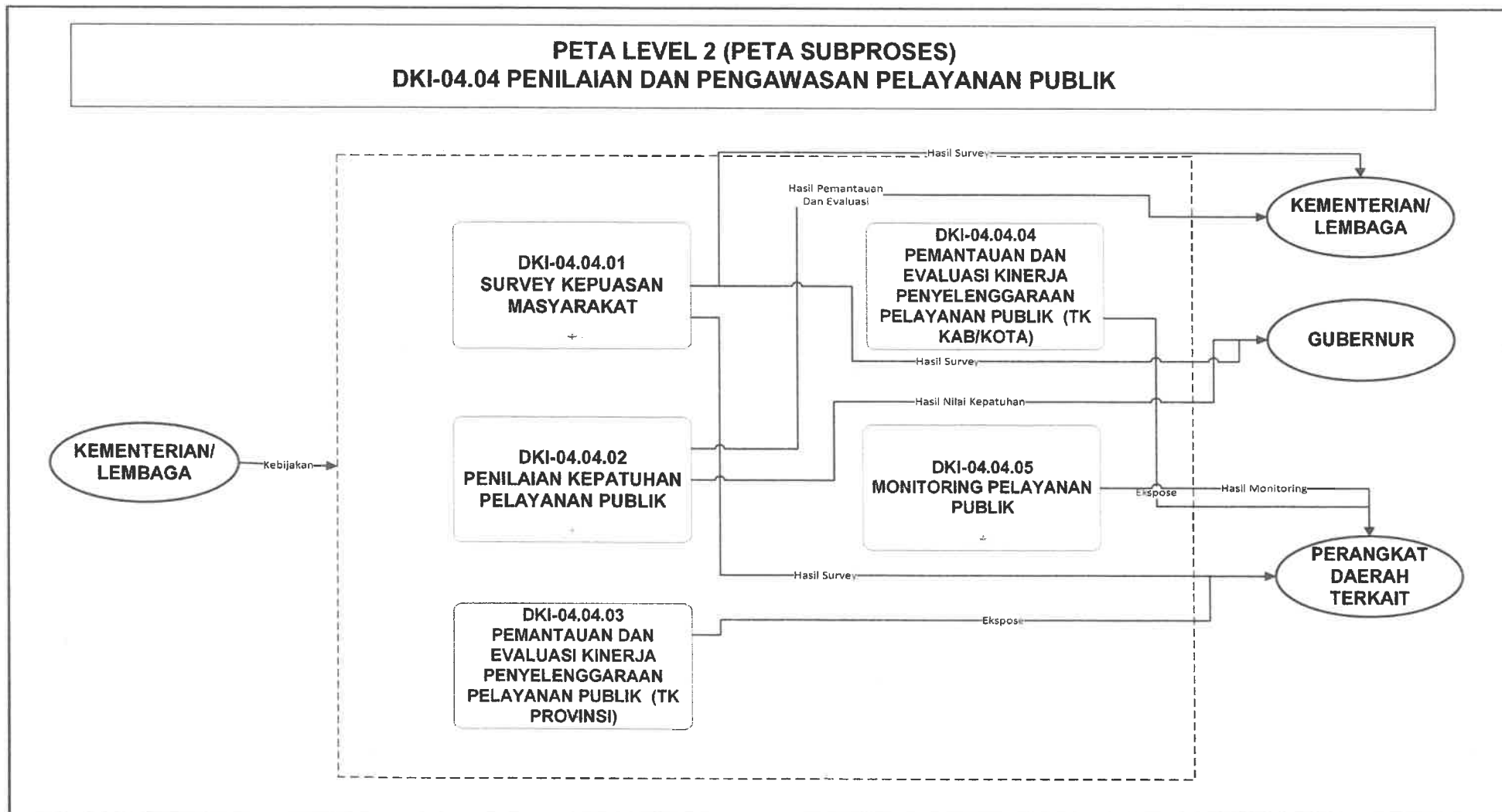
SUBPROSES DKI-04.01 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK



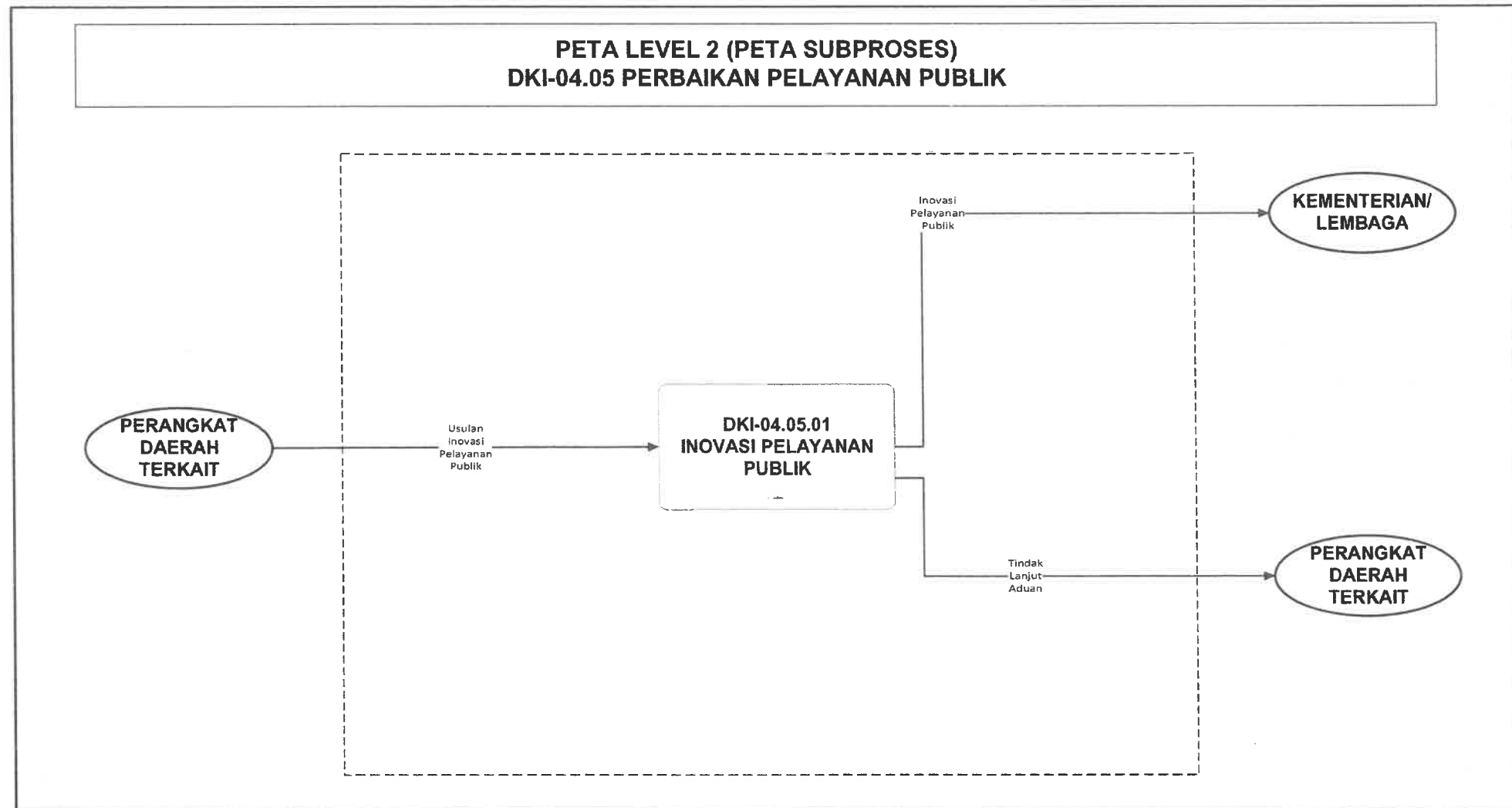
SUBPROSES DKI-04.02 PERENCANAAN PELAYANAN PUBLIK



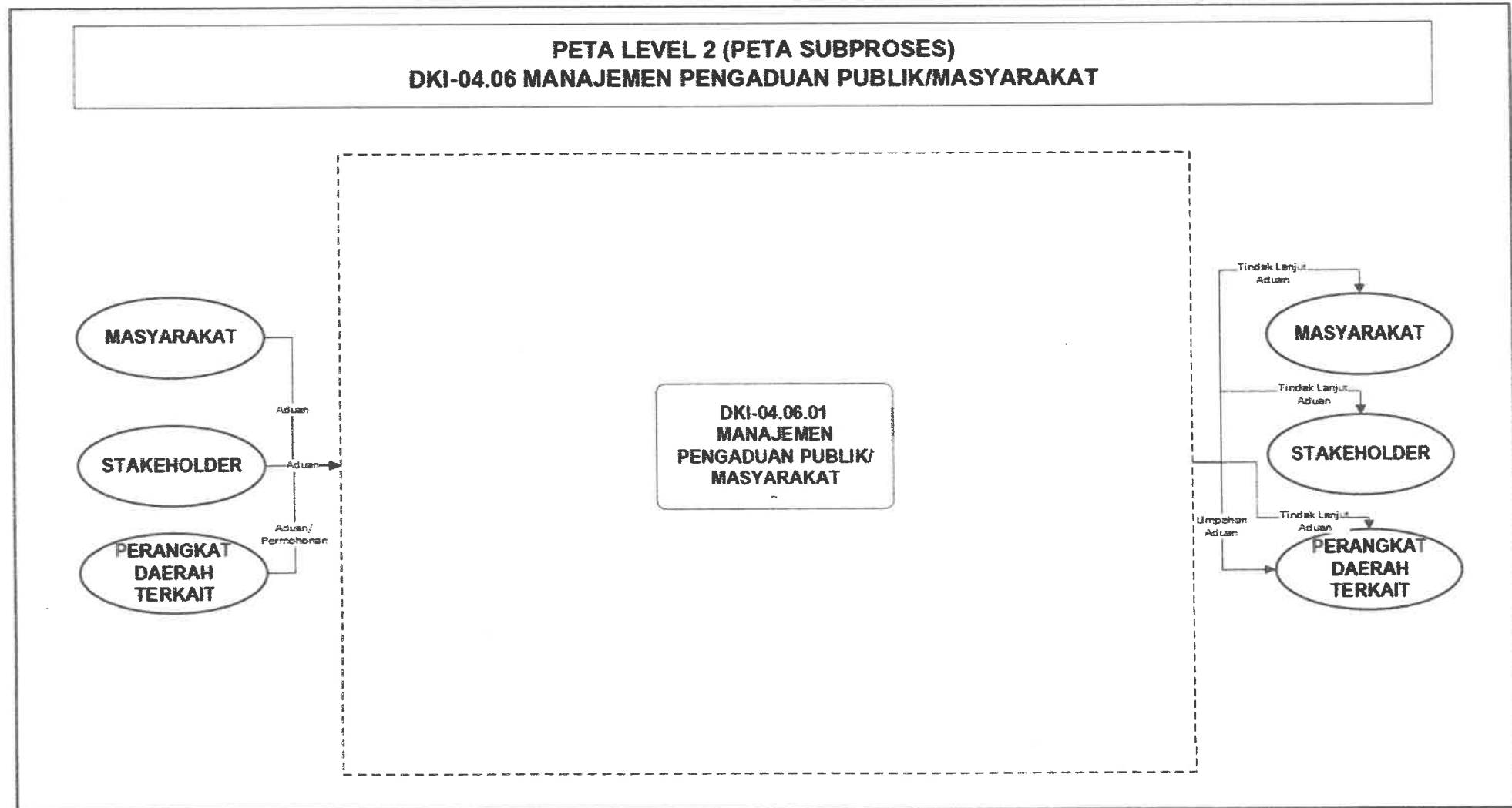
SUBPROSES DKI-04.03 PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK



SUBPROSES DKI-04.04 PENILAIAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

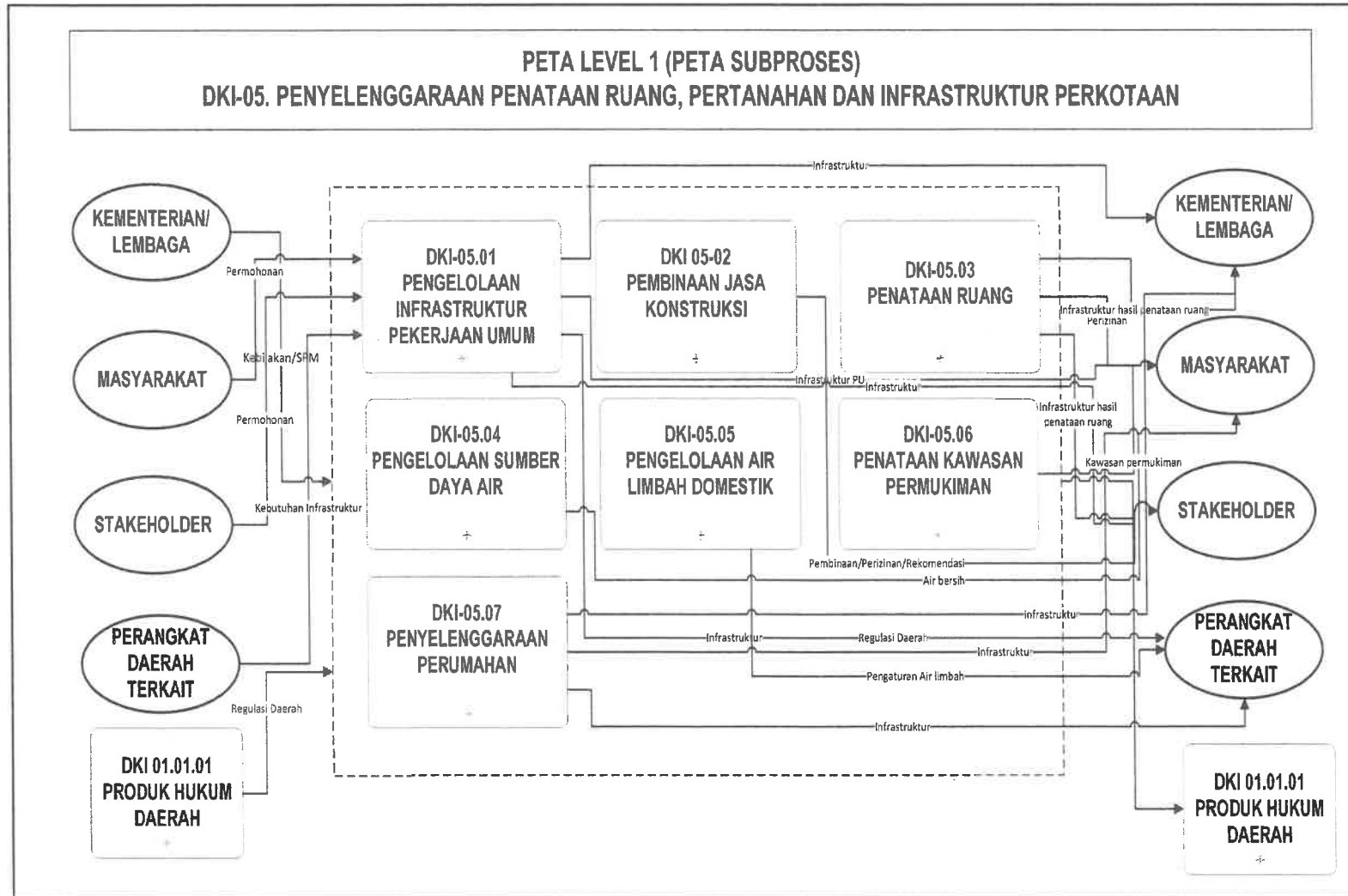


SUBPROSES DKI-04.05 PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK



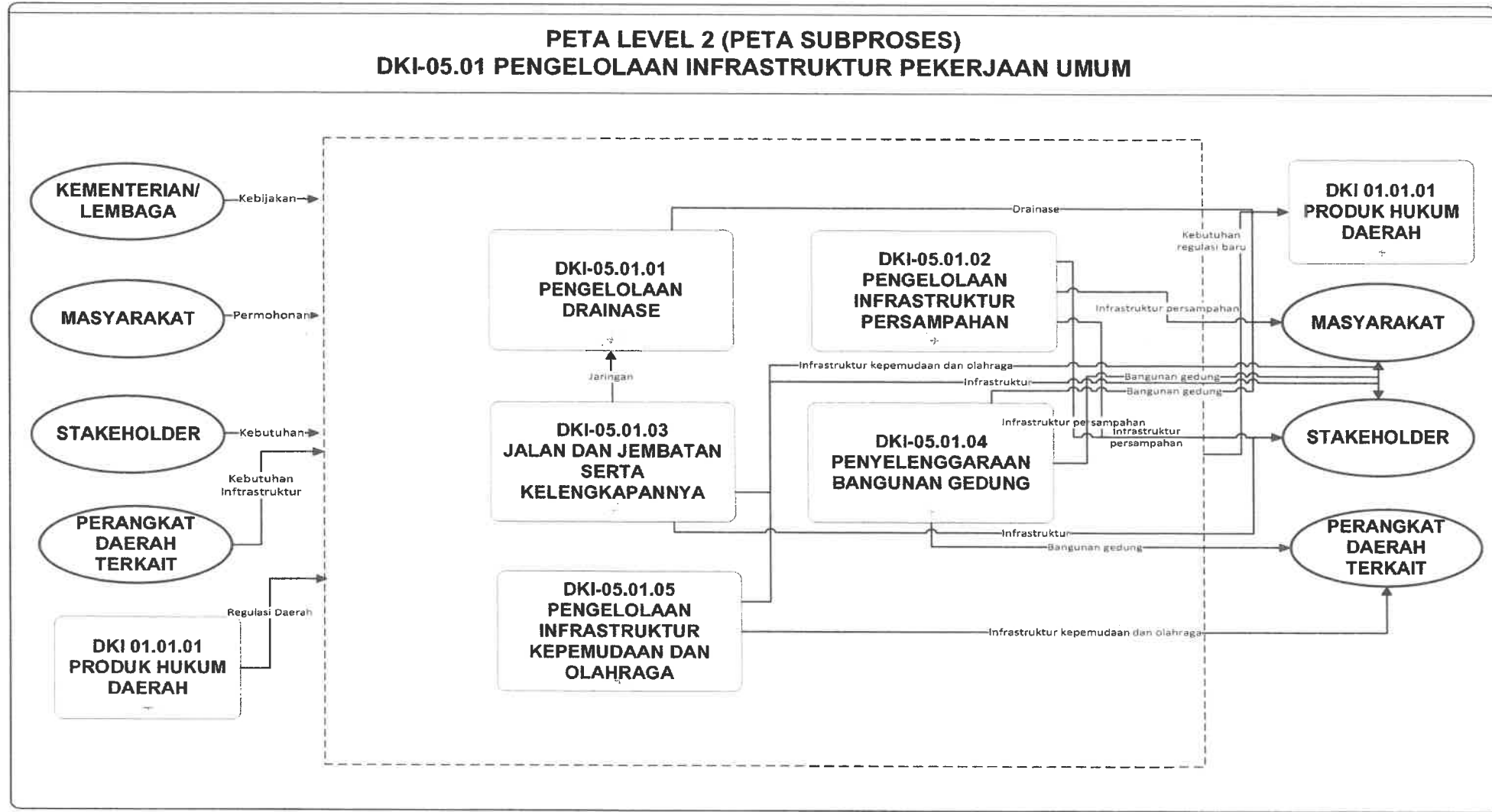
SUBPROSES DKI-04.06 MANAJEMEN PENGADUAN PUBLIK/MASYARAKAT

5. DKI-05 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

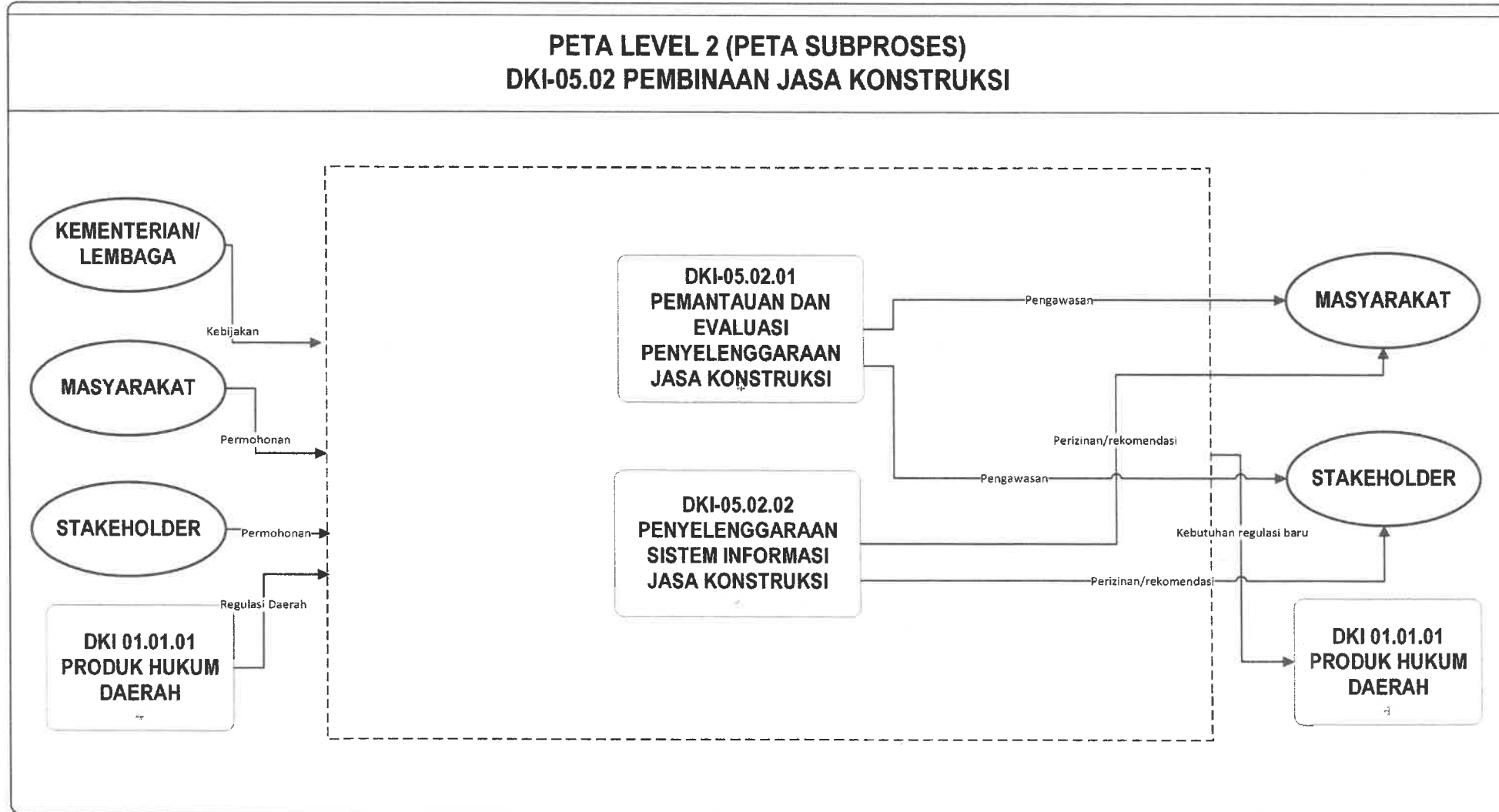


Penjelasan:
Proses ini merupakan proses terkait penyelenggaraan penataan ruang, petanahan dan infrastruktur perkotaan di DKI Jakarta. Yang dimana pada proses ini meliputi kegiatan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum, pembinaan jasa konstruksi, penataan ruang, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan air limbah domestik, penataan kawasan permukiman dan penyelenggaraan perumahan di DKI Jakarta.

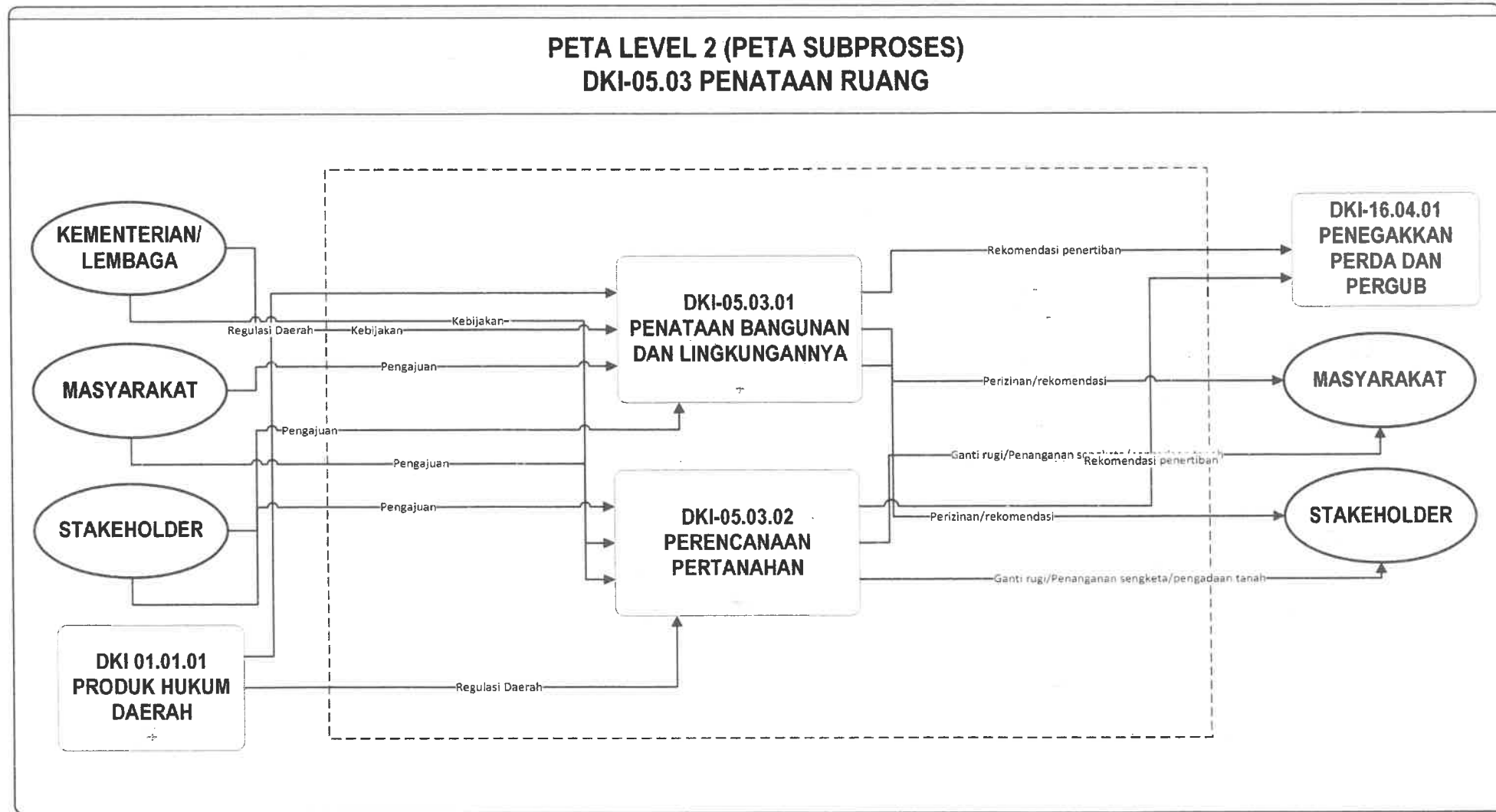
SUBPROSES DKI-05 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



SUBPROSES DKI-05.01 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

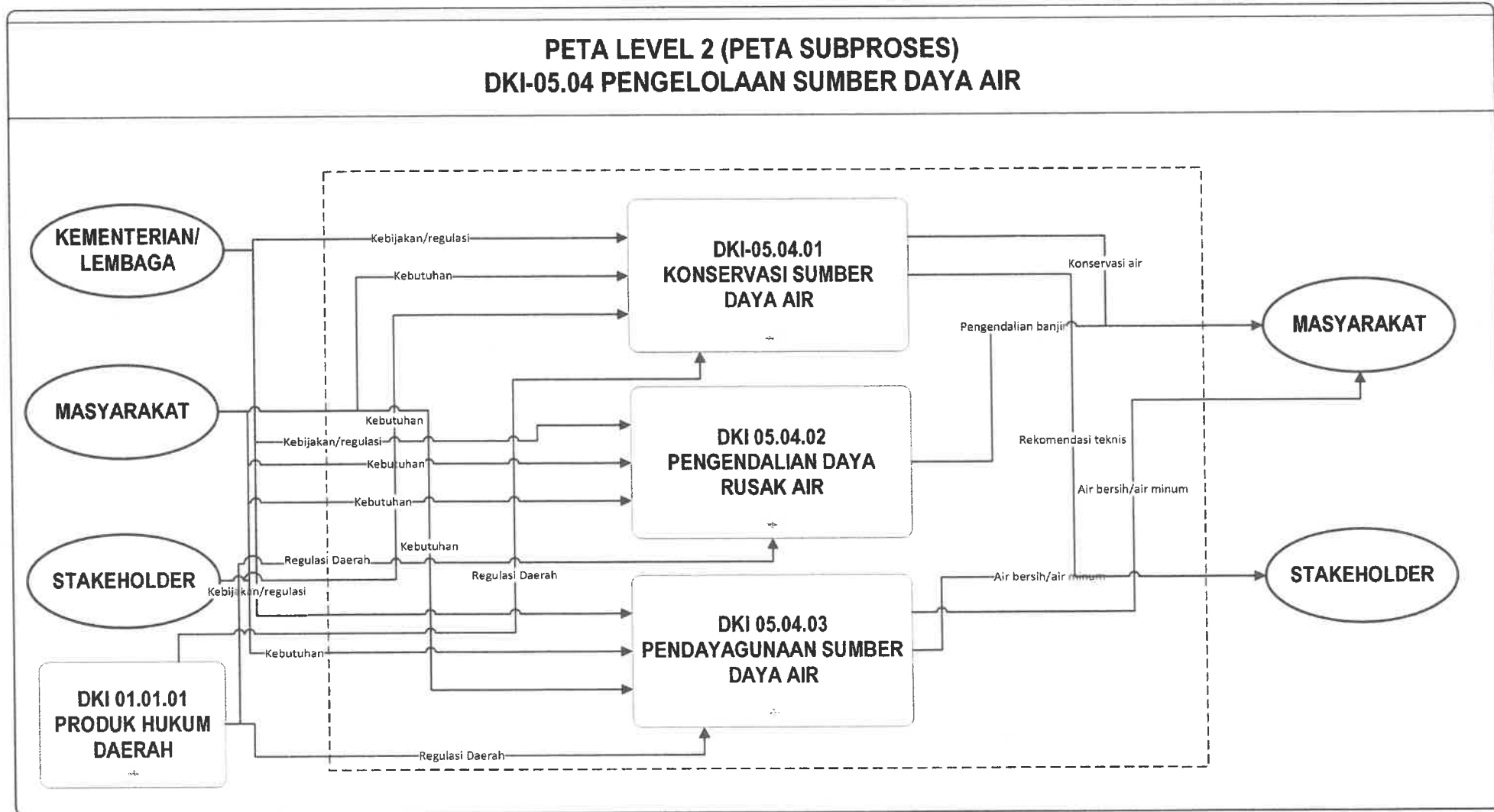


SUBPROSES DKI-05.02 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

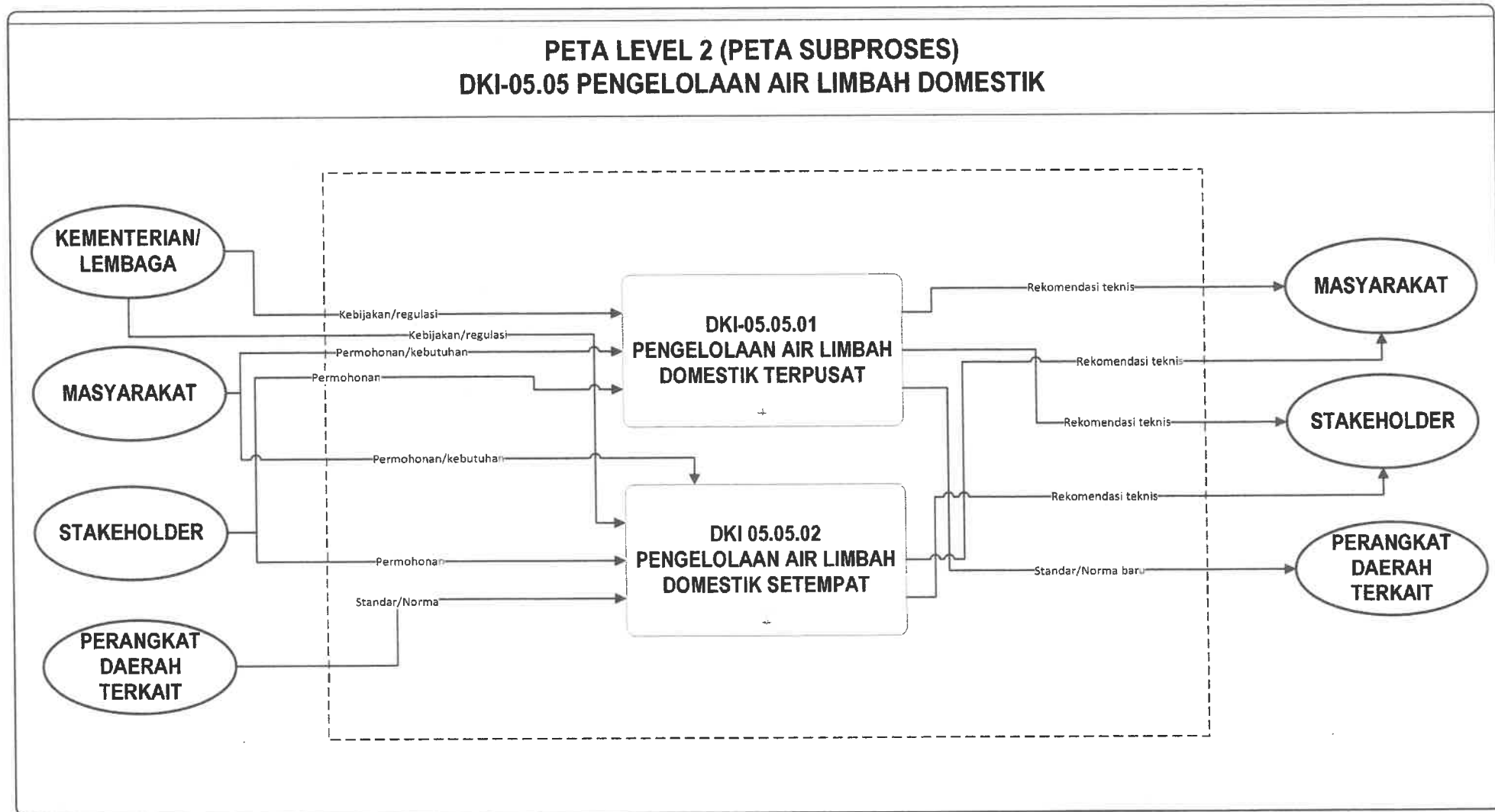


SUBPROSES DKI-05.03 PENATAAN RUANG

**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-05.04 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

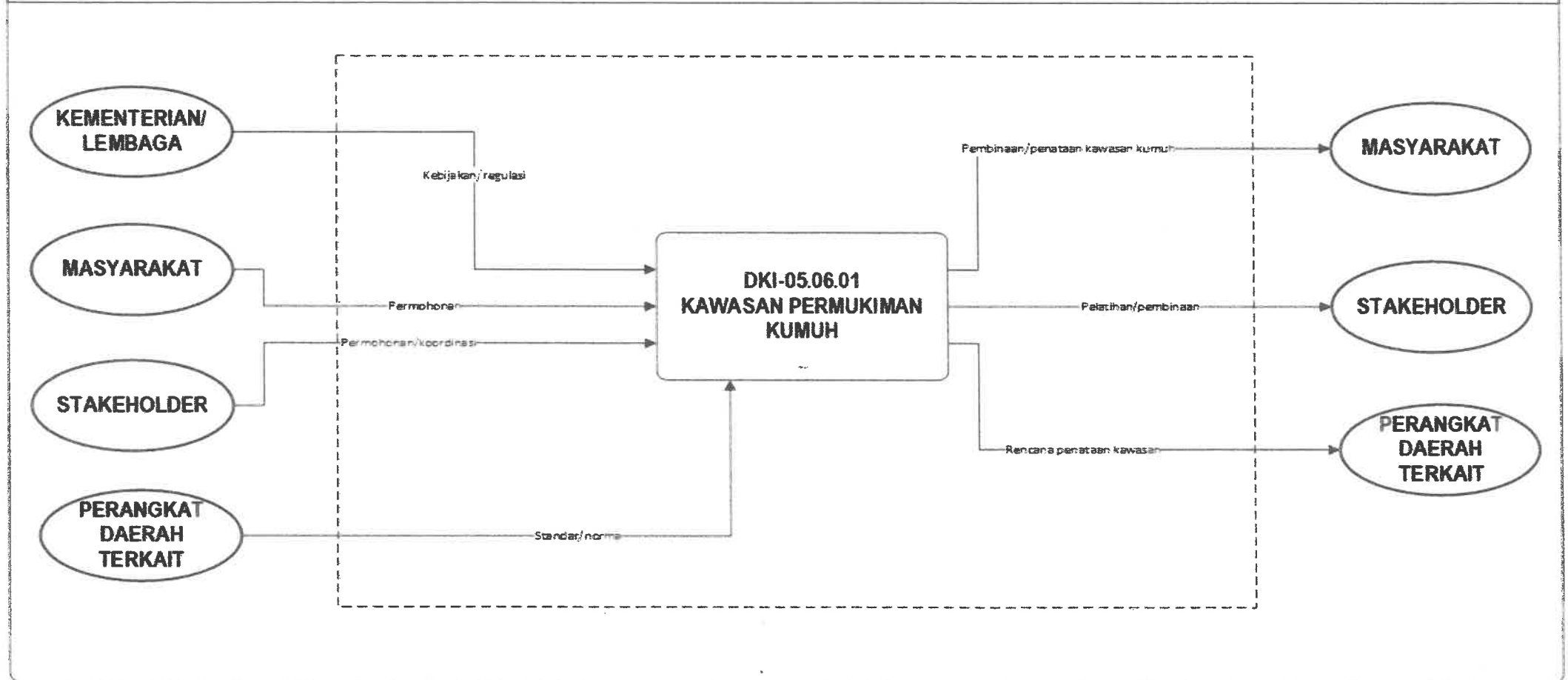


SUBPROSES DKI-05.04 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

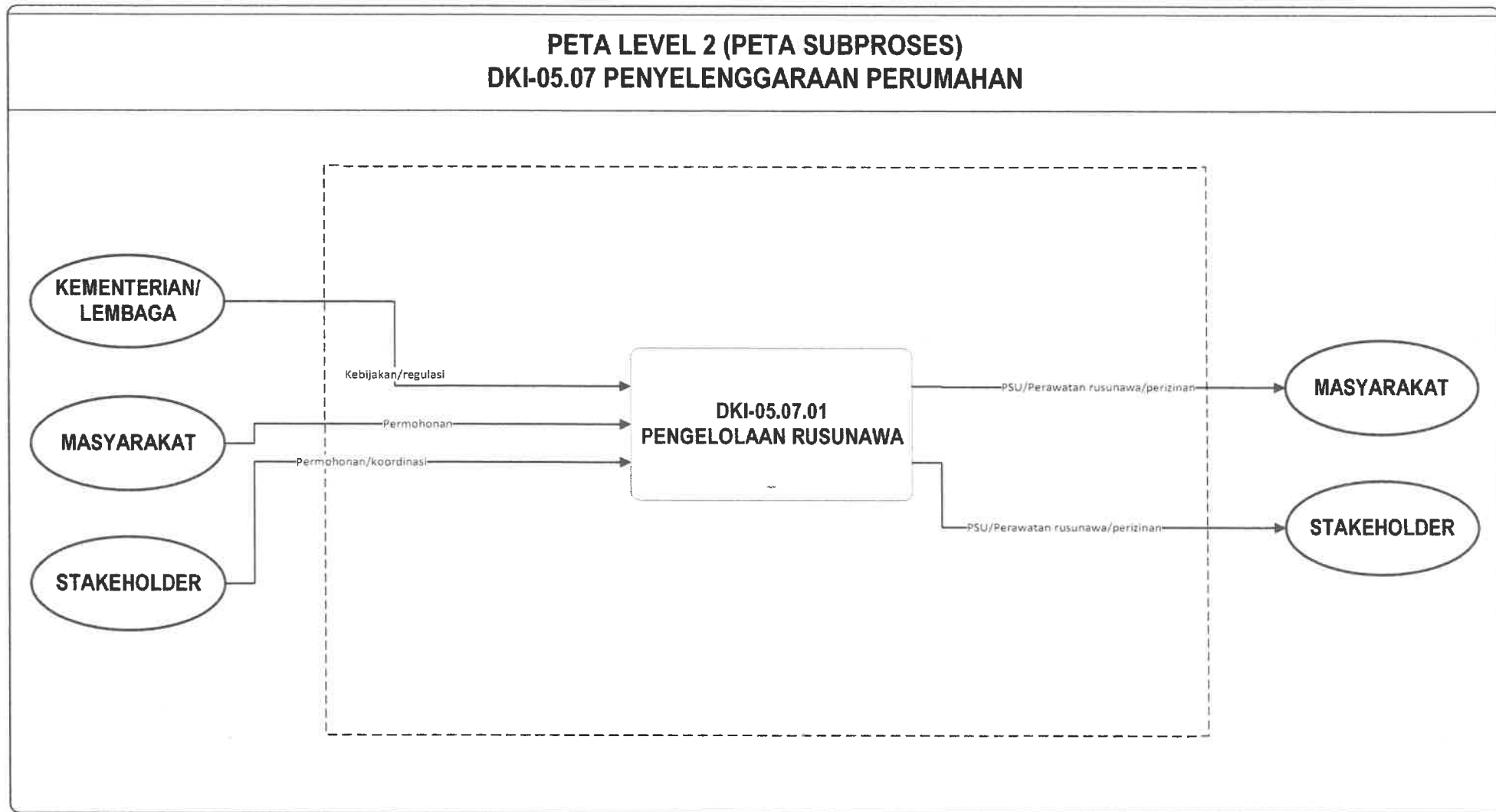


SUBPROSES DKI-05.05 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-05.06 PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN**

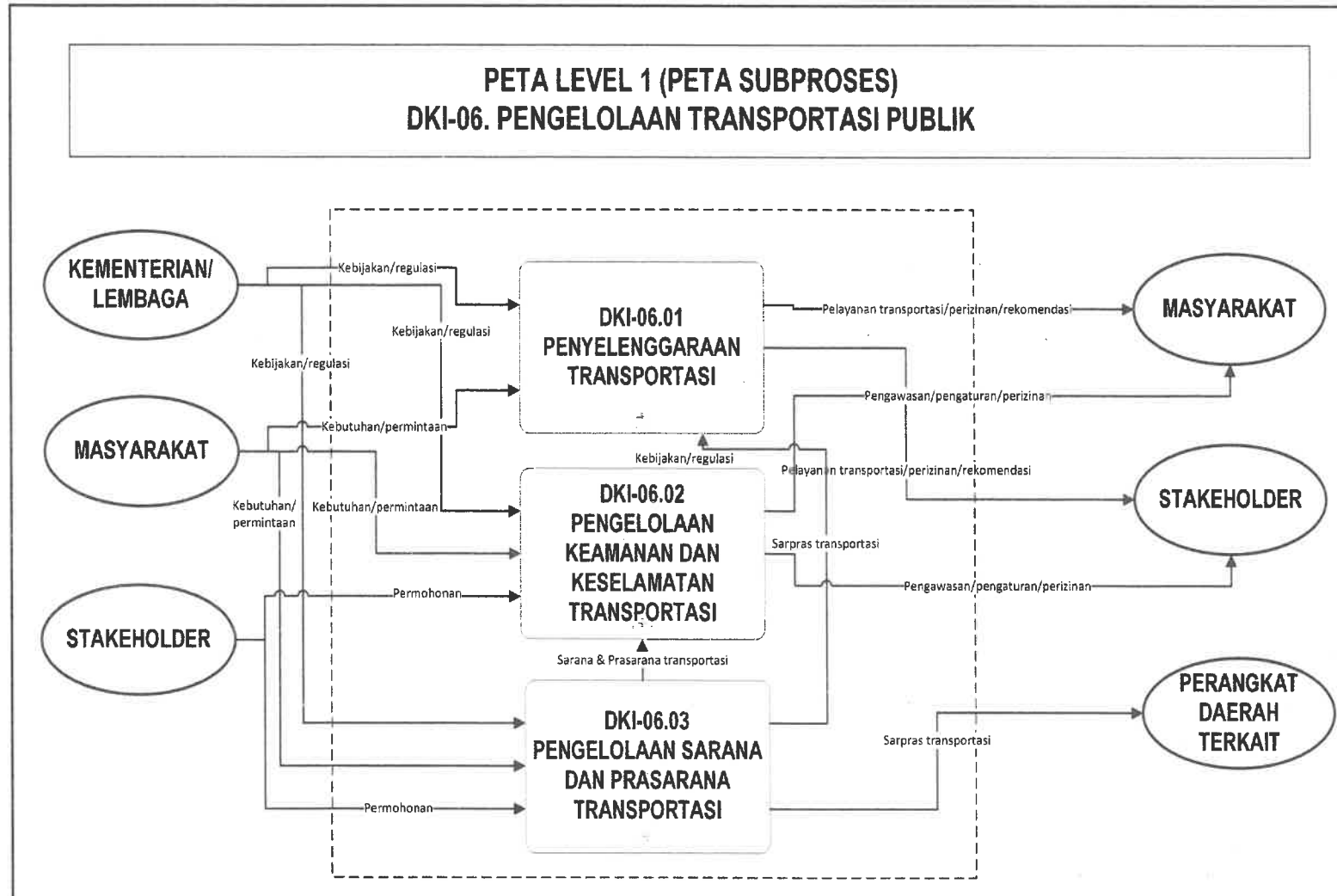


SUBPROSES DKI-05.06 PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN



SUBPROSES DKI-05.07 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

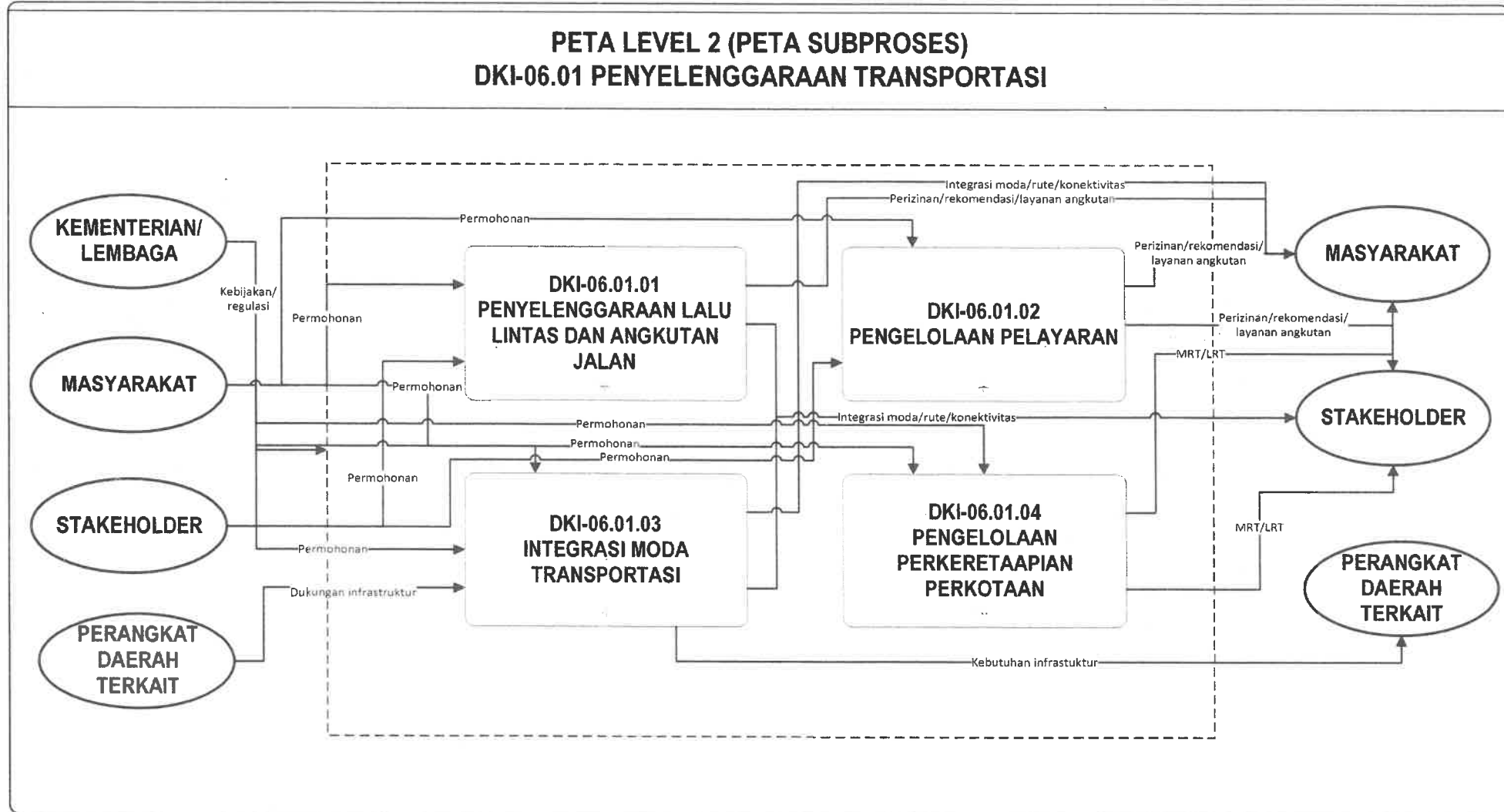
6. DKI-06 PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK



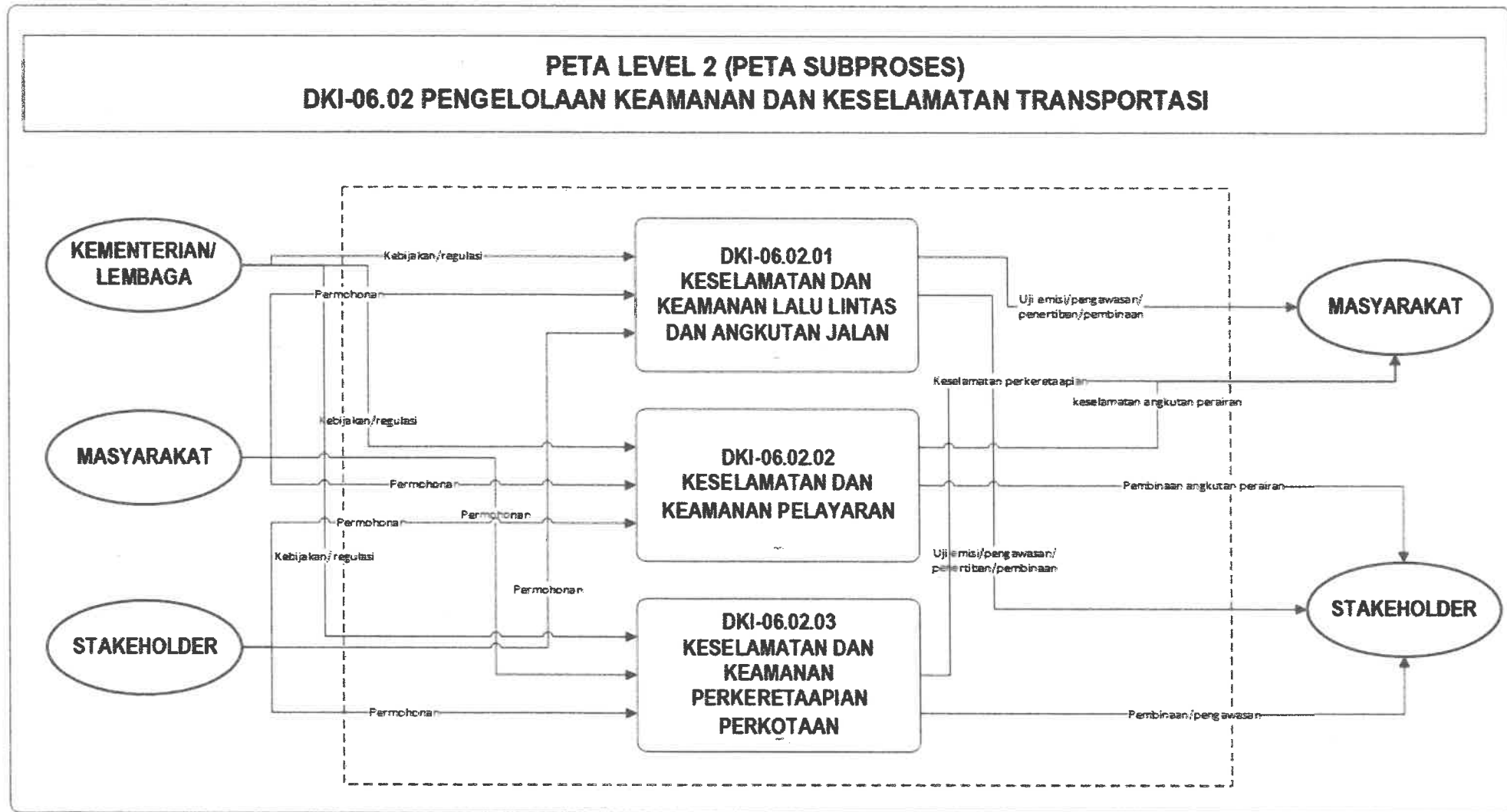
SUBPROSES DKI-06 PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK

Penjelasan:

Proses ini merupakan serangkaian kegiatan terkait pengelolaan transportasi publik di DKI Jakarta. Dimana pada penyelenggaraannya, terdapat serangkaian kegiatan mengenai pengelolaan pelayanan transportasi bagi masyarakat, pengelolaan kemandirian dan keselamatan transportasi pada berbagai jenis moda transportasi seperti moda transportasi darat, kereta api, dan laut yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Serta menjelaskan pengelolaan sarana beserta prasarana transportasi yang mendukung penyelenggaraan transportasi publik.

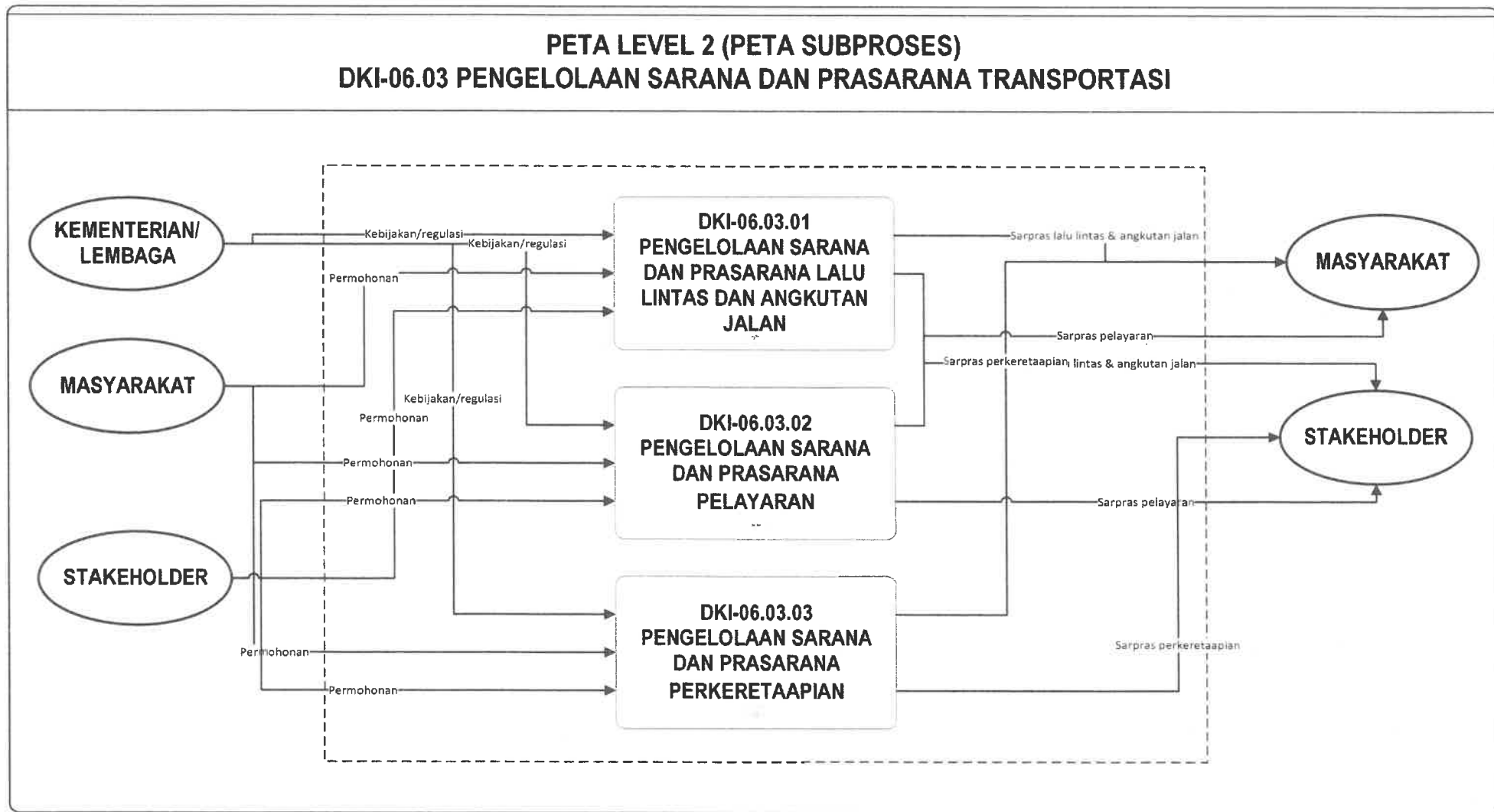


SUBPROSES DKI-06.01 PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI



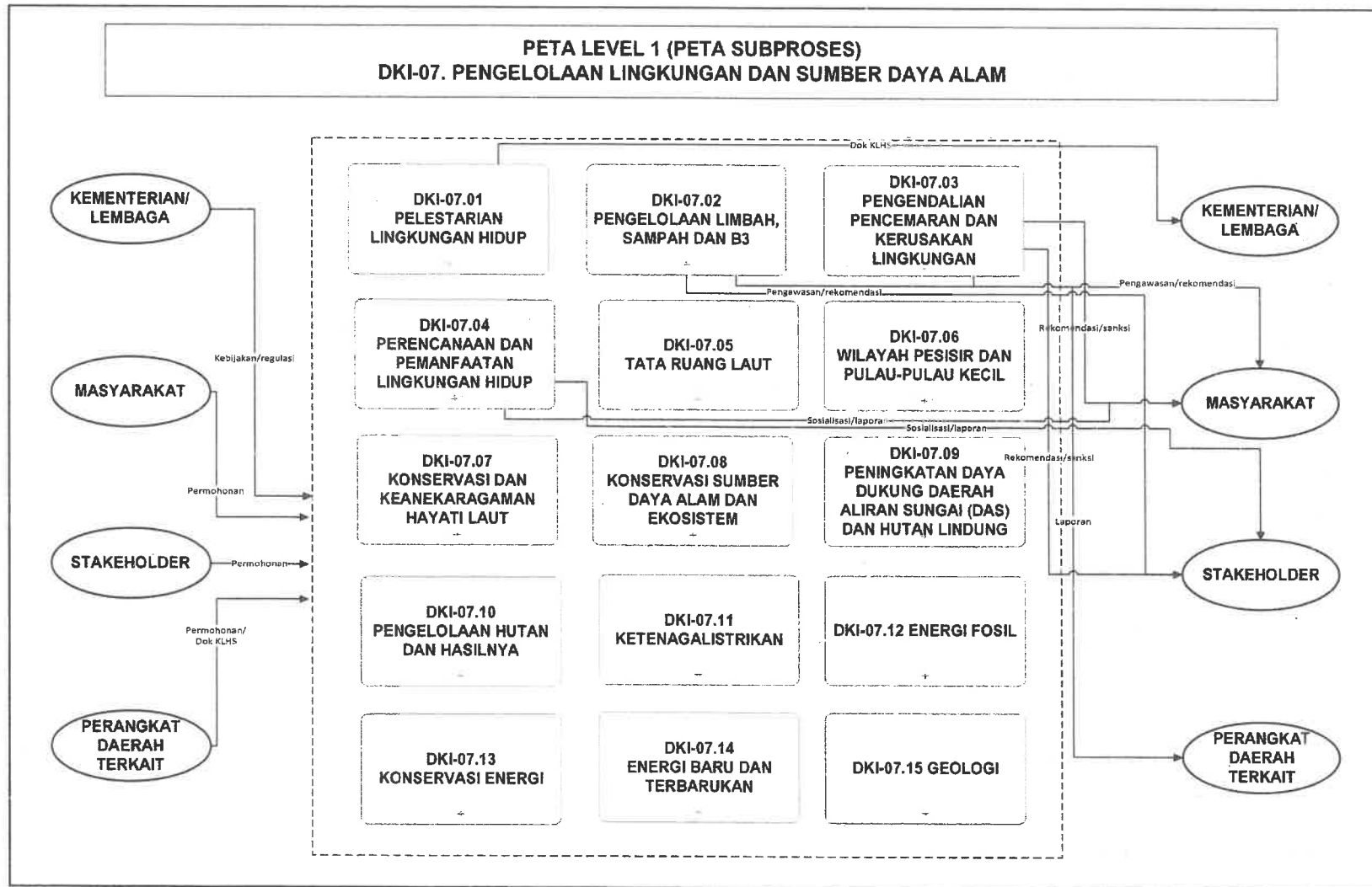
SUBPROSES DKI-06.02 PENGELOLAAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-06.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI**



SUBPROSES DKI-06.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

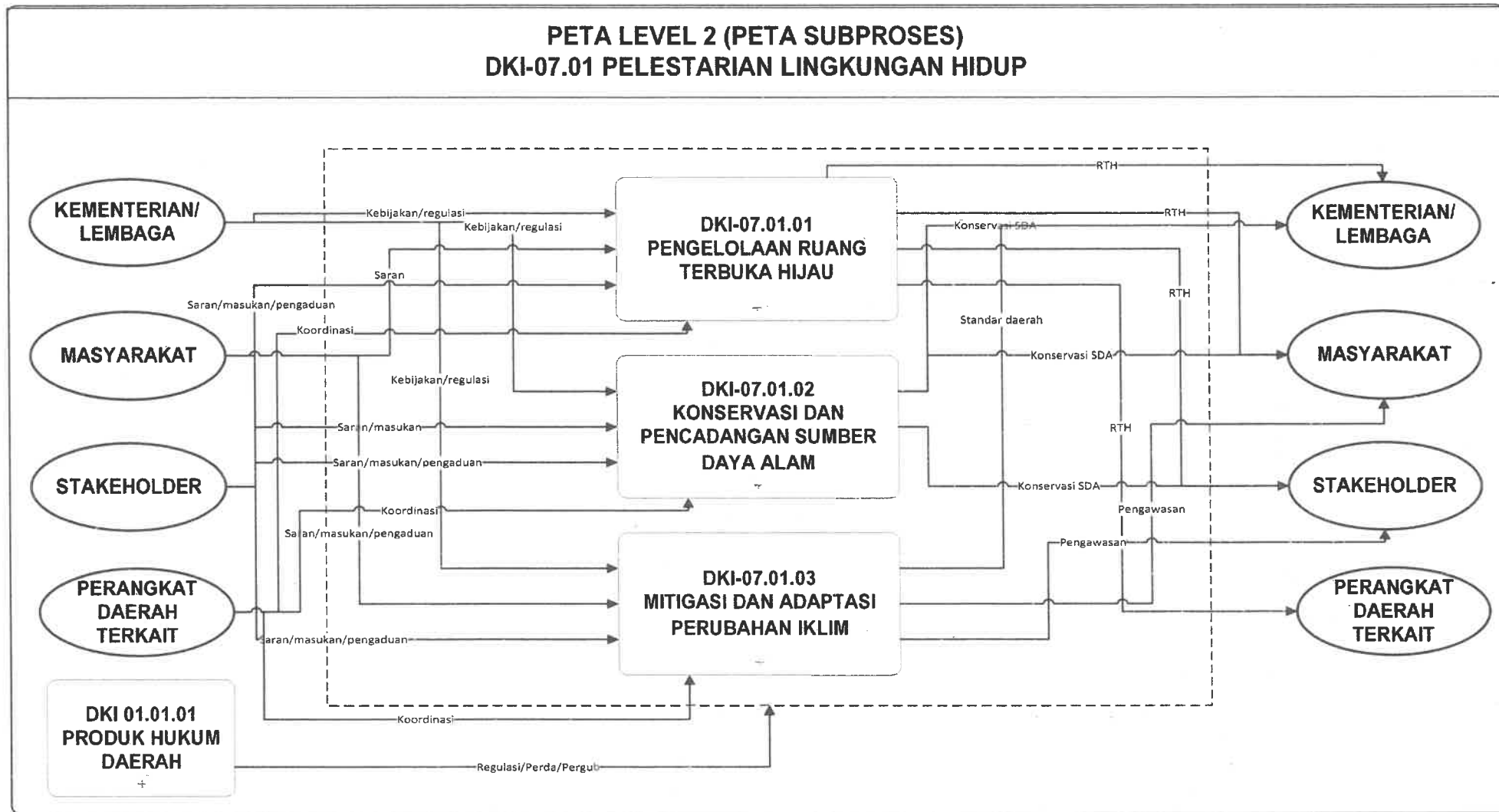
7. DKI-07 PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM



Penjelasan:
 Proses ini merupakan serangkaian kegiatan tentang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang dilakukan beberapa Perangkat Daerah di DKI Jakarta. Dimana pada proses ini membahas tentang berbagai rangkaian kegiatan pada bidang lingkungan hidup, kelautan, perikanan, kehutanan, energi dan pertambangan pada ruang lingkup Pemrov DKI Jakarta

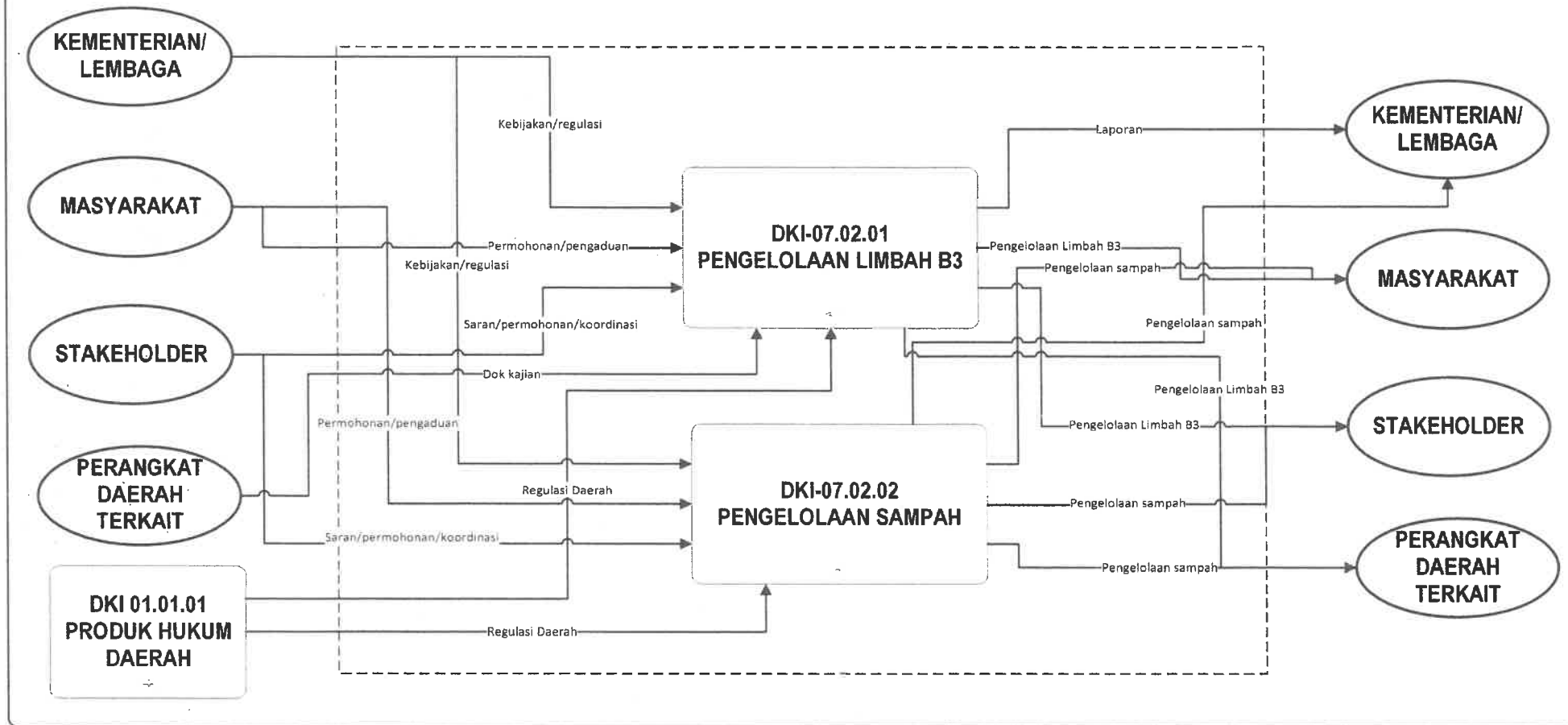
SUBPROSES DKI-07 PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM

**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-07.01 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

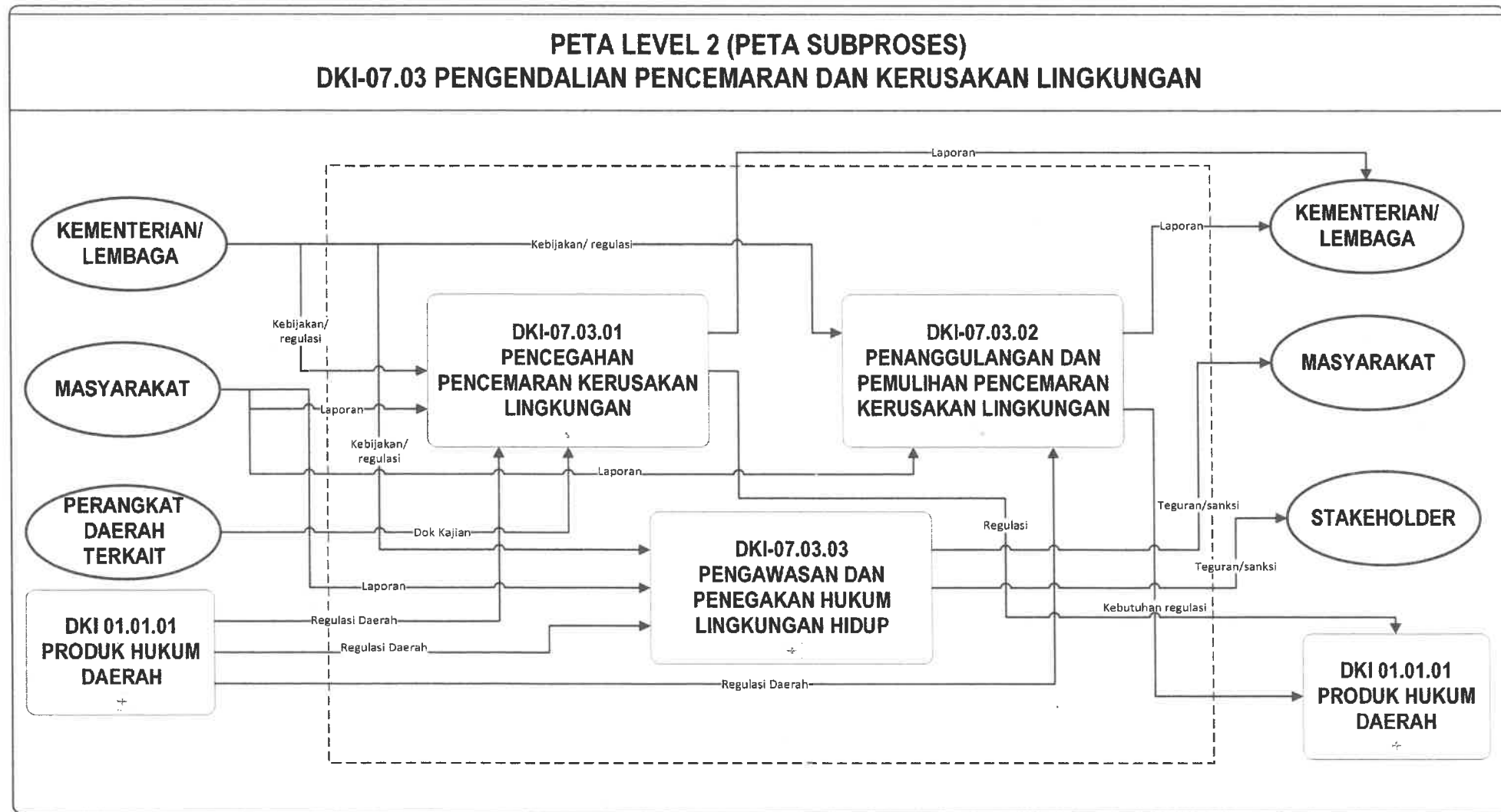


SUBPROSES DKI-07.01 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-07.02 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN B3**

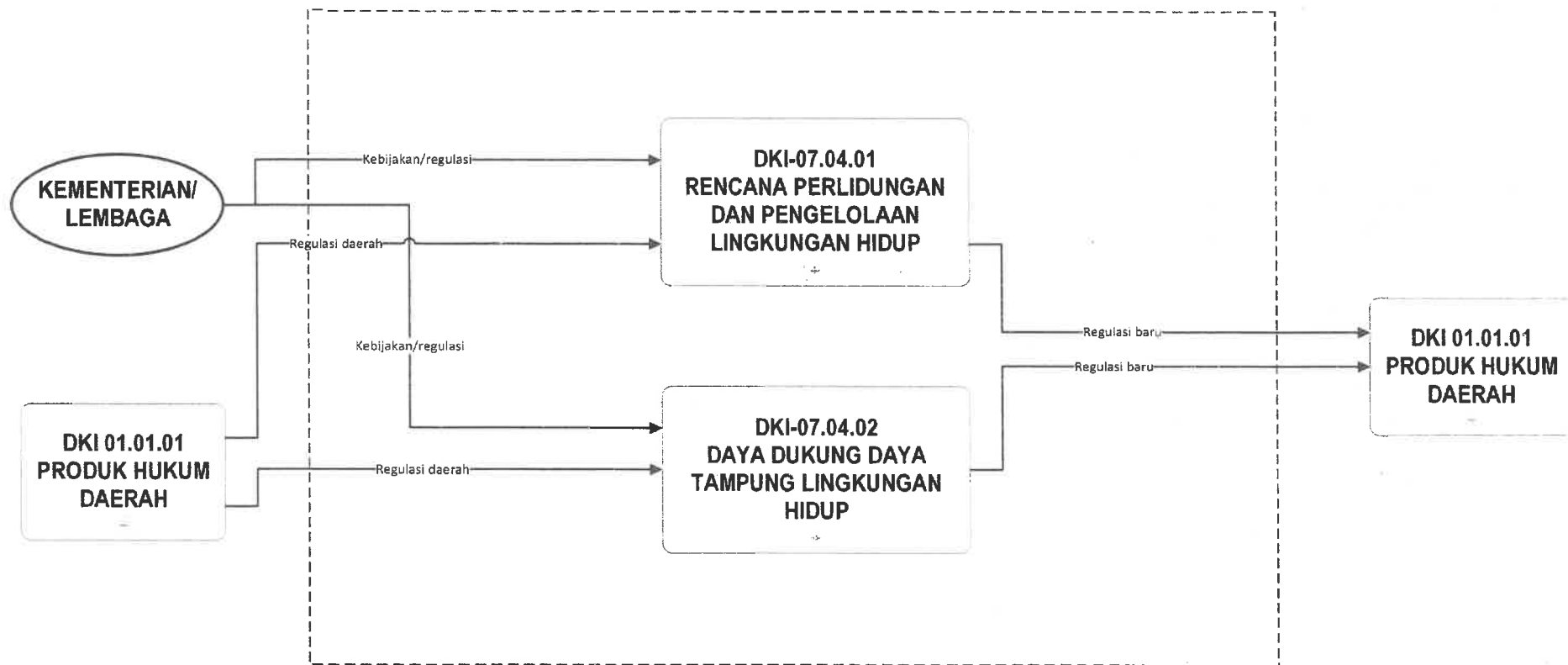


SUBPROSES DKI-07.02 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN B3

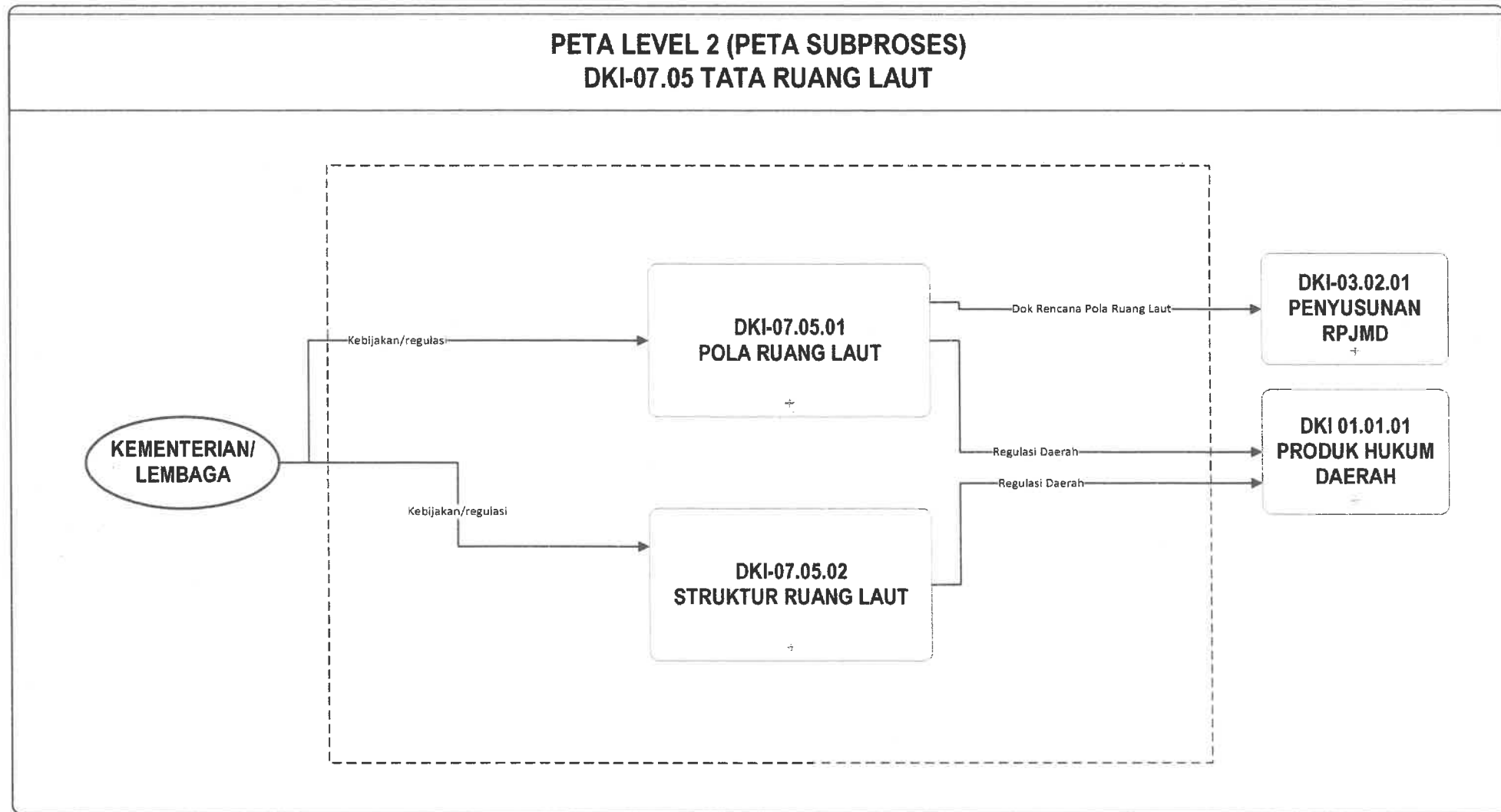


SUBPROSES DKI-07.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

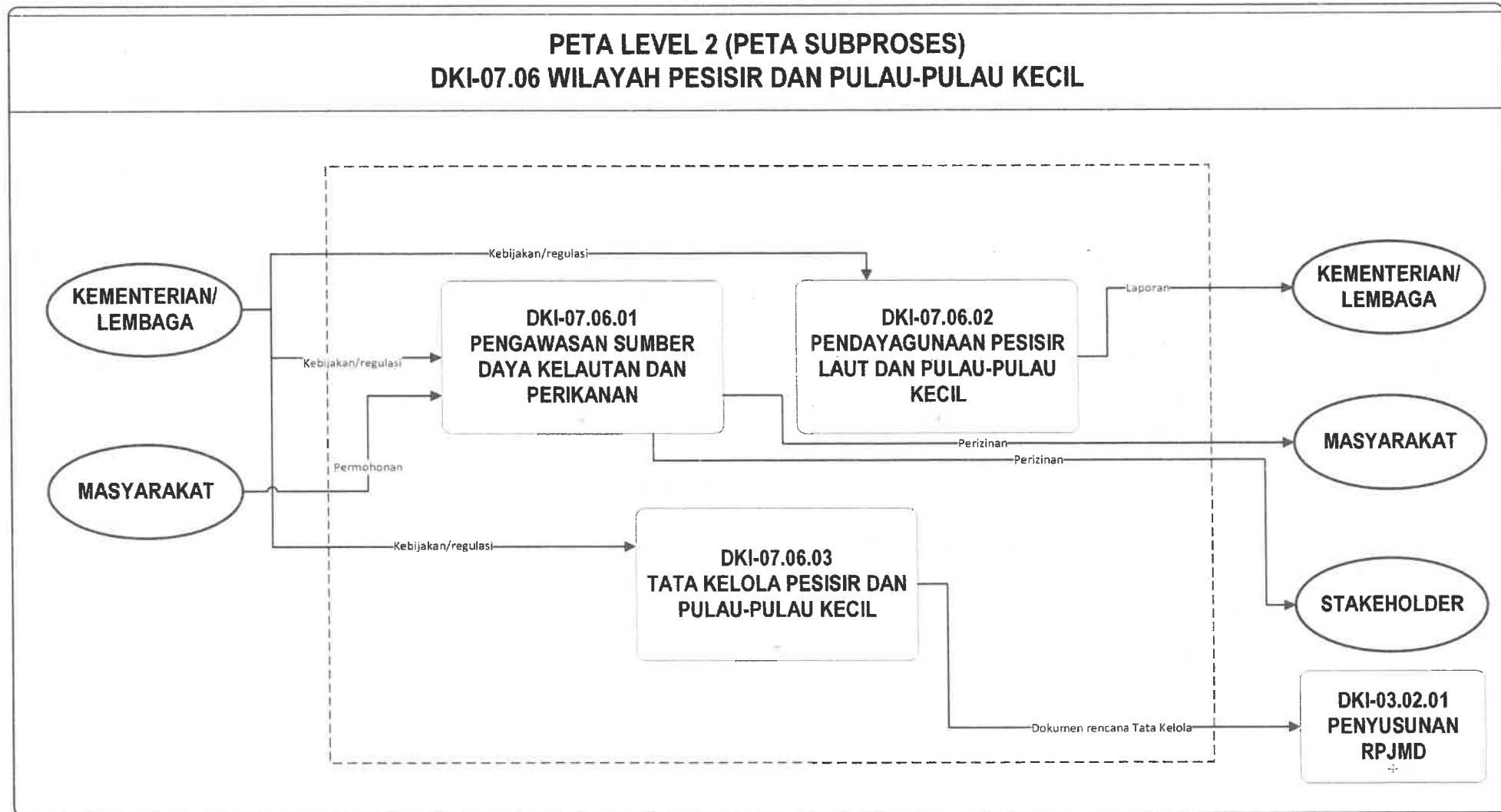
PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-07.04 PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP



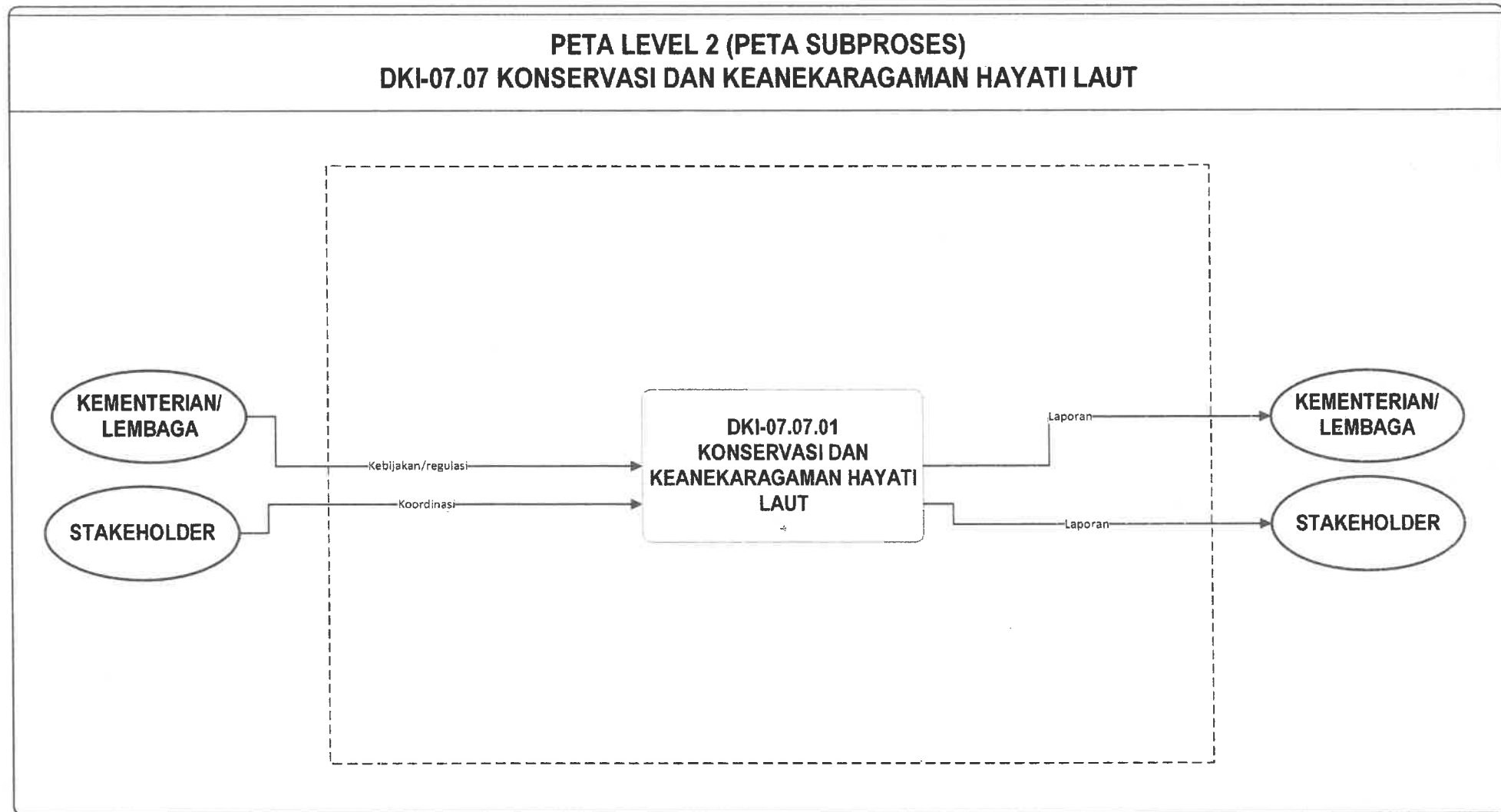
SUBPROSES DKI-07.04 PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP



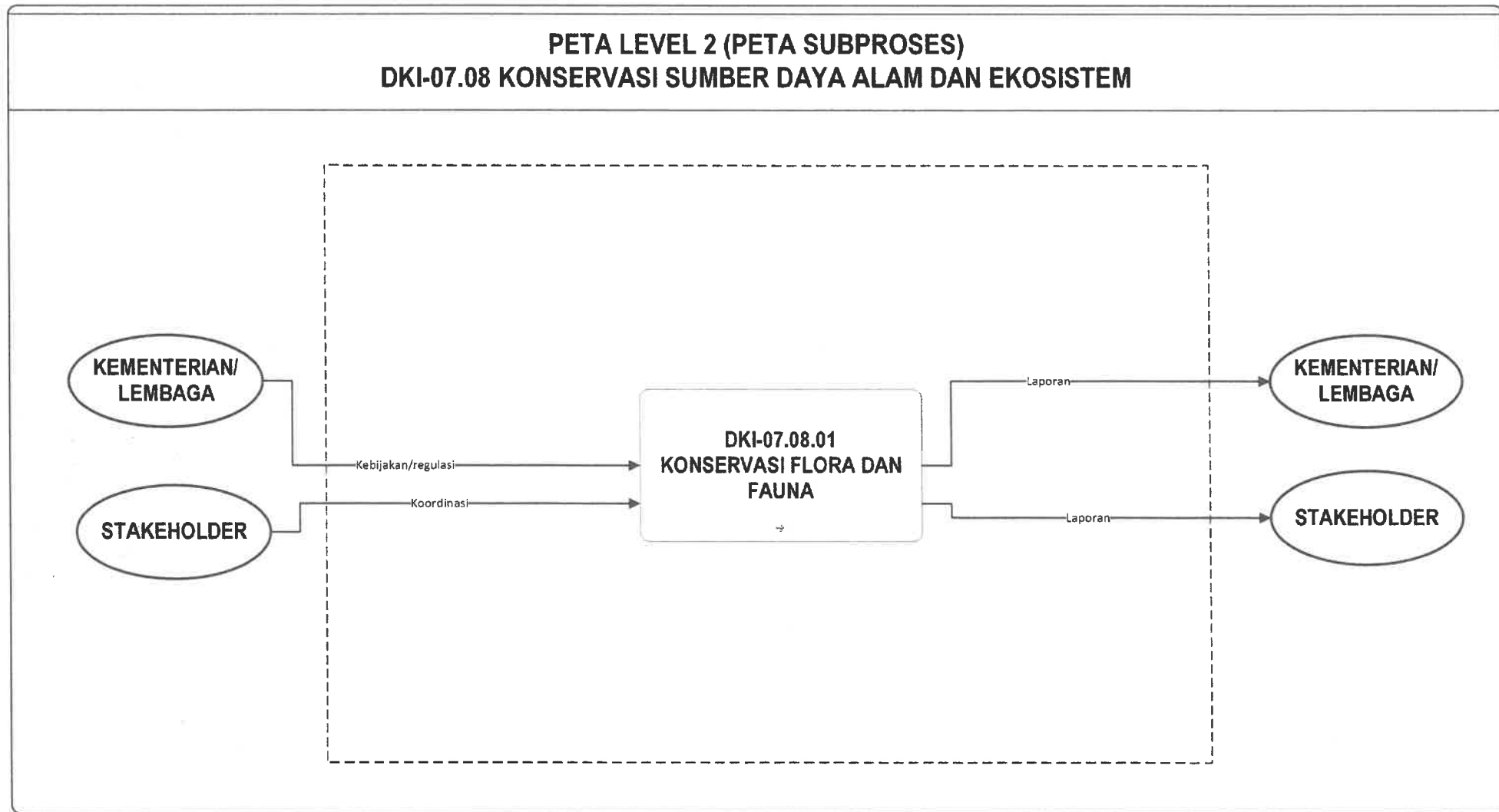
SUBPROSES DKI-07.05 TATA RUANG LAUT



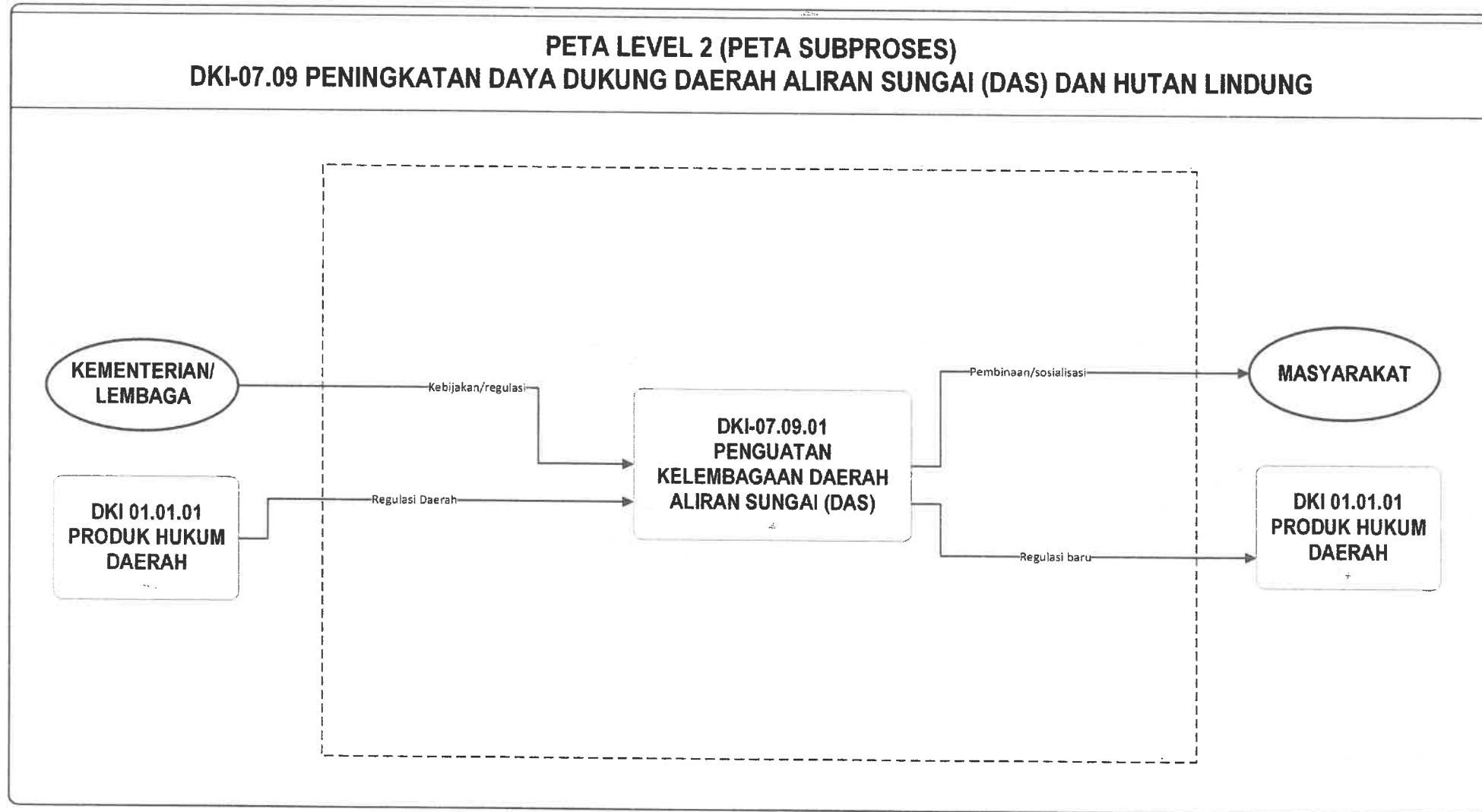
SUBPROSES DKI-07.06 WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



SUBPROSES DKI-07.07 KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT

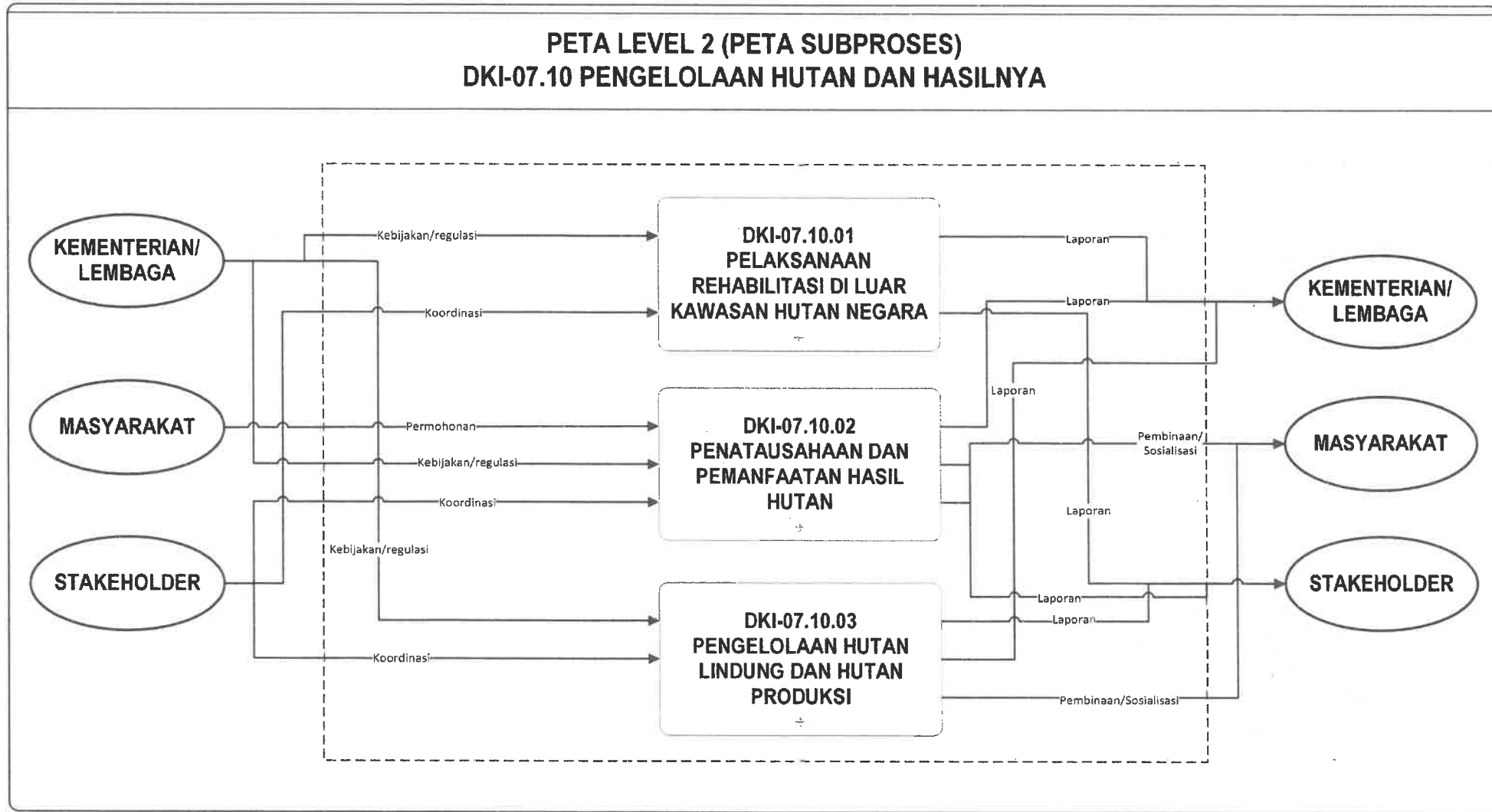


SUBPROSES DKI-07.08 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



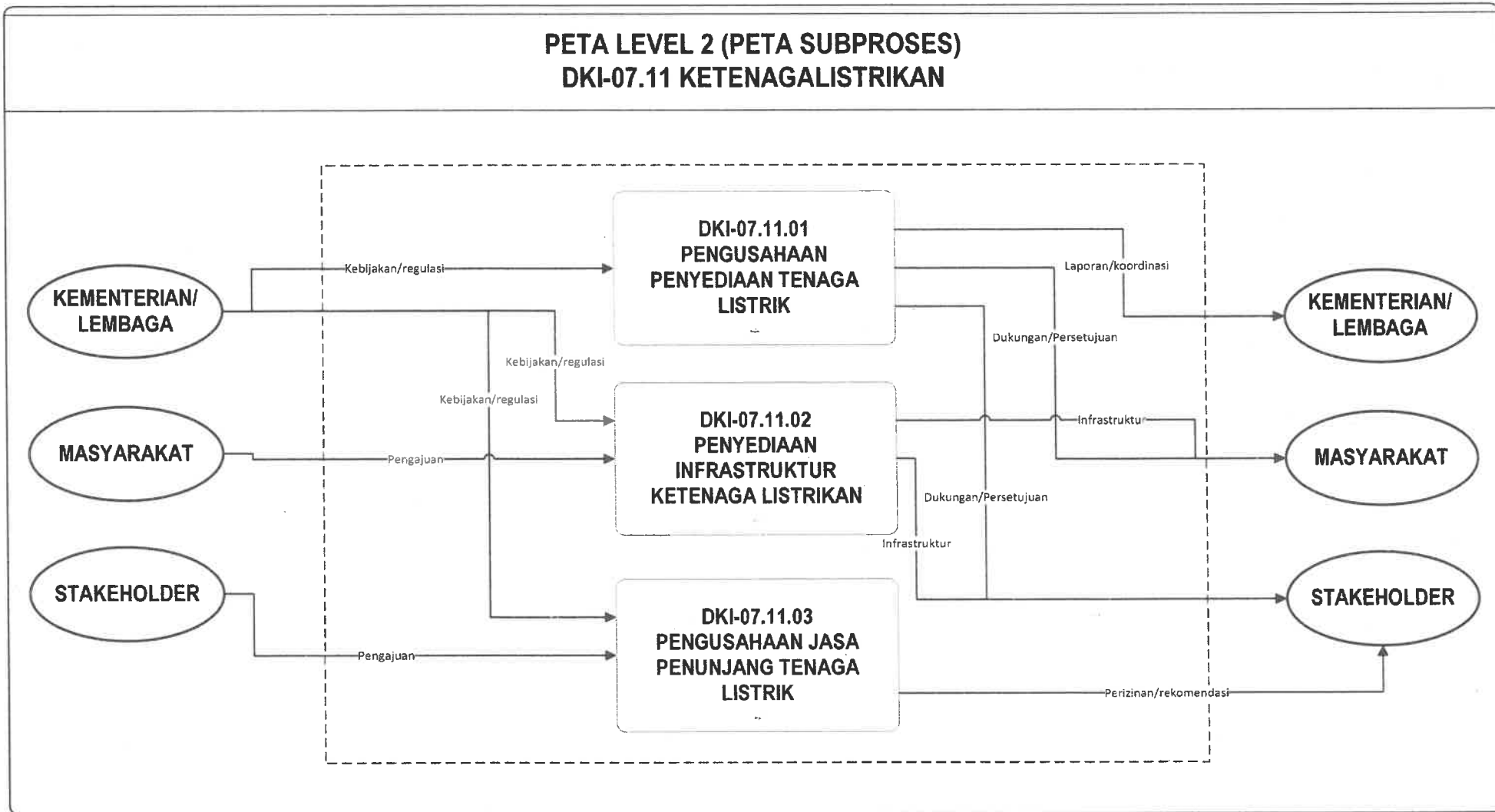
SUBPROSES DKI-07.09 PENINGKATAN DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN HUTAN LINDUNG

**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-07.10 PENGELOLAAN HUTAN DAN HASILNYA**

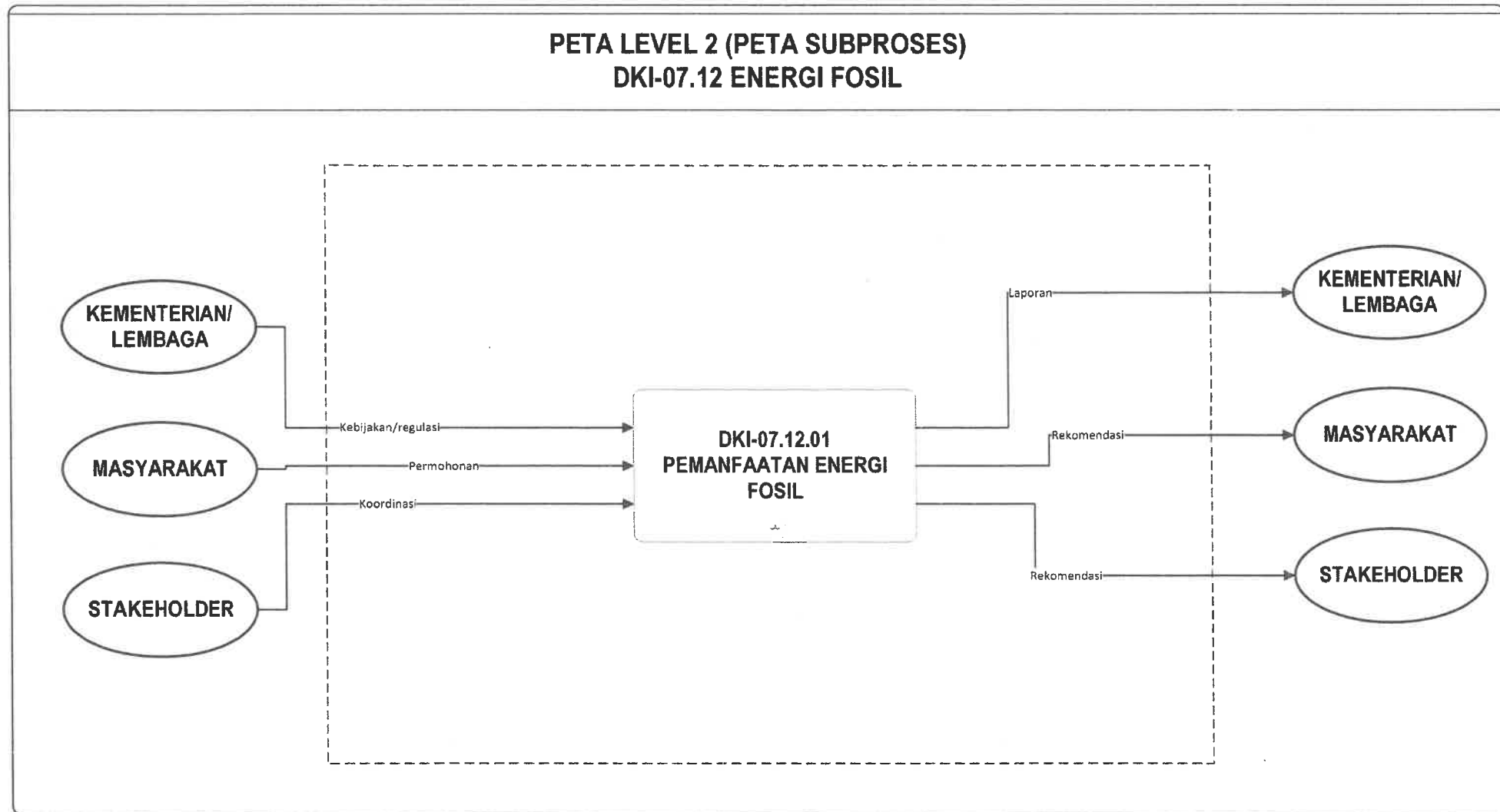


SUBPROSES DKI-07.10 PENGELOLAAN HUTAN DAN HASILNYA

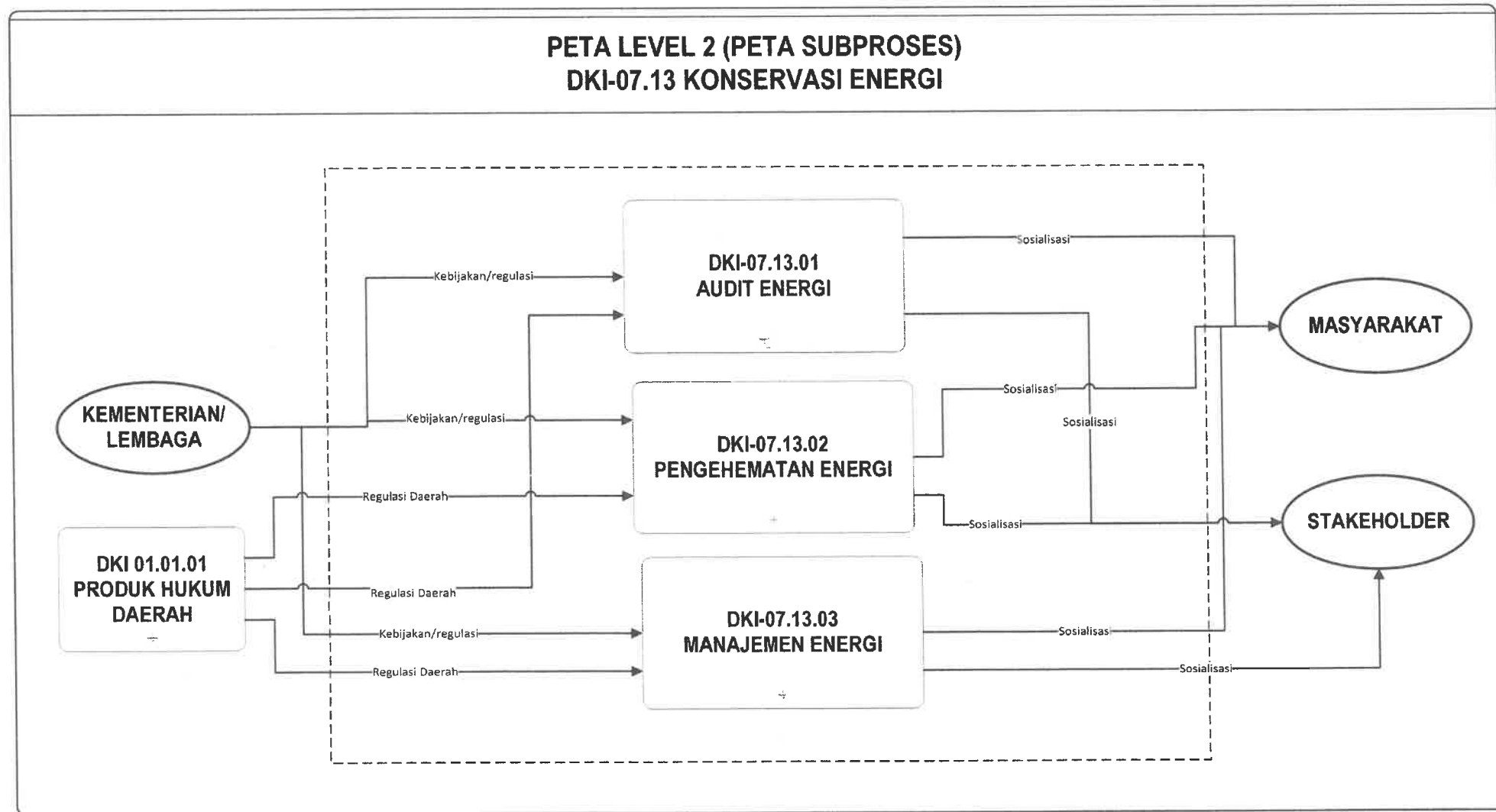
**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-07.11 KETENAGALISTRIKAN**



SUBPROSES DKI-07.11 KETENAGALISTRIKAN

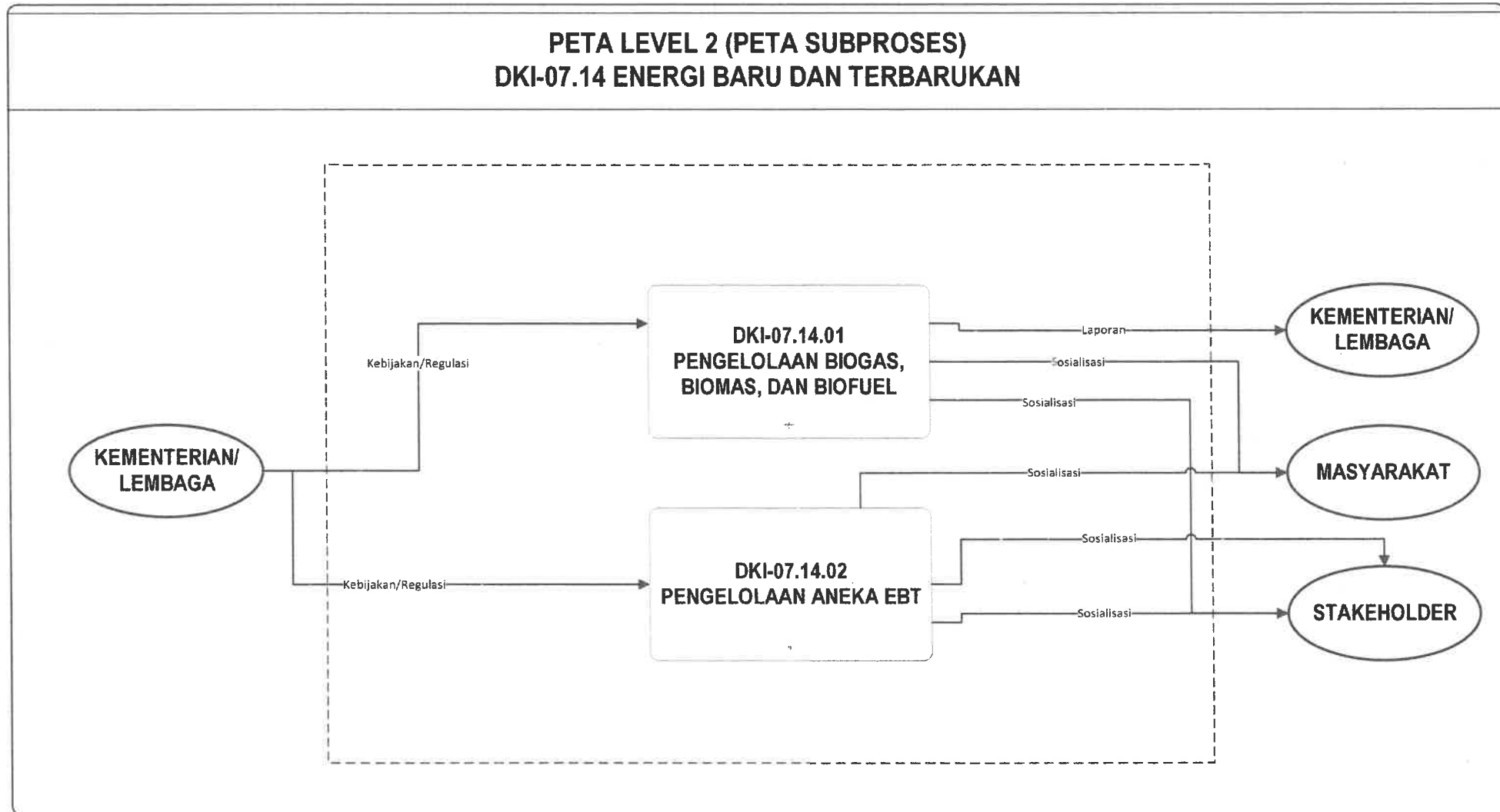


SUBPROSES DKI-07.12 ENERGI FOSIL

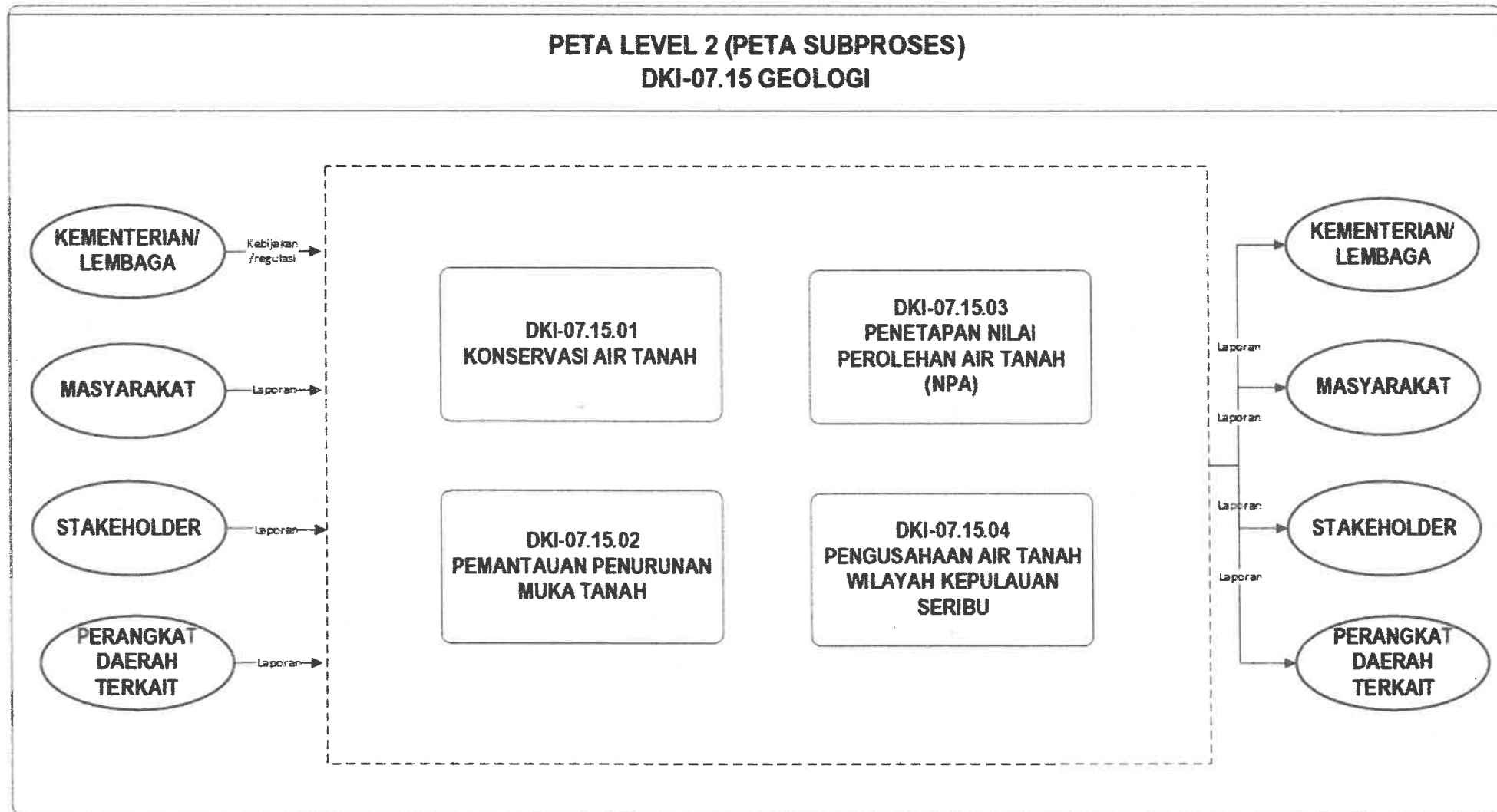


SUBPROSES DKI-07.13 KONSERVASI ENERGI

**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-07.14 ENERGI BARU DAN TERBARUKAN**

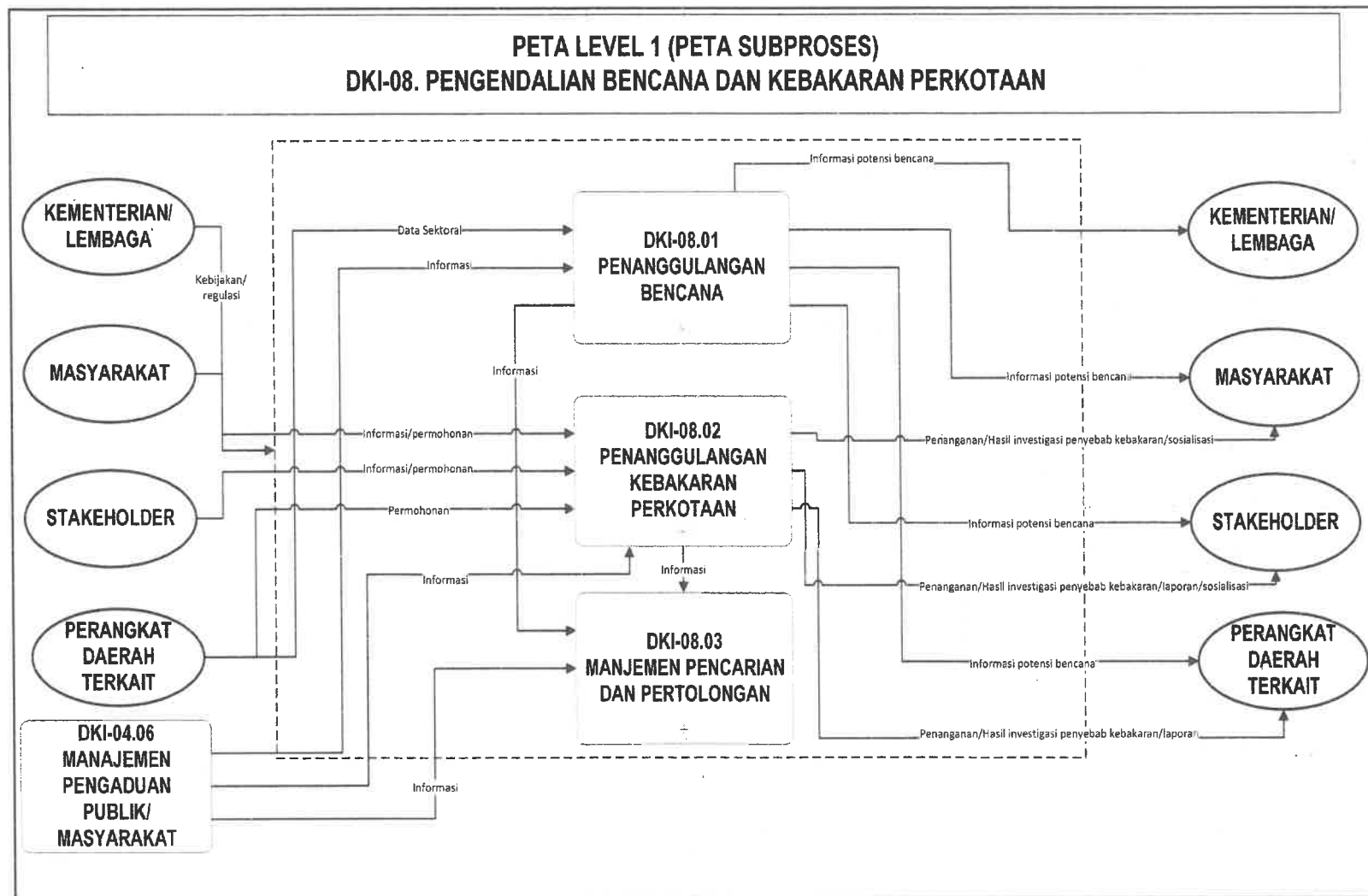


SUBPROSES DKI-07.14 ENERGI BARU DAN TERBARUKAN



SUBPROSES DKI-07.15 GEOLOGI

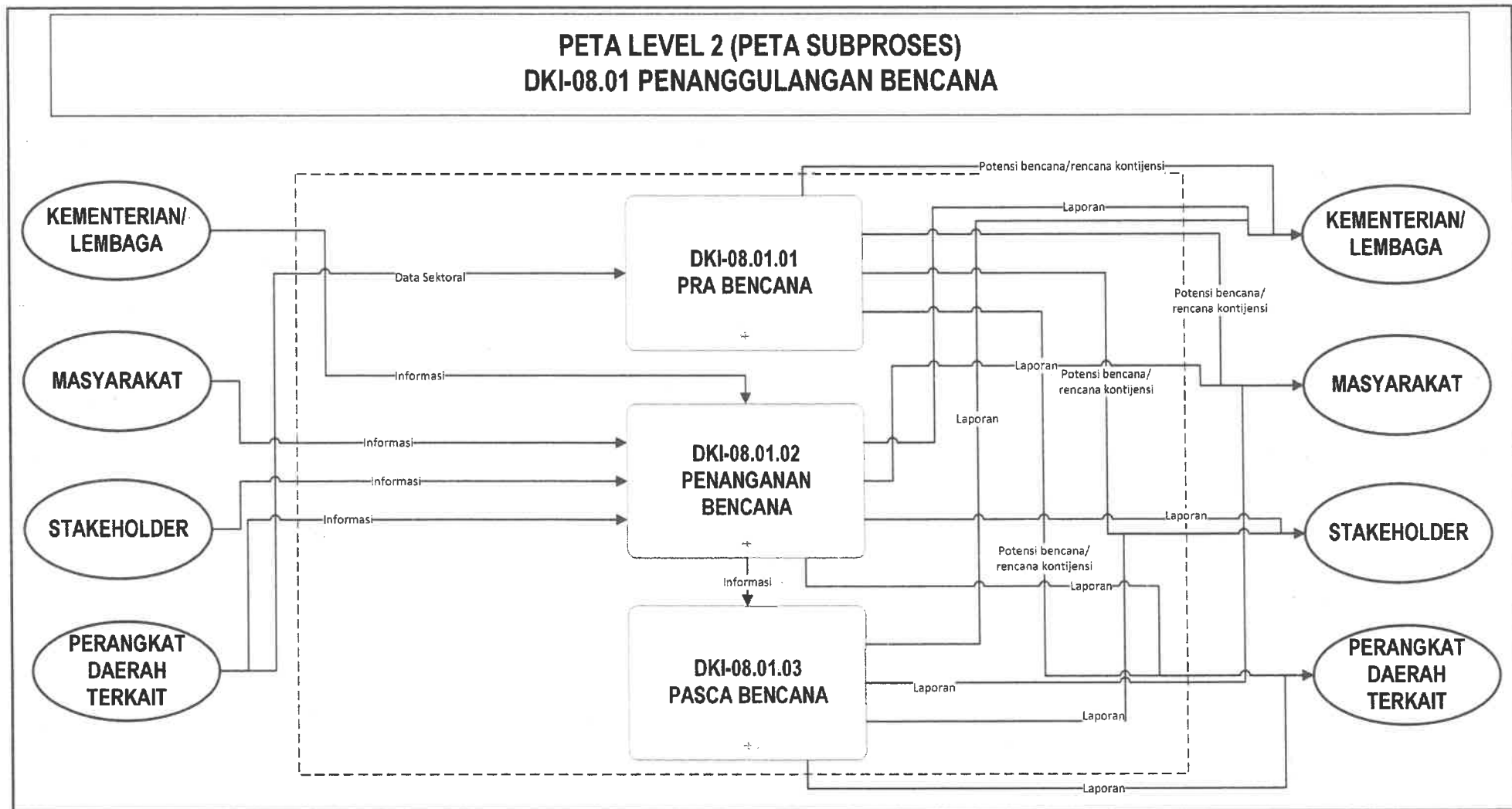
8. DKI-08 PENGENDALIAN BENCANA DAN KEBAKARAN PERKOTAAN

**Penjelasan:**

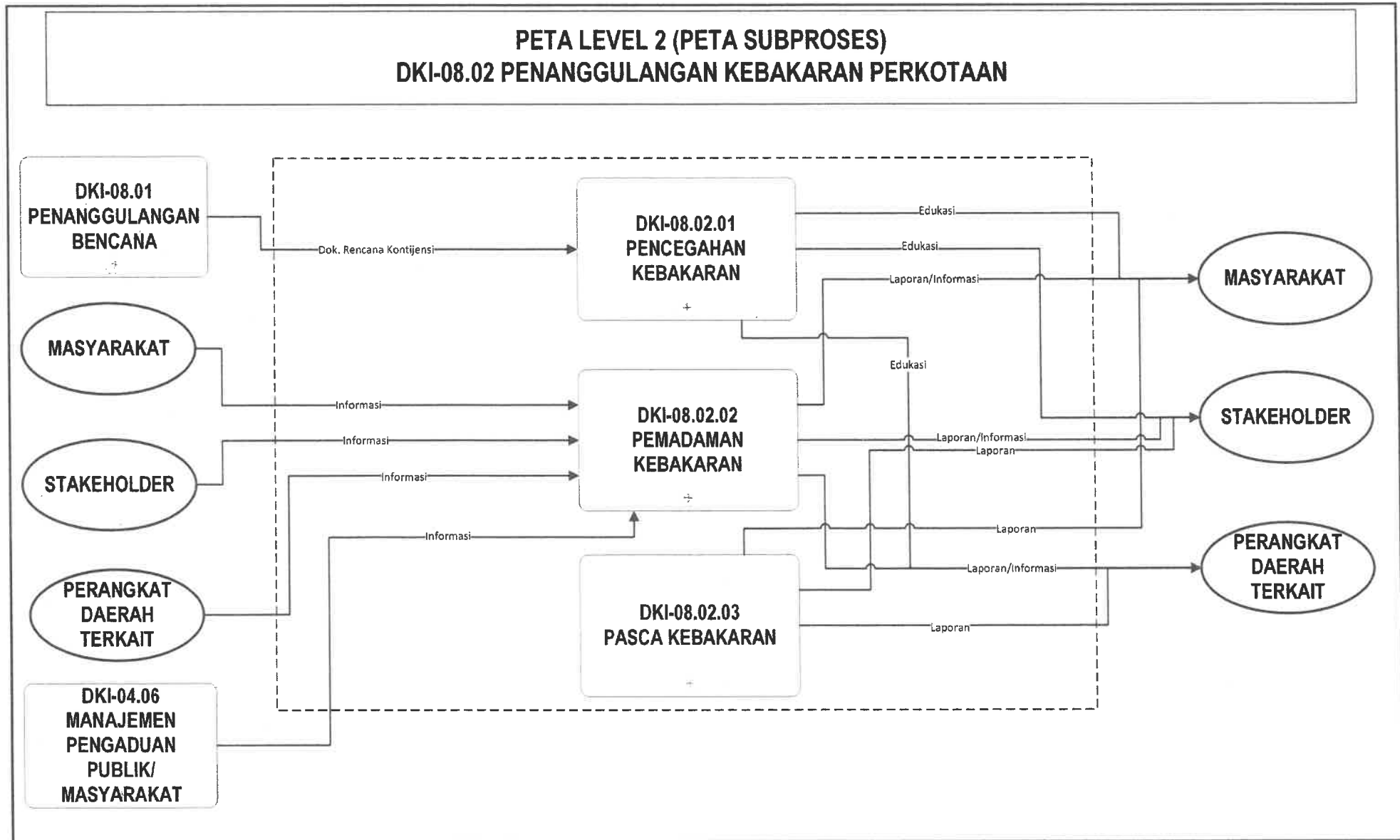
Proses ini merupakan kegiatan pengendalian bencana dan kebakaran perkotaan di DKI Jakarta.

Dimana proses ini meliputi berbagai tahapan mengenai penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran perkotaan, hingga tahapan dalam manajemen pencarian dan pertolongan bagi masyarakat korban bencana/kebakaran perkotaan.

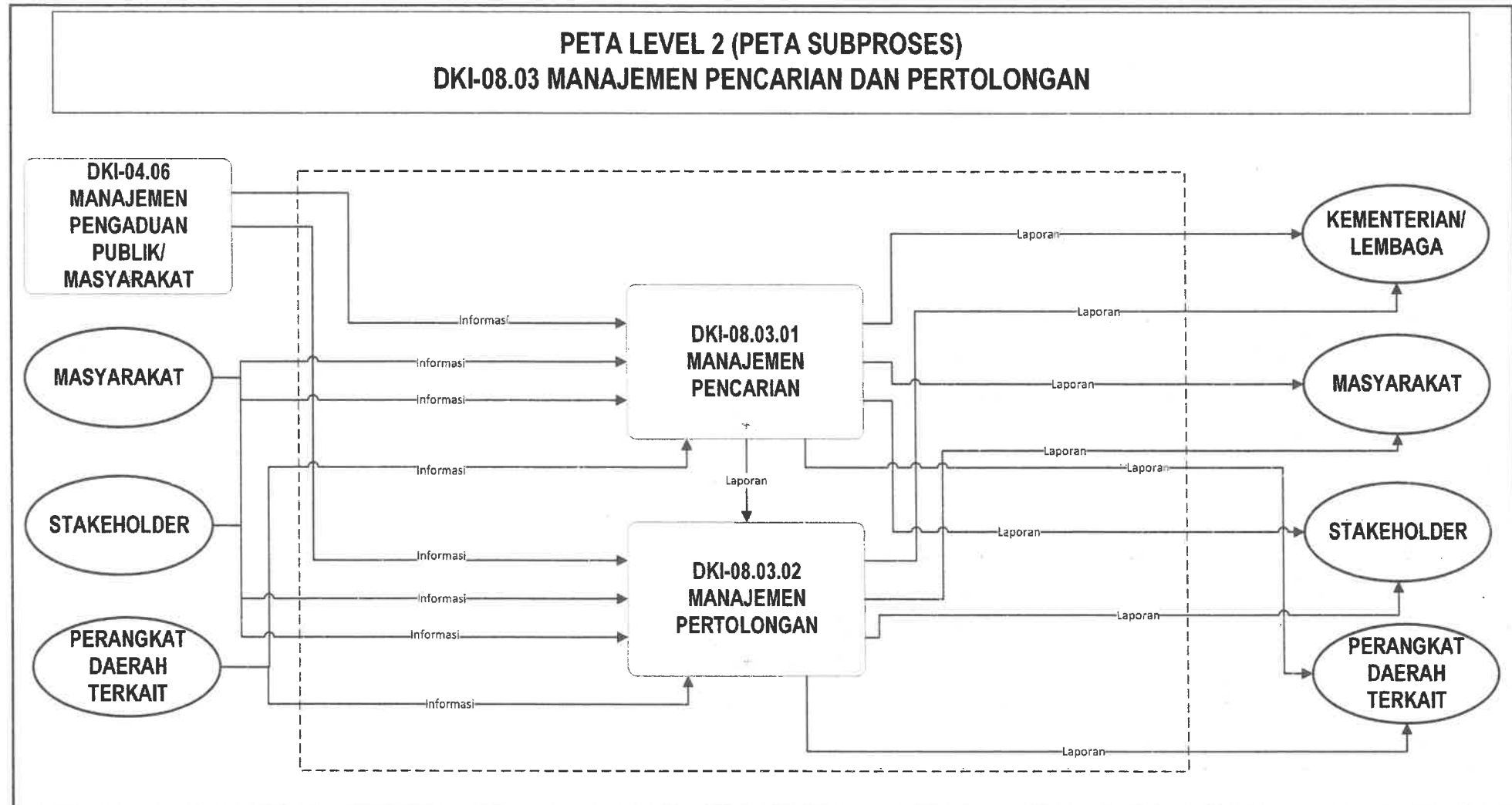
SUBPROSES DKI-8 PENGENDALIAN BENCANA DAN KEBAKARAN PERKOTAAN



SUBPROSES DKI-08.01 PENANGGULANGAN BENCANA

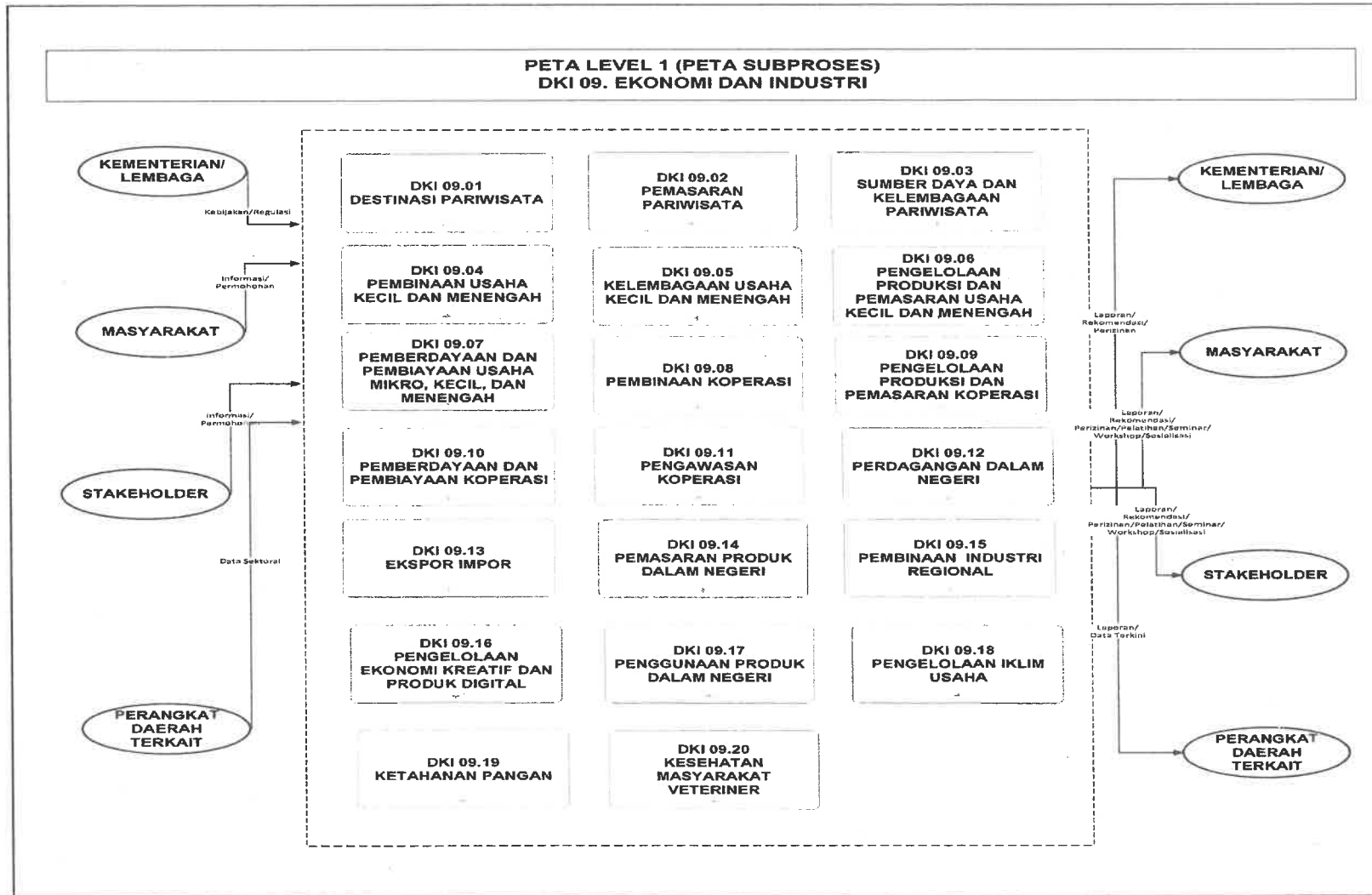


SUBPROSES DKI-08.02 PENANGGULANGAN KEBAKARAN PERKOTAAN



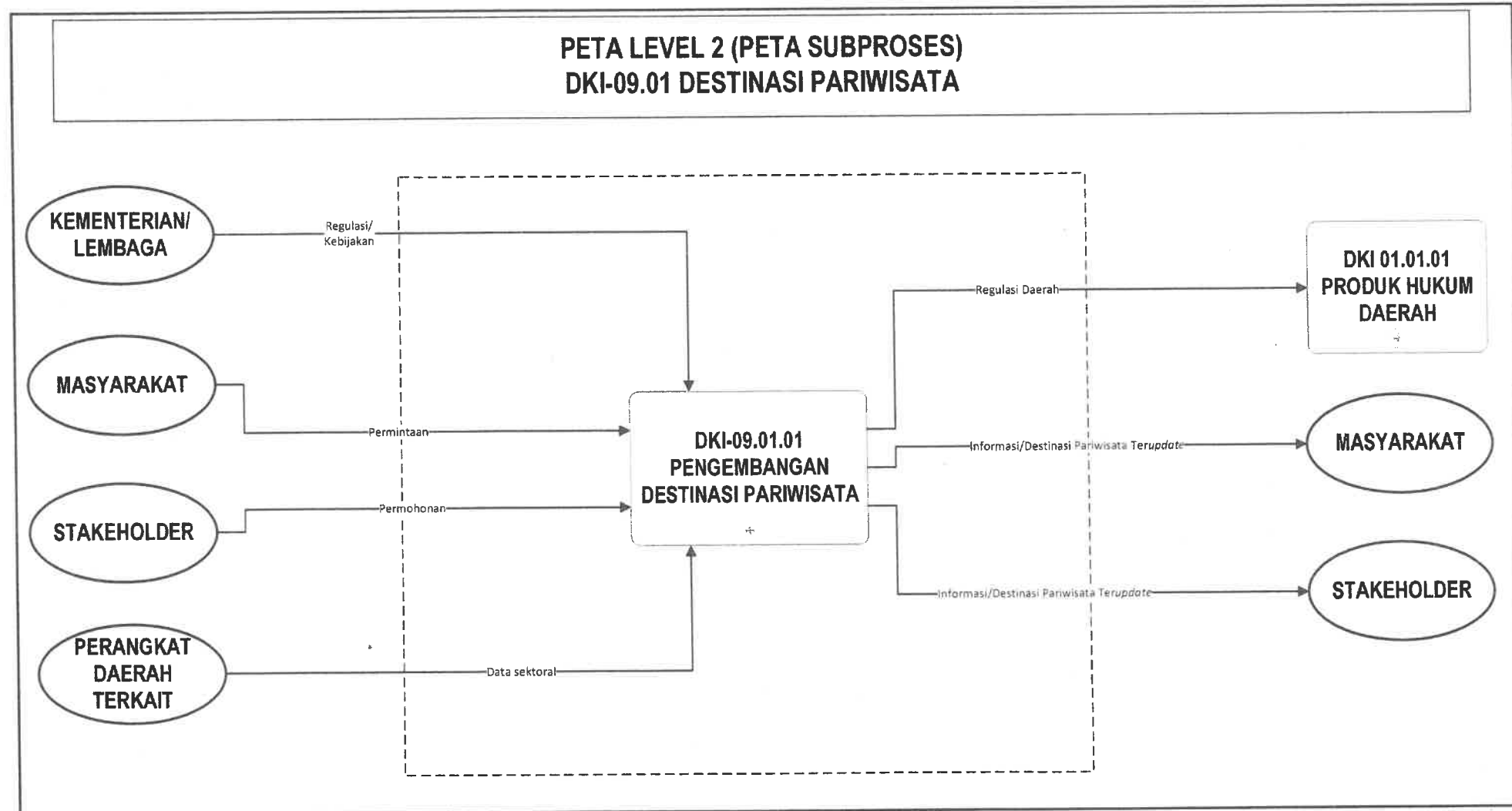
SUBPROSES DKI-08.03 MANAJEMEN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

9. DKI-09 PENGELOLAAN EKONOMI DAN INDUSTRI

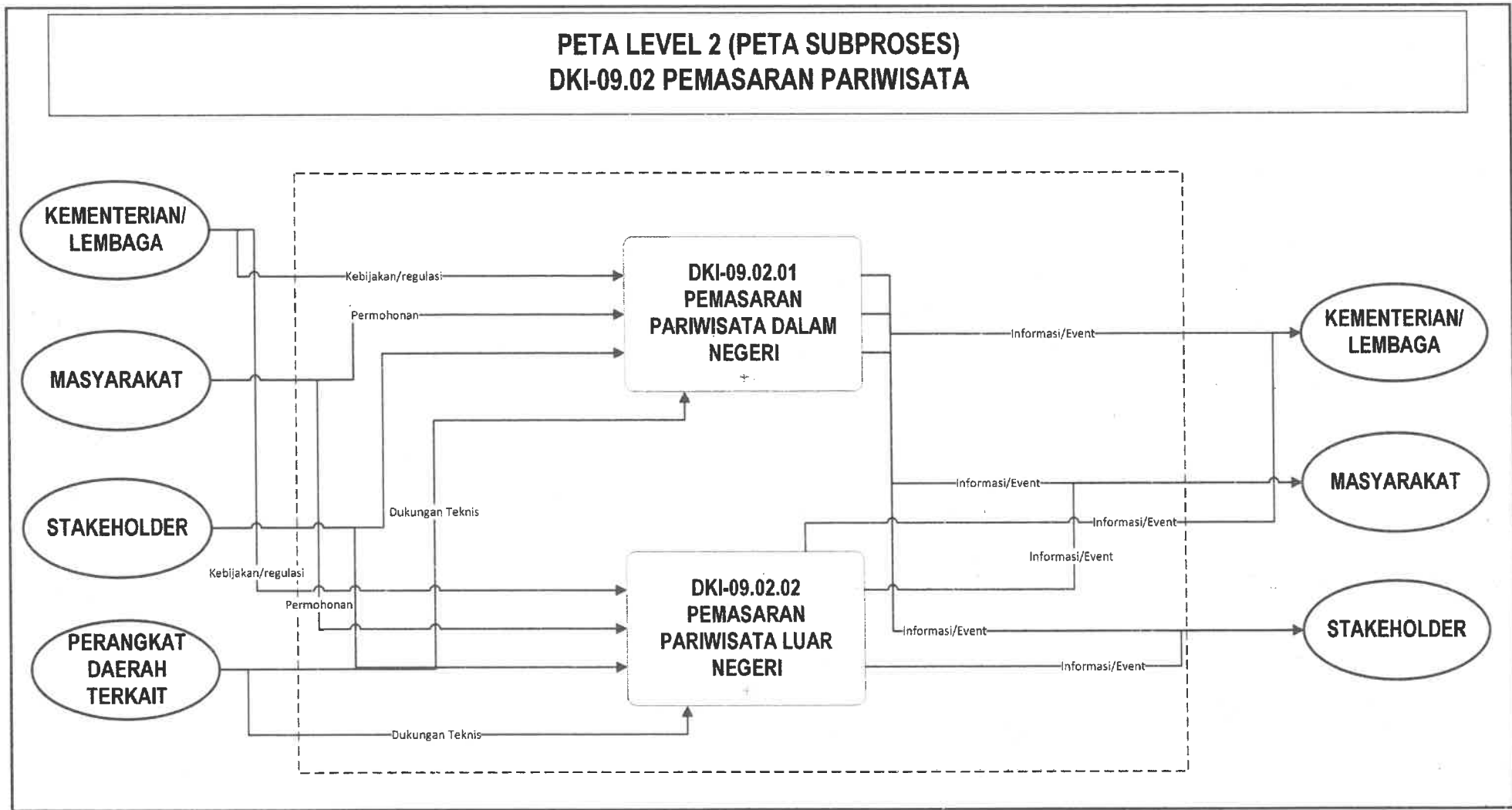


Penjelasan:
Proses ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam mengelola ekonomi dan industri di lingkungan DKI Jakarta. Dimana proses yang dilakukan adalah dengan mengelola bidang pariwisata, usaha kecil menengah, koperasi, perdagangan, industri, pertanian, peternakan dan perikanan di lingkungan DKI Jakarta

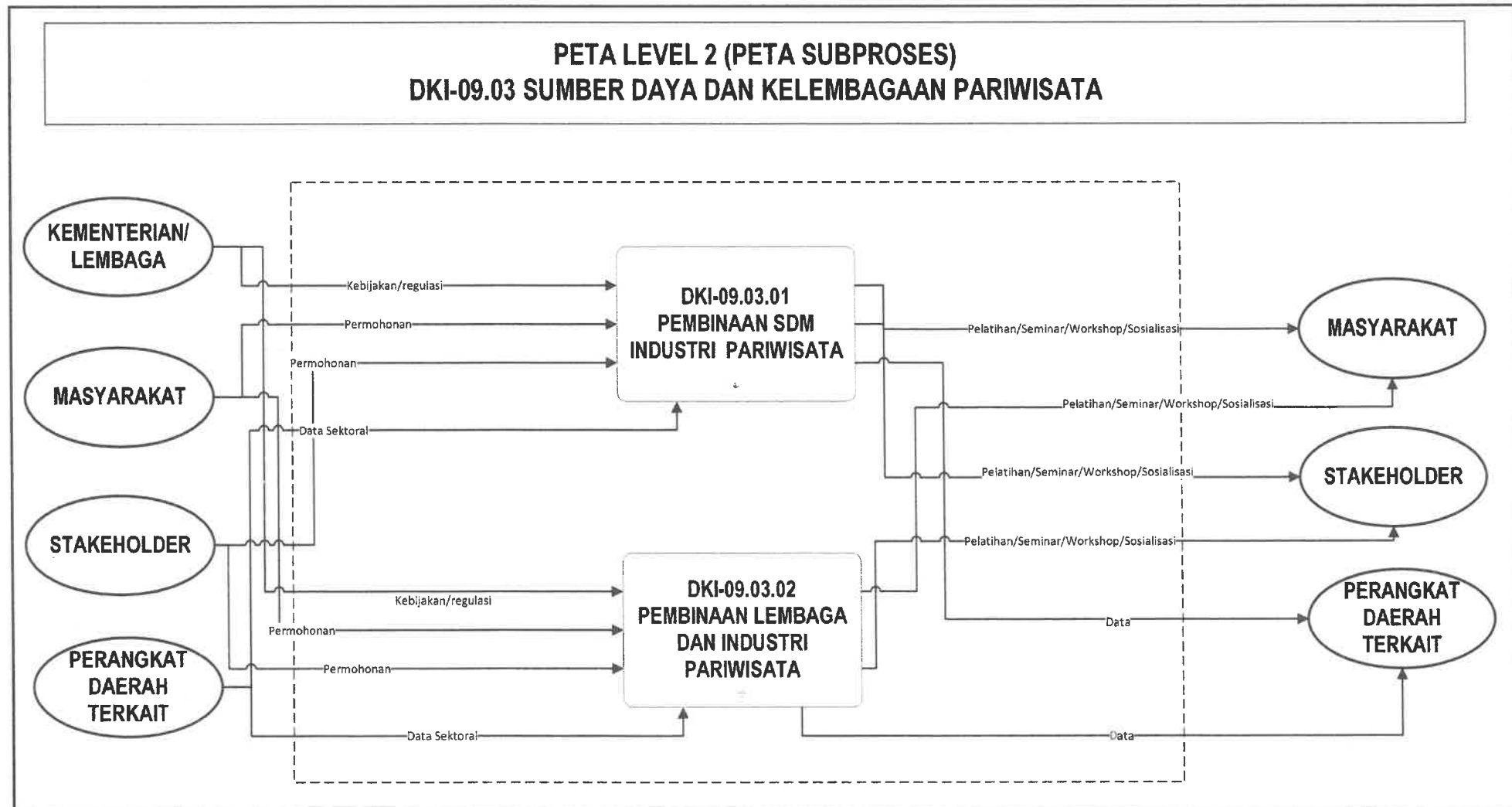
SUBPROSES DKI-09 EKONOMI DAN INDUSTRI



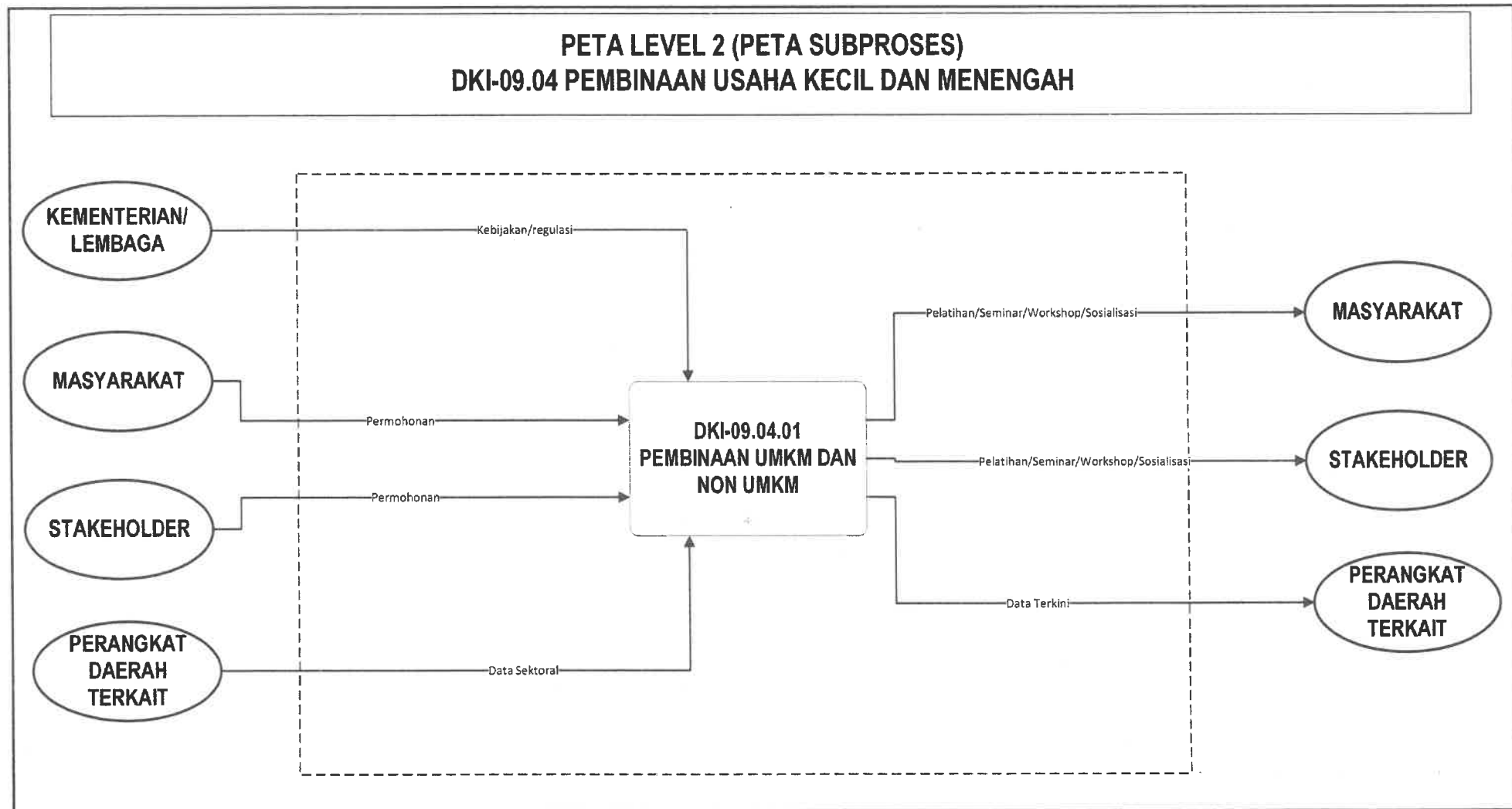
SUBPROSES DKI-09.01 DESTINASI PARIWISATA



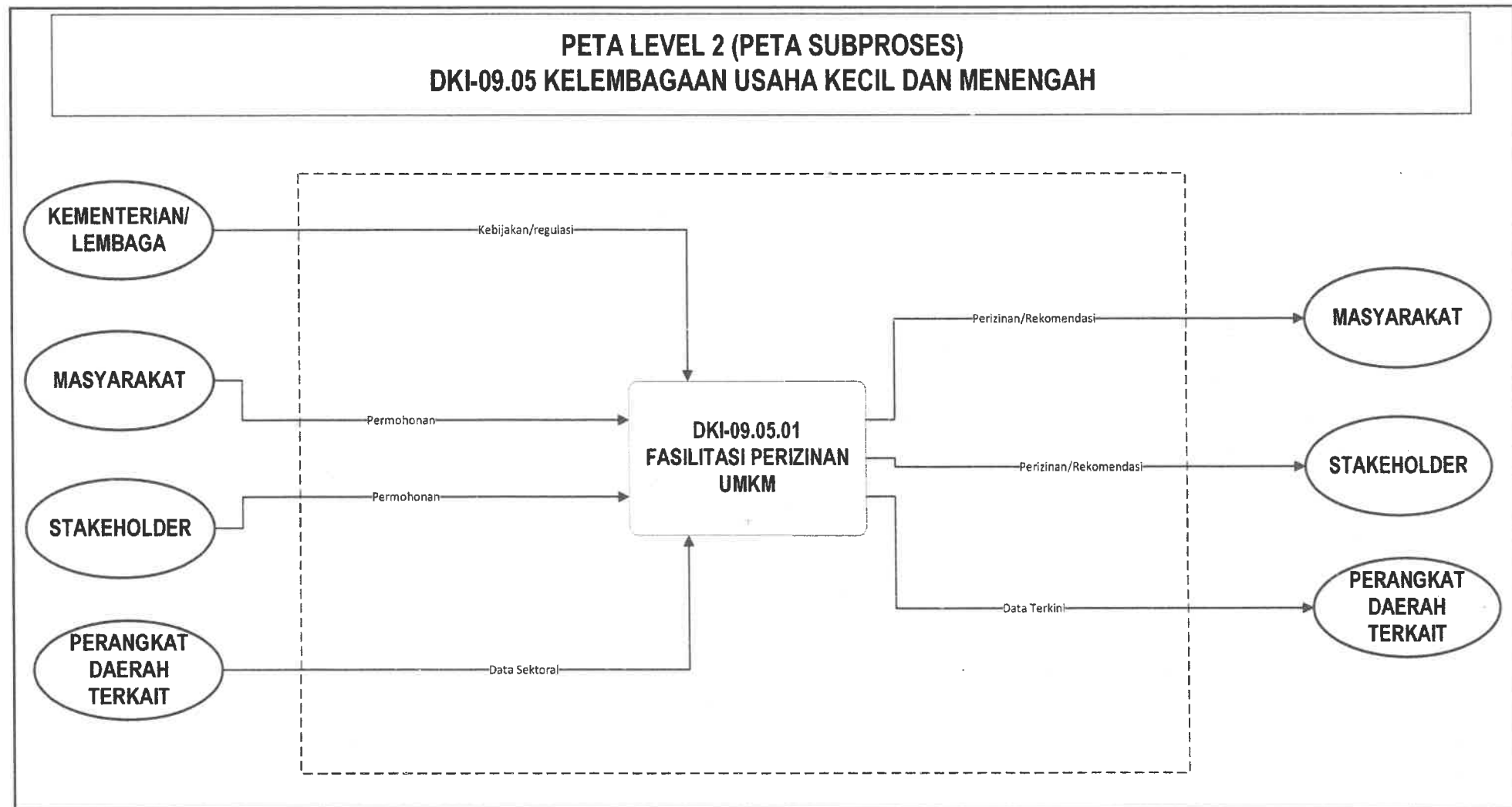
SUBPROSES DKI-09.02 PEMASARAN PARIWISATA



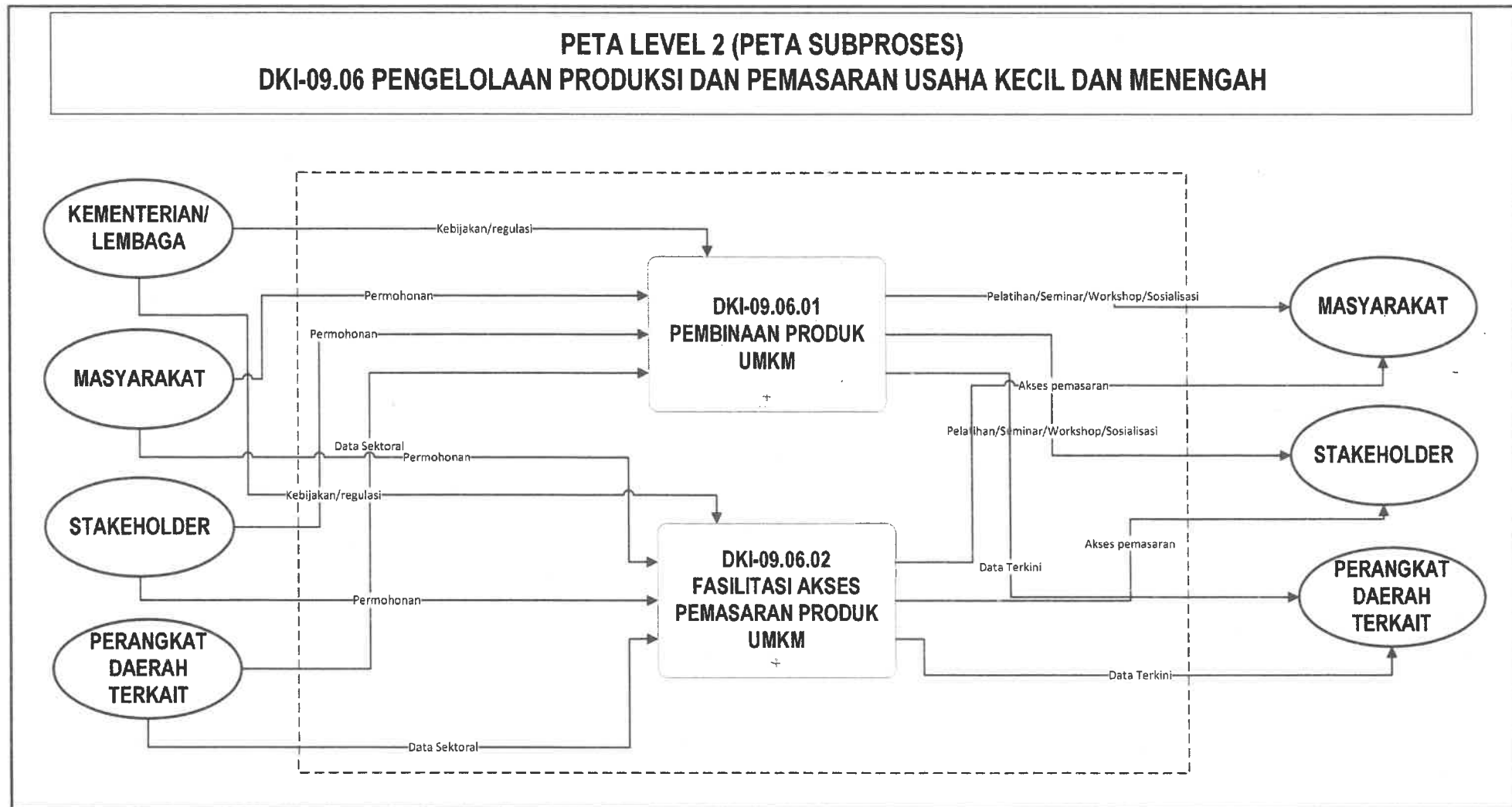
SUBPROSES DKI-09.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA



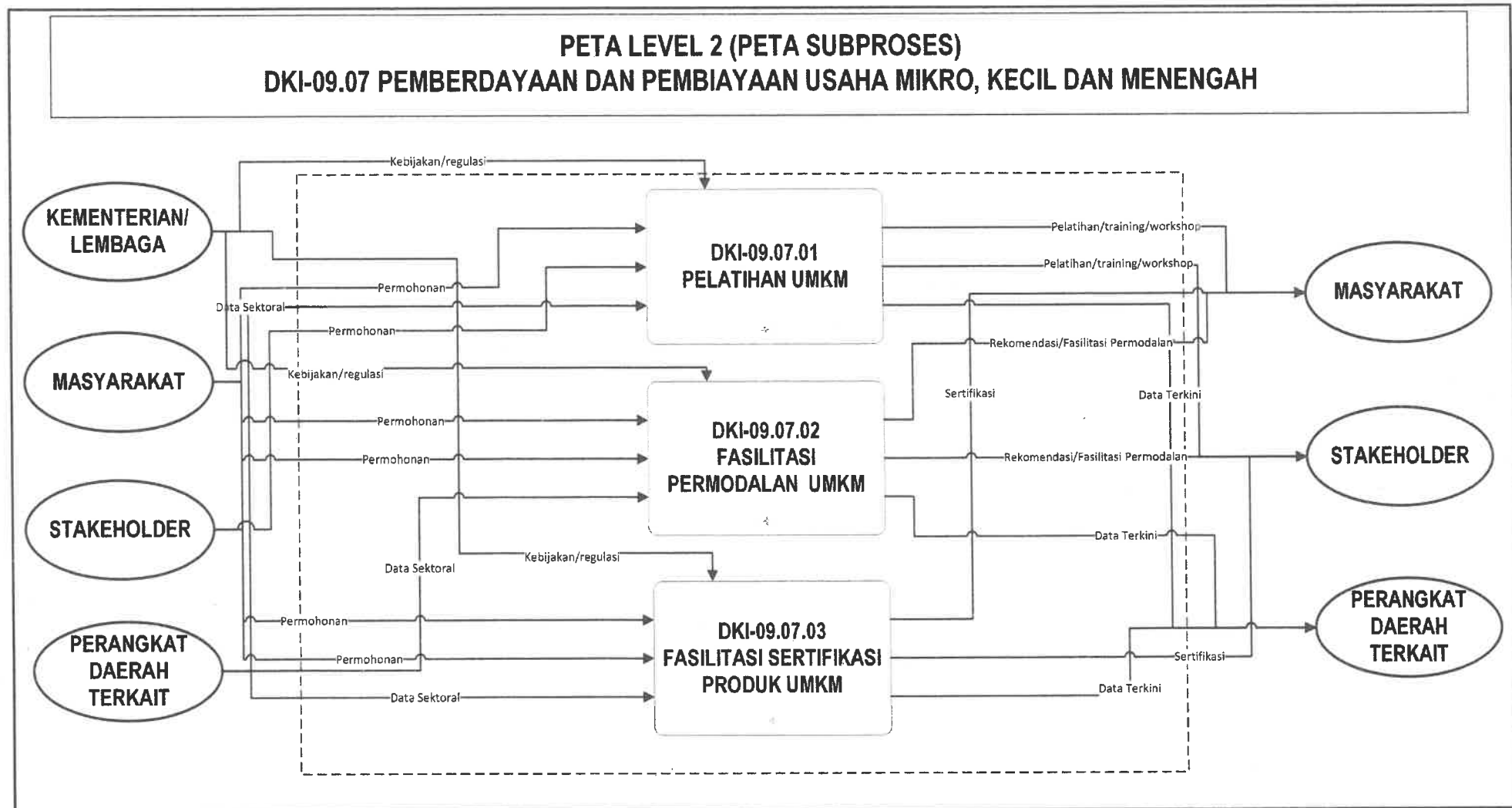
SUBPROSES DKI-09.04 PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



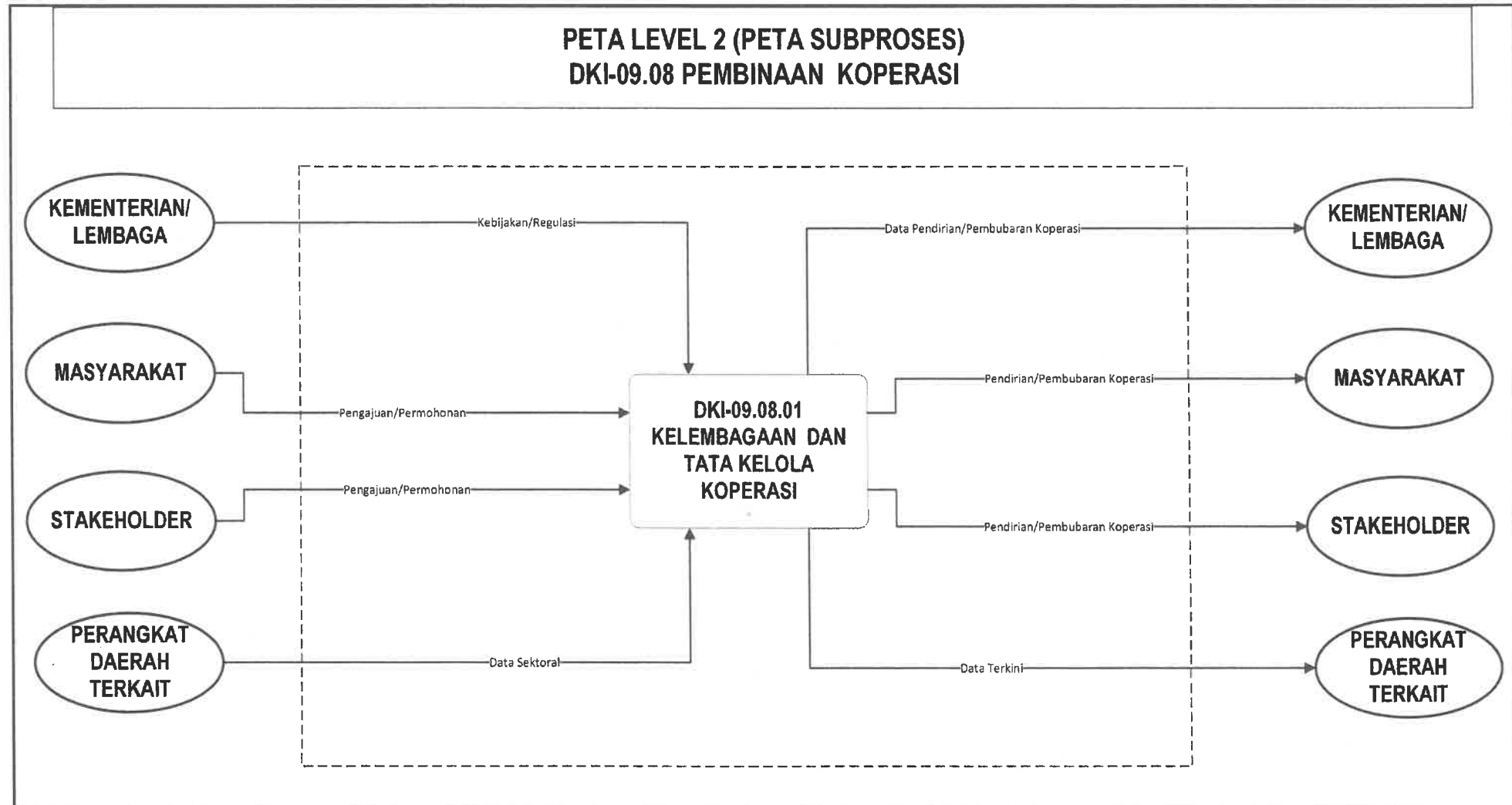
SUBPROSES DKI-09.05 KELEMBAGAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



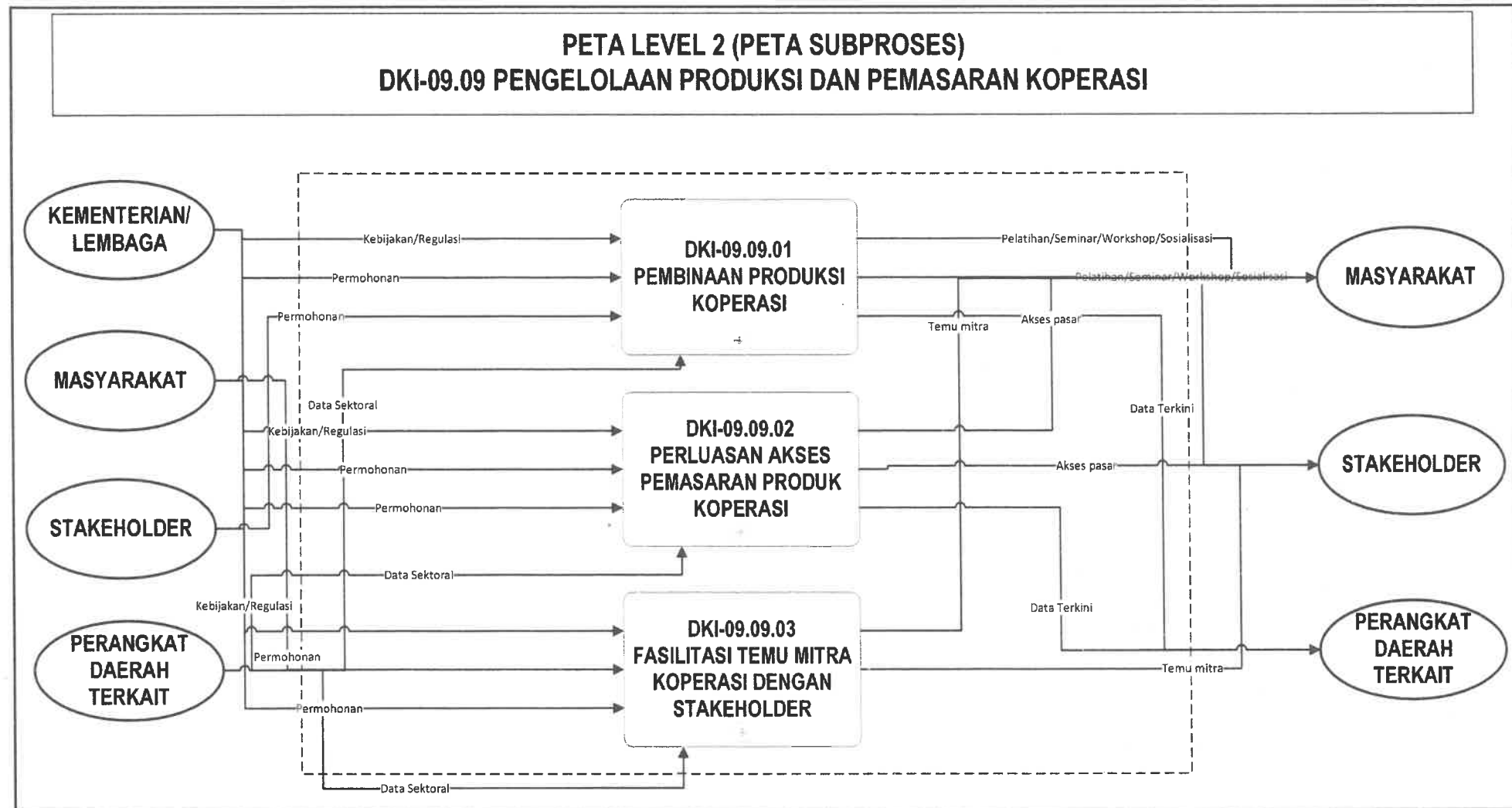
SUBPROSES DKI-09.06 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



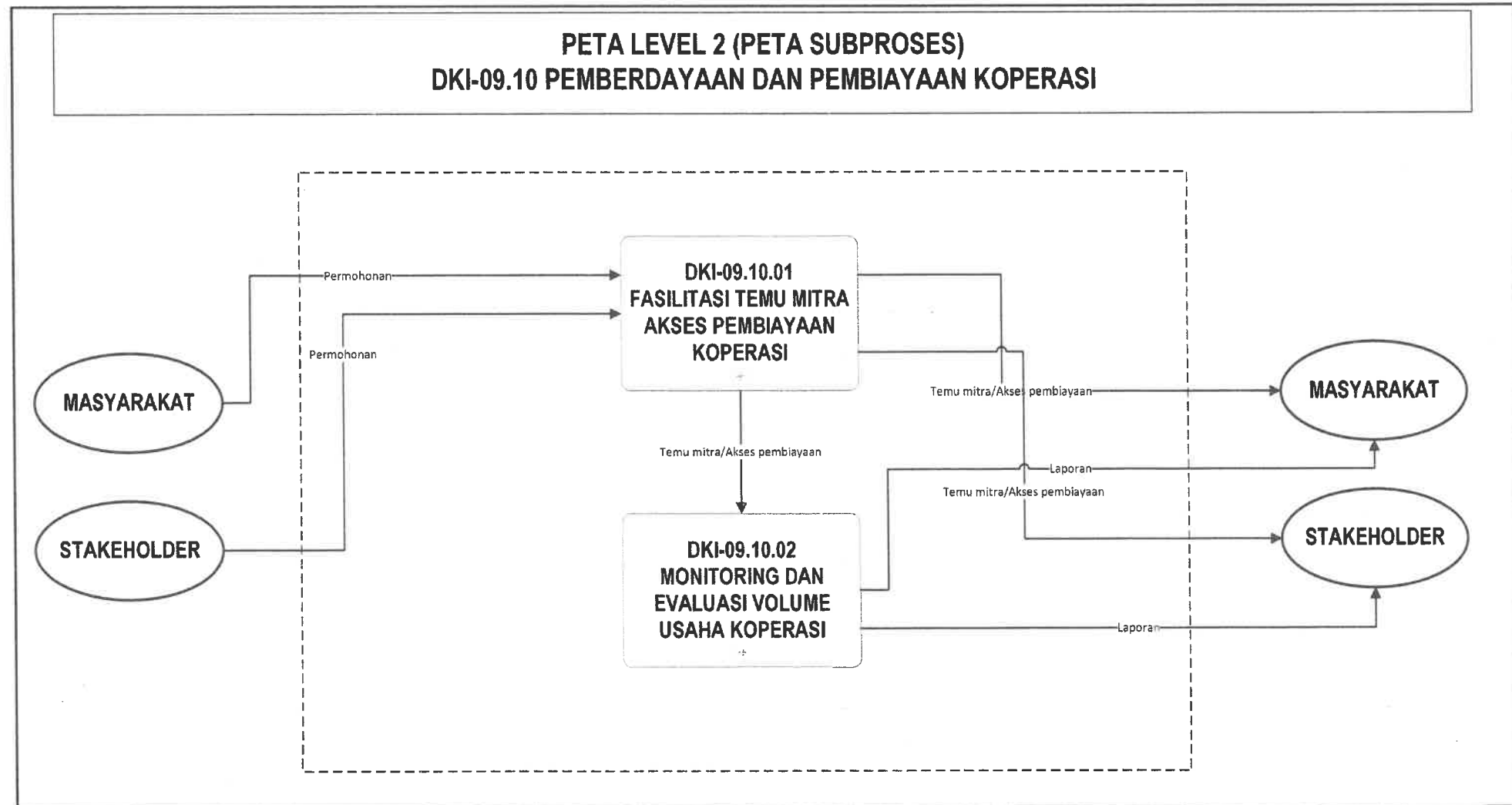
SUBPROSES DKI-09.07 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH



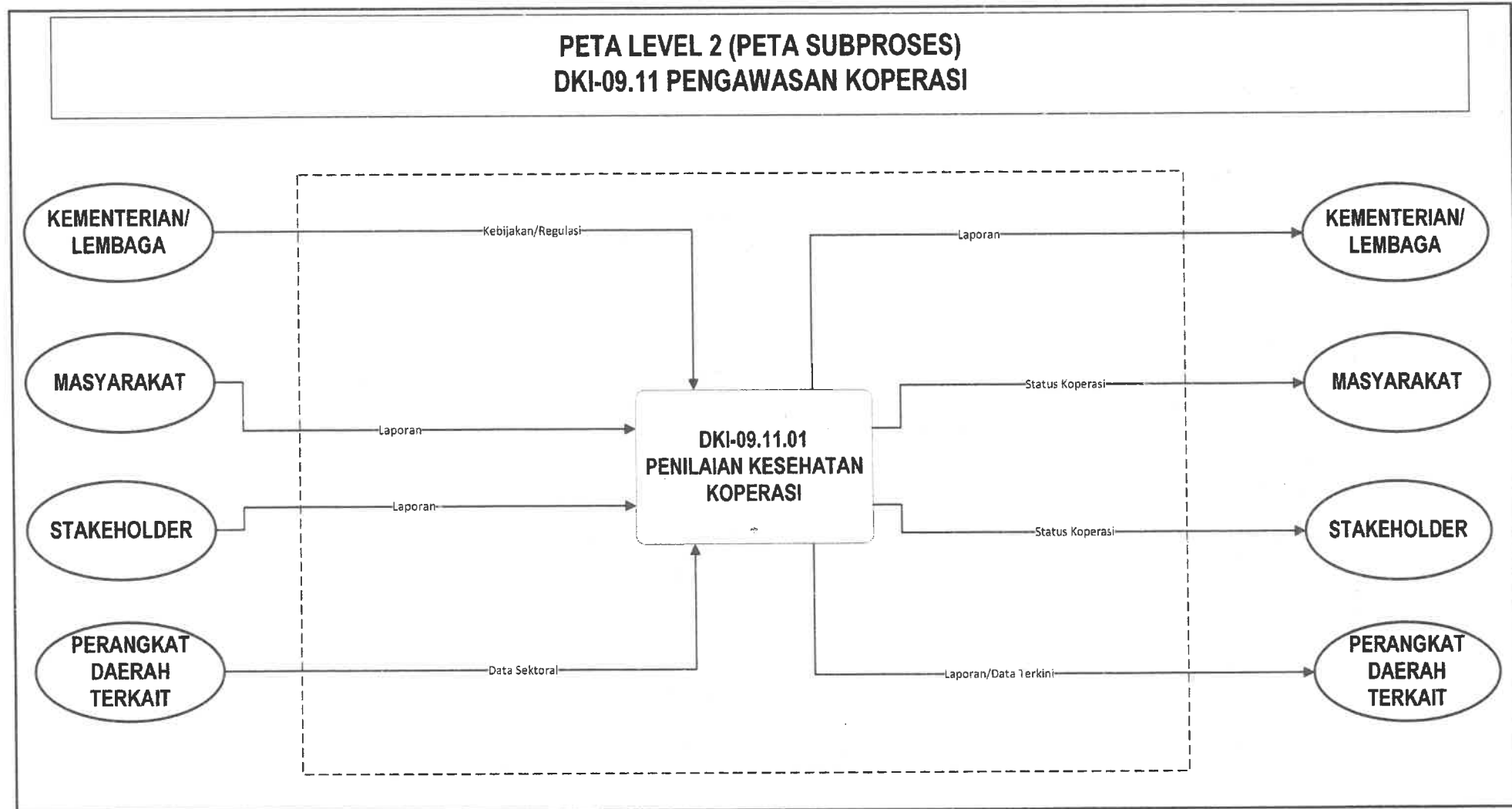
SUBPROSES DKI-09.08 PEMBINAAN KOPERASI



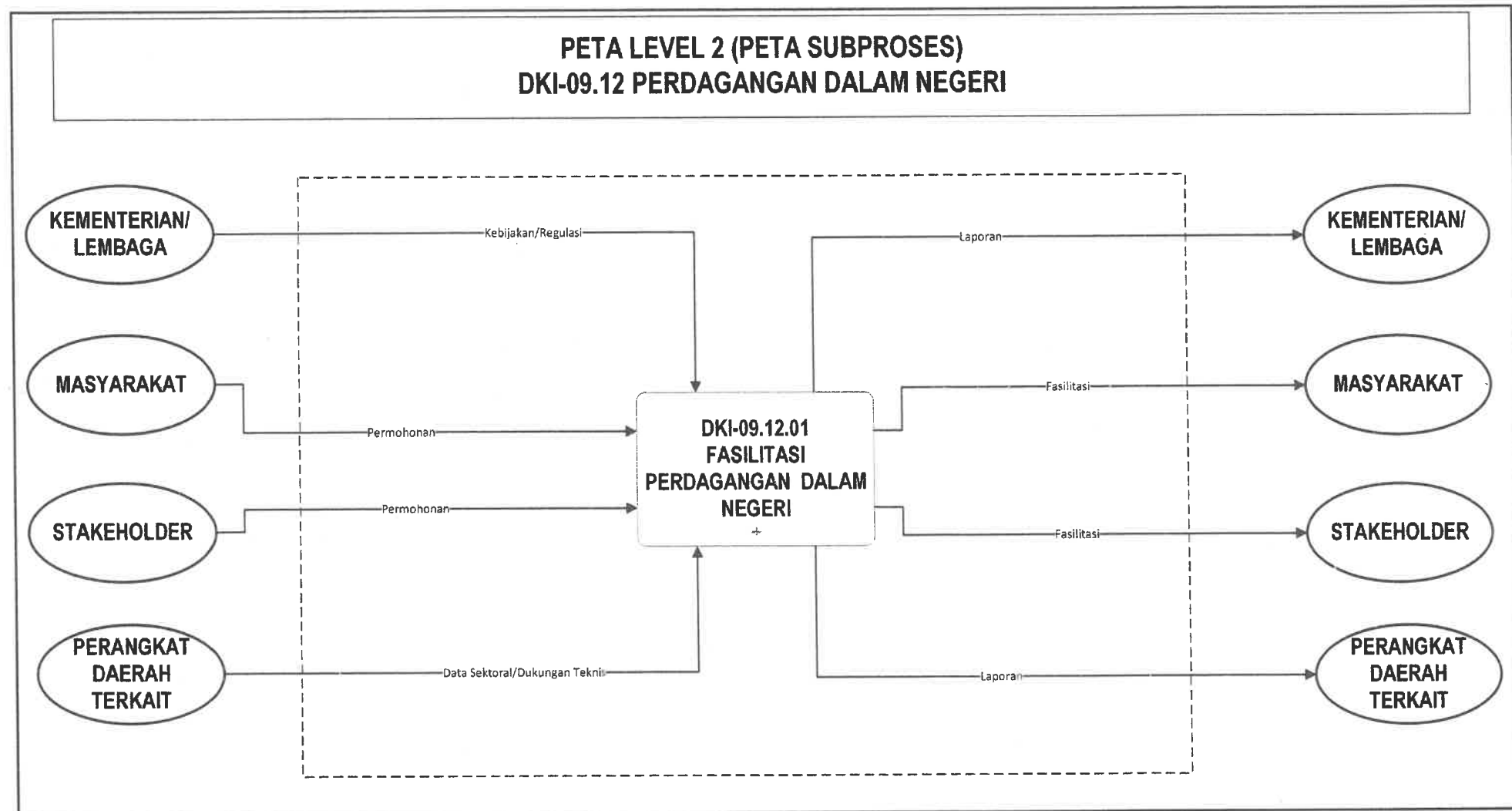
SUBPROSES DKI-09.09 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI



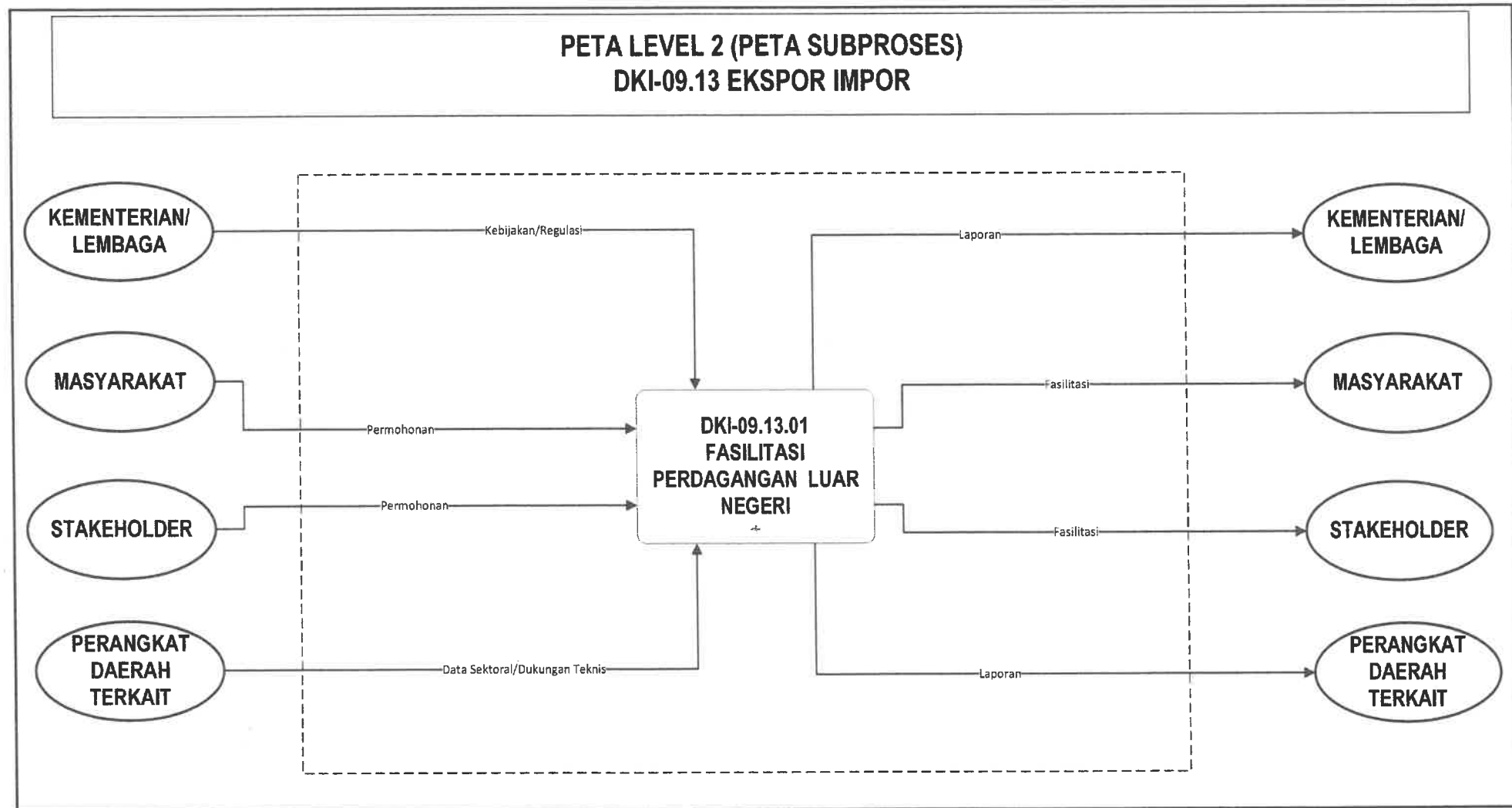
SUBPROSES DKI-09.10 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI



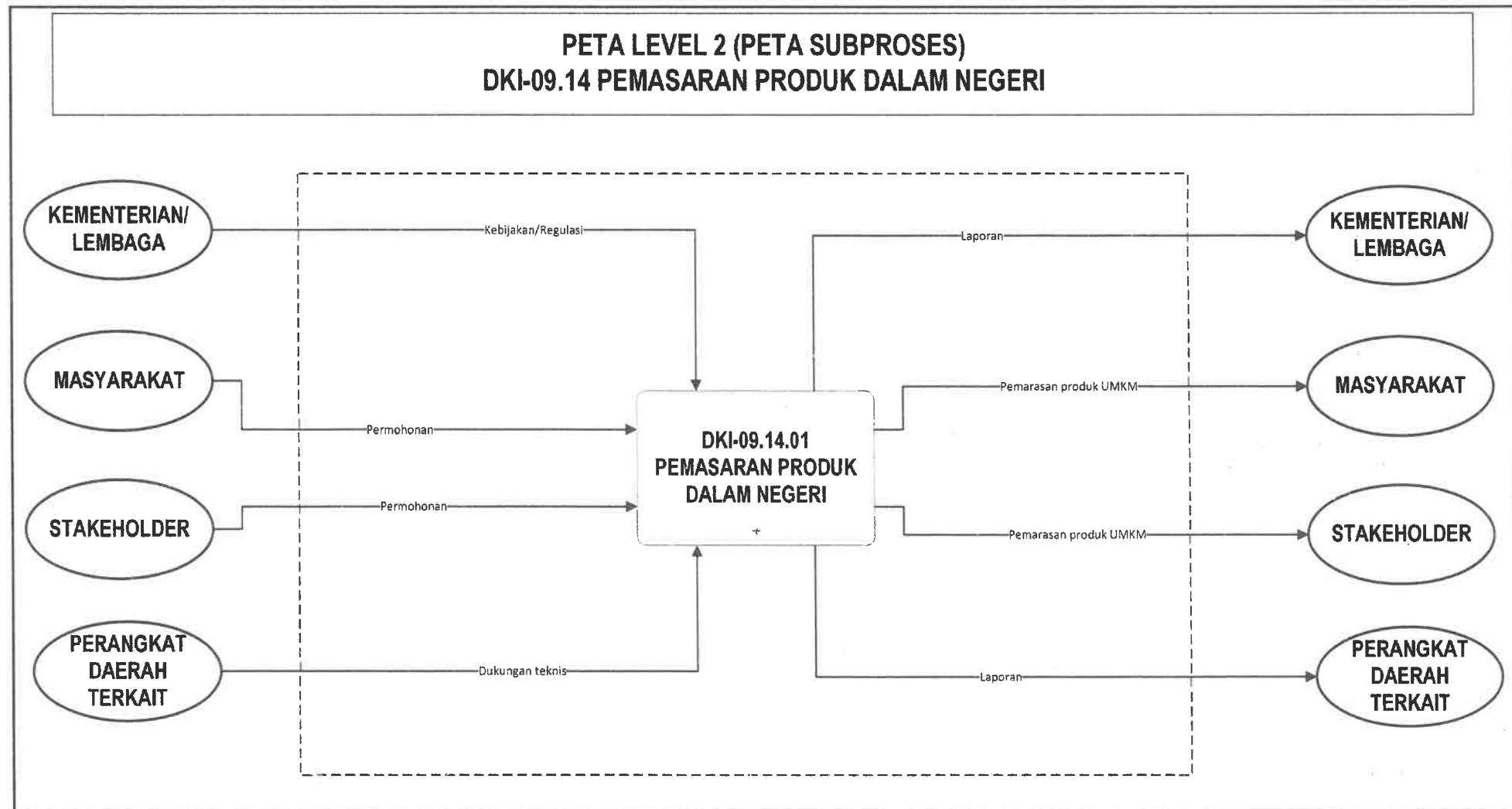
SUBPROSES DKI-09.11 PENGAWASAN KOPERASI



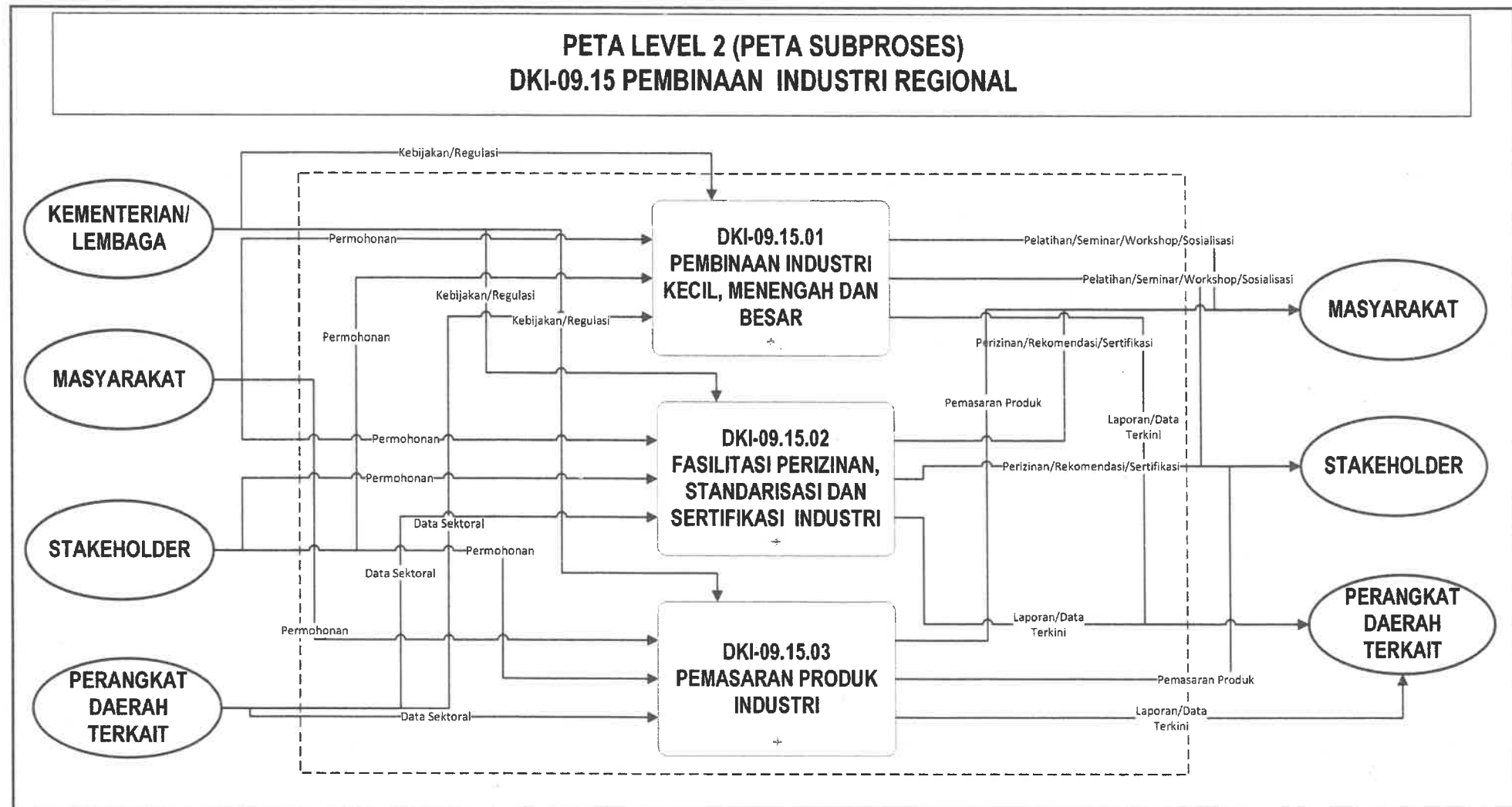
SUBPROSES DKI-09.12 PERDAGANGAN DALAM NEGERI



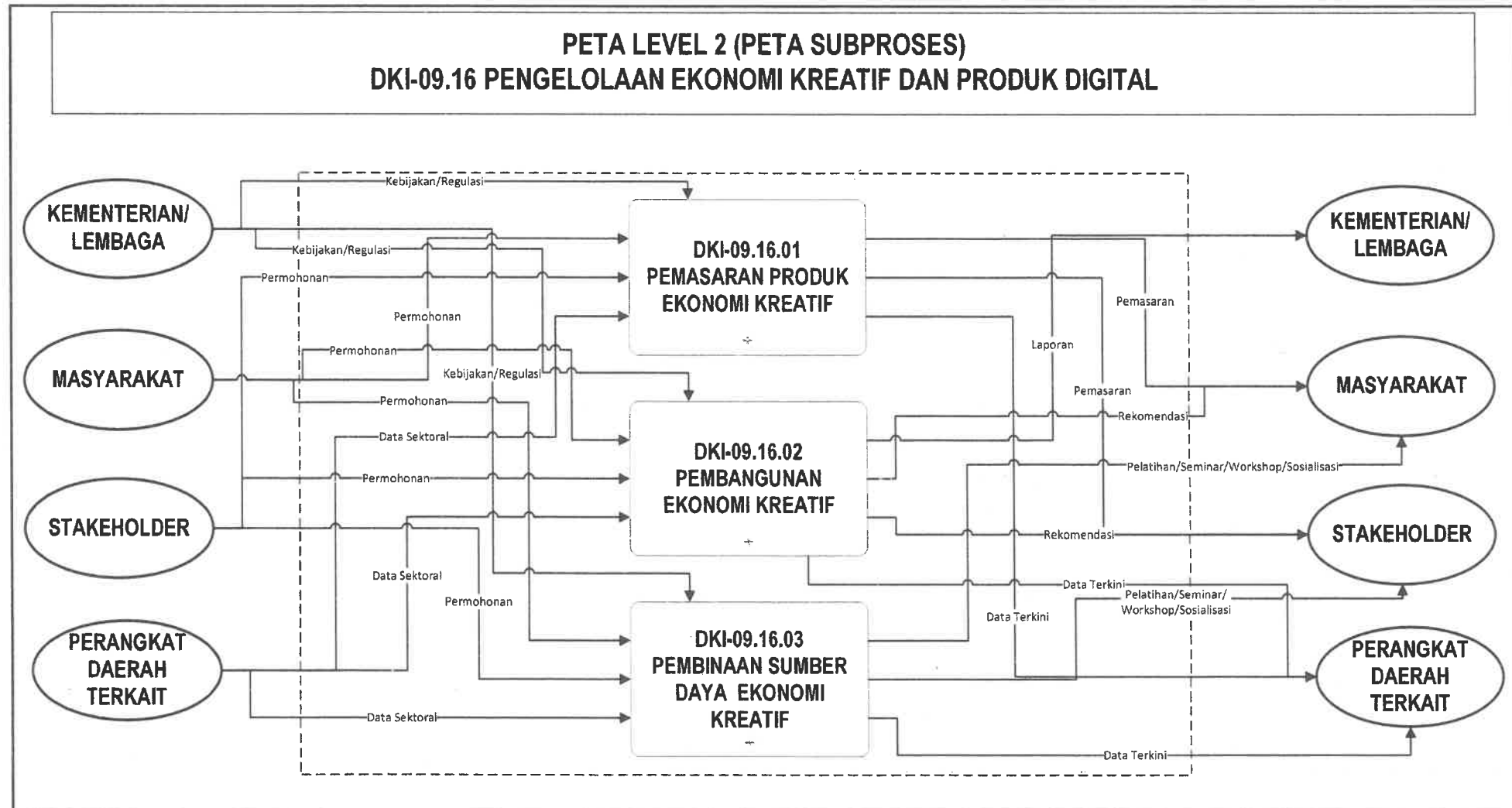
SUBPROSES DKI-09.13 EKSPOR IMPOR



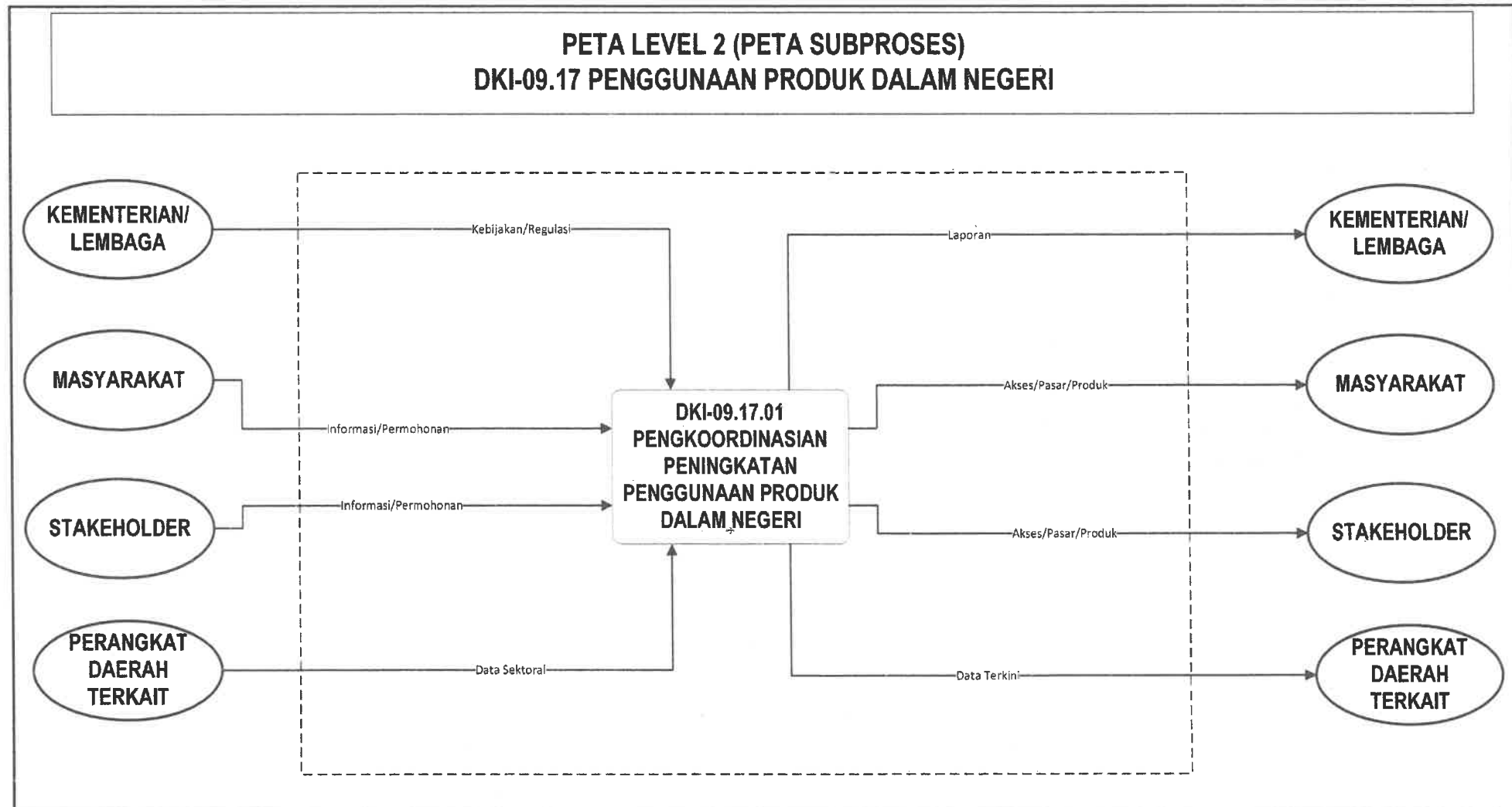
SUBPROSES DKI-09.14 PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI



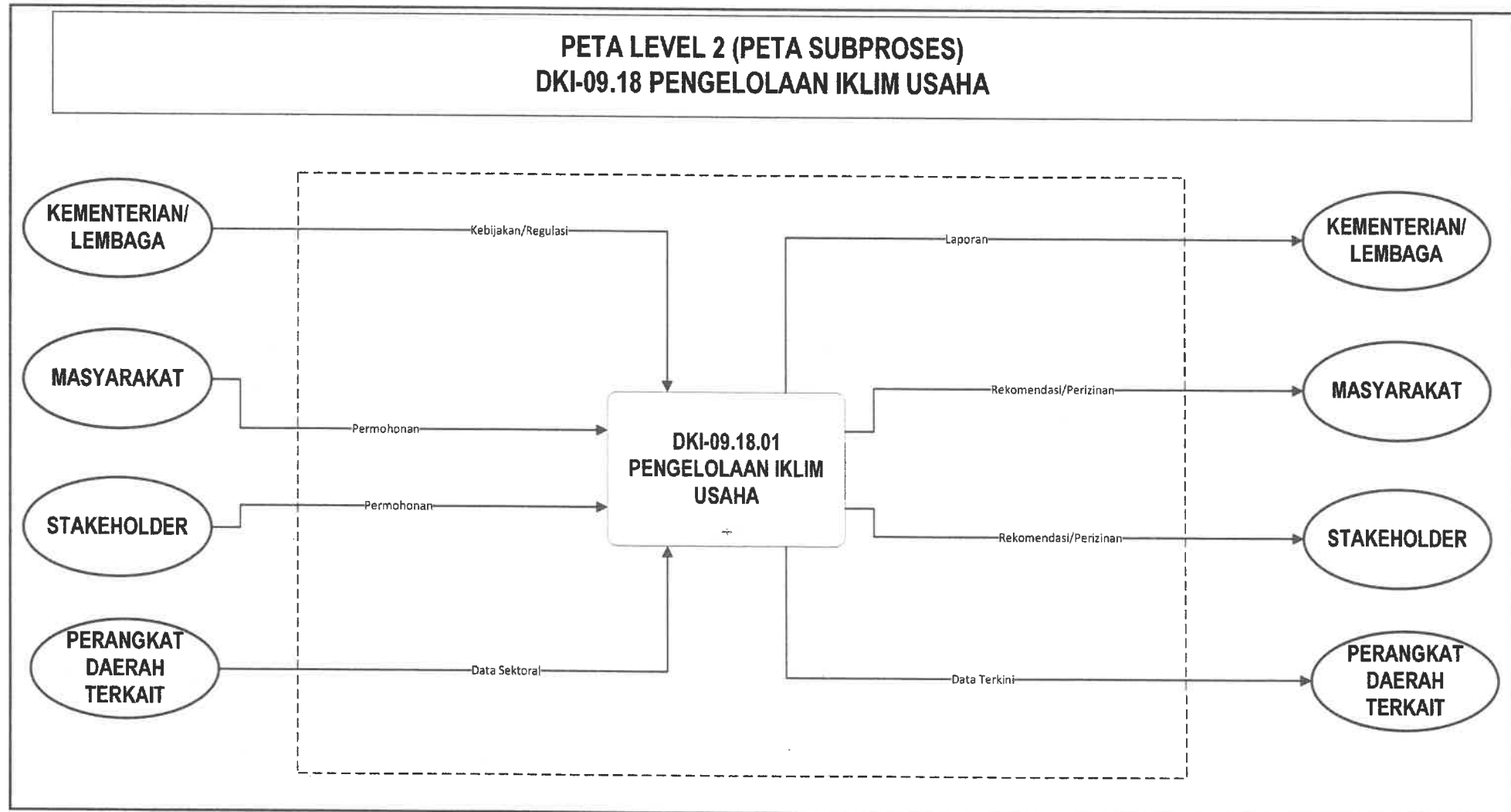
SUBPROSES DKI-09.15 PEMBINAAN IDUSTRI REGIONAL



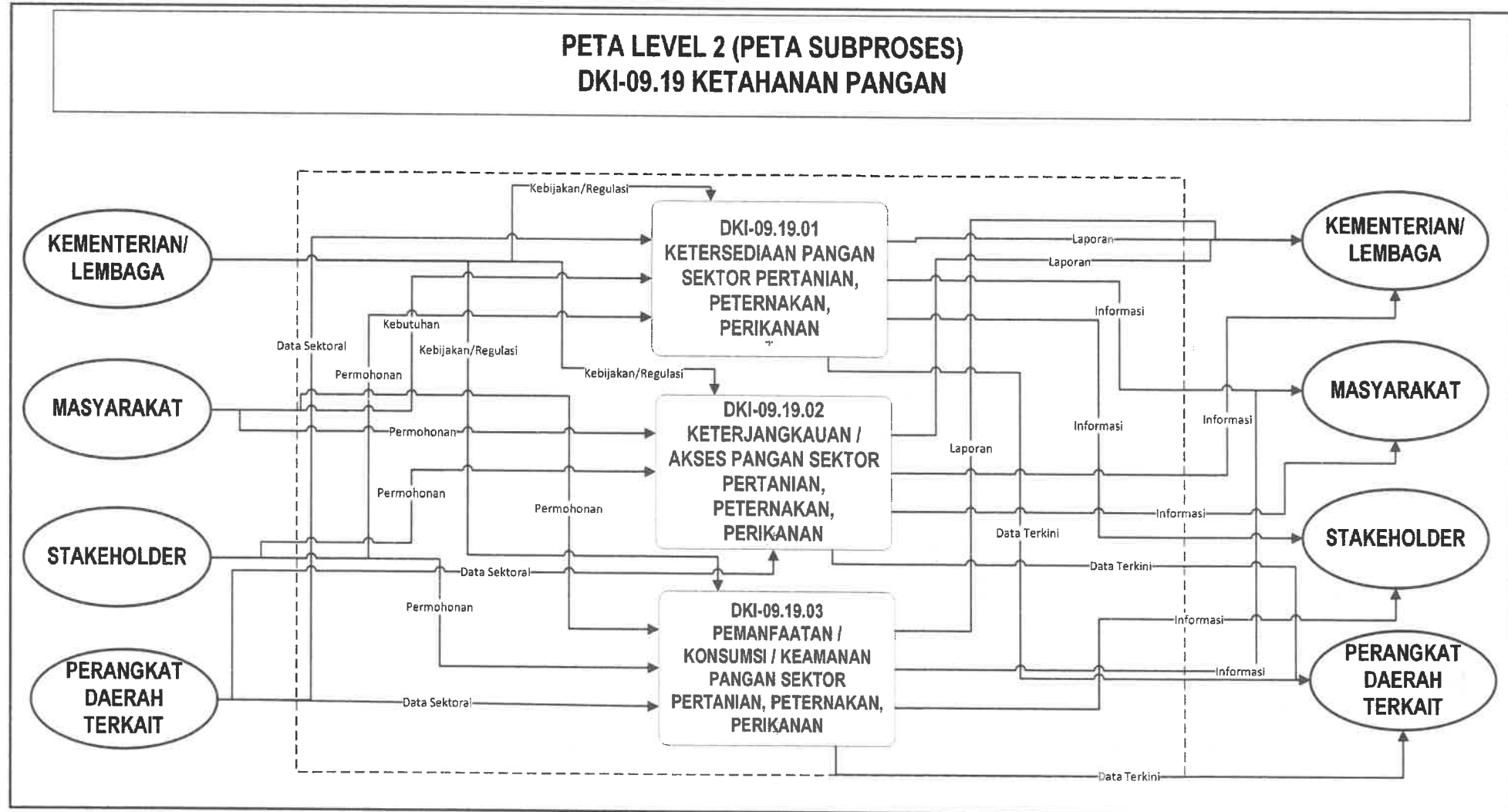
SUBPROSES DKI-09.16 PENGELOLAAN EKONOMI KREATIF DAN PRODUK DIGITAL



SUBPROSES DKI-09.17 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

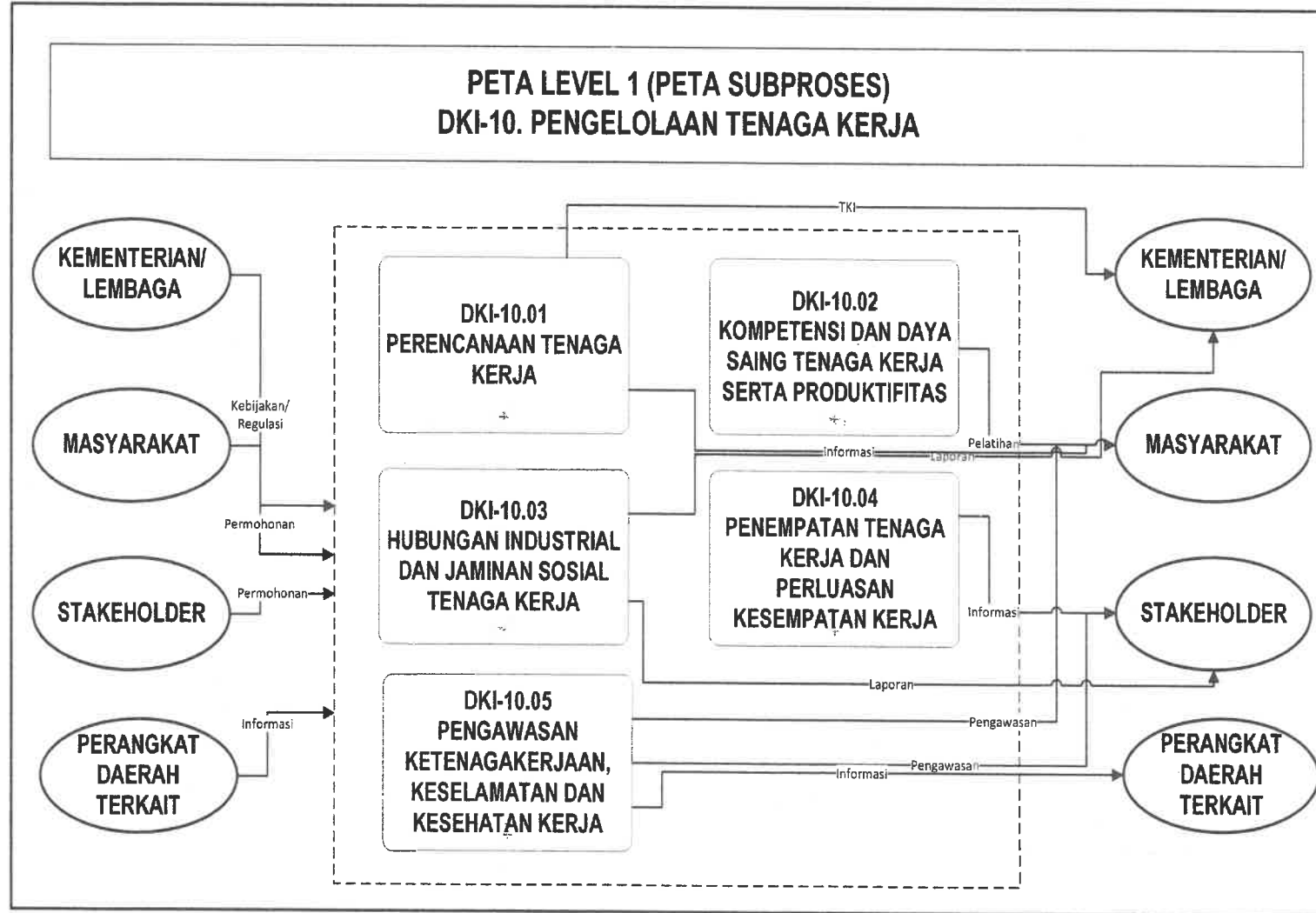


SUBPROSES DKI-09.18 PENGELOLAAN IKLIM USAHA



SUBPROSES DKI-09.19 KETAHANAN PANGAN

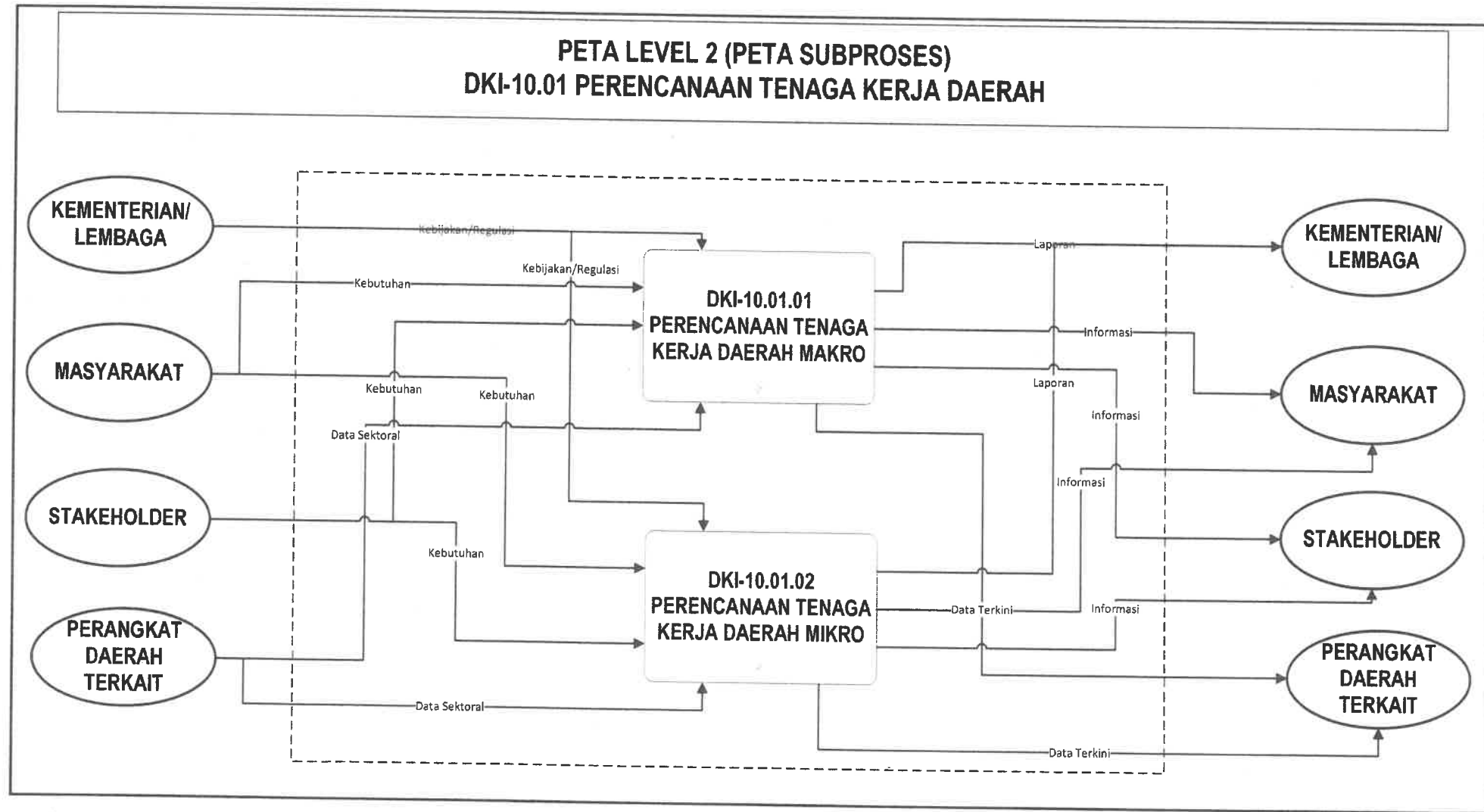
10. DKI-10 PENGELOLAAN TENAGA KERJA



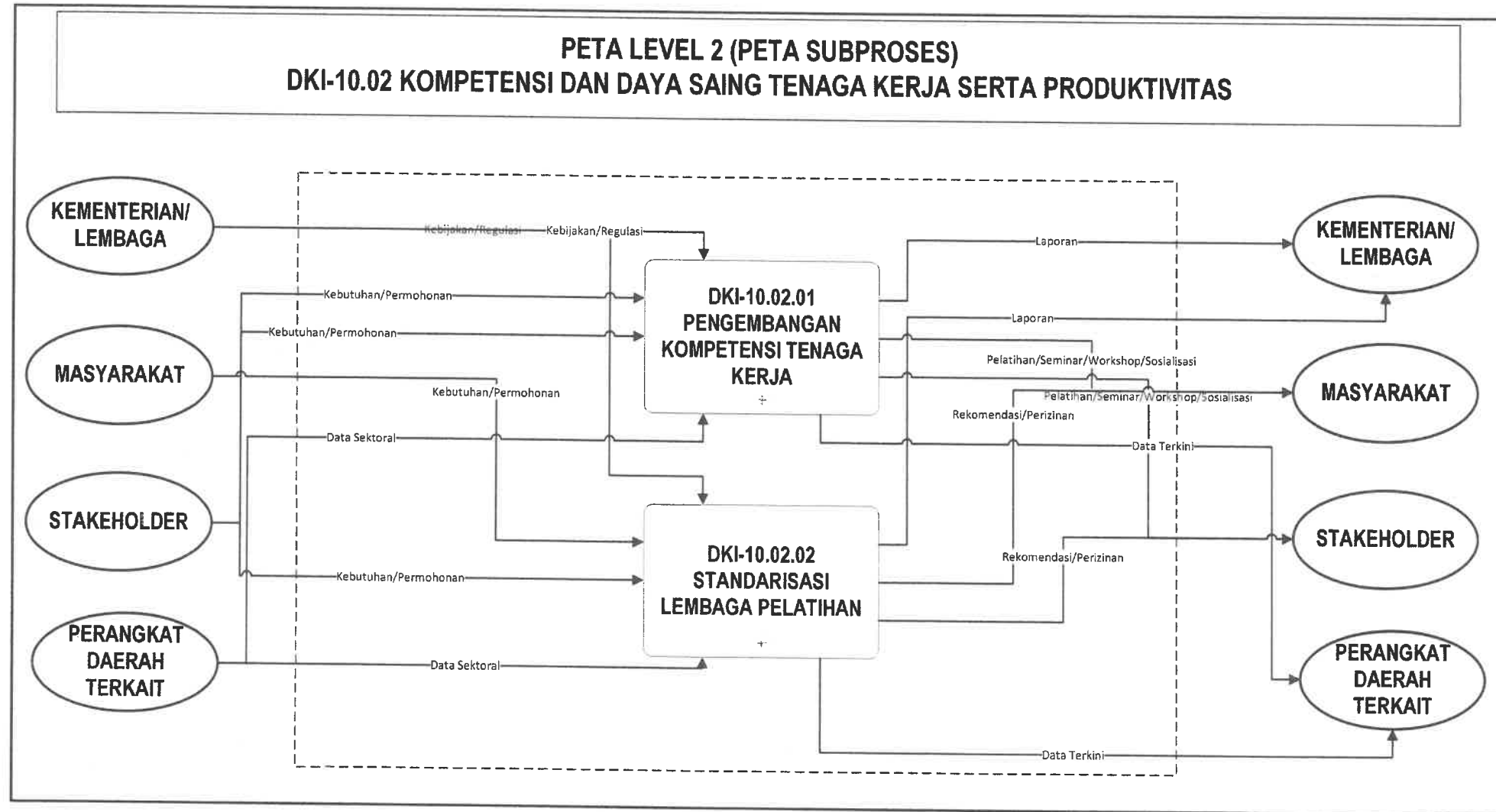
SUBPROSES DKI-10 PENGELOLAAN TENAGA KERJA

Penjelasan:

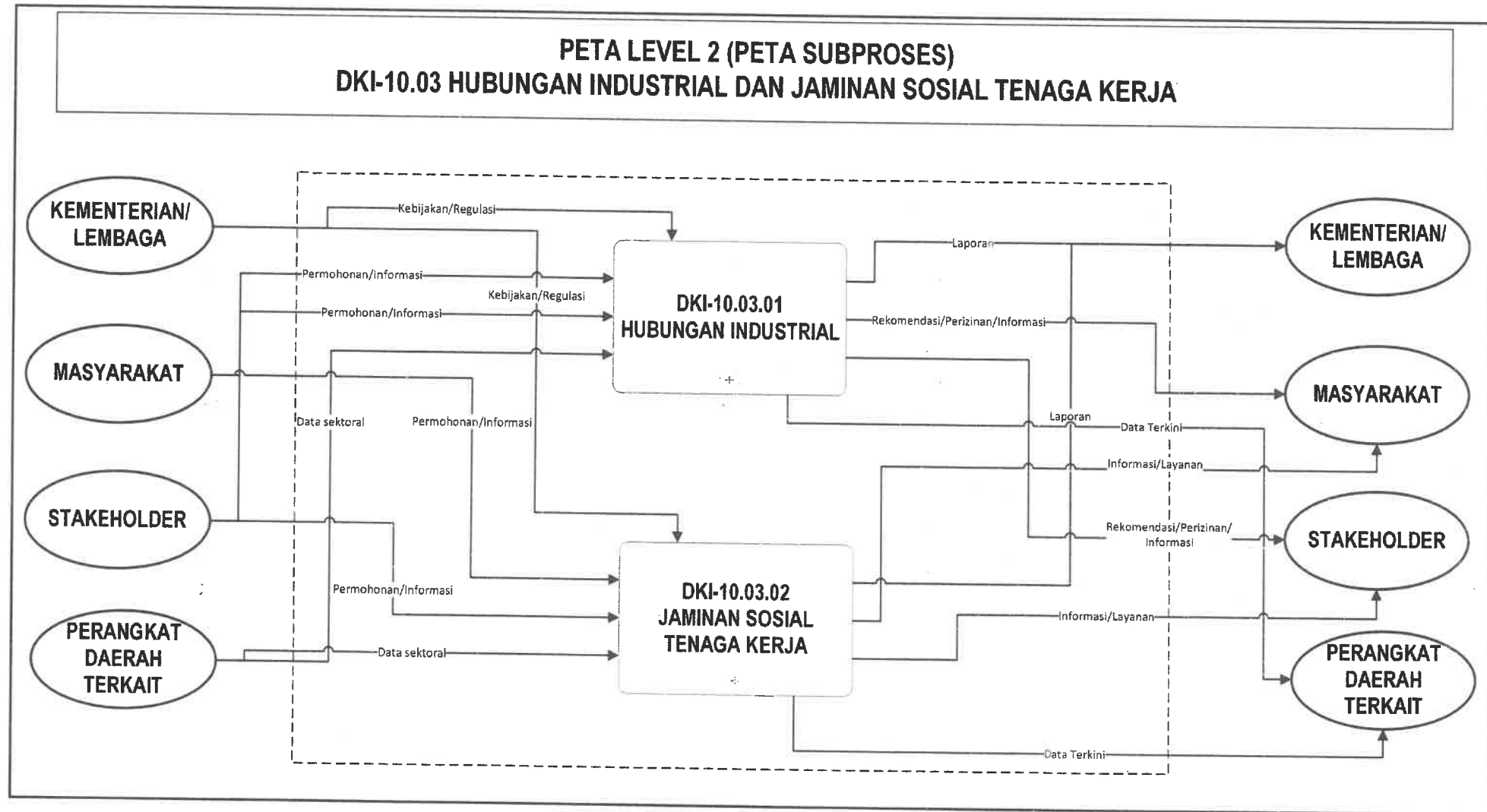
Proses ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan tenaga kerja di lingkungan DKI Jakarta. Pada proses ini beberapa kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan tenaga kerja, kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, pengelolaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja.



SUBPROSES DKI-10.01 PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH



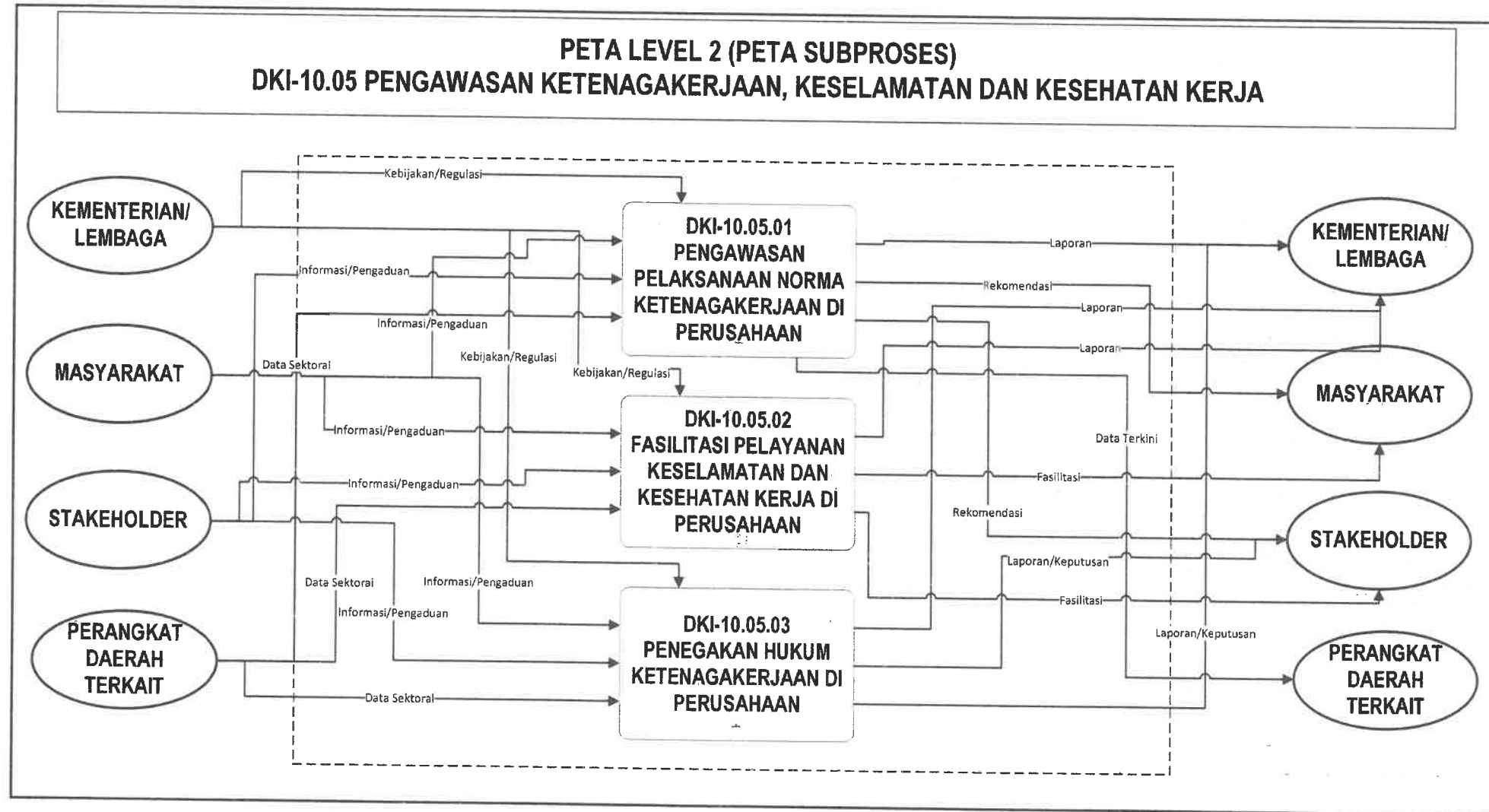
SUBPROSES DKI-10.02 KOMPETENSI DAN DAYA SAING TENAGA KERJA SERTA PRODUKTIVITAS



SUBPROSES DKI-10.03 HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

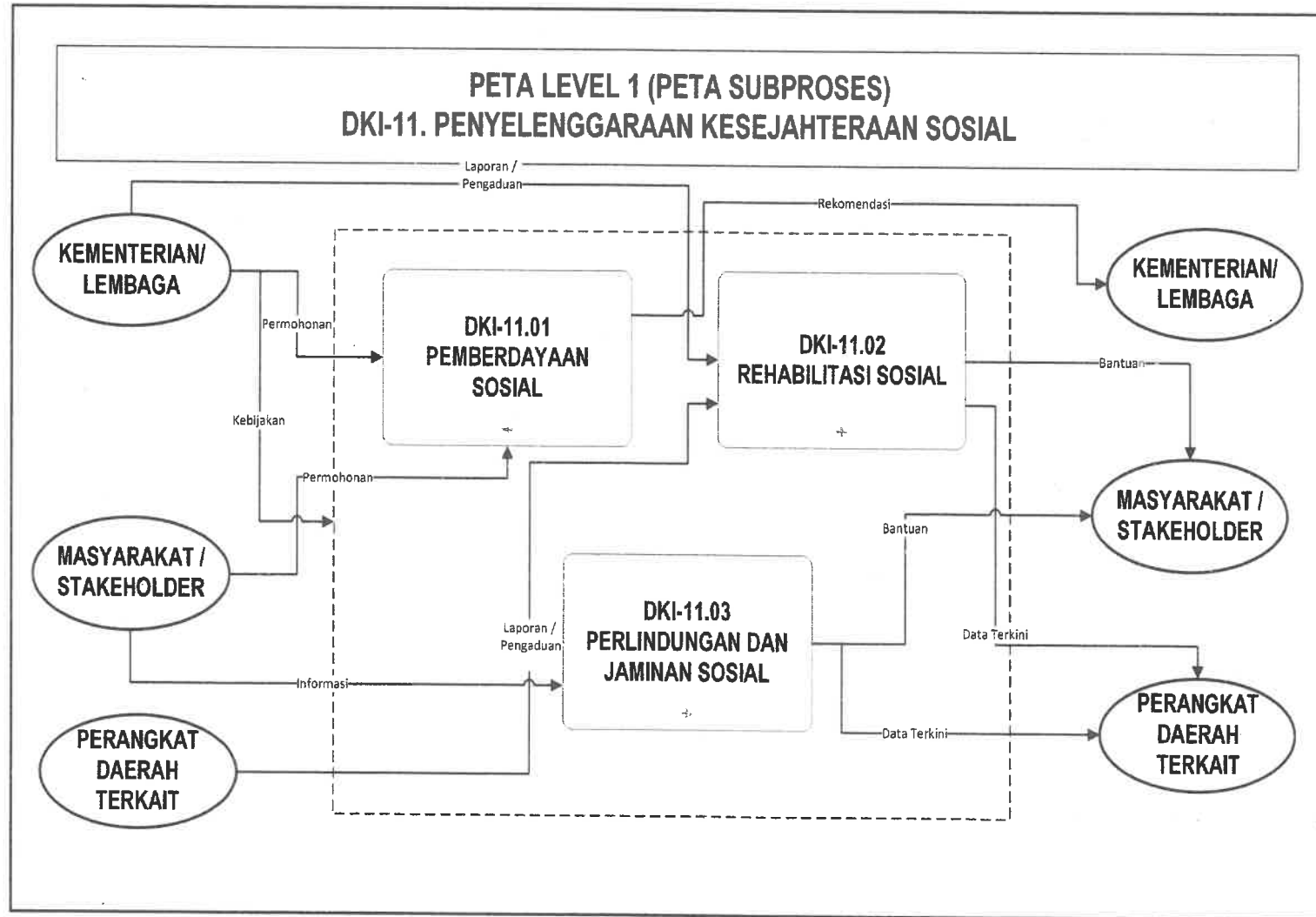


SUBPROSES DKI-10.04 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA



SUBPROSES DKI-10.05 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

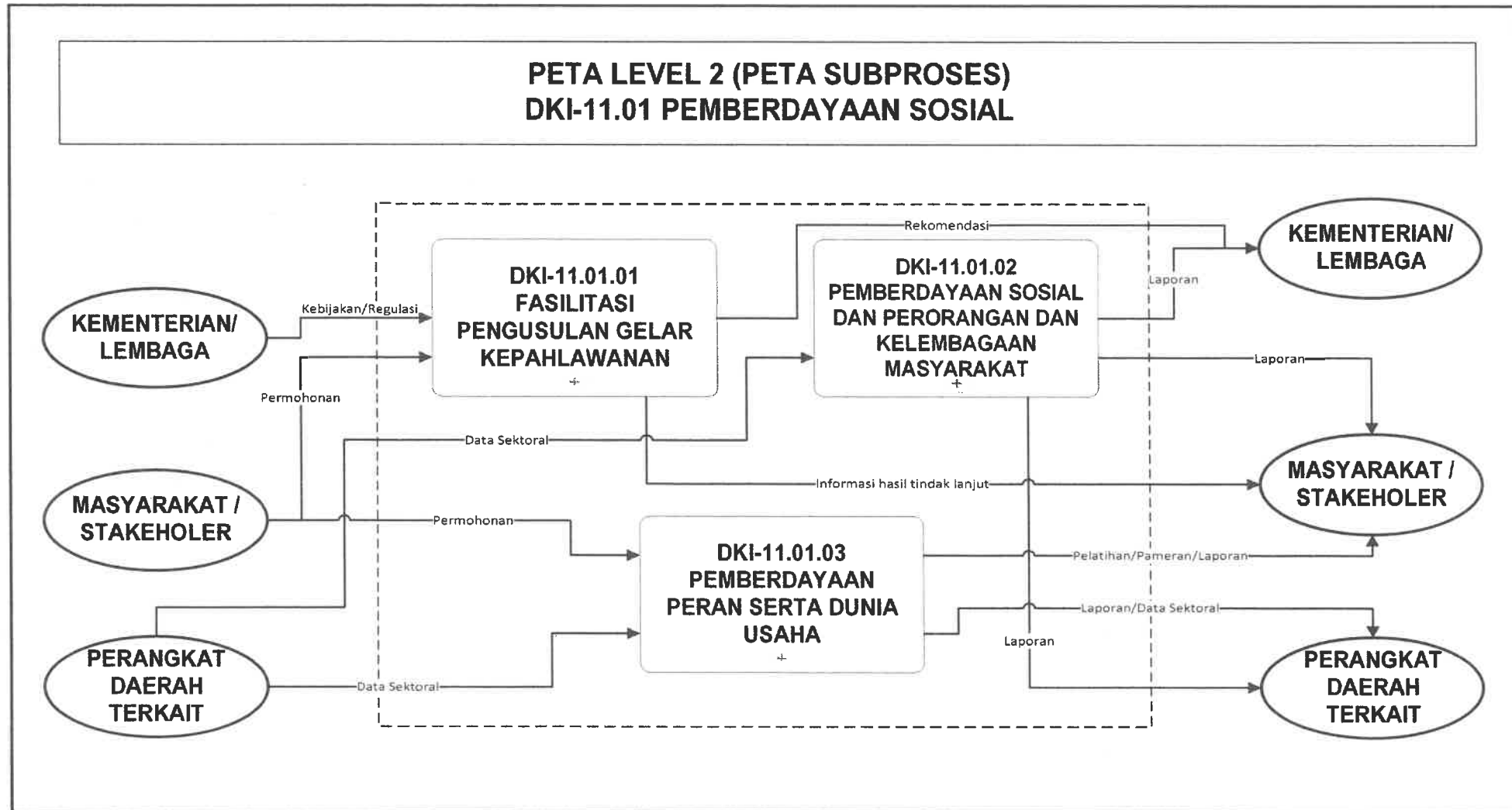
11. DKI-11 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



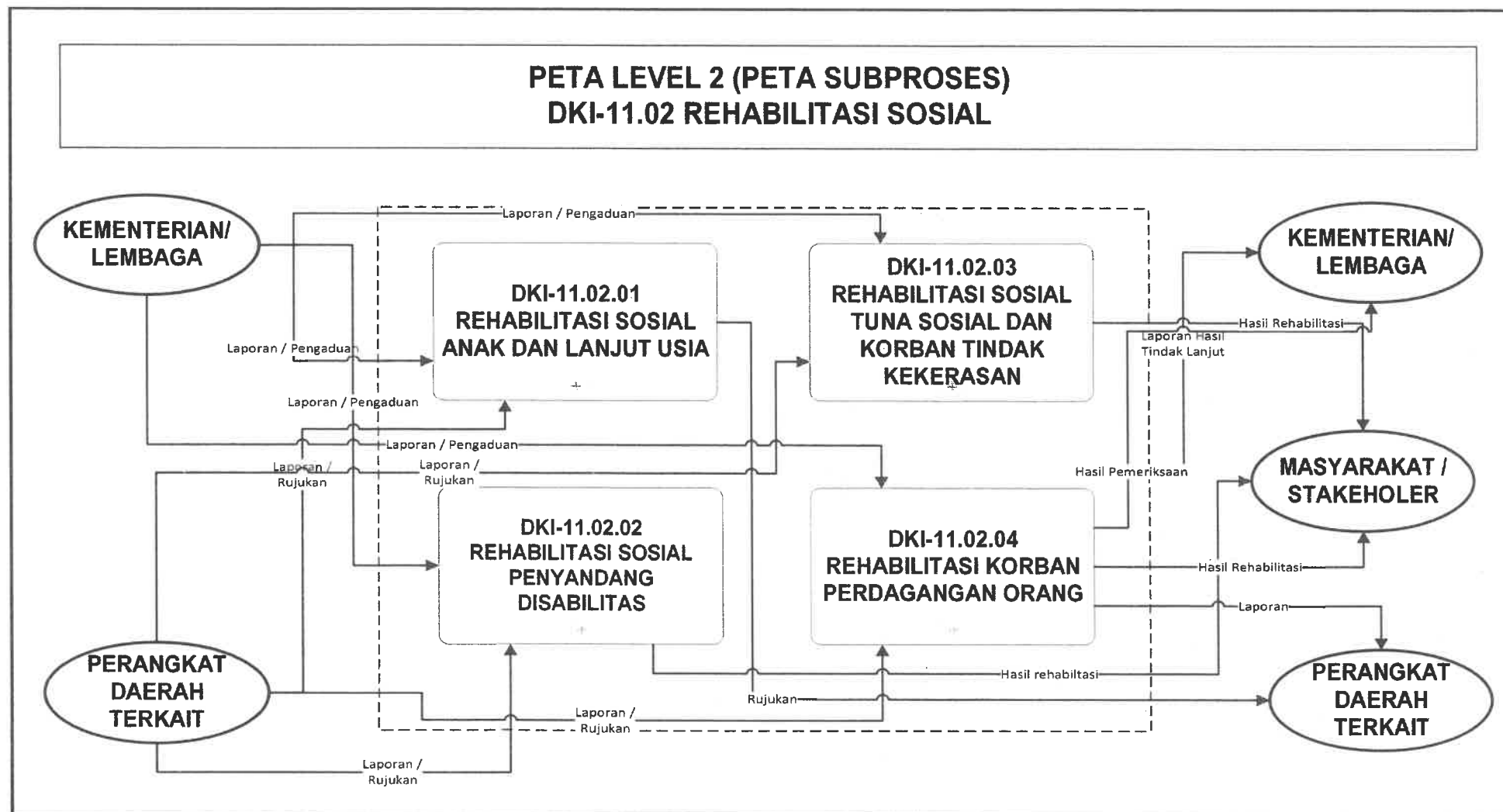
SUBPROSES DKI-11 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penjelasan:

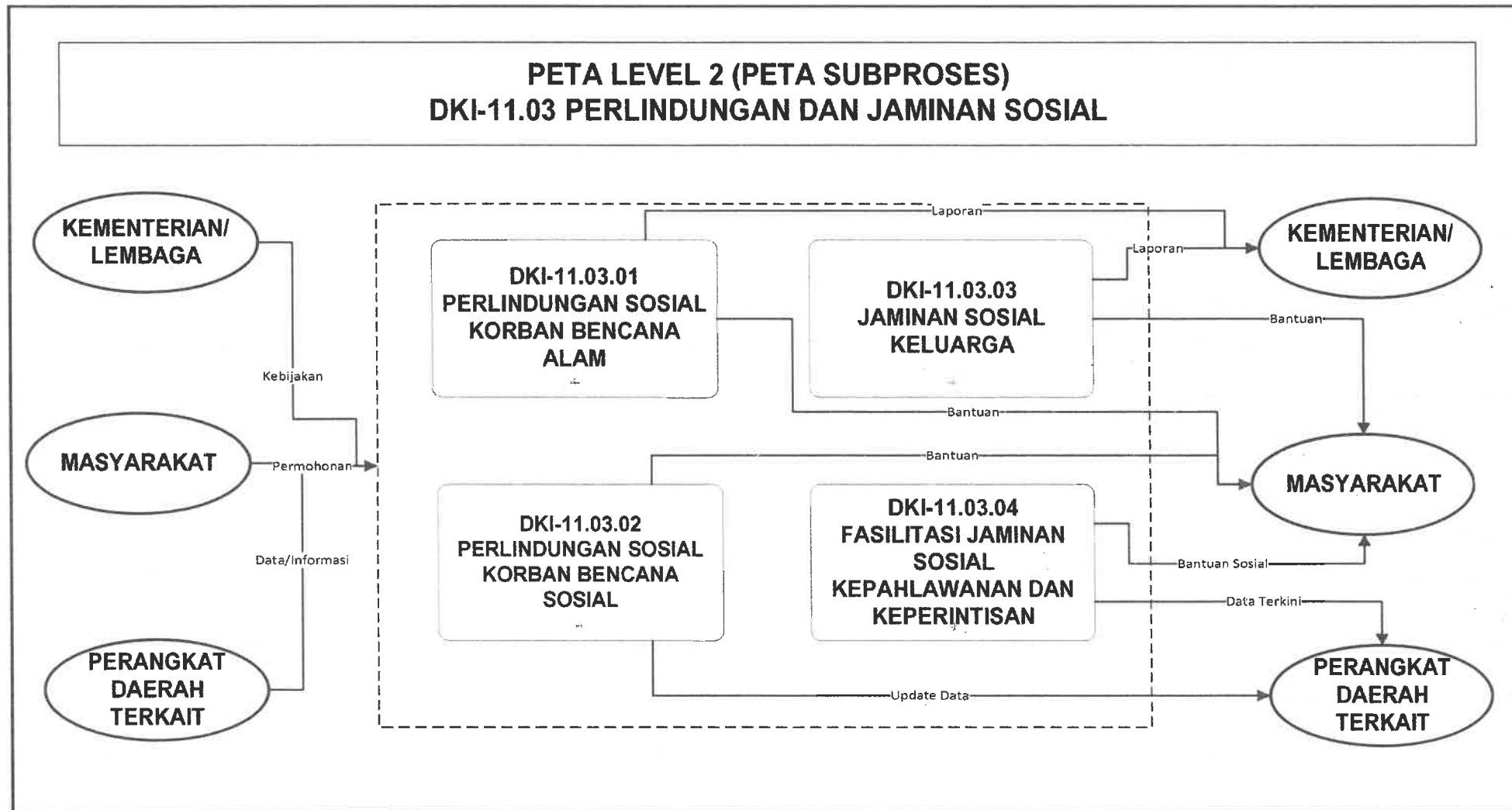
Proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk pelayanan sosial bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jakarta yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga DKI Jakarta.



SUBPROSES BISNIS DKI-11.01 PEMBERDAYAAN SOSIAL

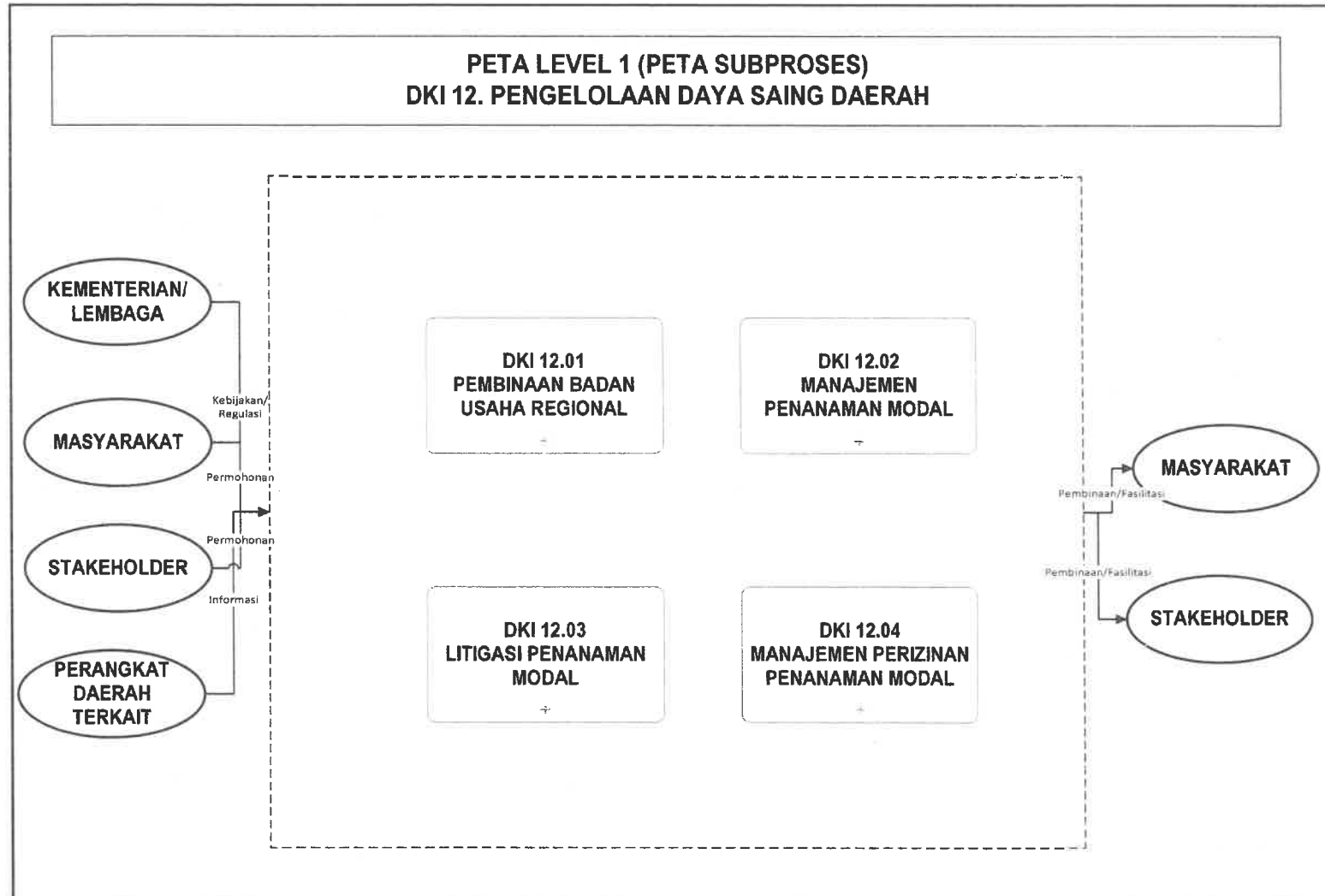


SUBPROSES DKI-11.02 REHABILITASI SOSIAL



SUBPROSES DK1-11.03 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

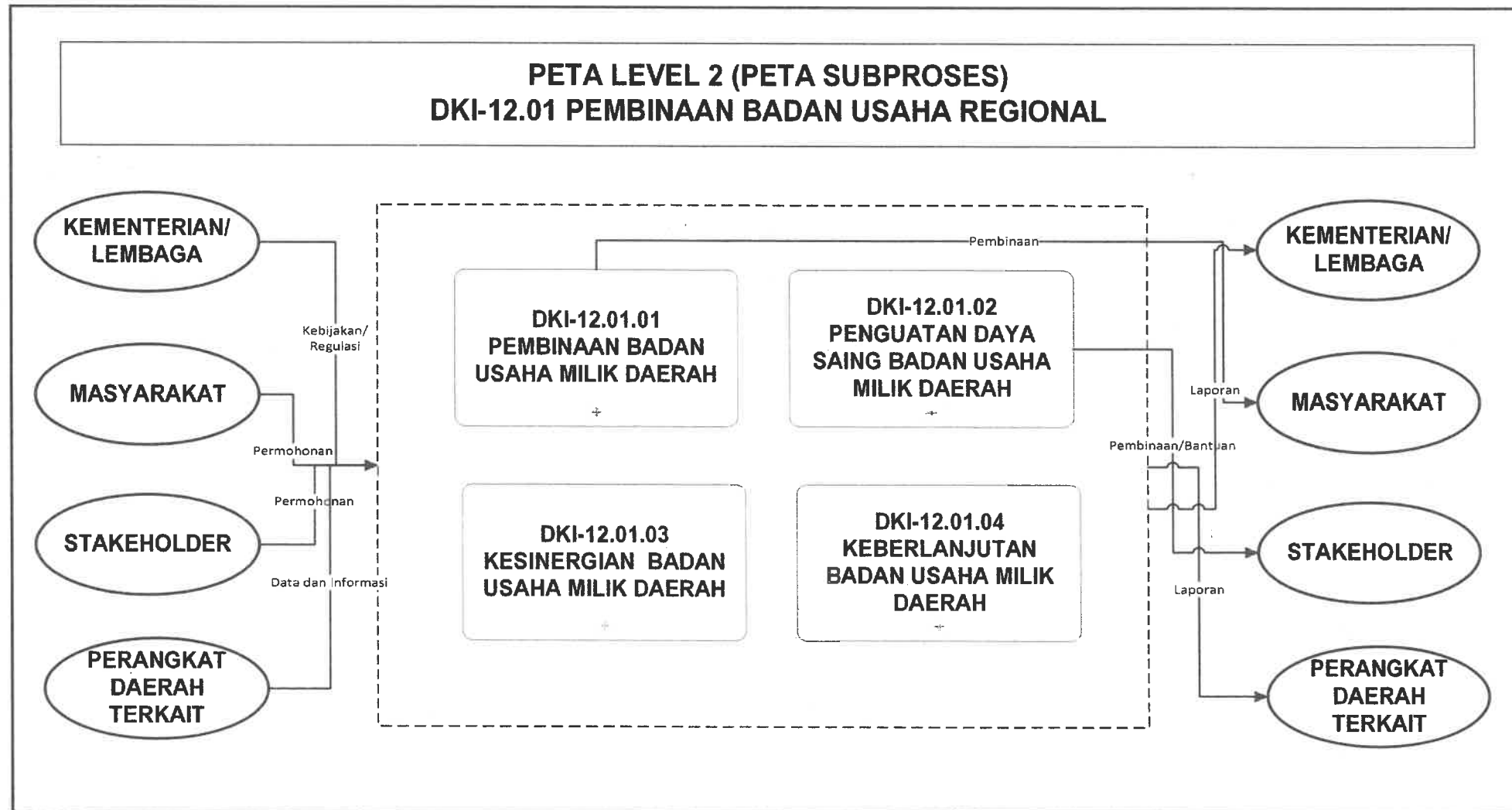
12. DKI-12 PENGELOLAAN DAYA SAING DAERAH



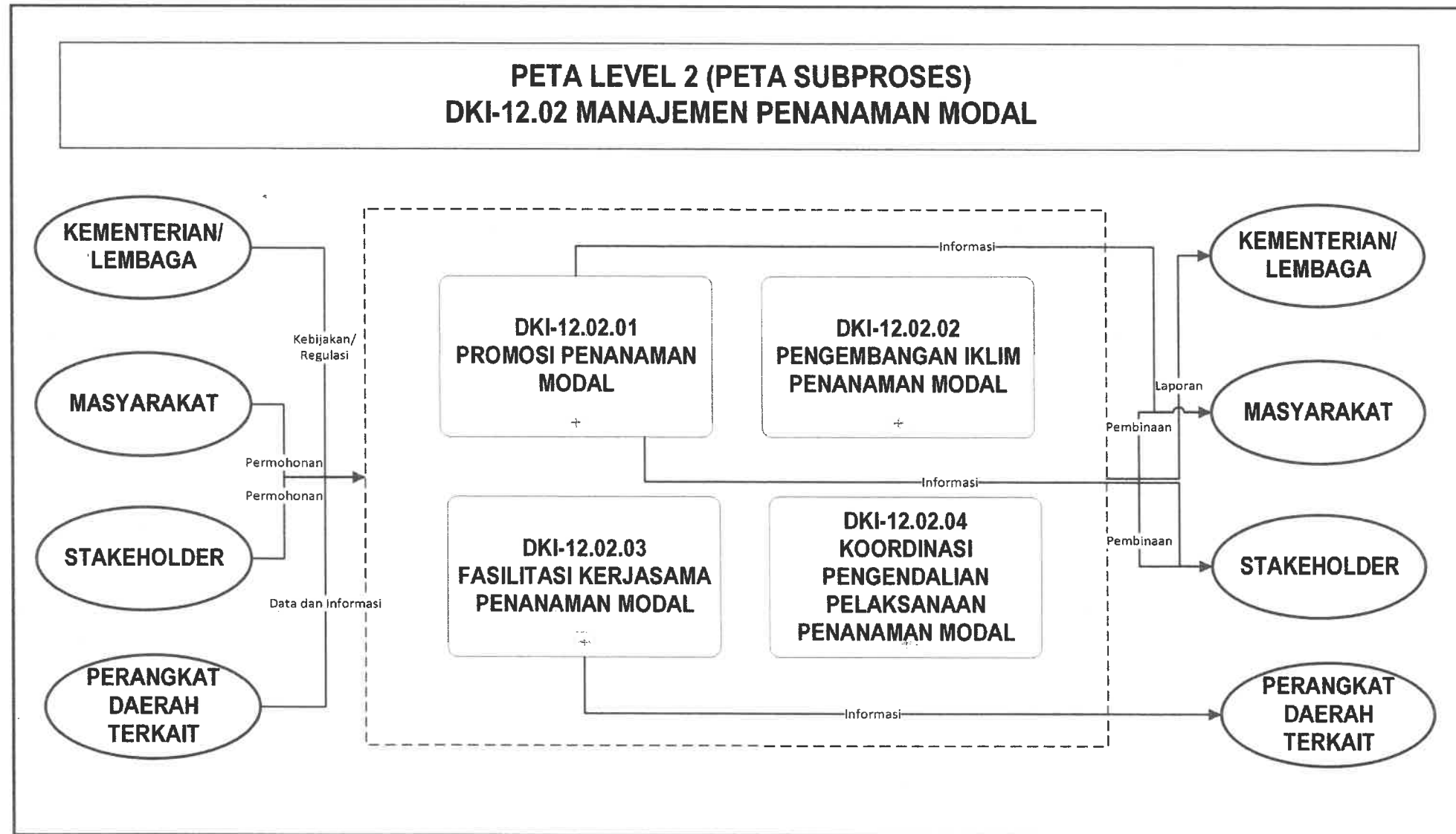
SUBPROSES DKI-12 PENGELOLAAN DAYA SAING DAERAH

Penjelasan:

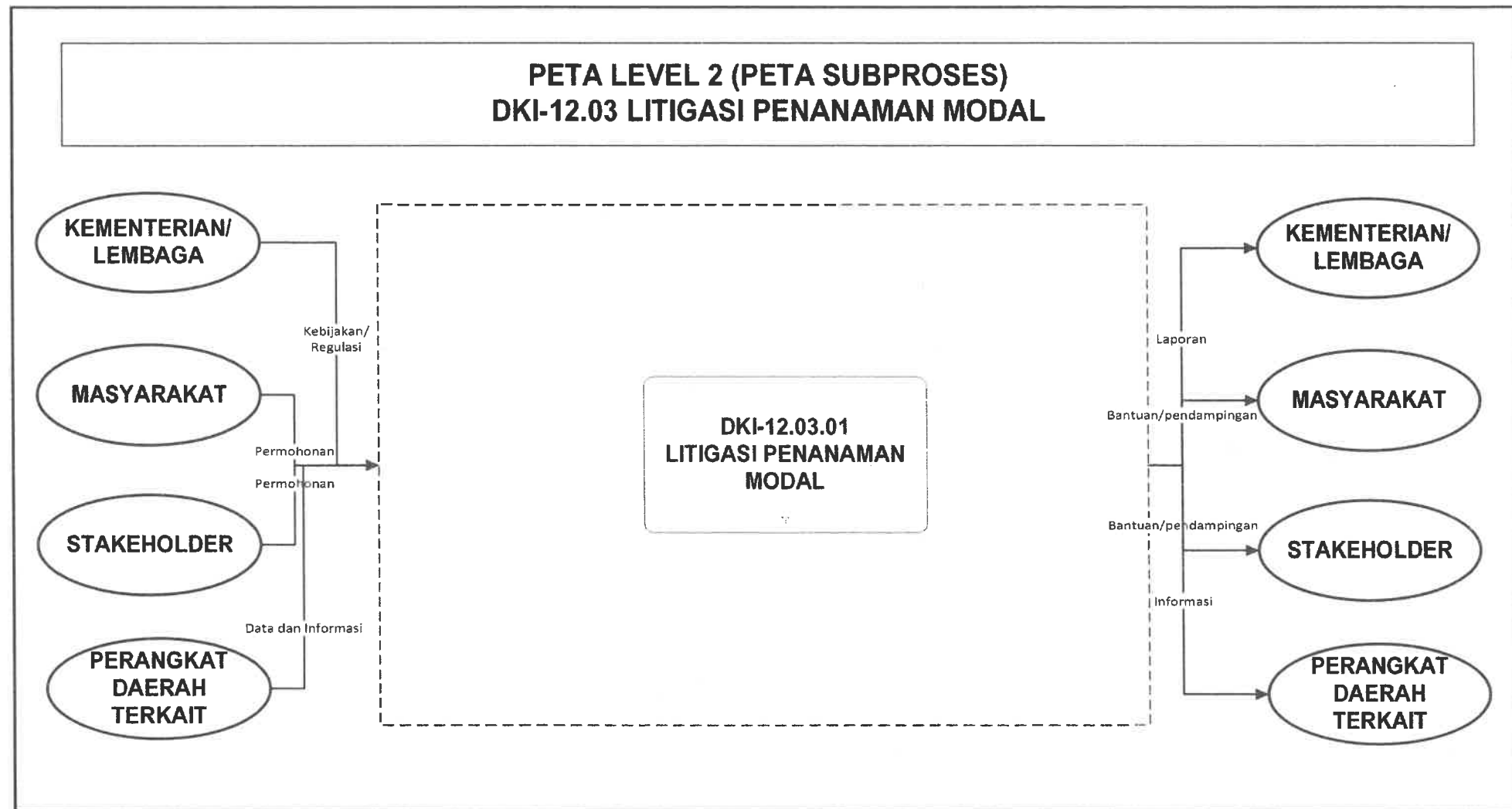
Proses pengelolaan daya saing daerah adalah proses yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta yang meliputi pembinaan badan usaha regional, manajemen penanaman modal, litigasi penanaman modal dan manajemen perizinan penanaman modal.



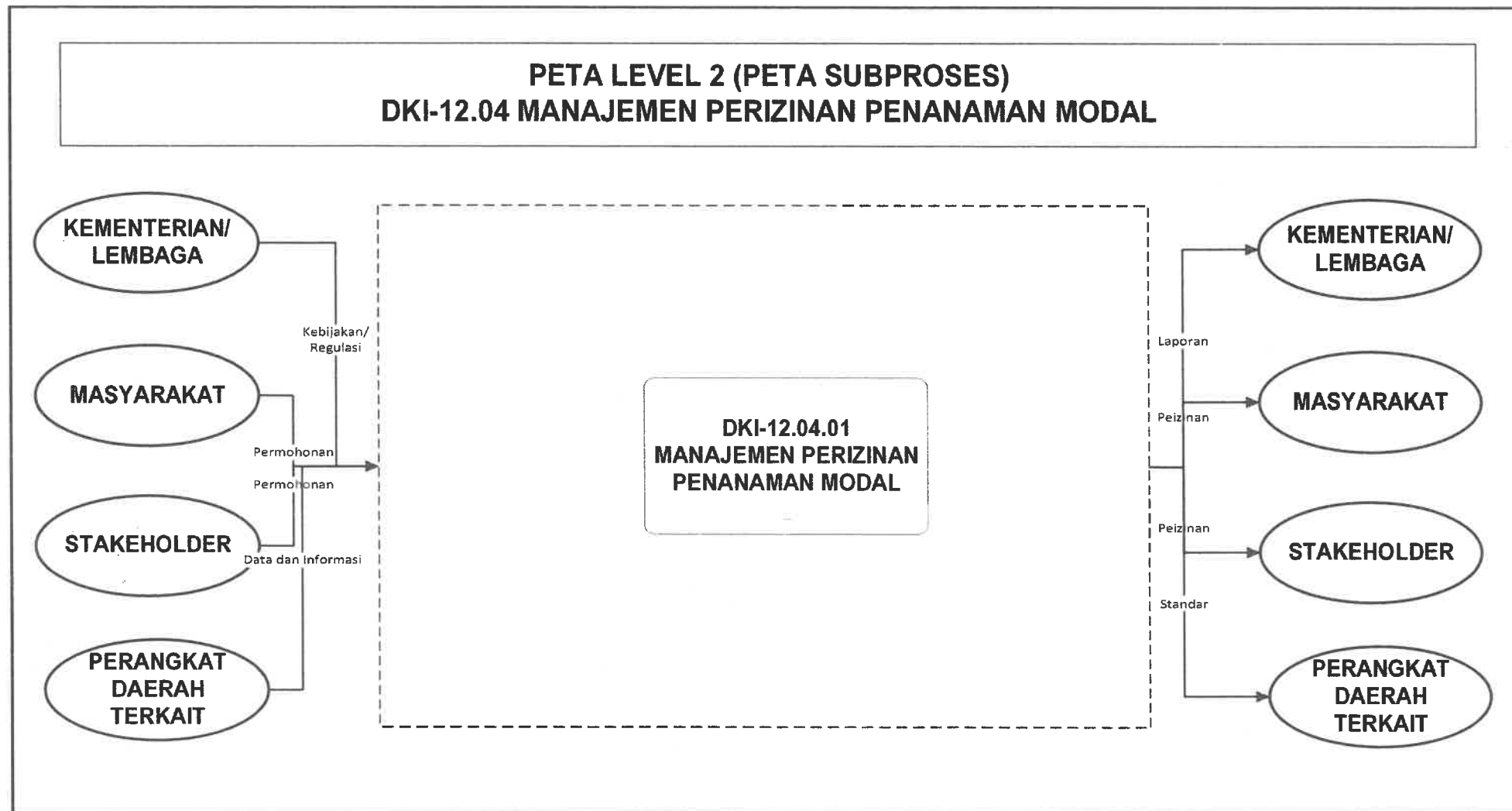
SUBPROSES DK1-12.01 PEMBINAAN BADAN USAHA REGIONAL



SUBPROSES DK1-12.02 MANAJEMEN PENANAMAN MODAL

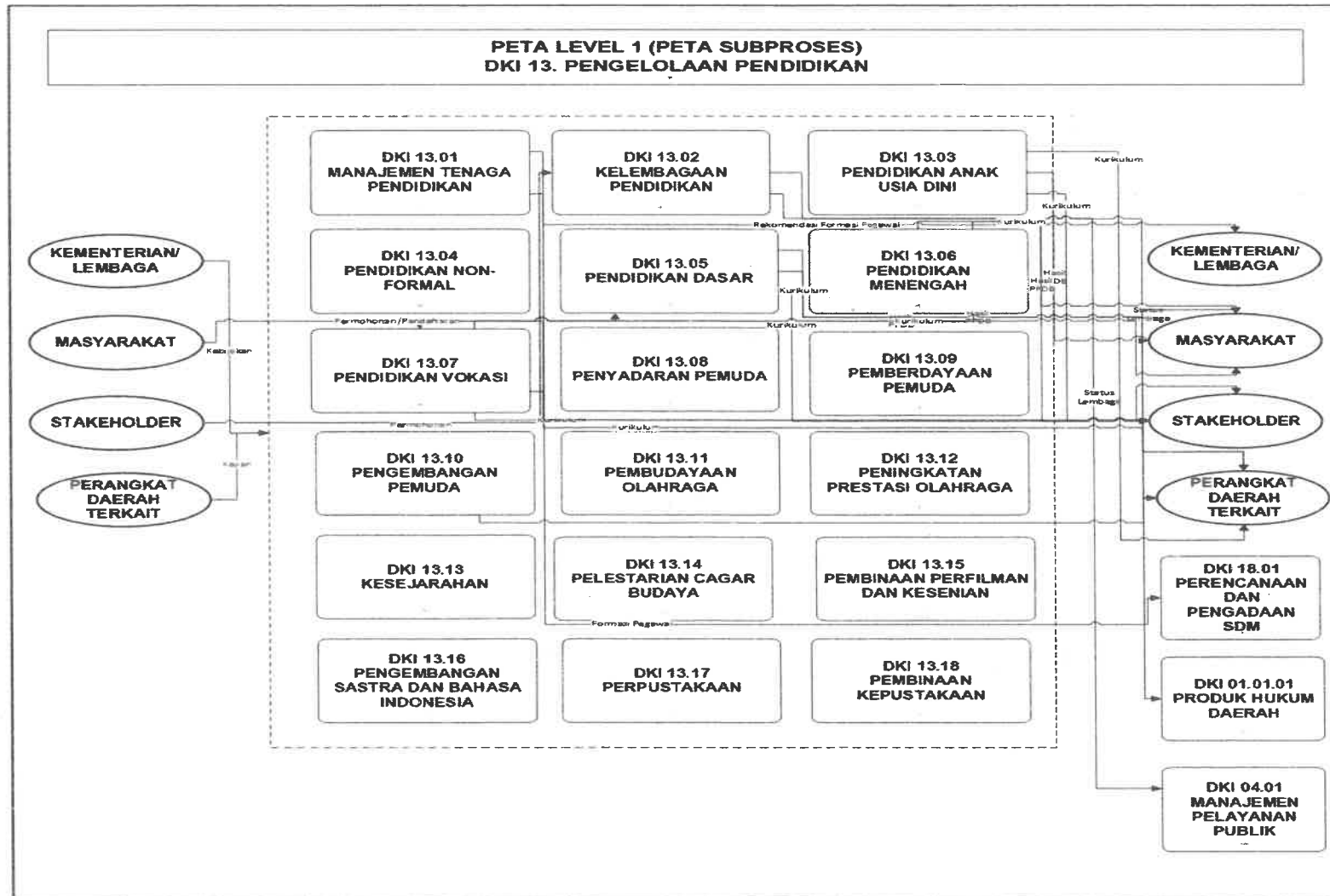


SUBPROSES DKI-12.03 LITIGASI PENANAMAN MODAL



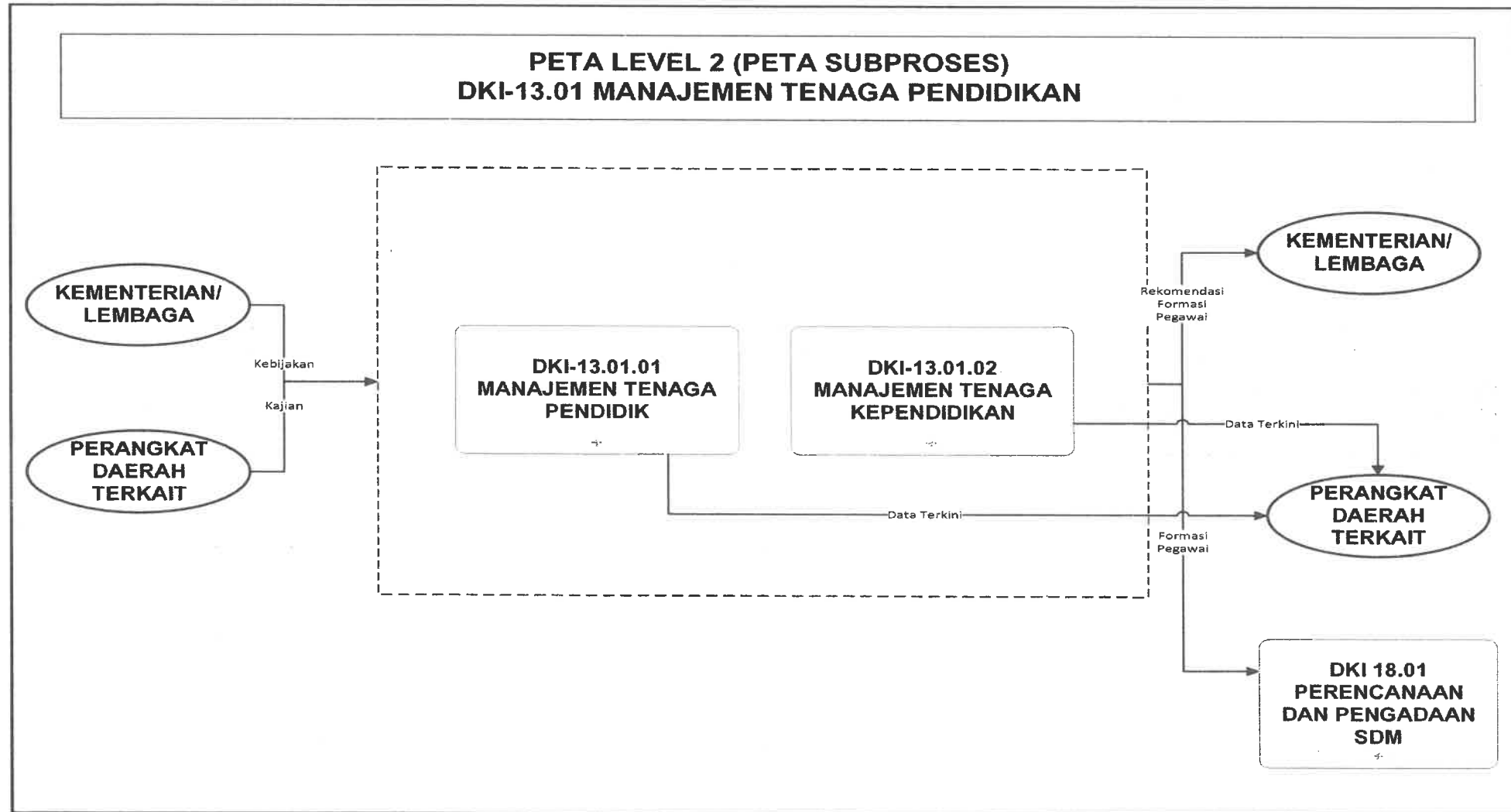
SUBPROSES DKI-12.04 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

13. DKI-13 PENGELOLAAN PENDIDIKAN

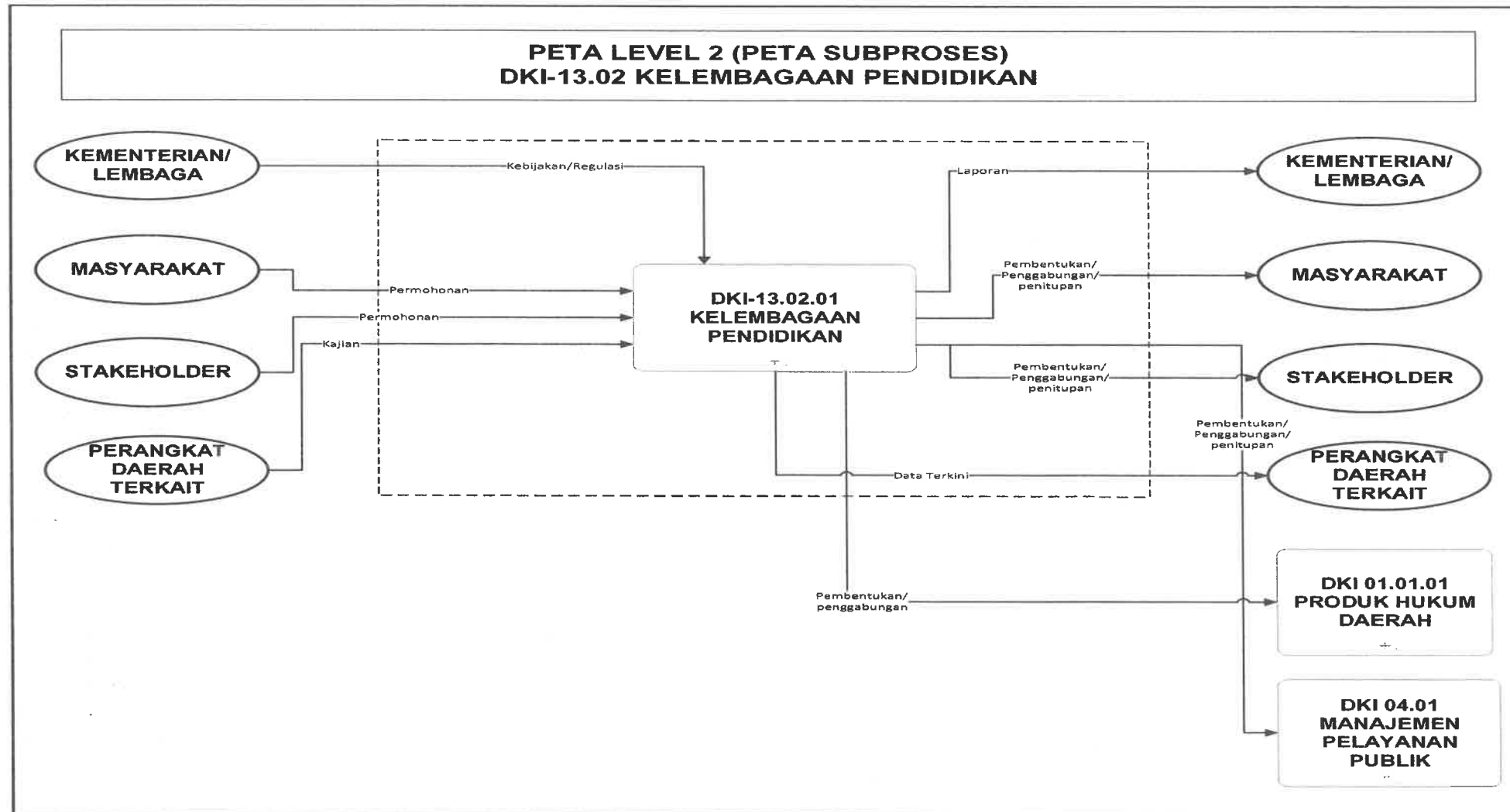


Penjelasan.
Proses pengelolaan pendidikan yang masuk dalam aktivitas ini adalah aktivitas yang meliputi bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan perpustakaan.

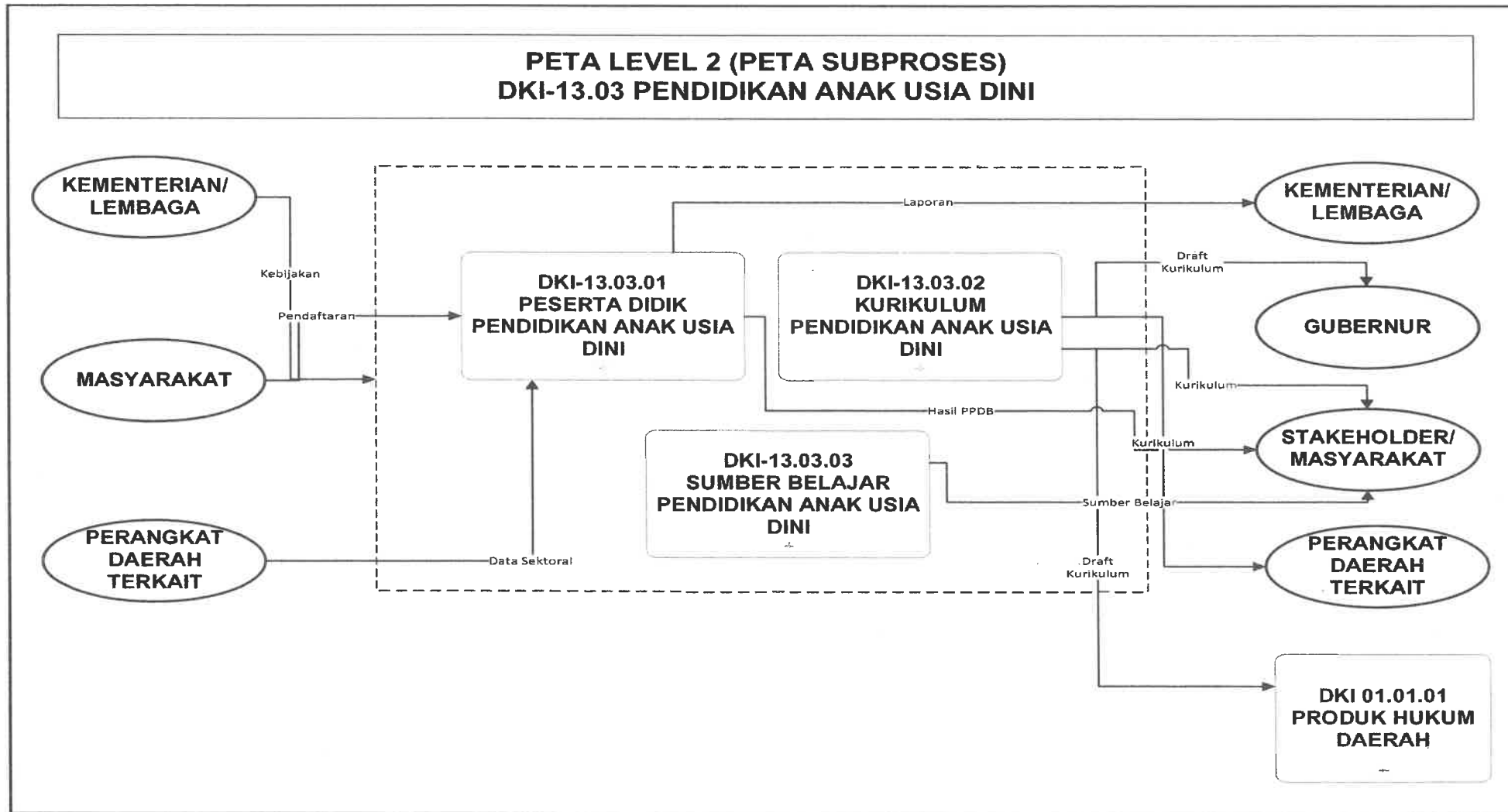
SUBPROSES DKI-13 PENGELOLAAN PENDIDIKAN



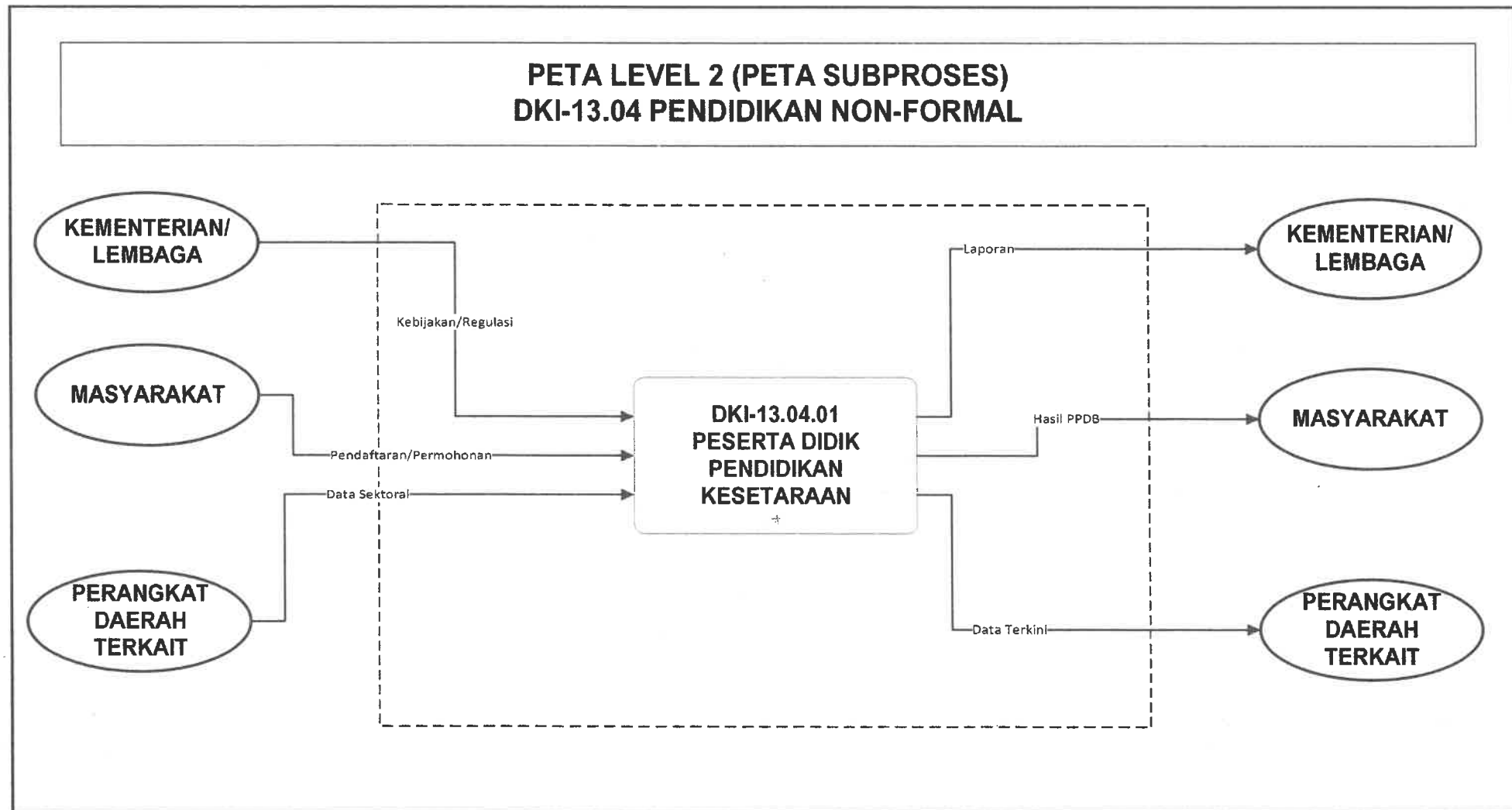
SUBPROSES DK1-13.01 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN



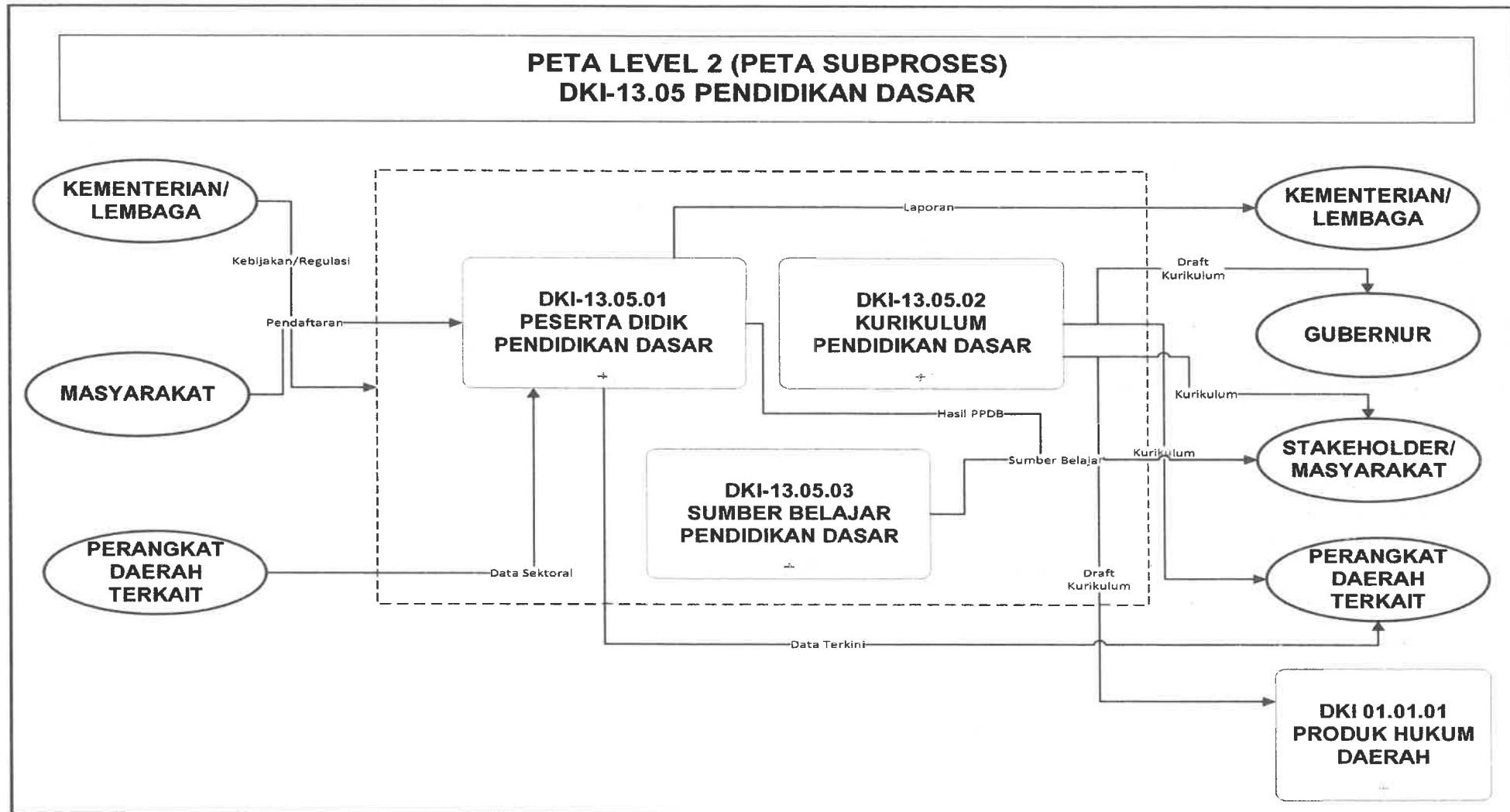
SUBPROSES DKI-13.02 KELEMBAGAAN PENDIDIKAN



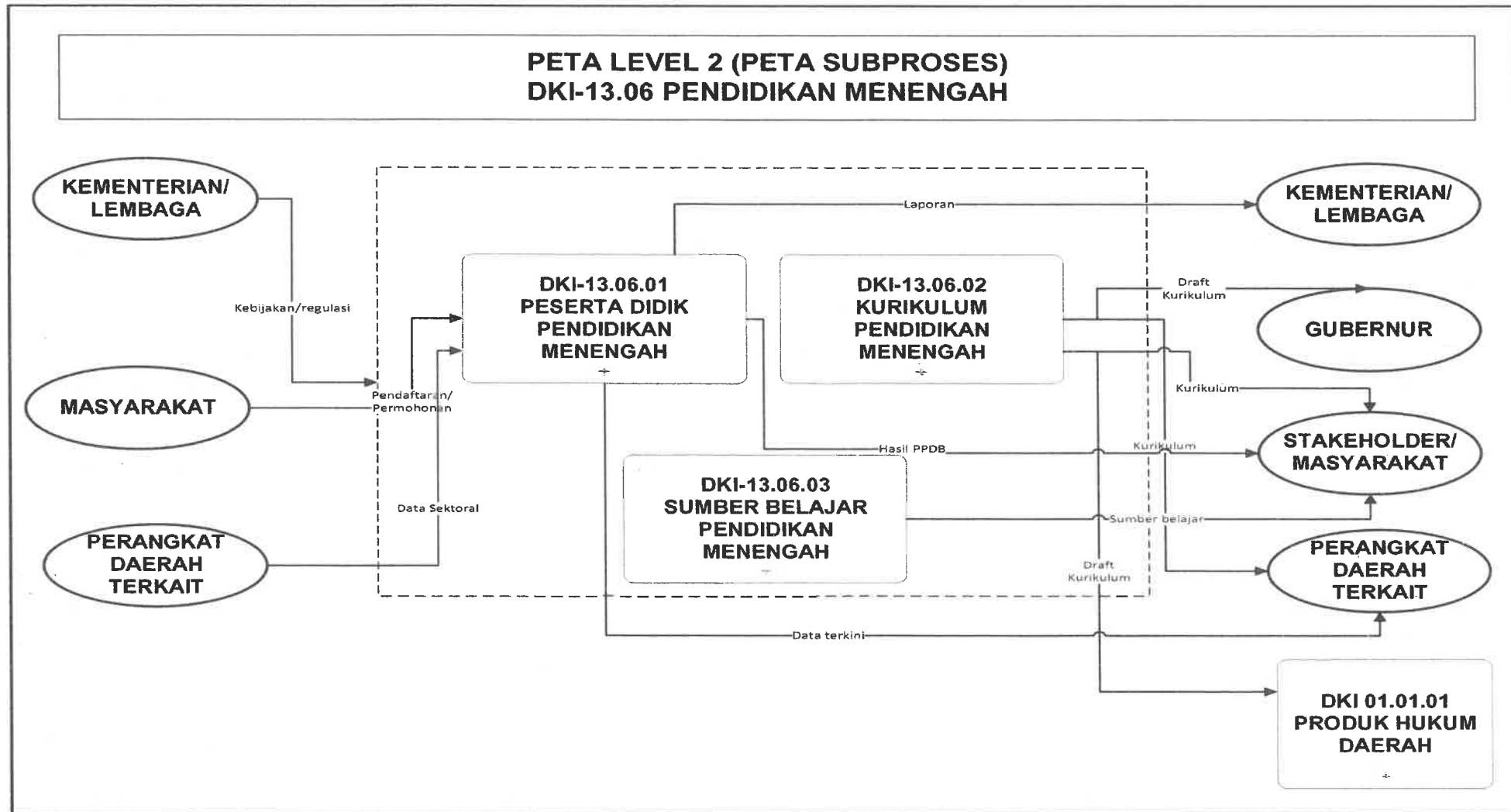
SUBPROSES DKI-13.03 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI



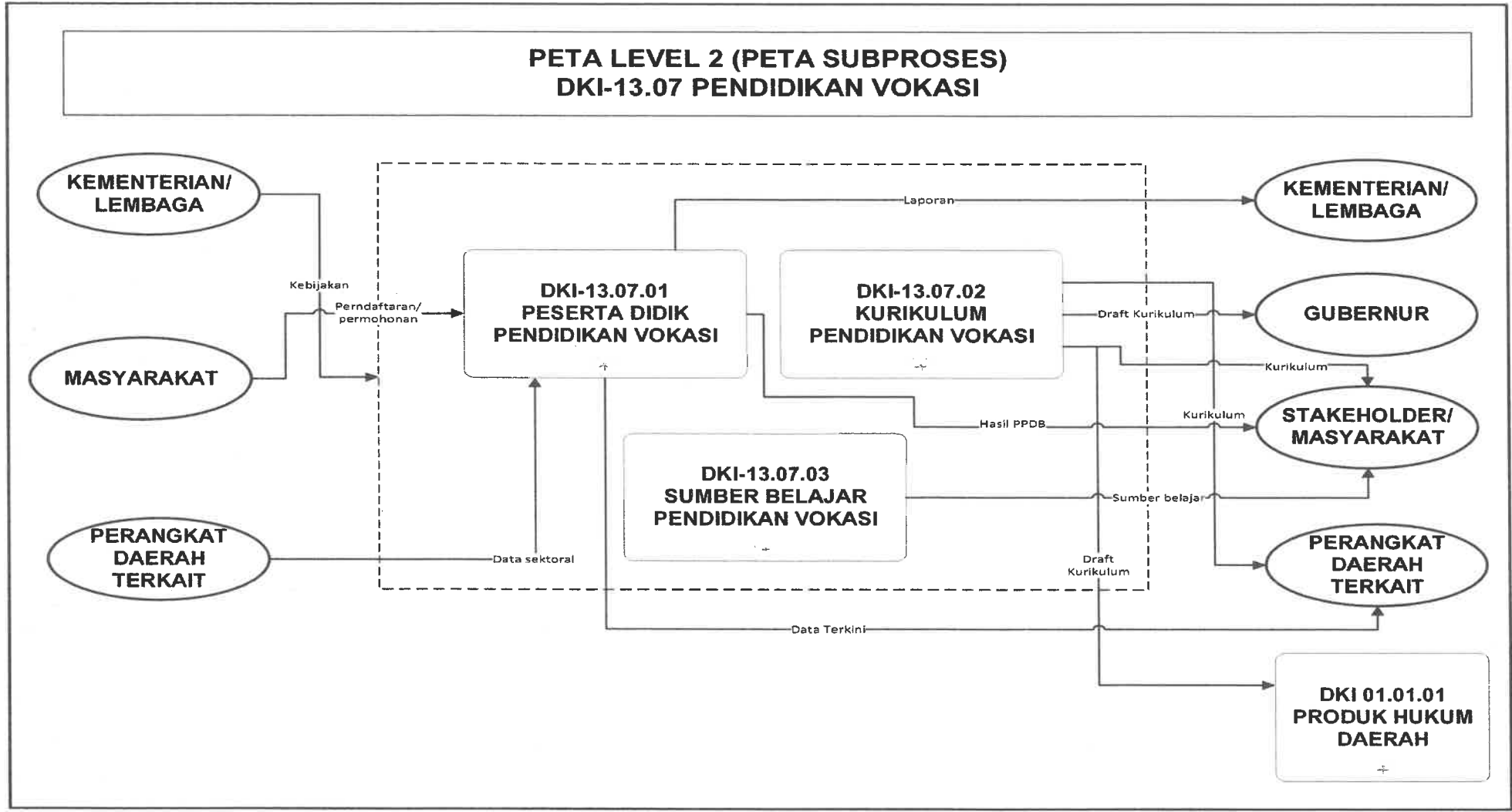
SUBPROSES DK1-13.04 PENDIDIKAN NON-FORMAL



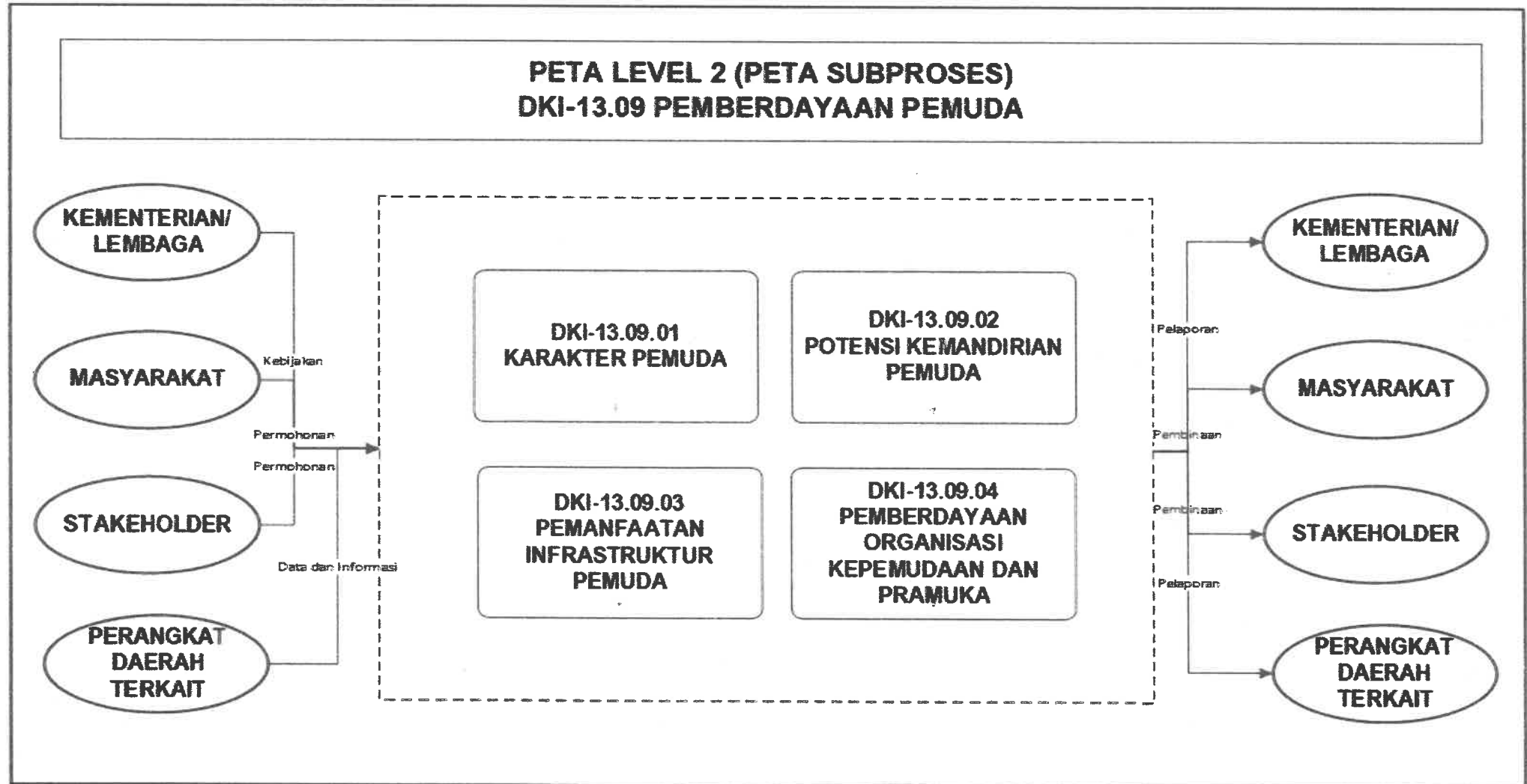
SUBPROSES DKI-13.05 PENDIDIKAN DASAR



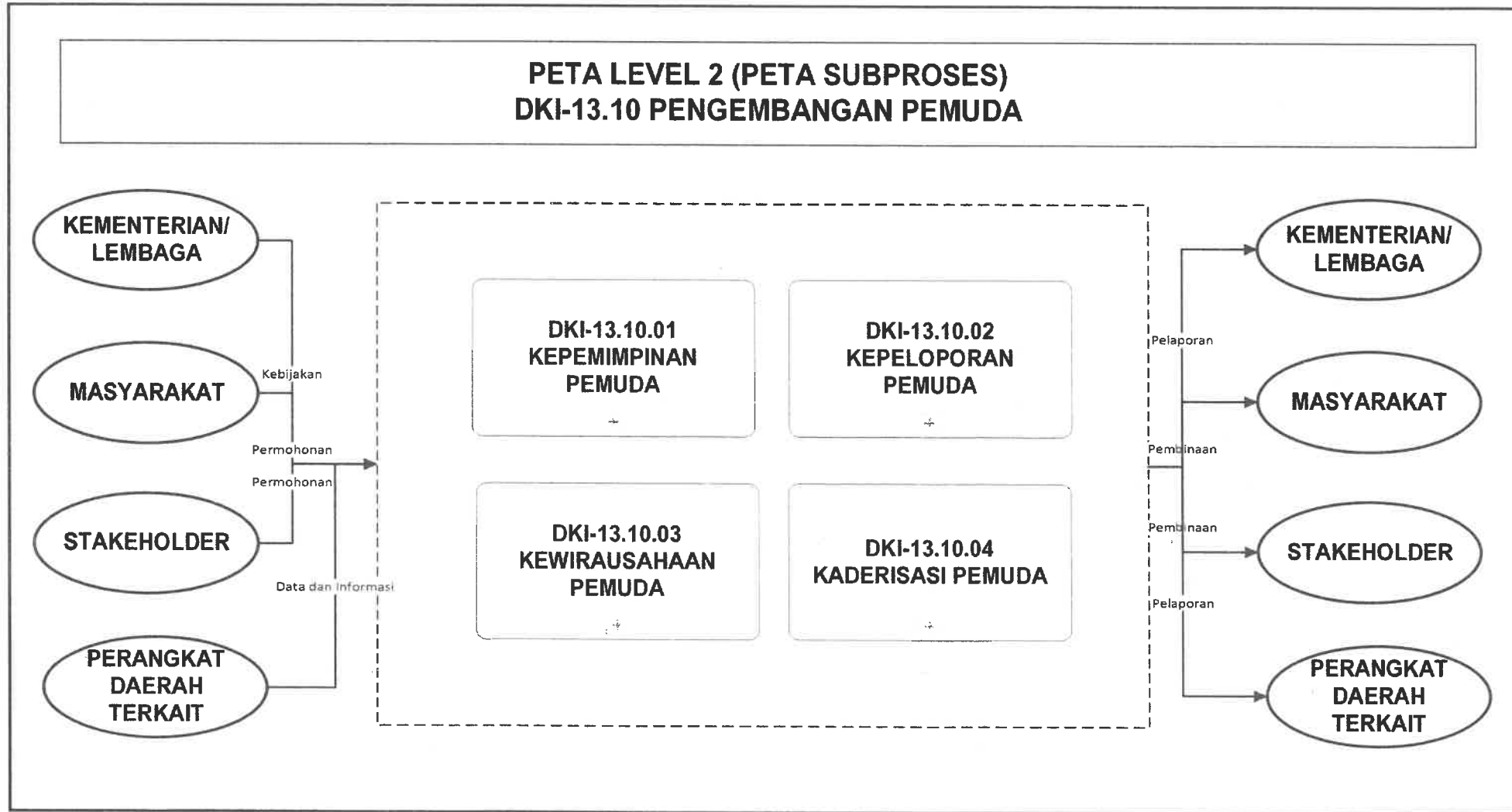
SUBPROSES DKI-13.06 PENDIDIKAN MENENGAH



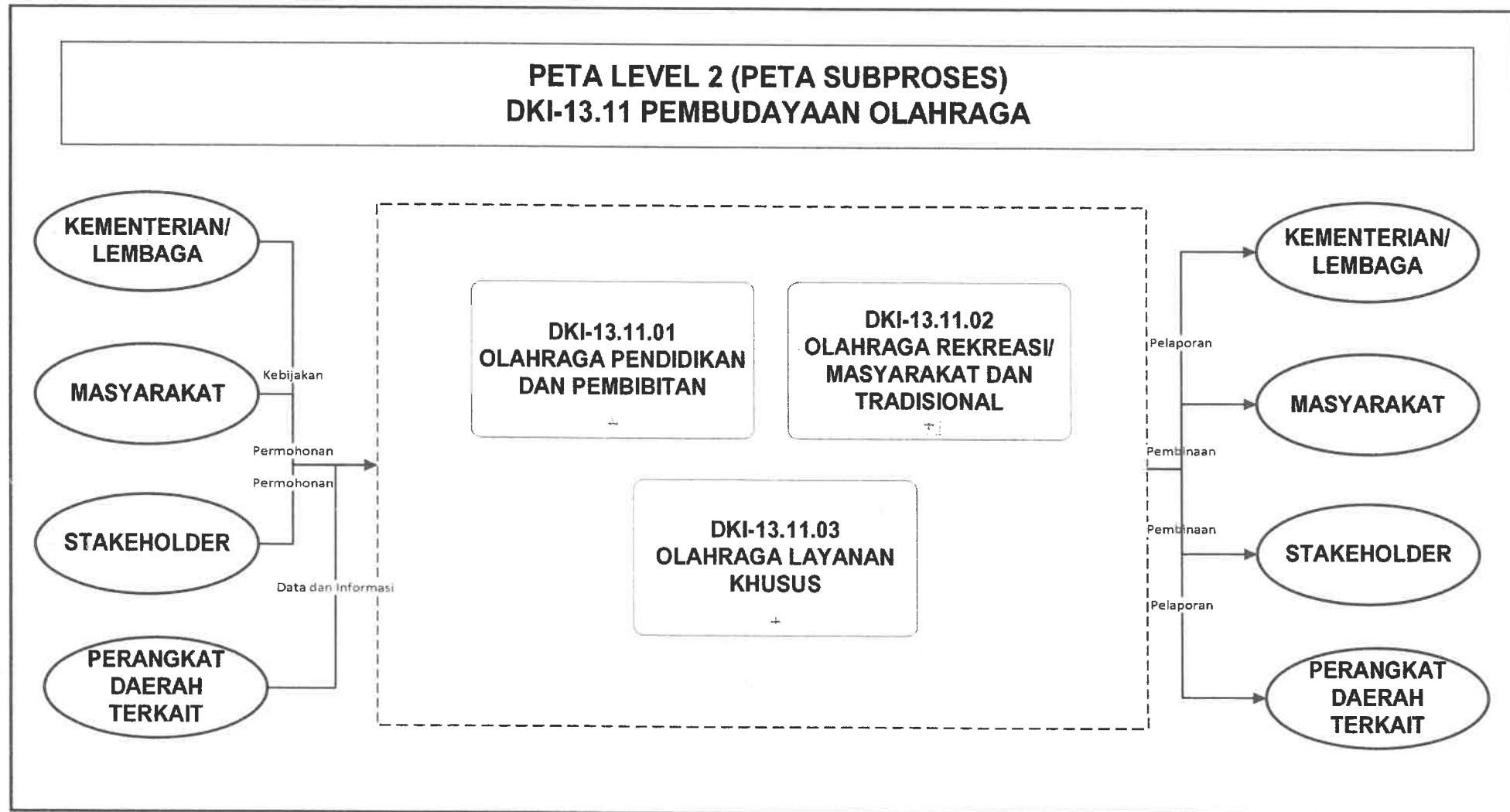
SUBPROSES DKI-13.07 PENDIDIKAN VOKASI



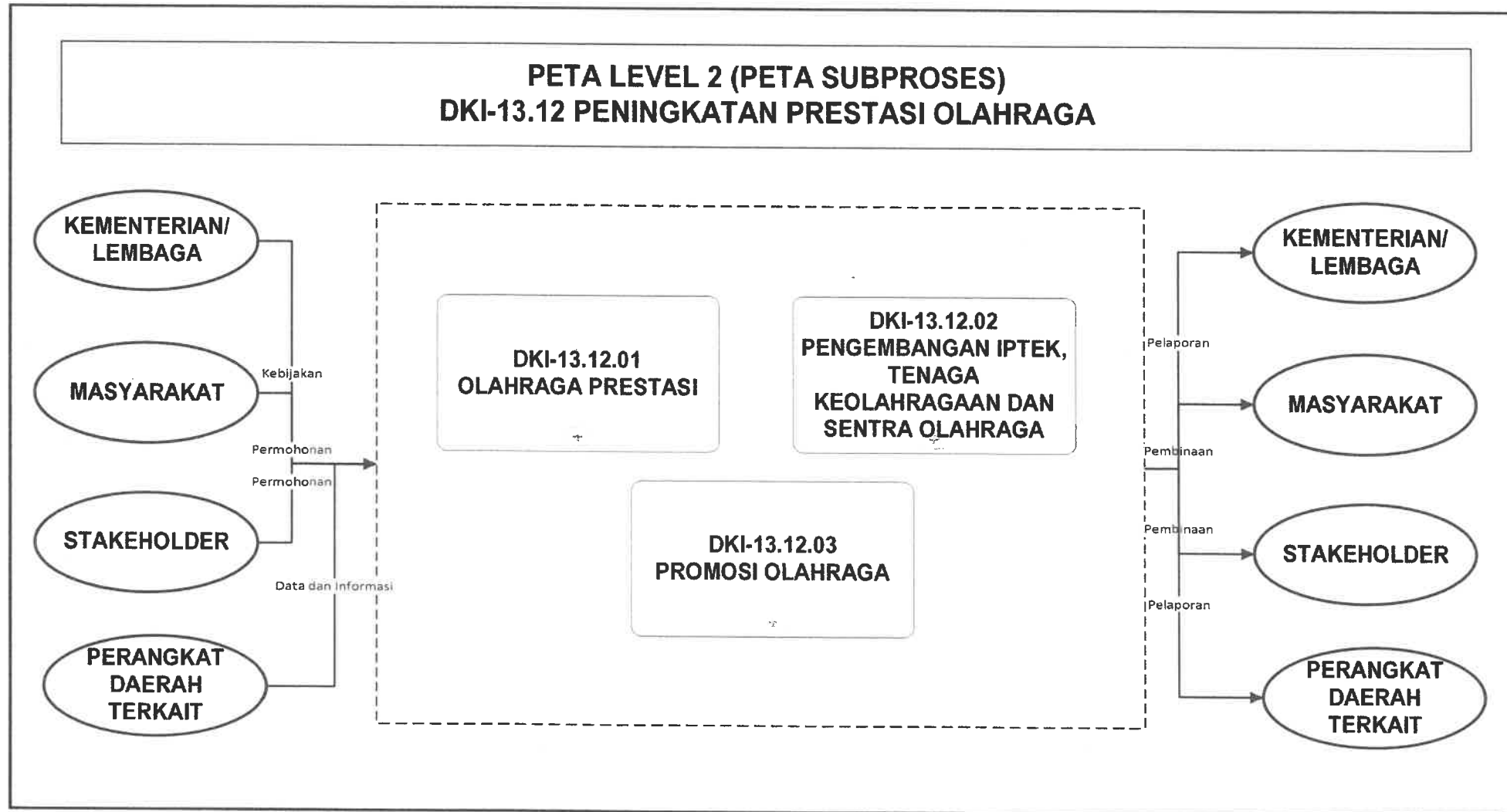
SUBPROSES DKI-13.09 PEMBERDAYAAN PEMUDA



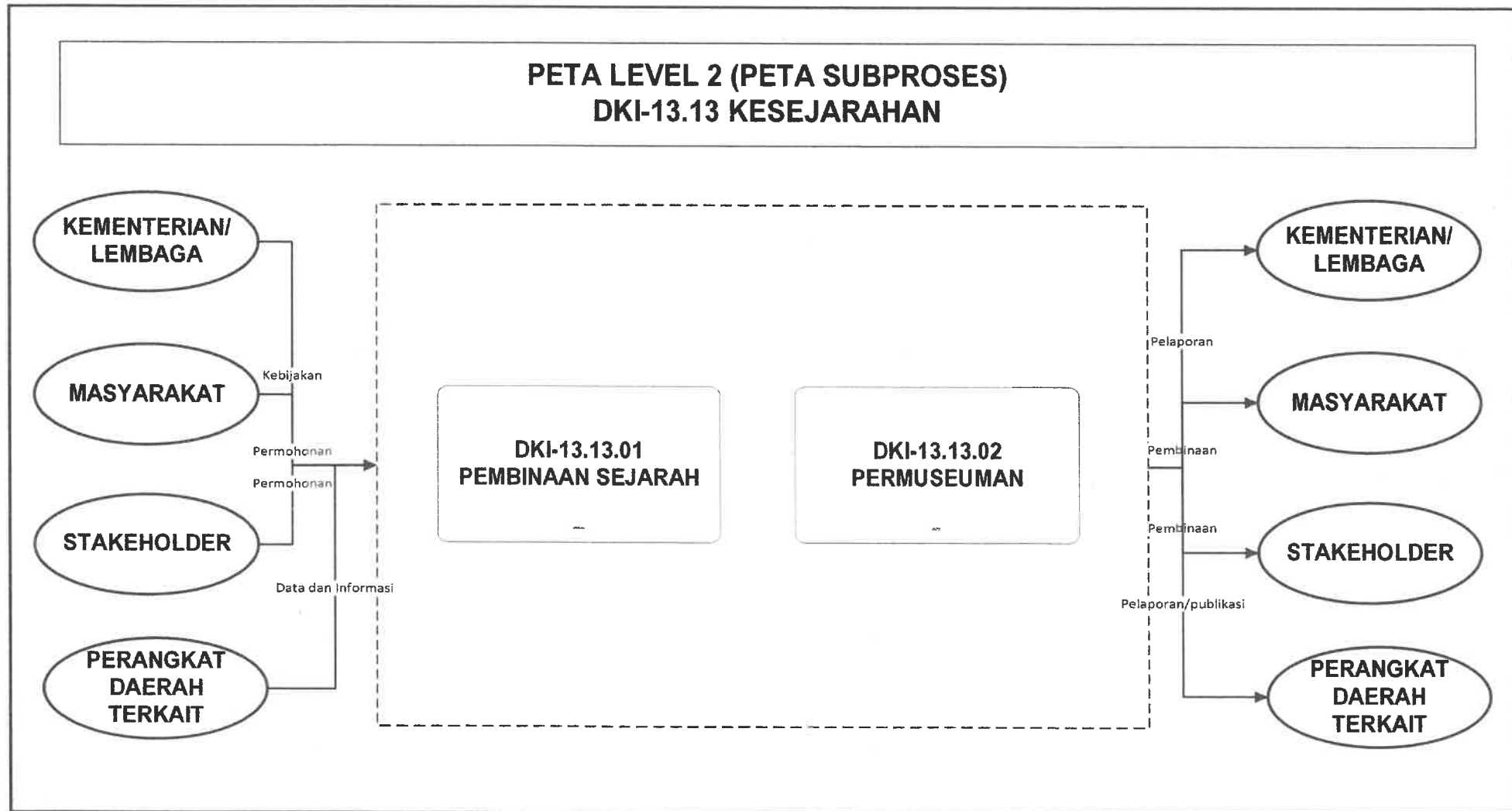
SUBPROSES DKI-13.10 PENGEMBANGAN PEMUDA



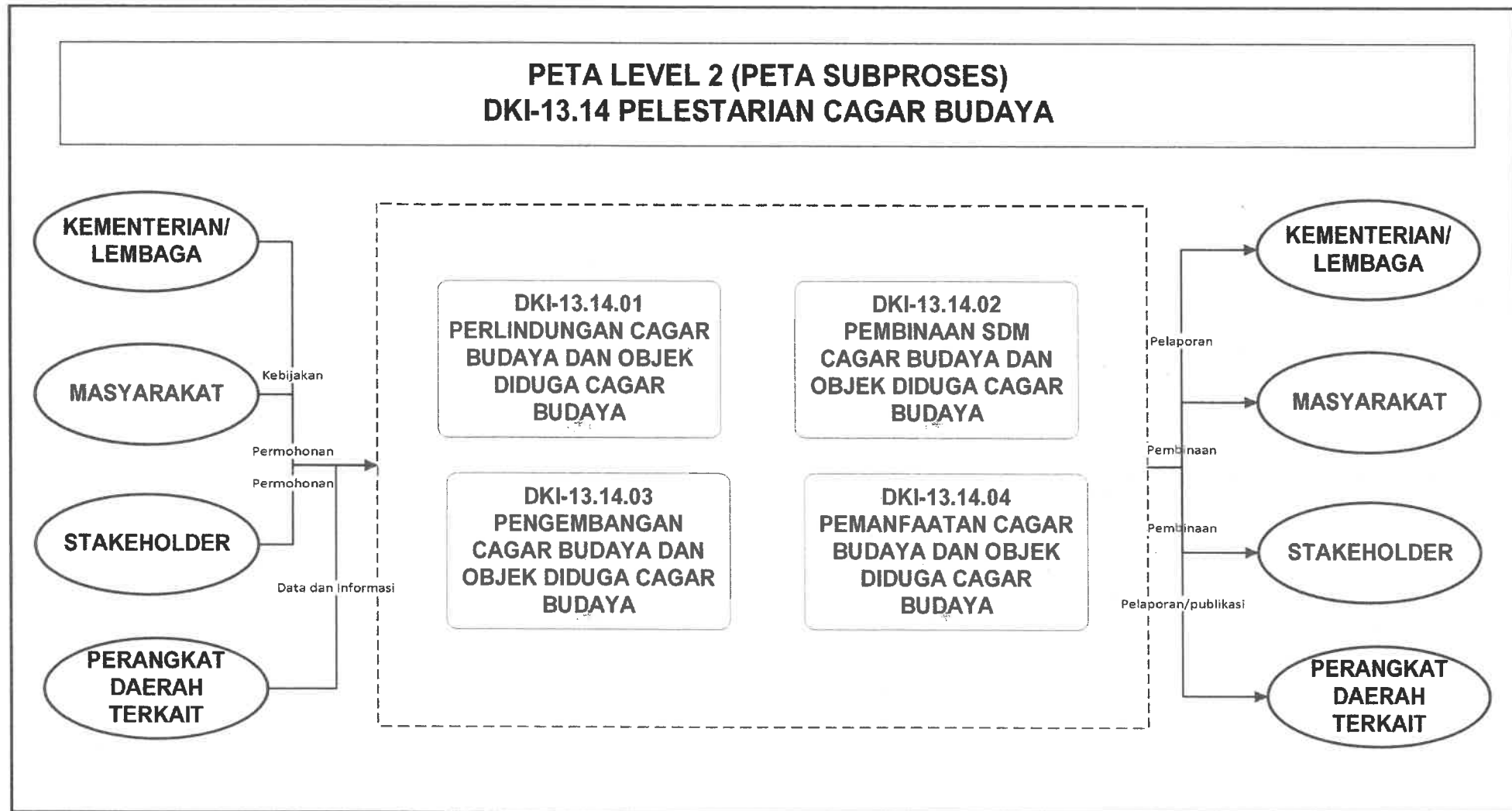
SUBPROSES DKI-13.11 PEMBERDAYAAN OLAHRAGA



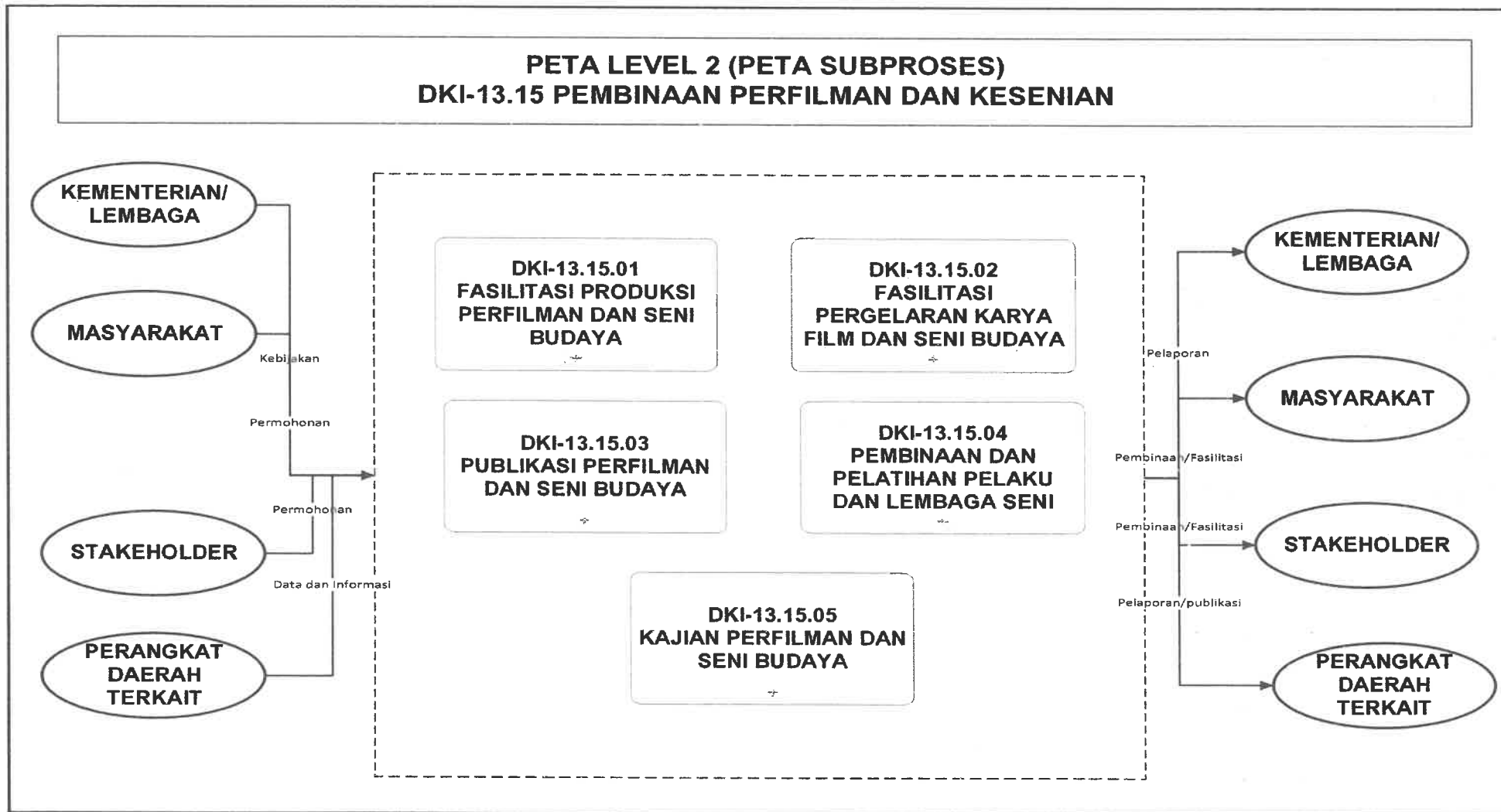
SUBPROSES DKI-13.12 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA



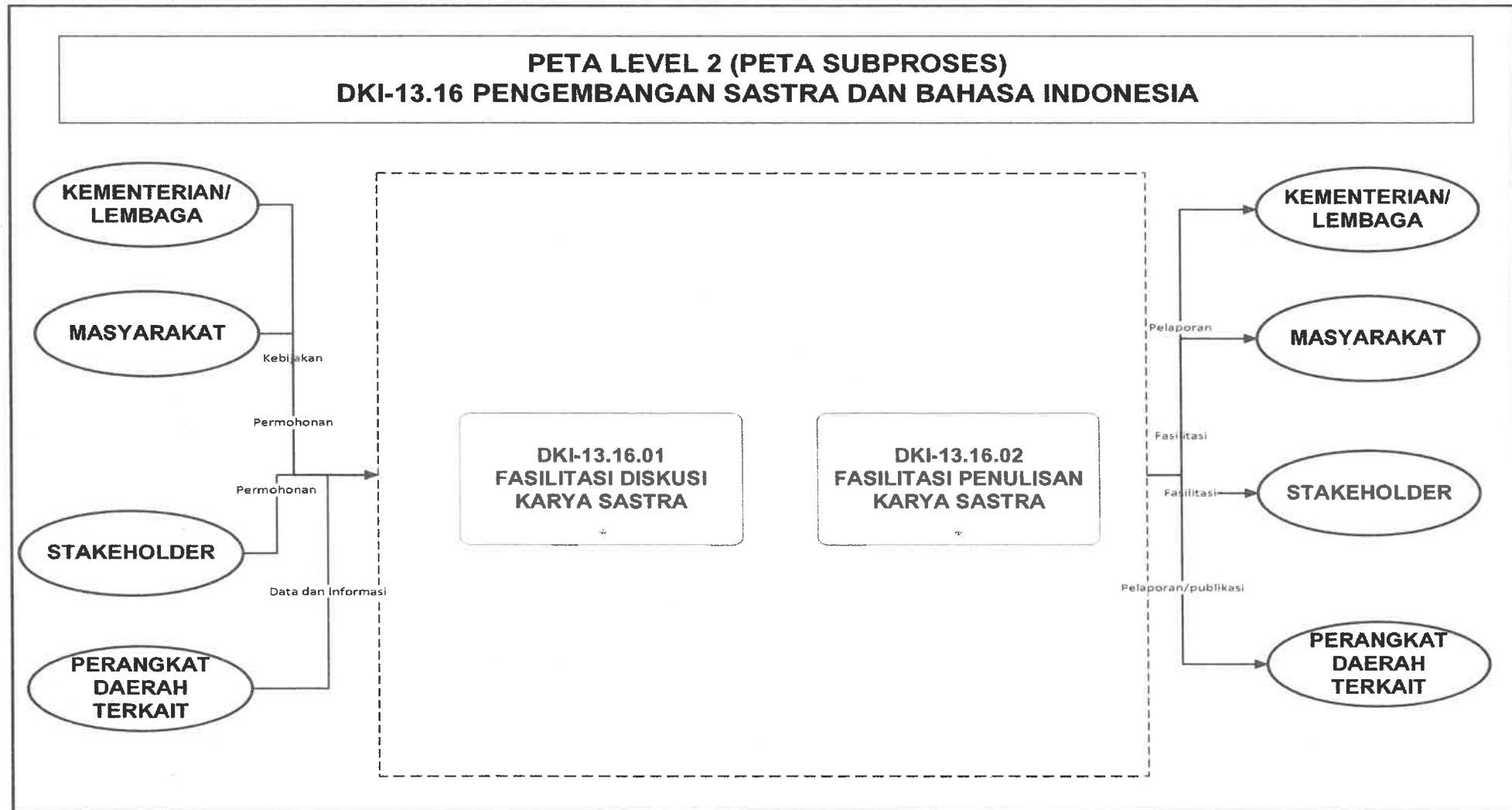
SUBPROSES DKI-13.13 KESEJARAHAN



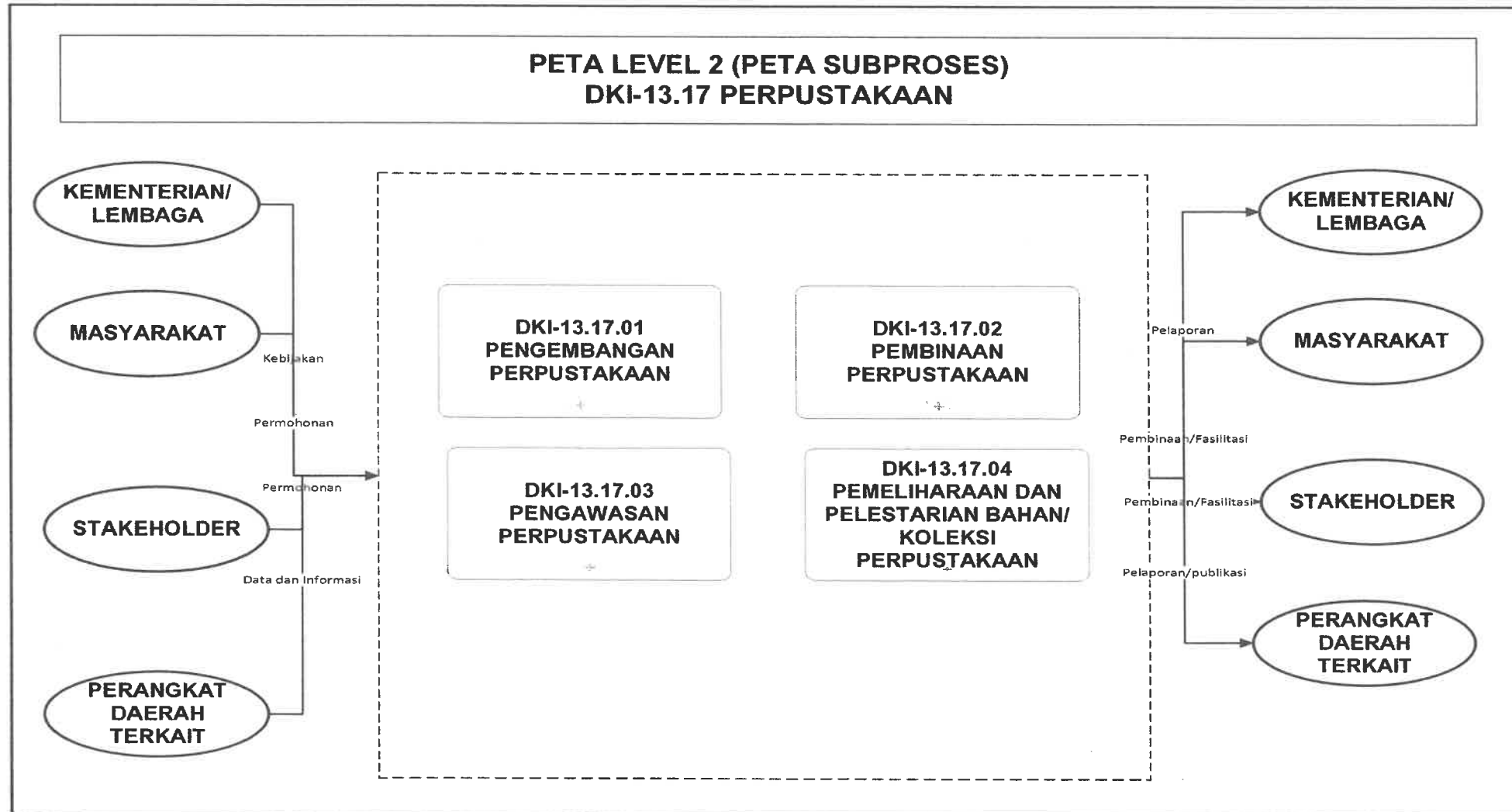
SUBPROSES DKI-13.14 PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



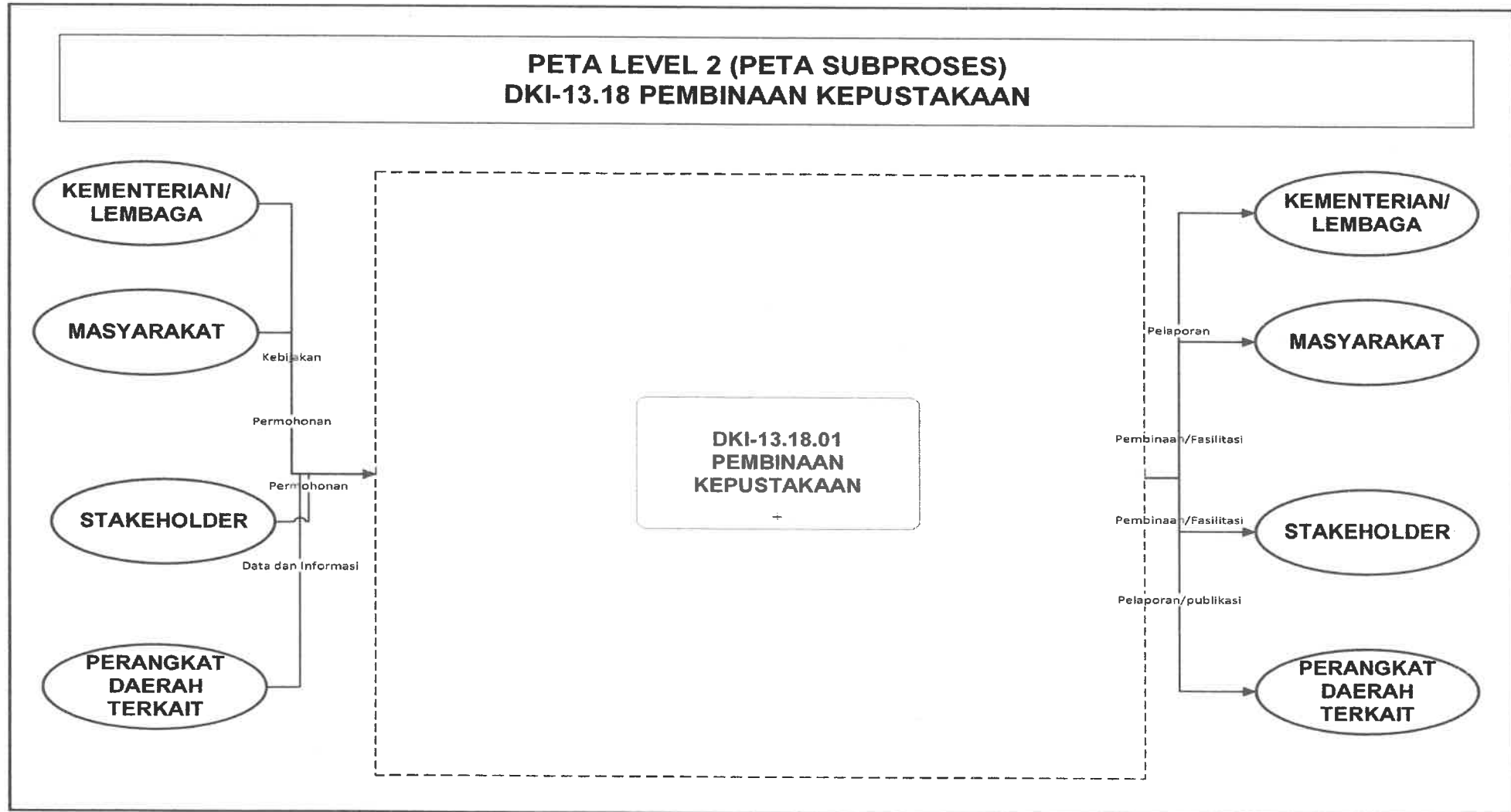
SUBPROSES DKI-13.15 PEMBINAAN PERFILMAN DAN KESENIAN



SUBPROSES DKI-13.16 PENGEMBANGAN SASTRA DAN BAHASA INDONESIA

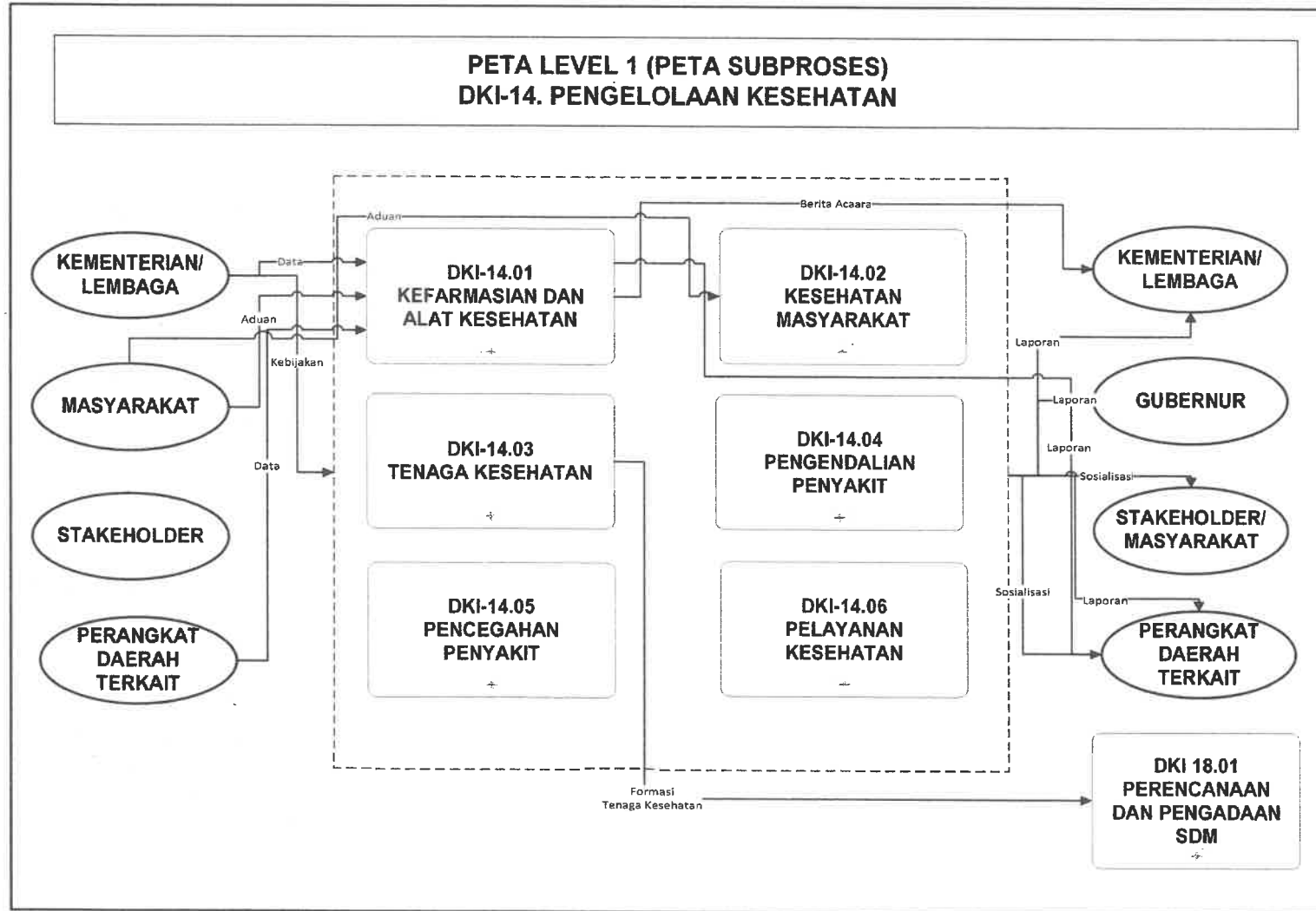


SUBPROSES DK1-13.17 PERPUSTAKAAN



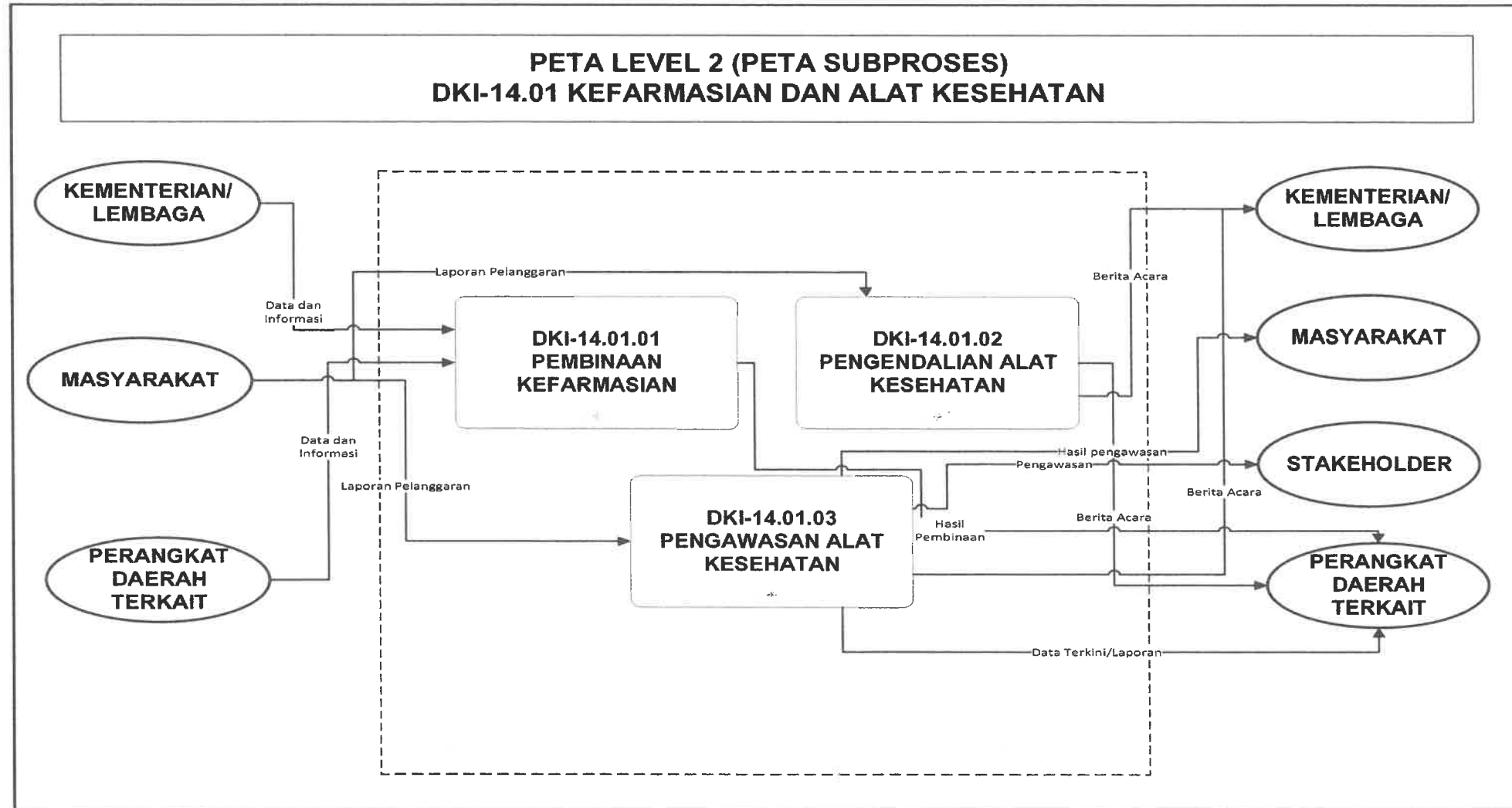
SUBPROSES DKI-13.18 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN

14. DKI-14 PENGELOLAAN KESEHATAN

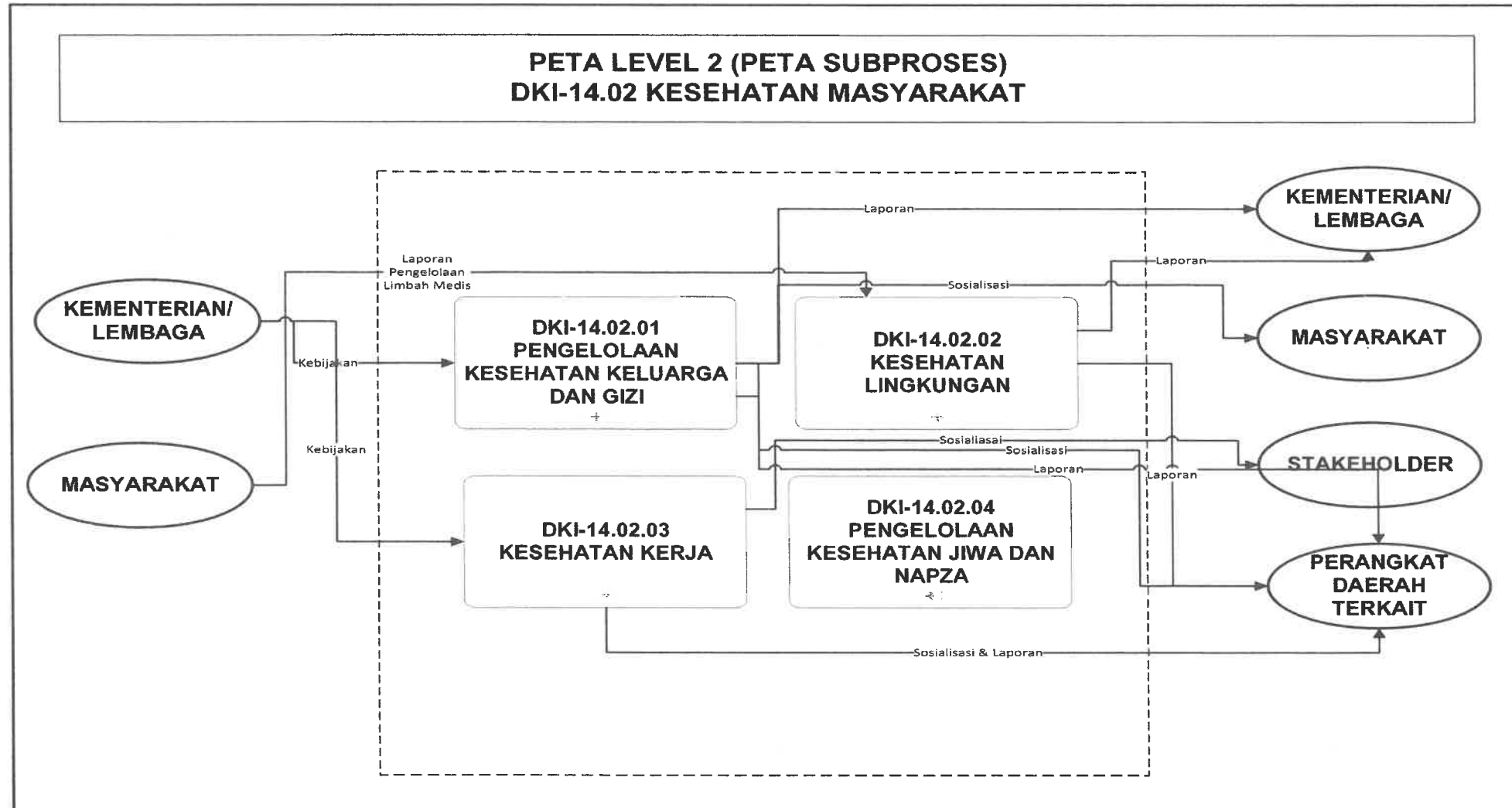


Penjelasan:
Proses pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta meliputi pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan, pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular, pencegahan penyakit, dan pelayanan kesehatan di lingkungan DKI Jakarta.

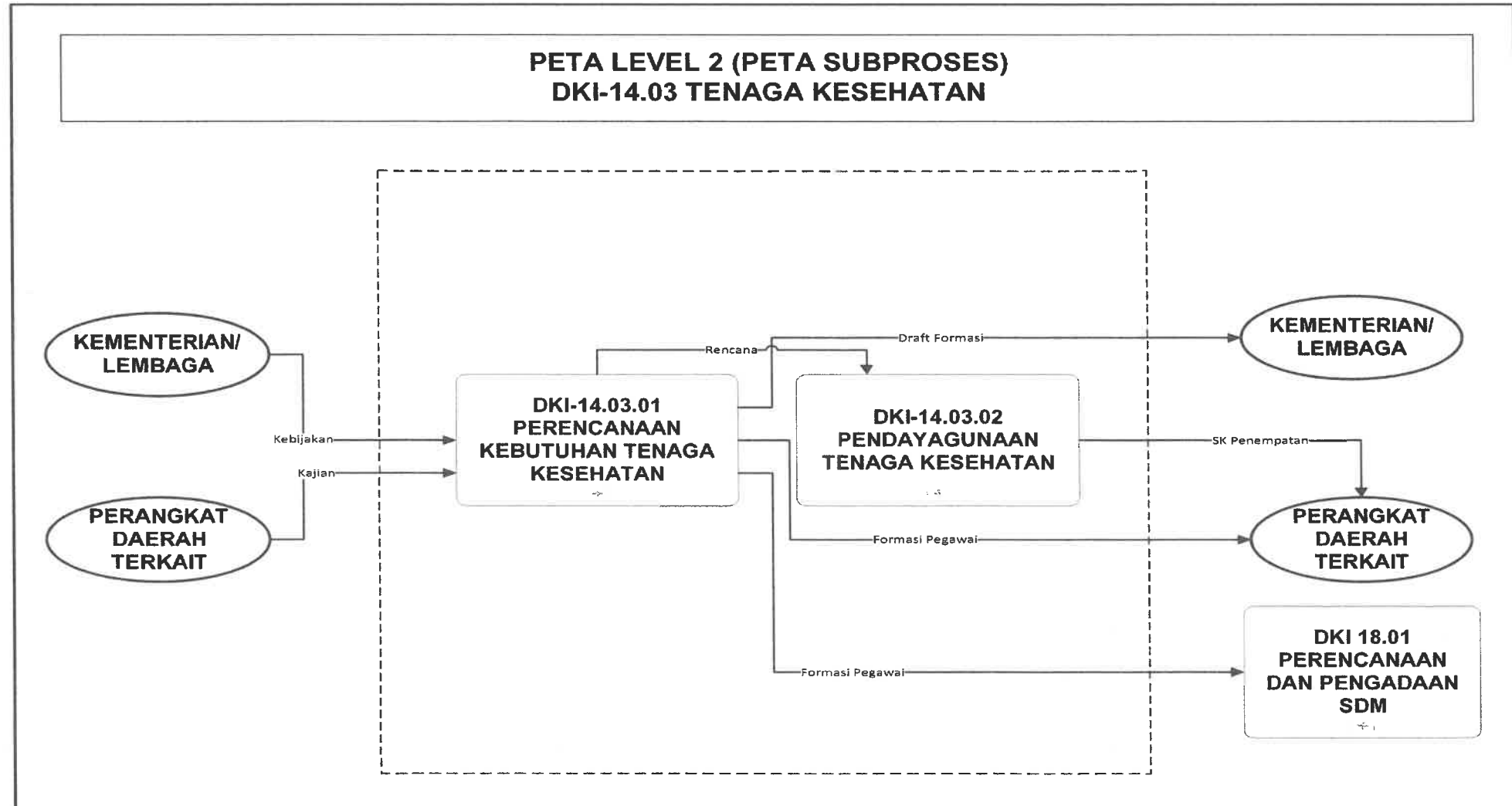
SUBPROSES DKI-14 PENGELOLAAN KESEHATAN



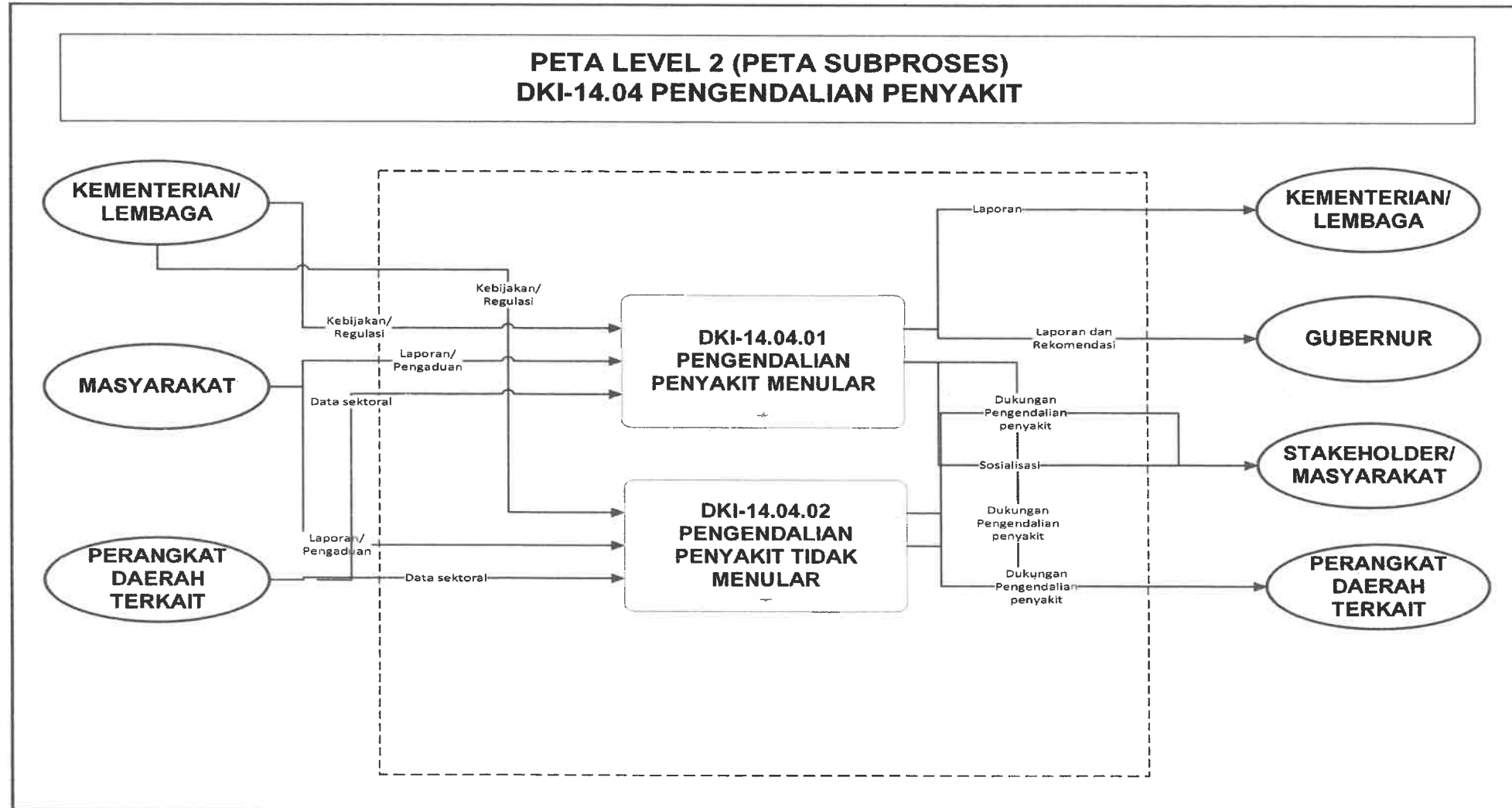
SUBPROSES DKI-14.01 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN



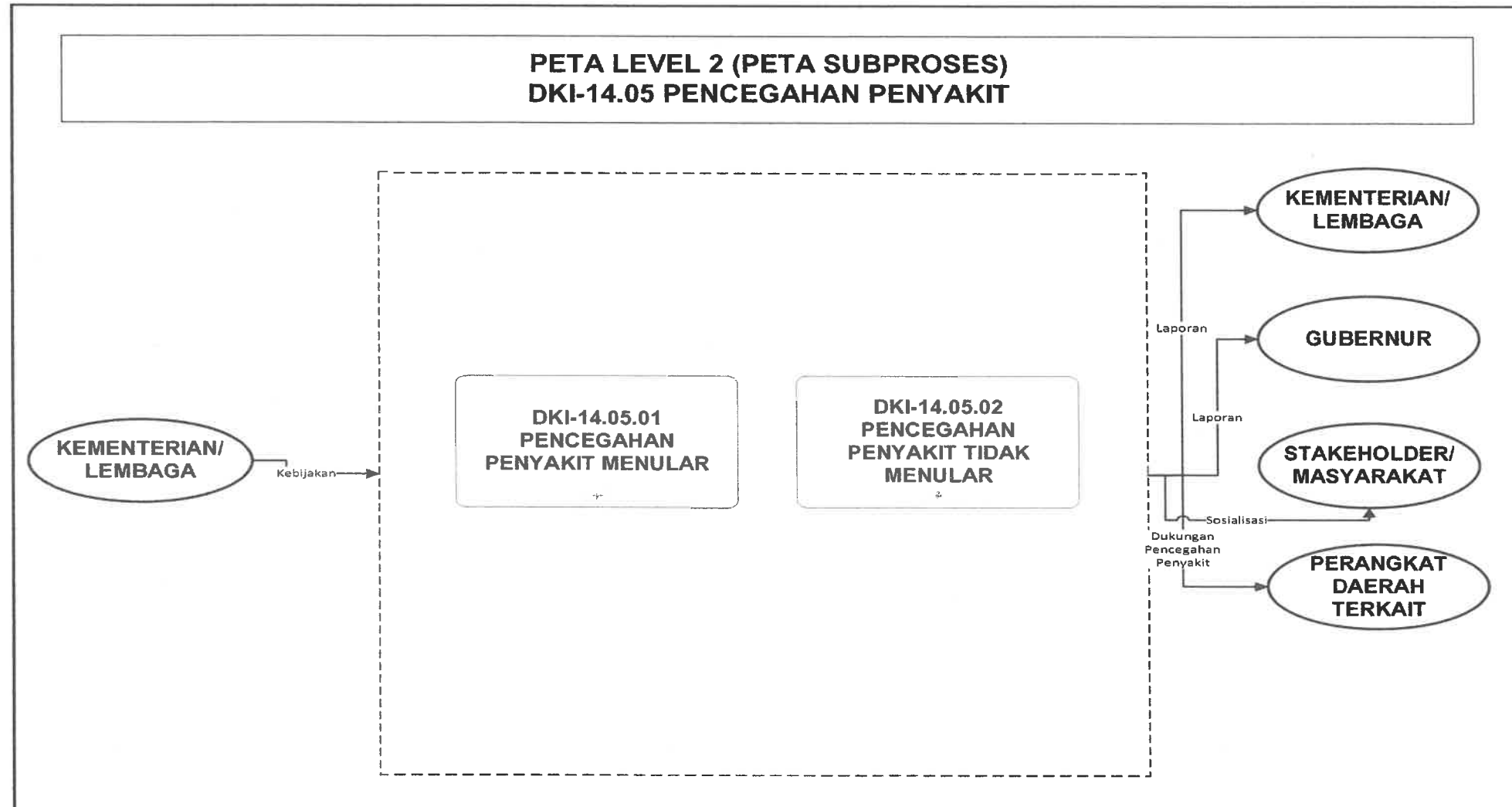
SUBPROSES DK1-14.02 KESEHATAN MASYARAKAT



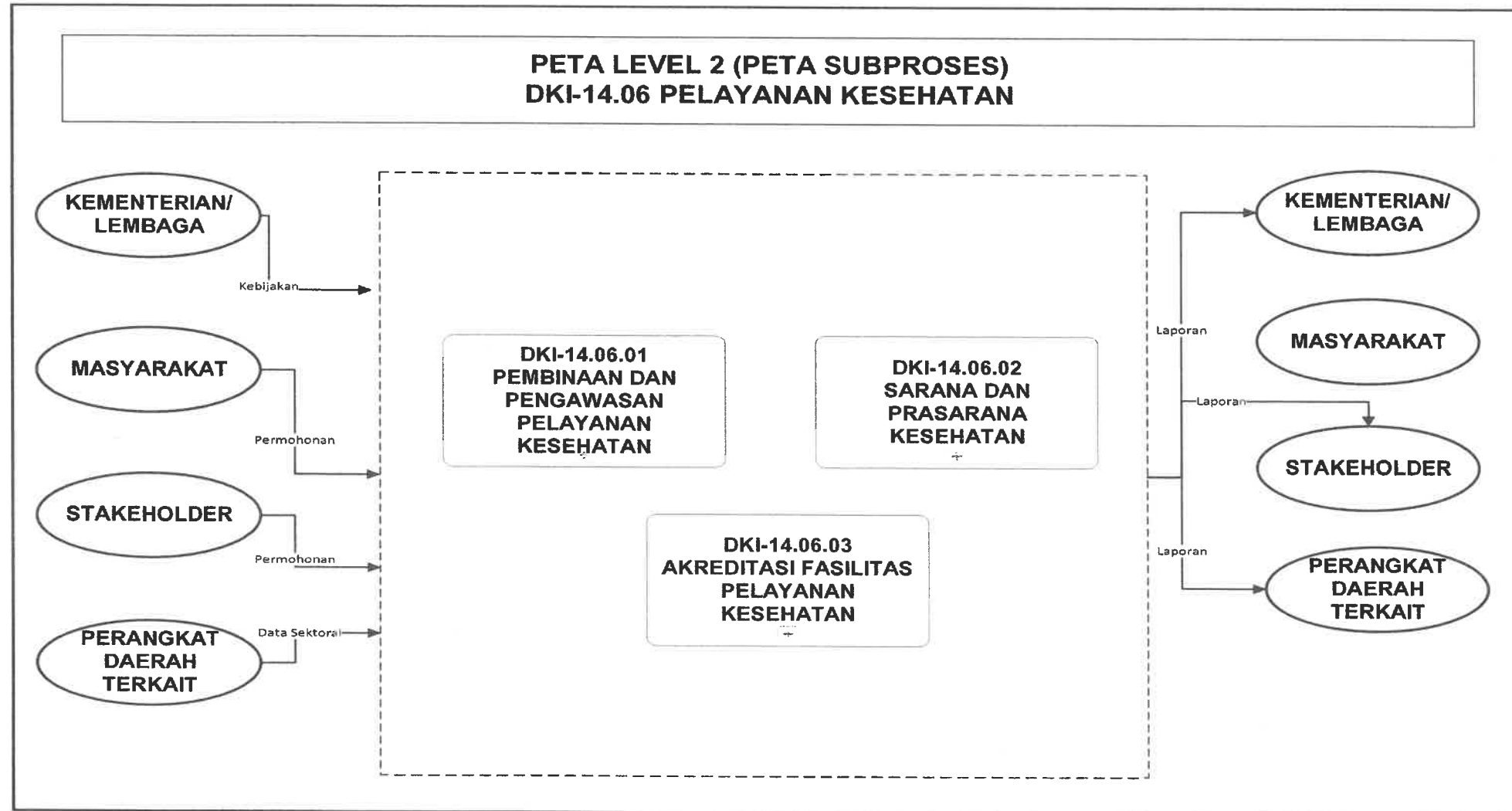
SUBPROSES DKI-14.03 TENAGA KESEHATAN



SUBPROSES DKI-14.04 PENGENDALIAN PENYAKIT

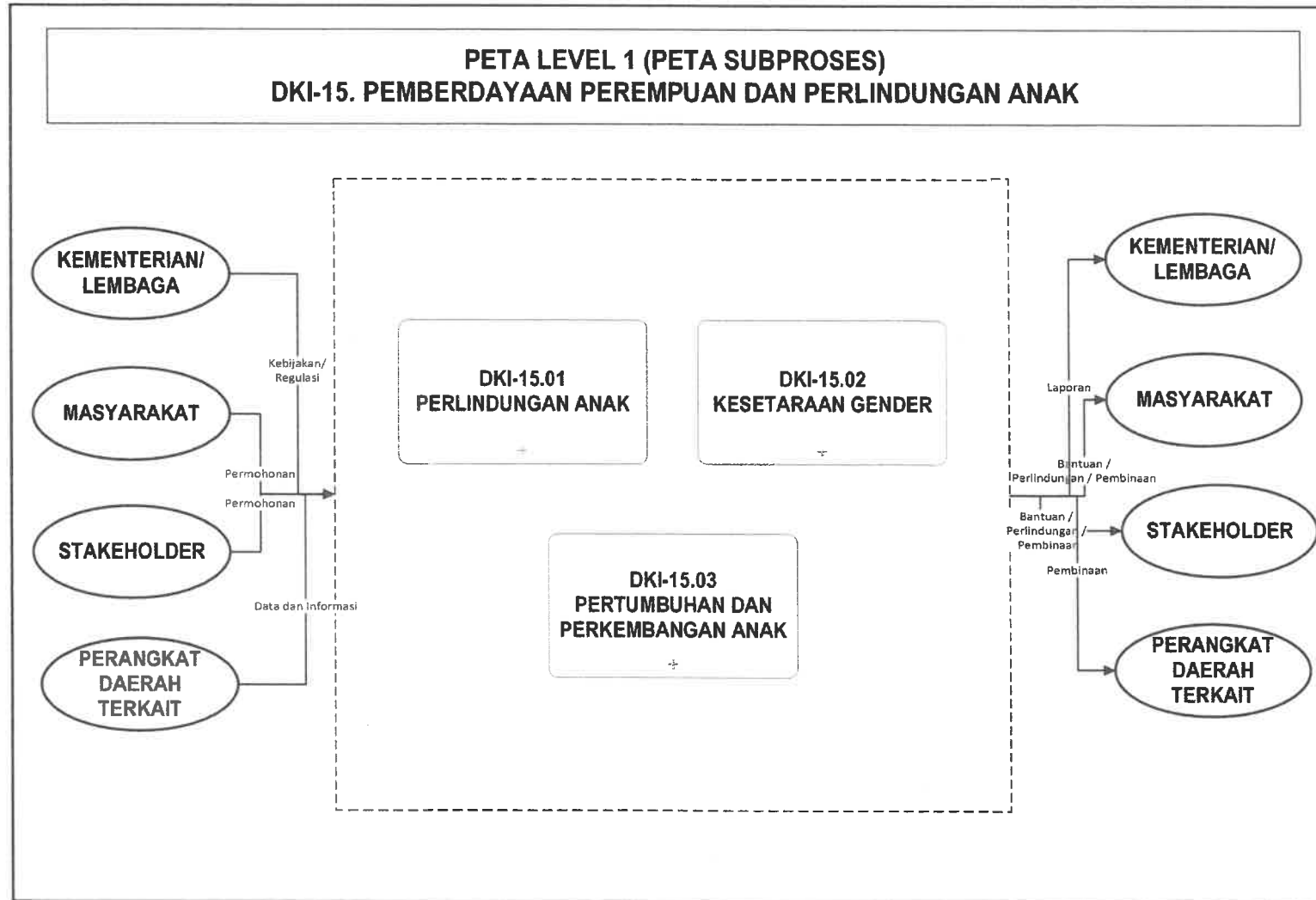


SUBPROSES DKI-14.05 PENCEGAHAN PENYAKIT



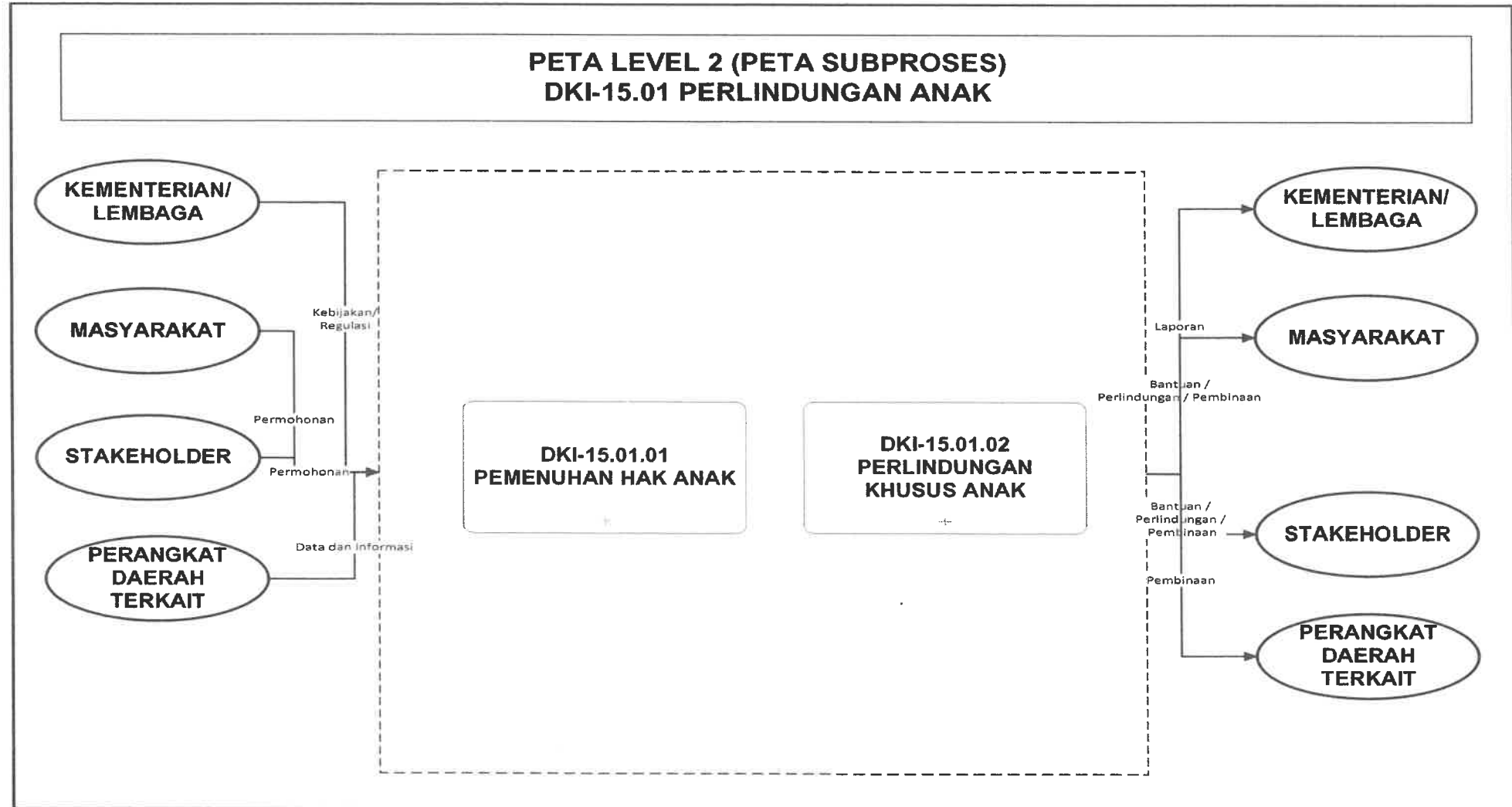
SUBPROSES DK1-14.06 PELAYANAN KESEHATAN

15. DKI-15 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

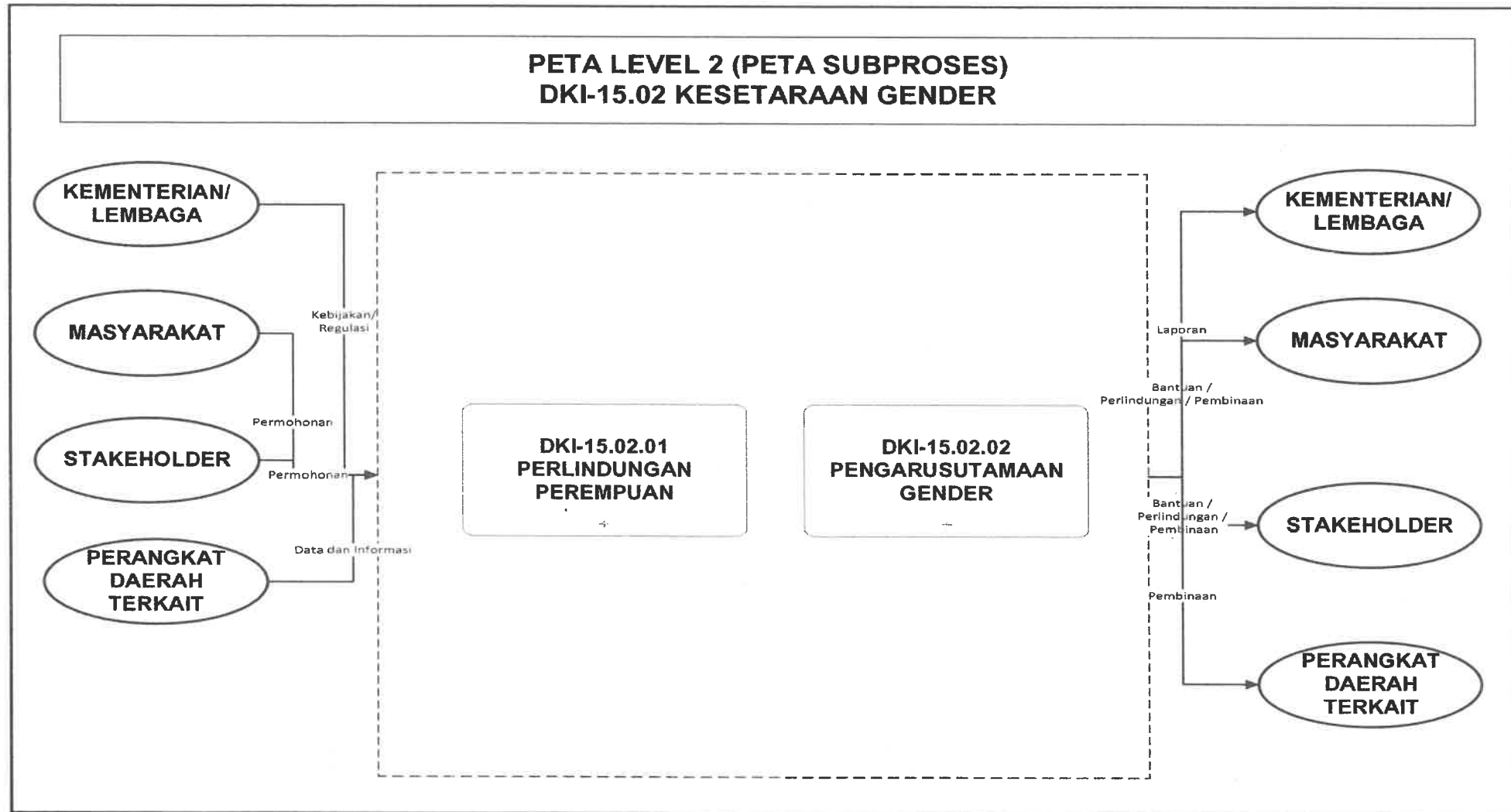
Penjelasan:

Proses pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah kegiatan yang meliputi perlindungan anak dalam pemenuhan haknya dan perlindungan khusus anak, melakukan perlindungan bagi perempuan, pengarusutamaan gender, serta pembinaan keluarga dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.

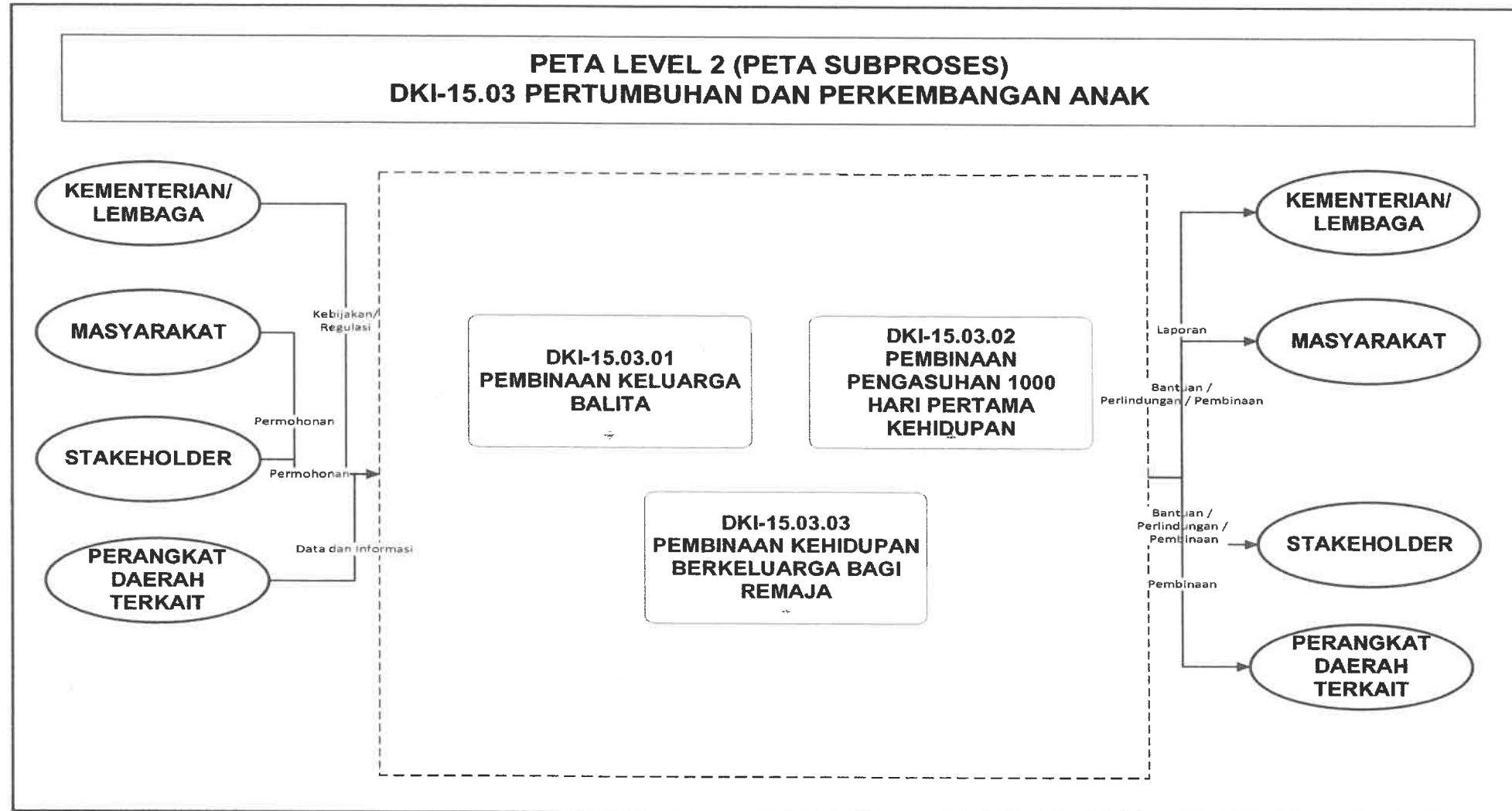
SUBPROSES DKI-15 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



SUBPROSES DKI-15.01 PERLINDUNGAN ANAK

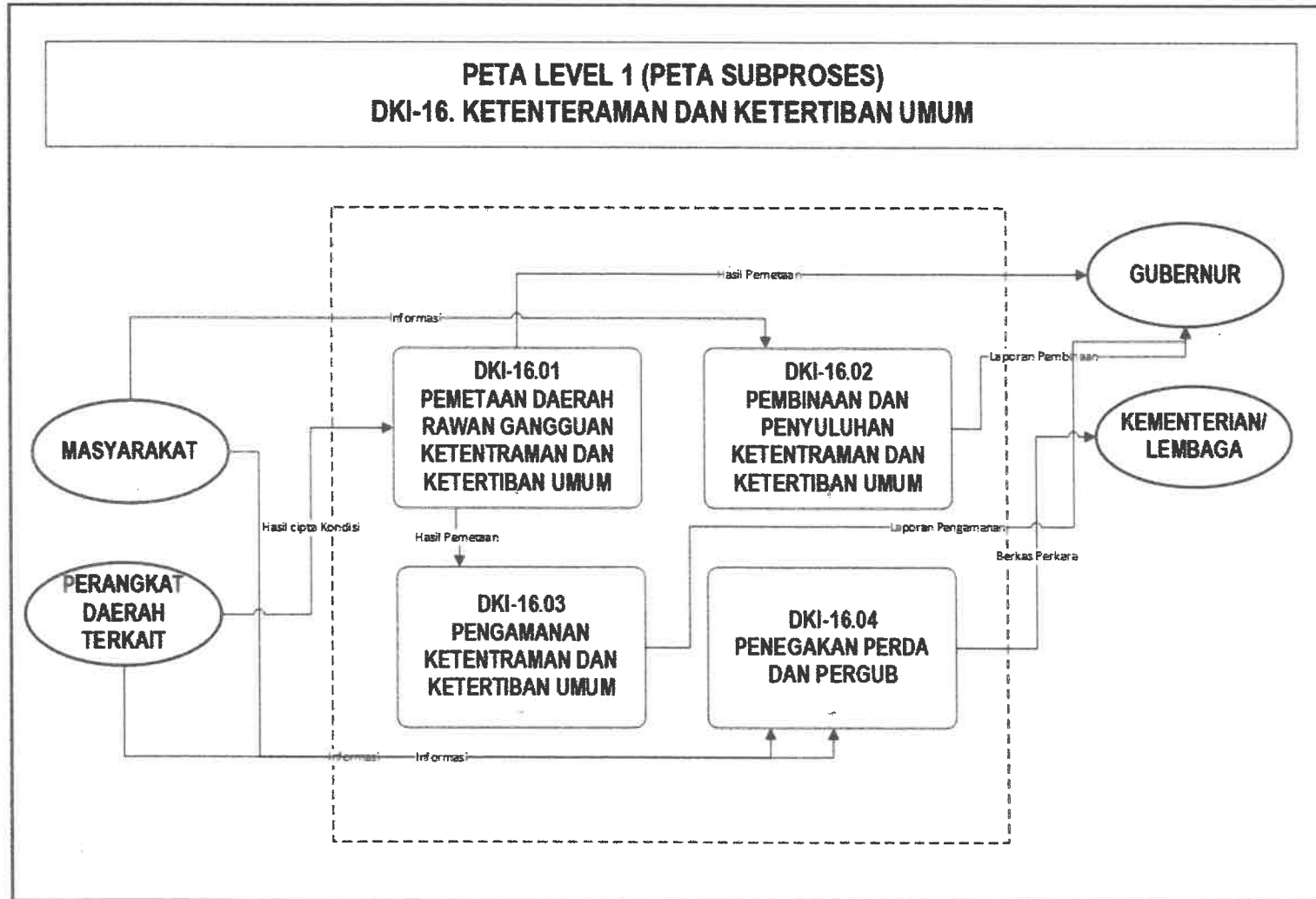


SUBPROSES DKI-15.02 KESETARAAN GENDER



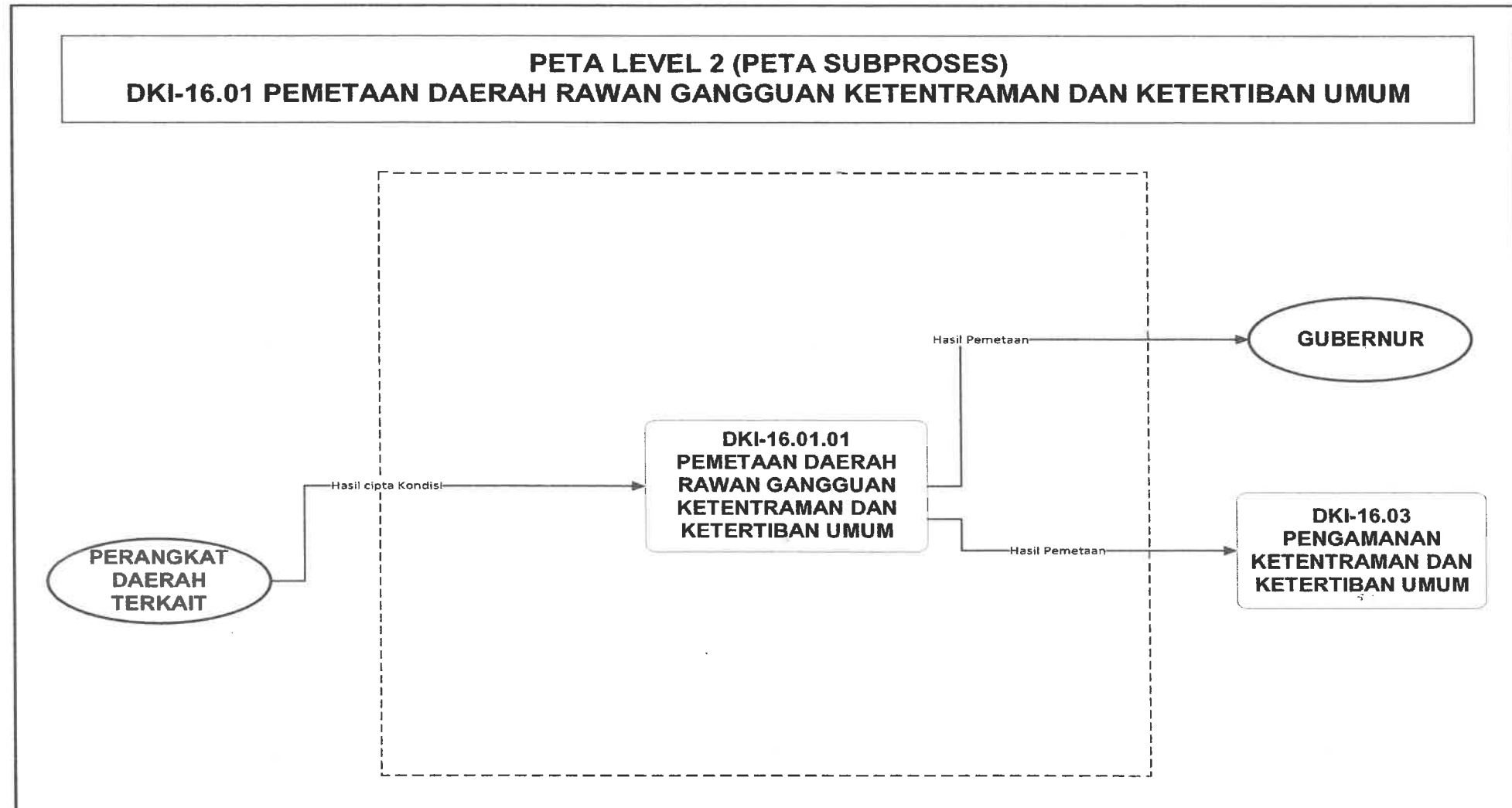
SUBPROSES DKI-15.03 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK

16. DKI-16 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

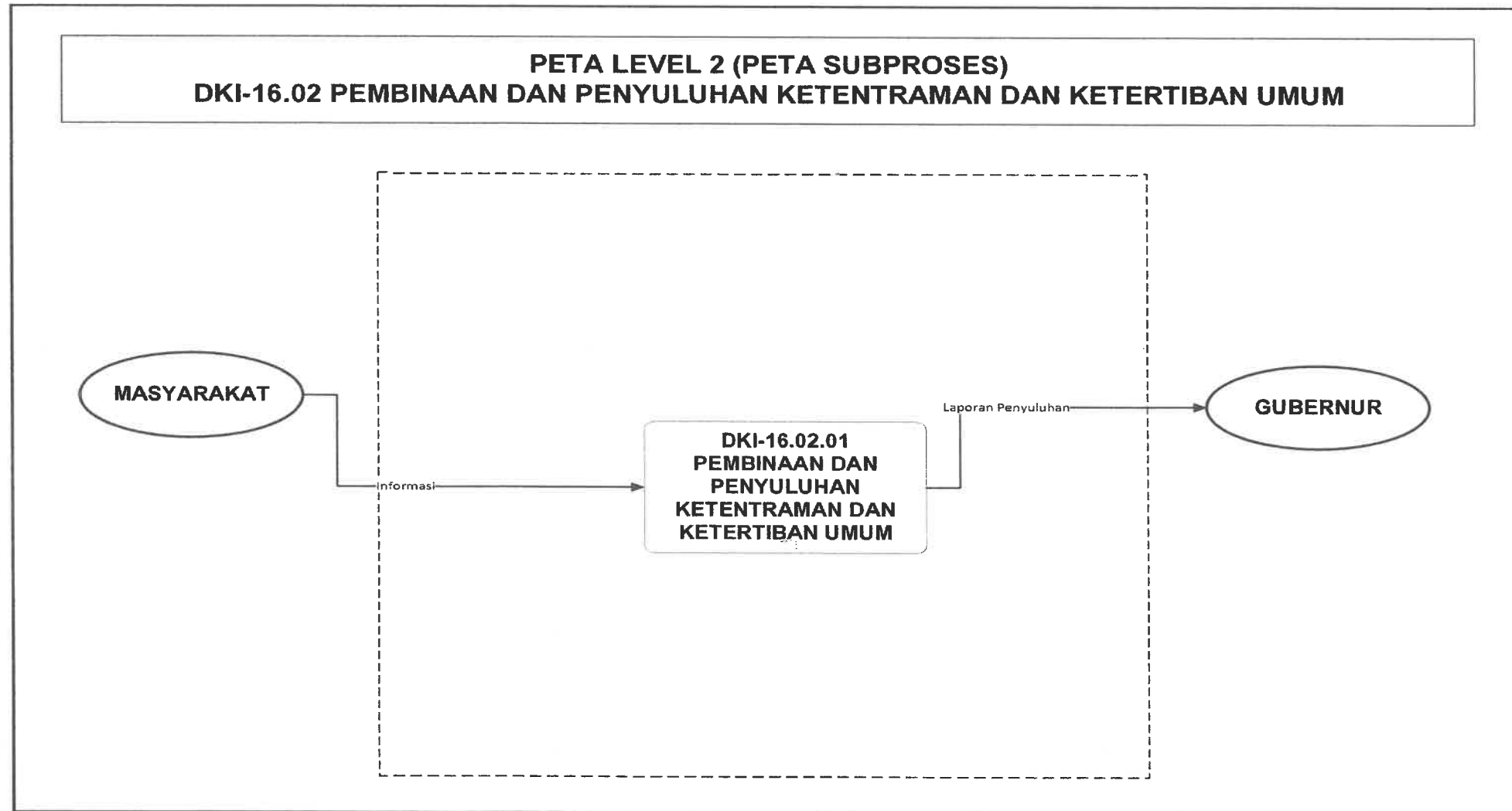
Penjelasan:

Proses ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai upaya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Pada proses ini dilakukan proses pemetaan daerah rawan gangguan, pembinaan dan penyuluhan, pengamanan hingga penegakkan Perda dan Pergub DKI Jakarta.

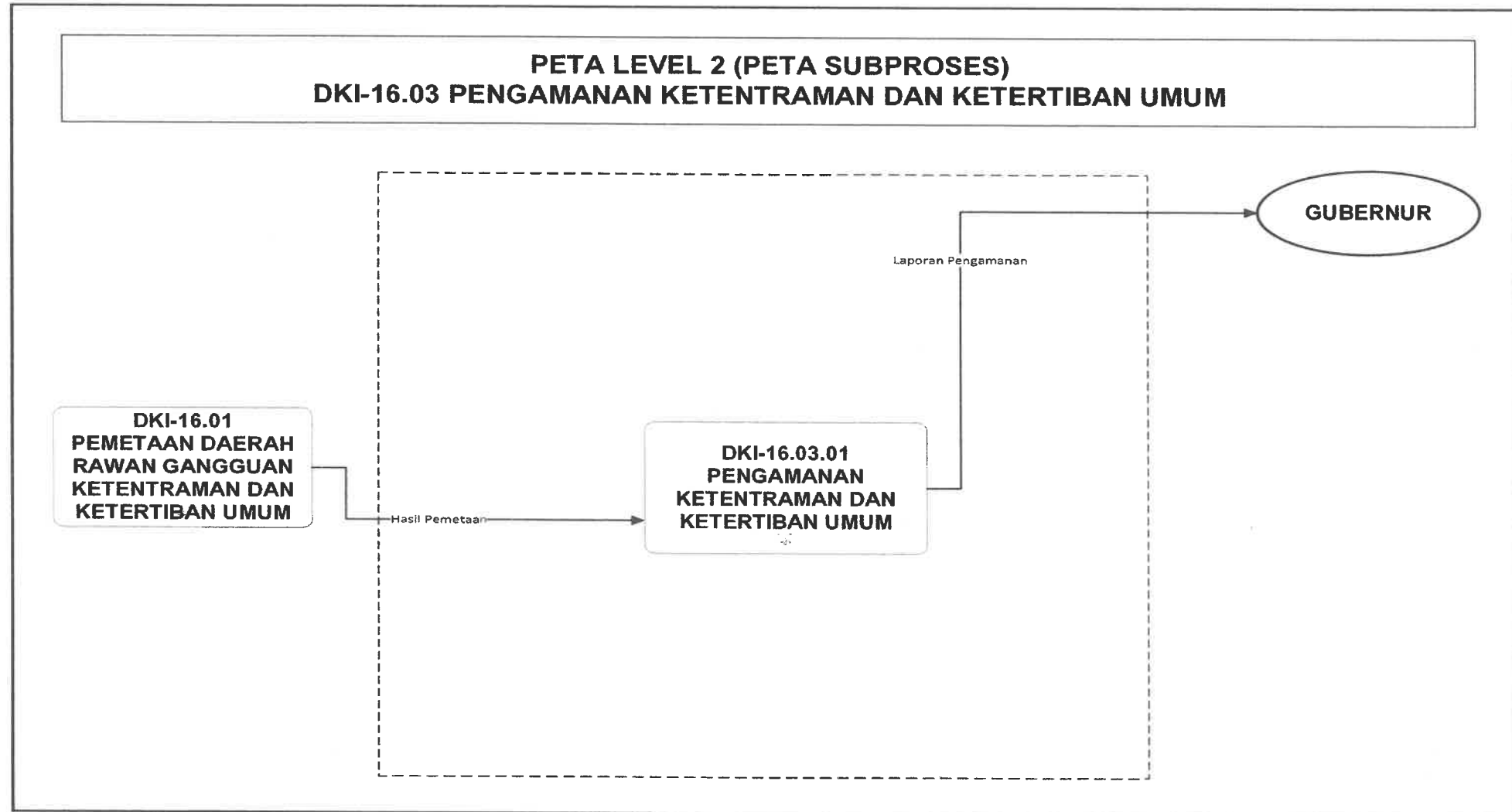
SUBPROSES DKI-16 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



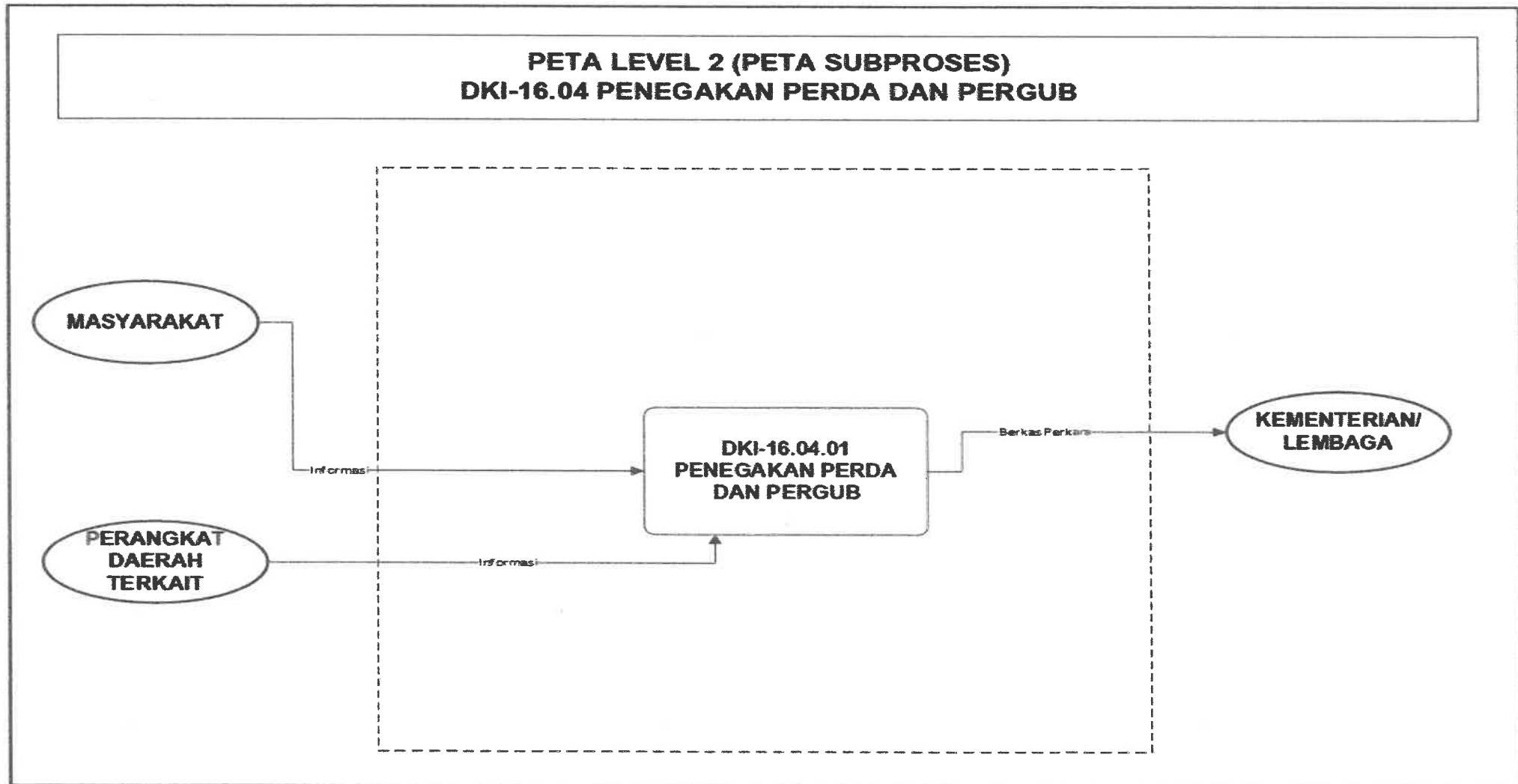
SUBPROSES DKI-16.01 PEMETAAN DAERAH RAWAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



SUBPROSES DKI-16.02 PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

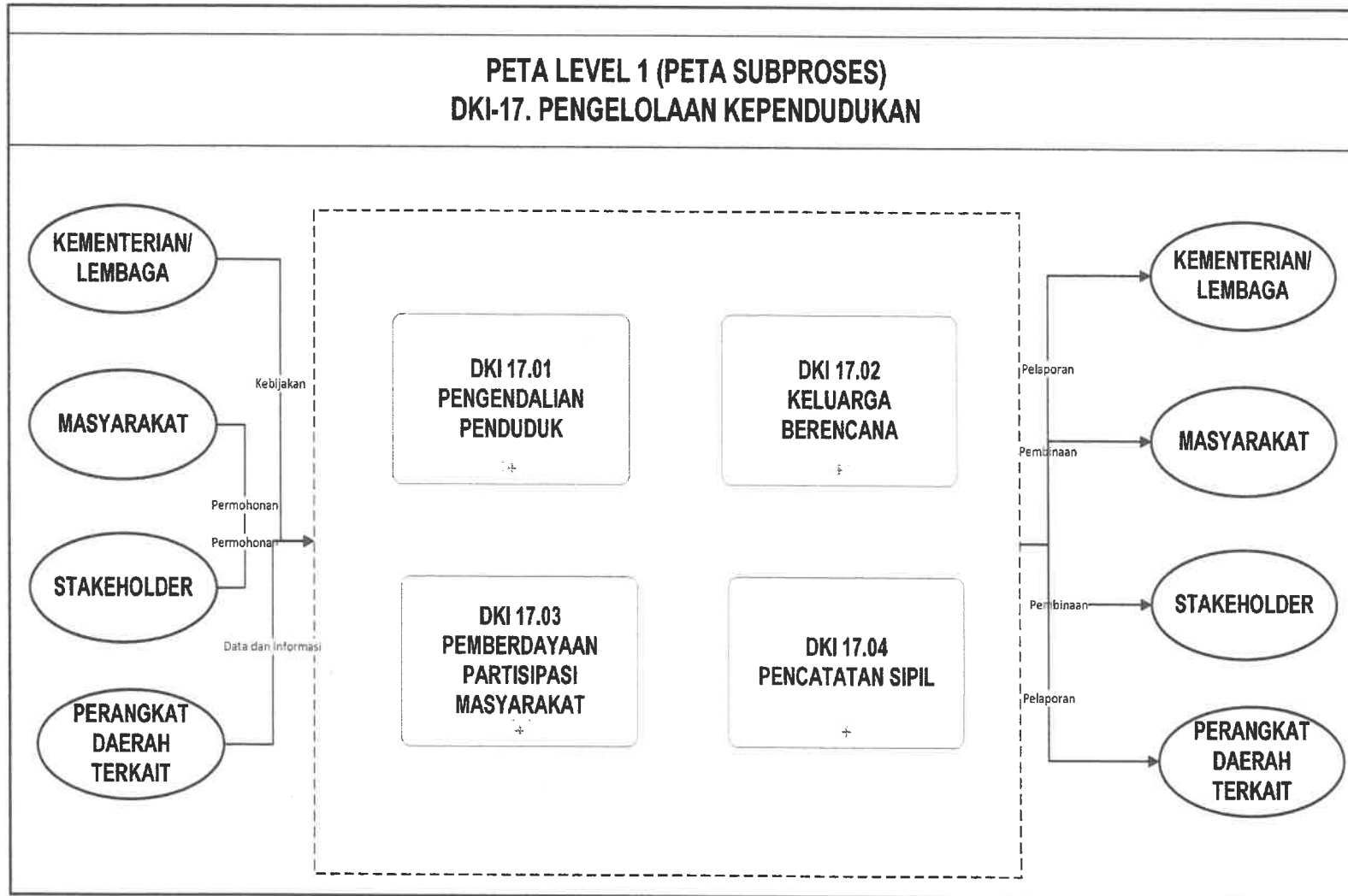


SUBPROSES DKI-16.03 PENGAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



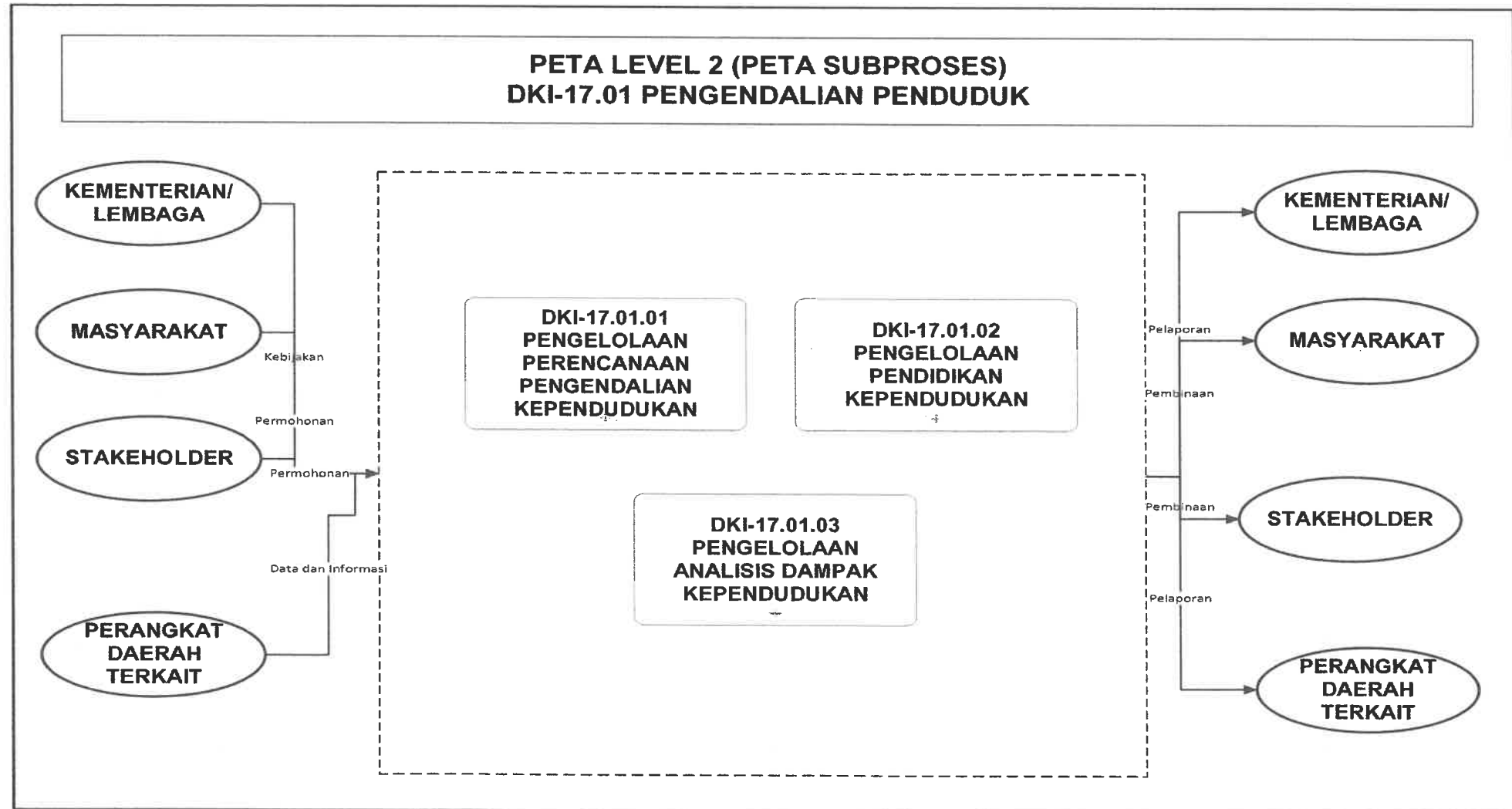
SUBPROSES DKI-16.04 PENEGAKAN PERDA DAN PERGUB

17. DKI-17 PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN

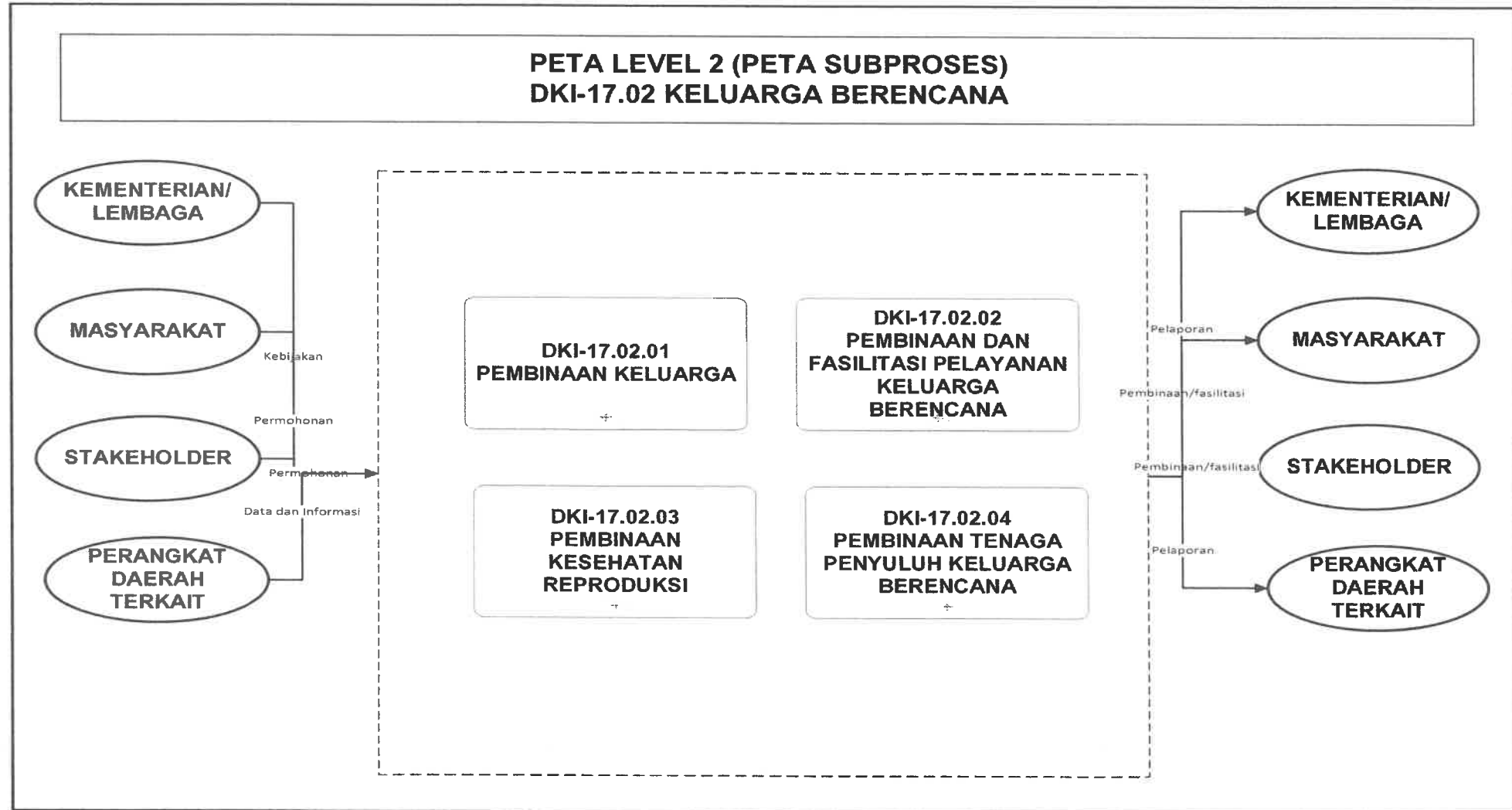


Penjelasan:
 Proses pengelolaan kependudukan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta meliputi pengendalian penduduk, pengelolaan keluarga berencana, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, serta pencatatan sipil bagi warga DKI Jakarta.

SUBPROSES DKI-17 PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN



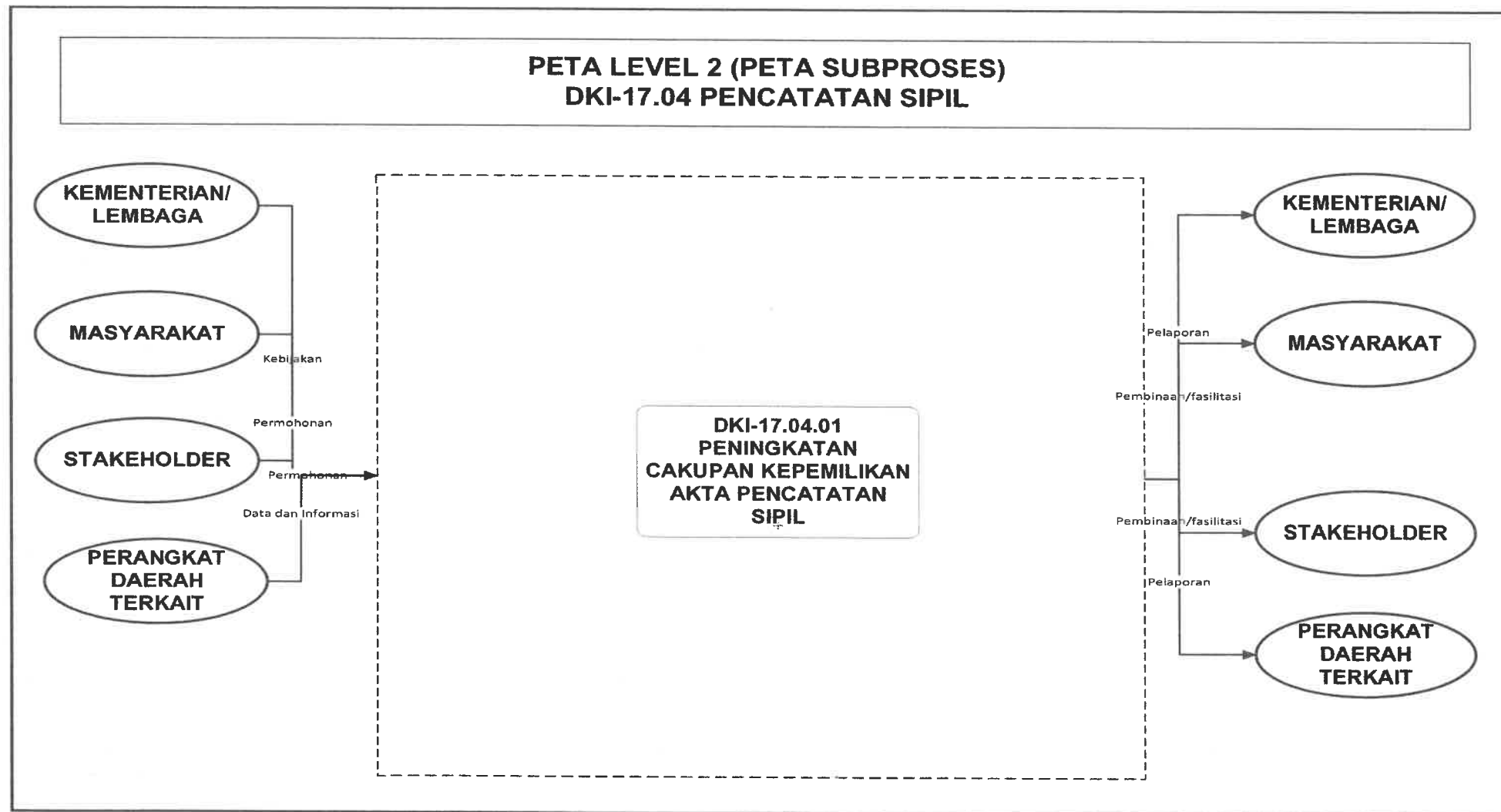
SUBPROSES DKI-17.01 PENGENDALIAN PENDUDUK



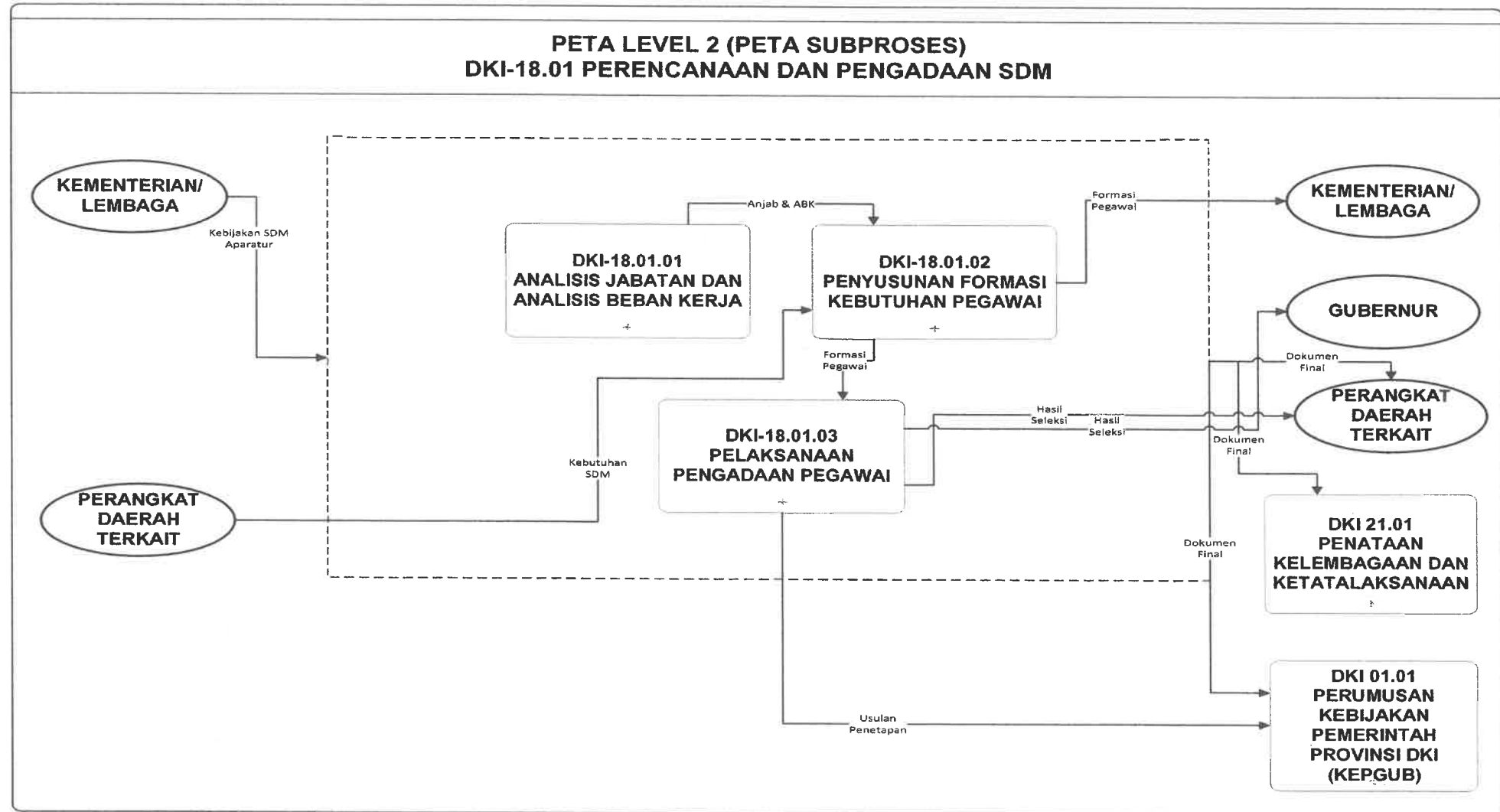
SUBPROSES DKI-17.02 KELUARGA BERENCANA



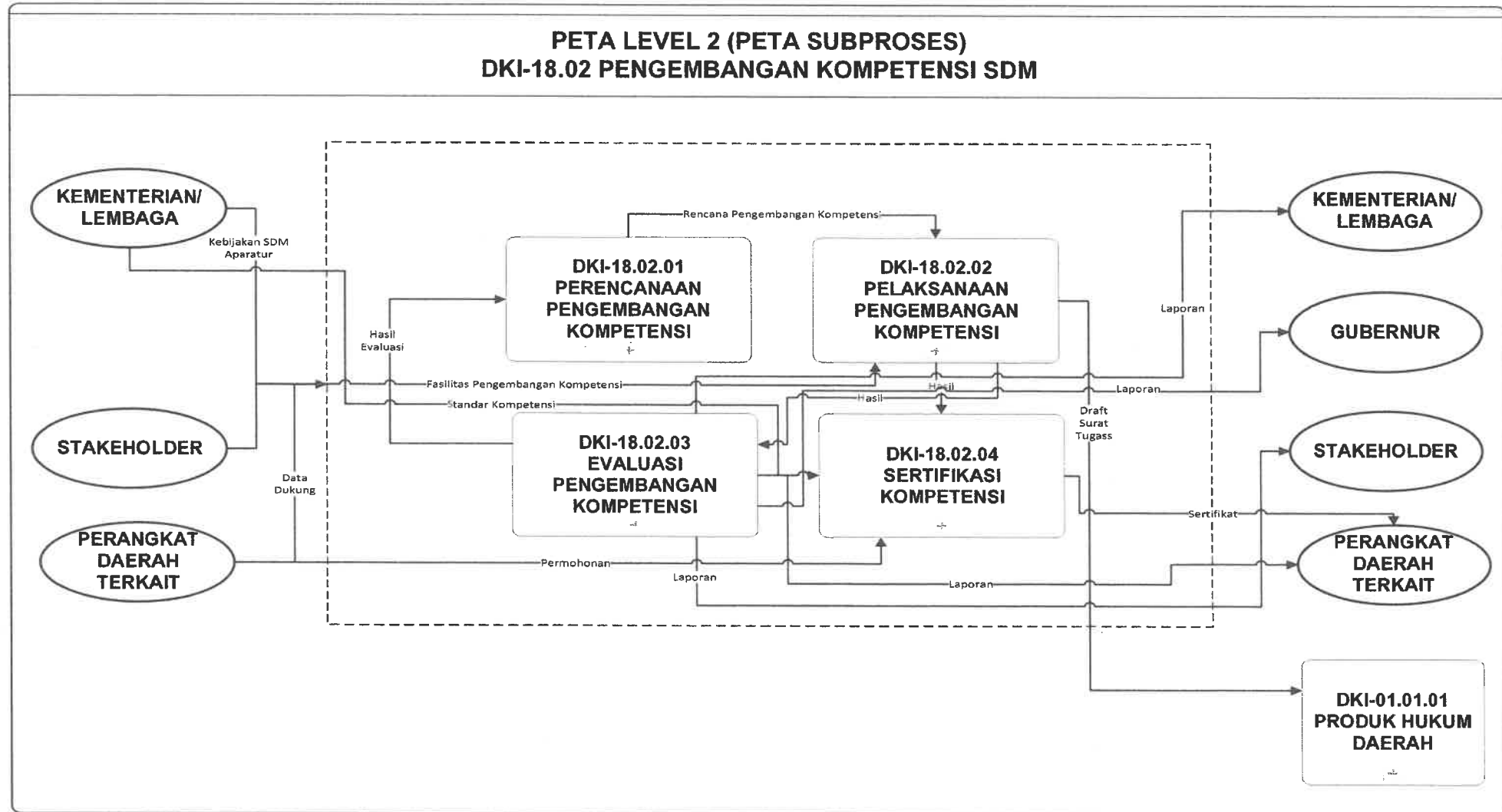
SUBPROSES DKI-17.03 PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT



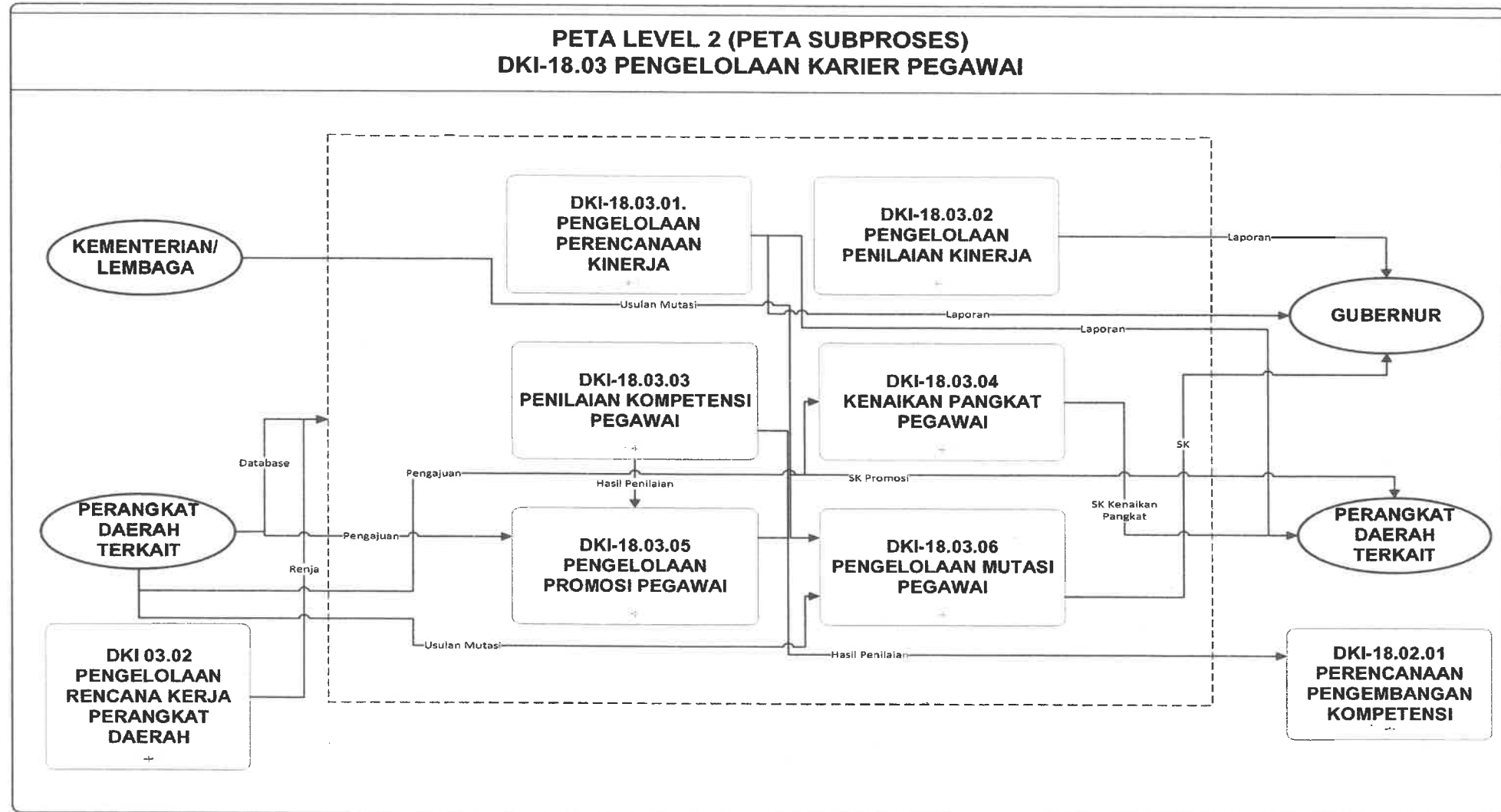
SUBPROSES DKI-17.04 PENCATATAN SIPIL



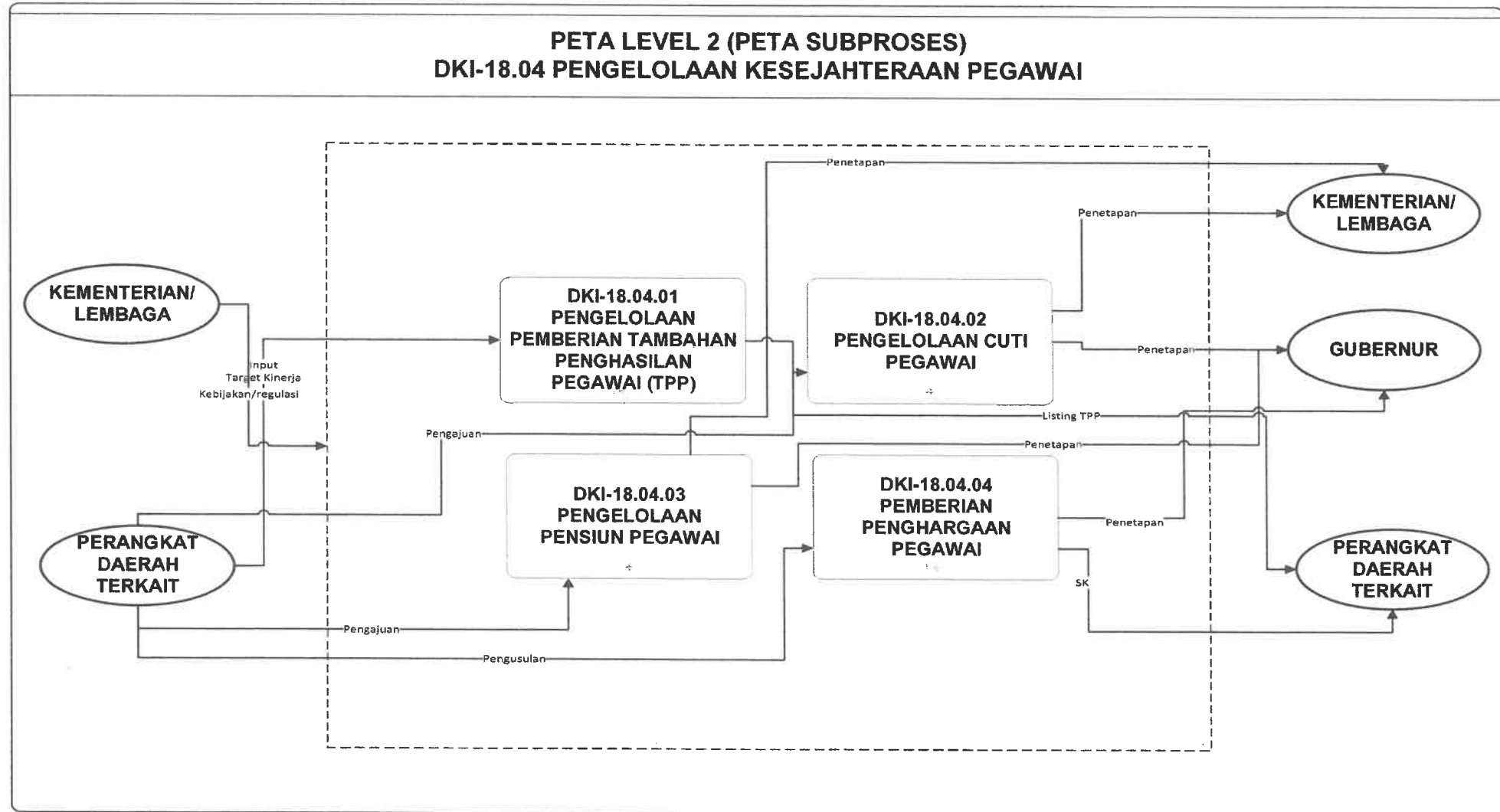
SUBPROSES DKI-18.01 PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM



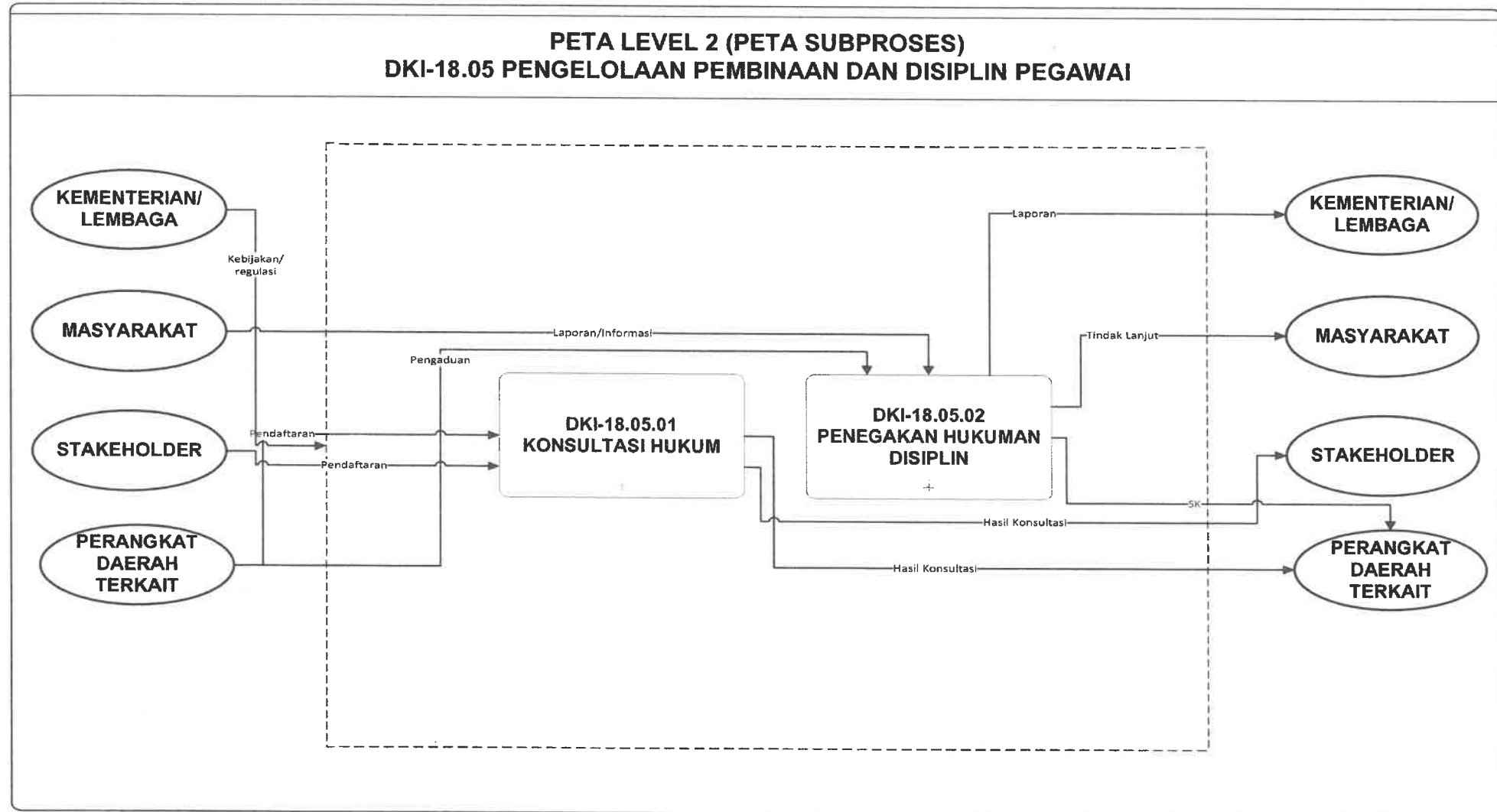
SUBPROSES DKI-18.02 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM



SUBPROSES DKI-18.03 PENGELOLAAN KARIER PEGAWAI

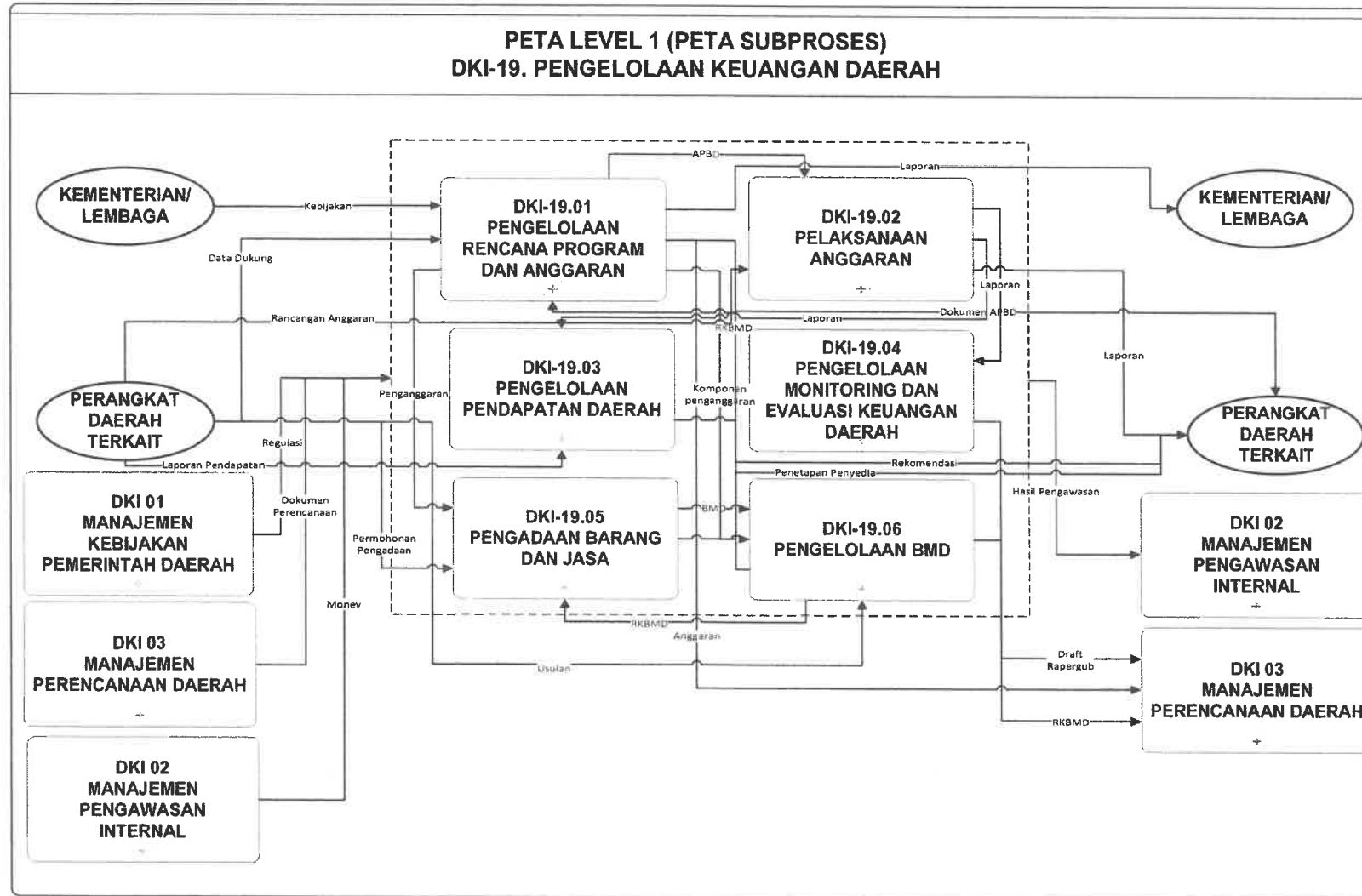


SUBPROSES DKI-18.04 PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI



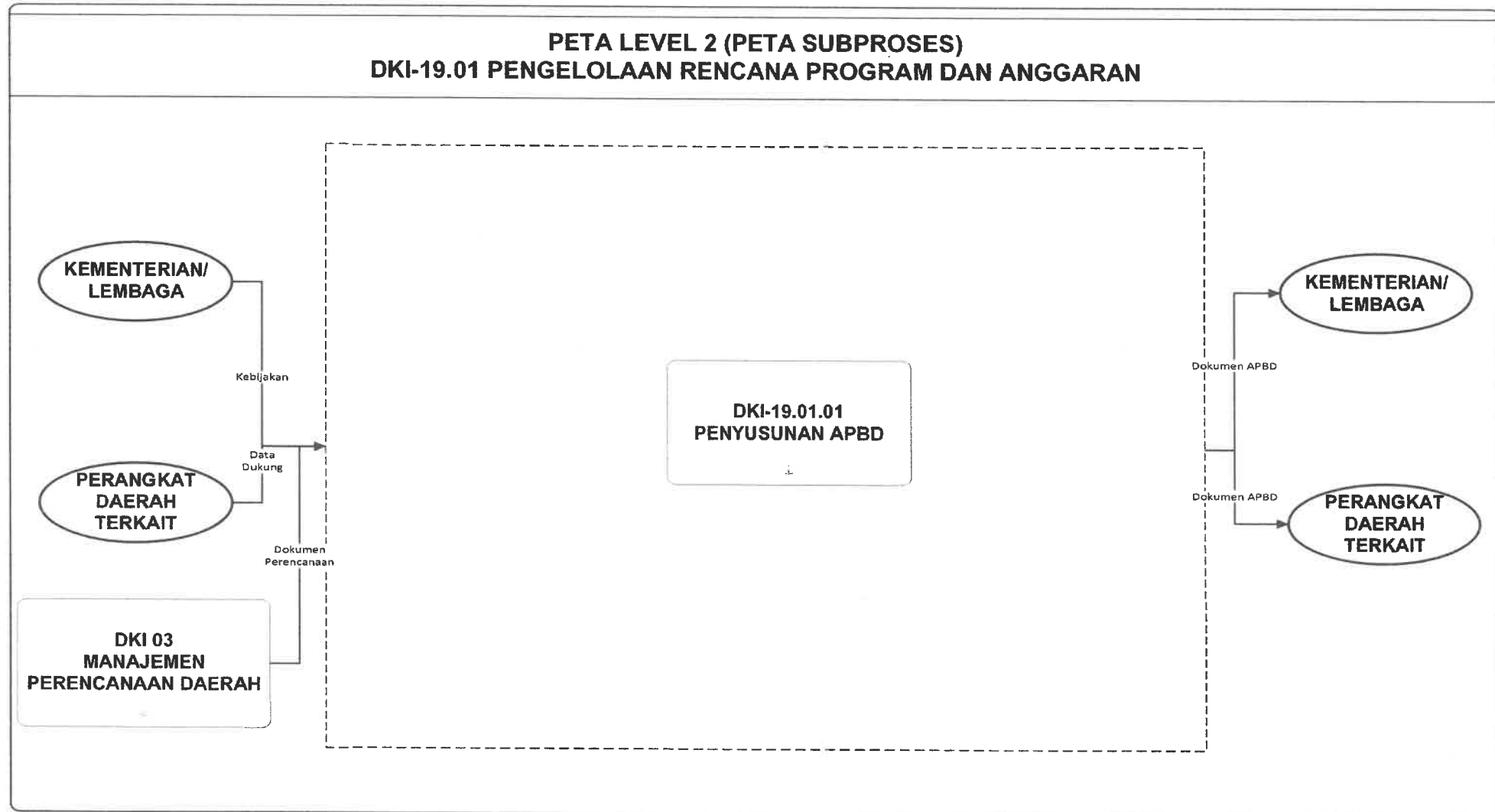
SUBPROSES DKI-18.05 PENGELOLAAN PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI

19. DKI-19 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

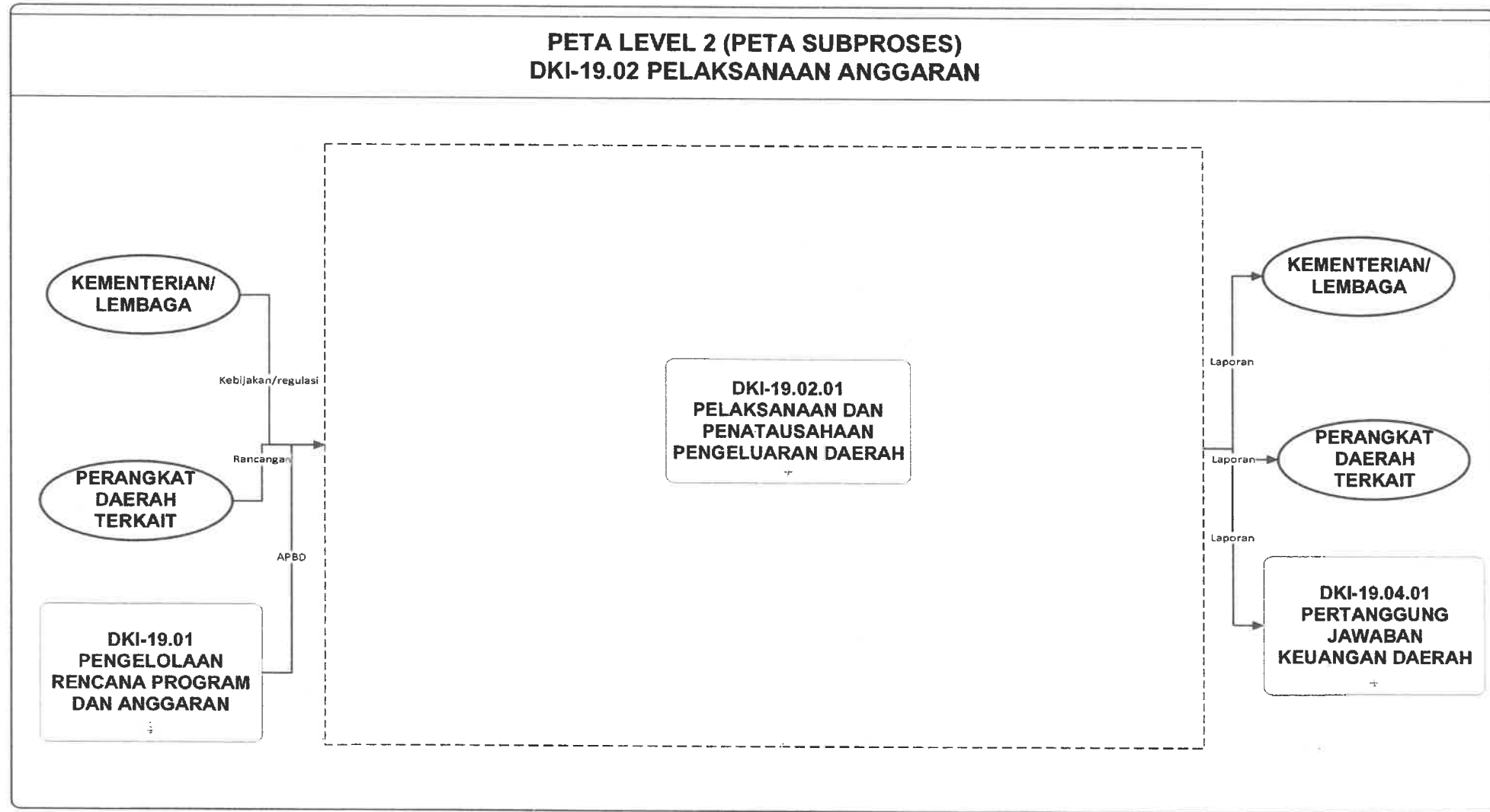


Penjelasan:
 Proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan meliputi pengelolaan rencana program dan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan monitoring dan evaluasi keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan barang milik daerah.

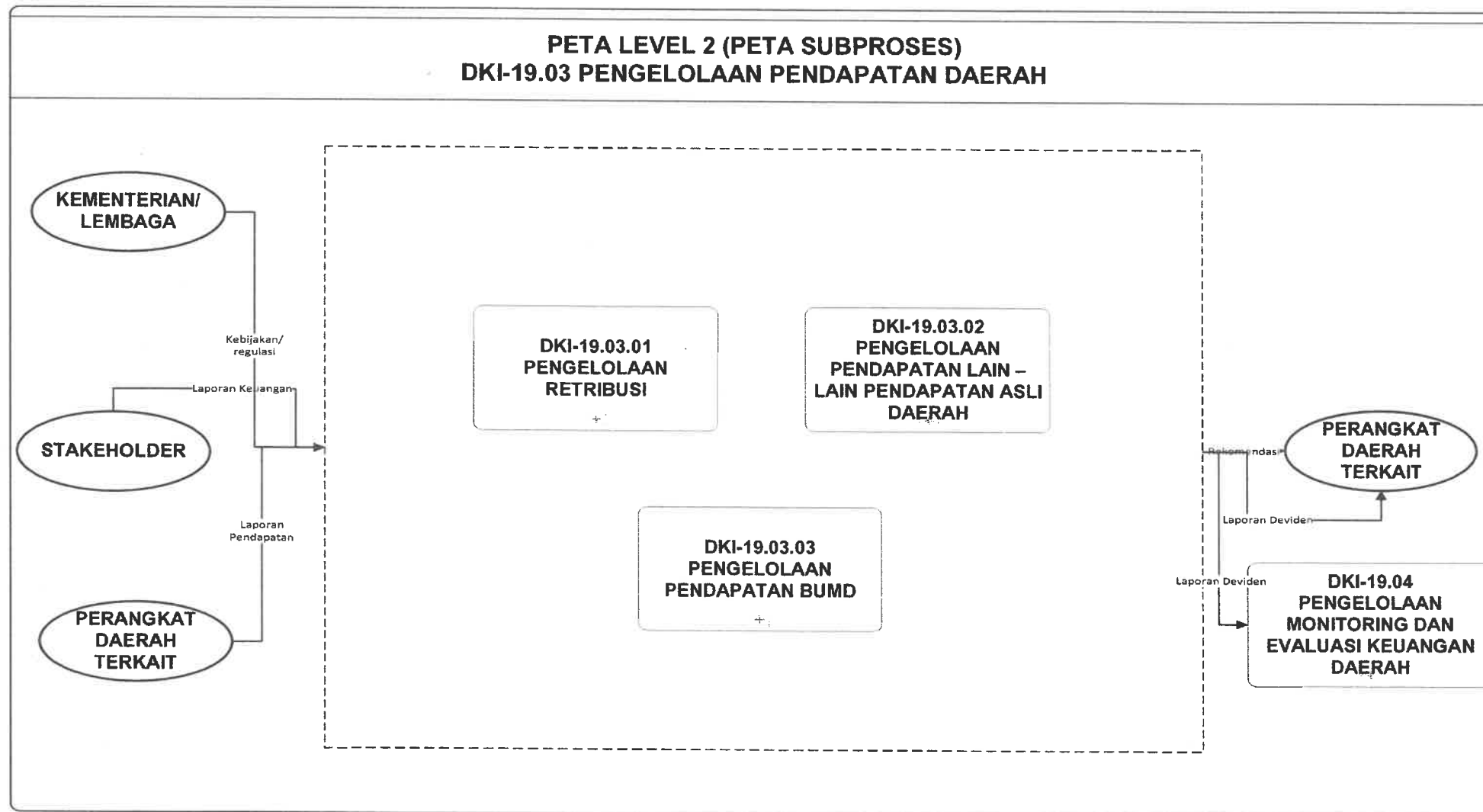
SUBPROSES DKI-19 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



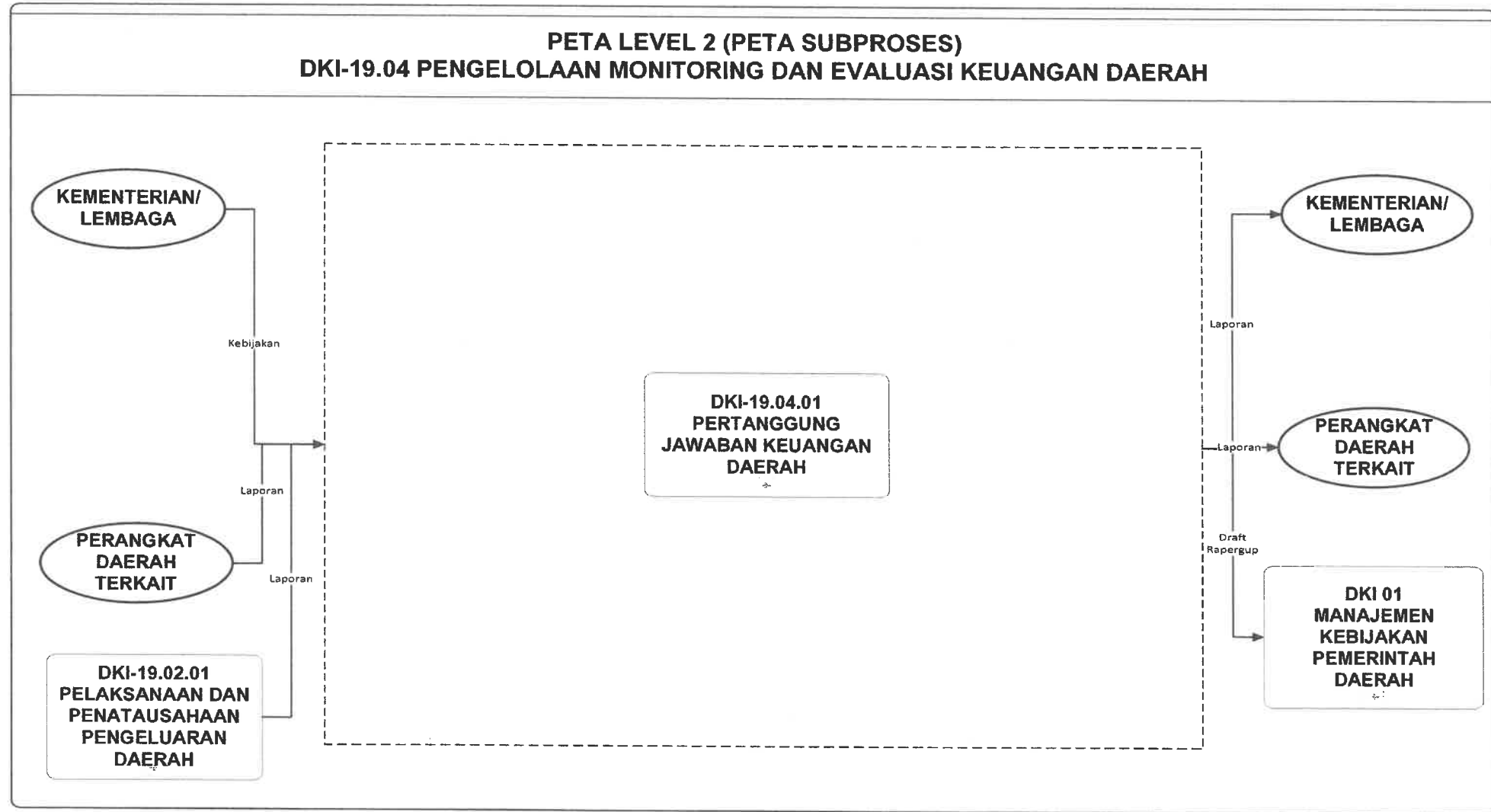
SUBPROSES DKI-19.01 PENGELOLAAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN



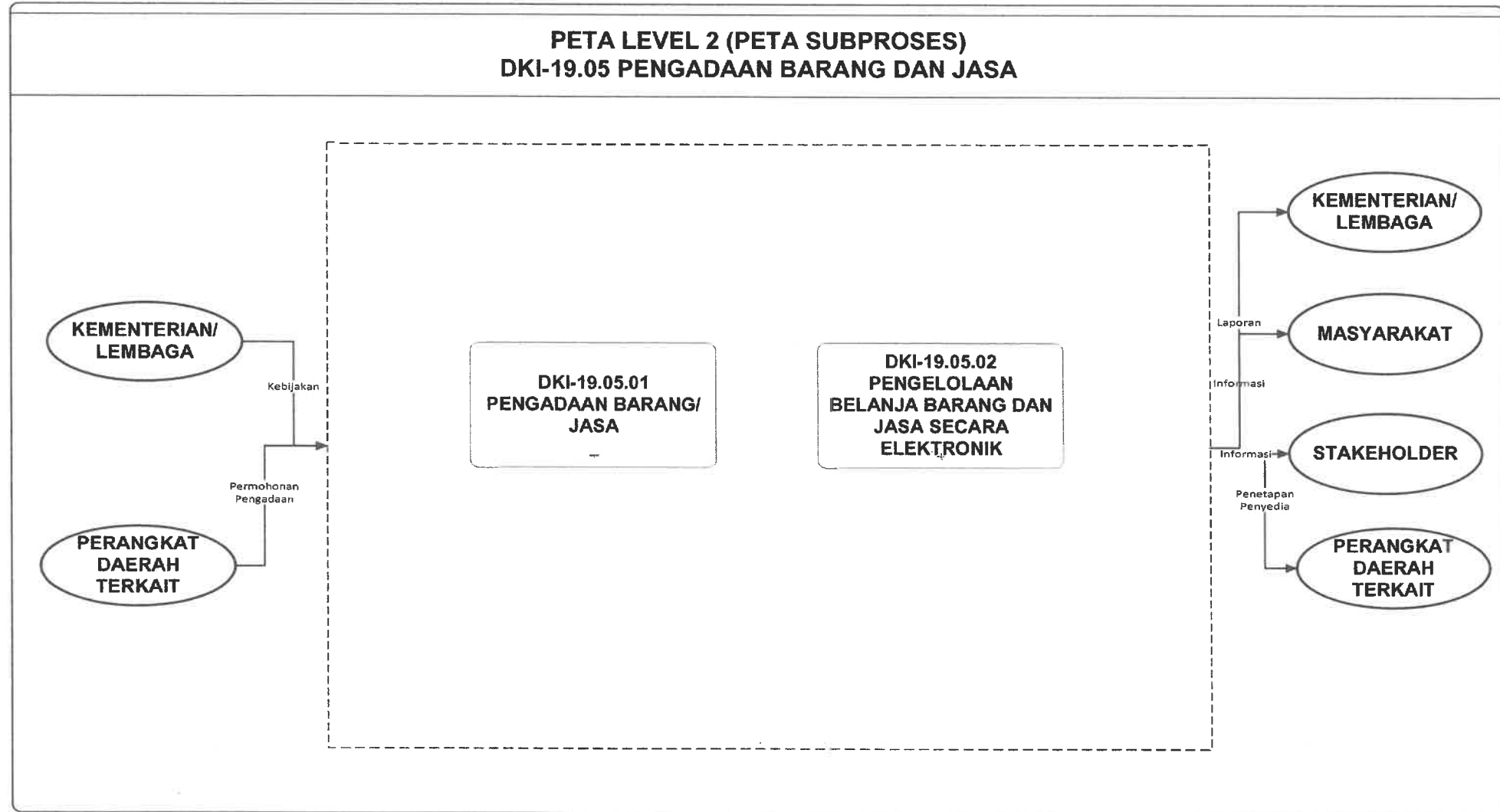
SUBPROSES DKI-19.02 PELAKSANAAN ANGGARAN



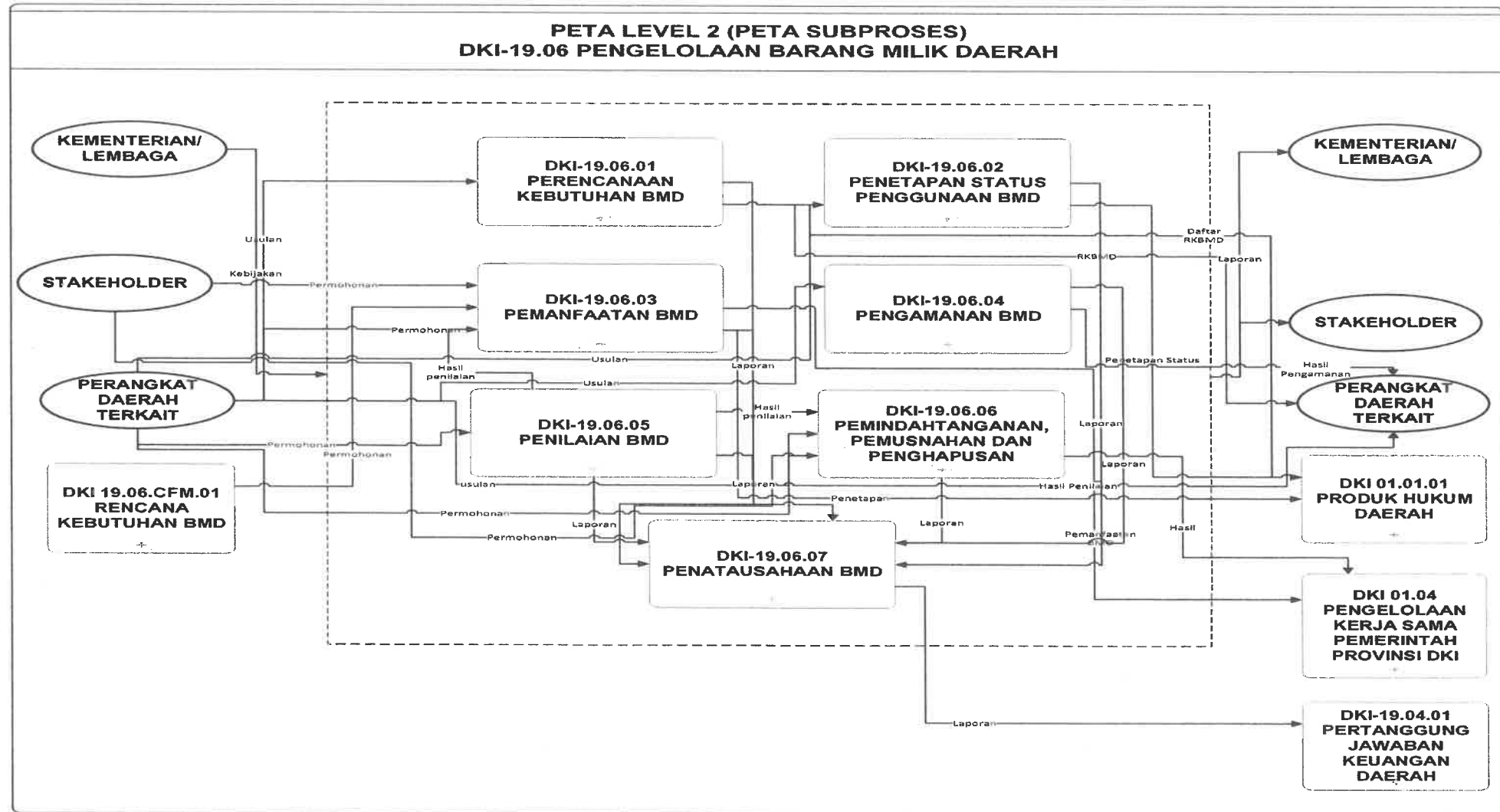
SUBPROSES DKI-19.03 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



SUBPROSES DKI-19.04 PENGELOLAAN MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DAERAH

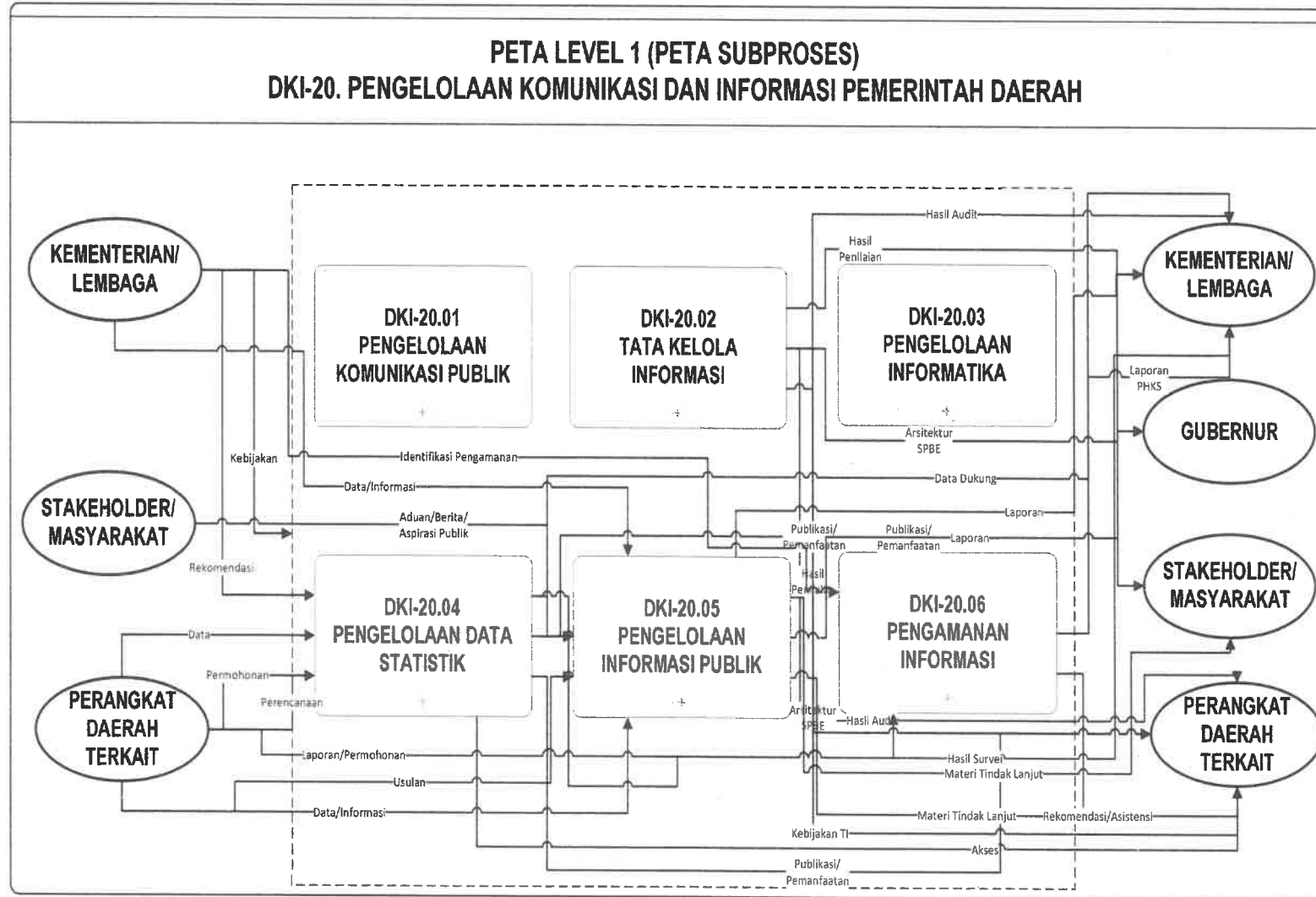


SUBPROSES DKI-19.05 PENGADAAN BARANG DAN JASA



SUBPROSES DKI-19.06 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

20. DKI-20 PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

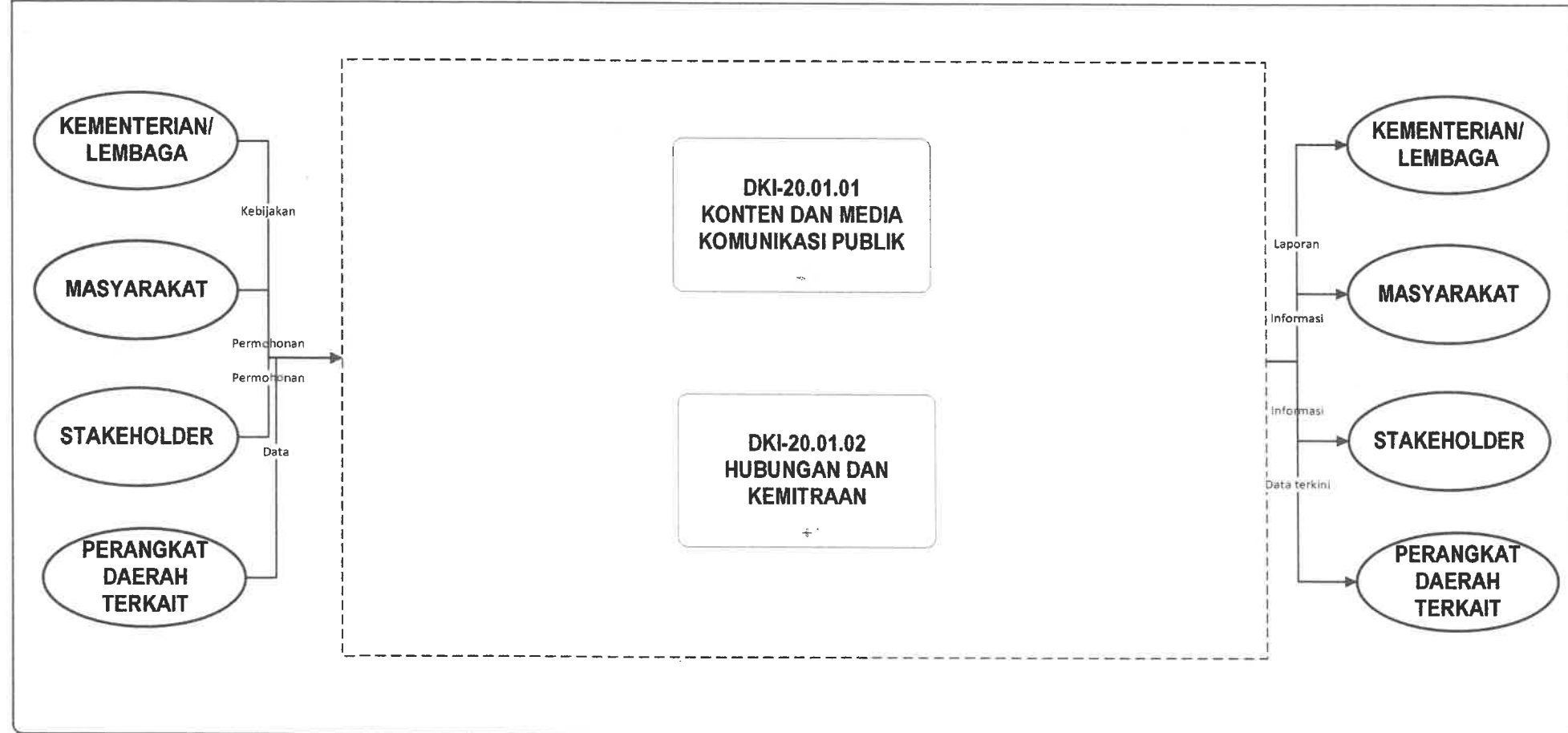


Penjelasan:

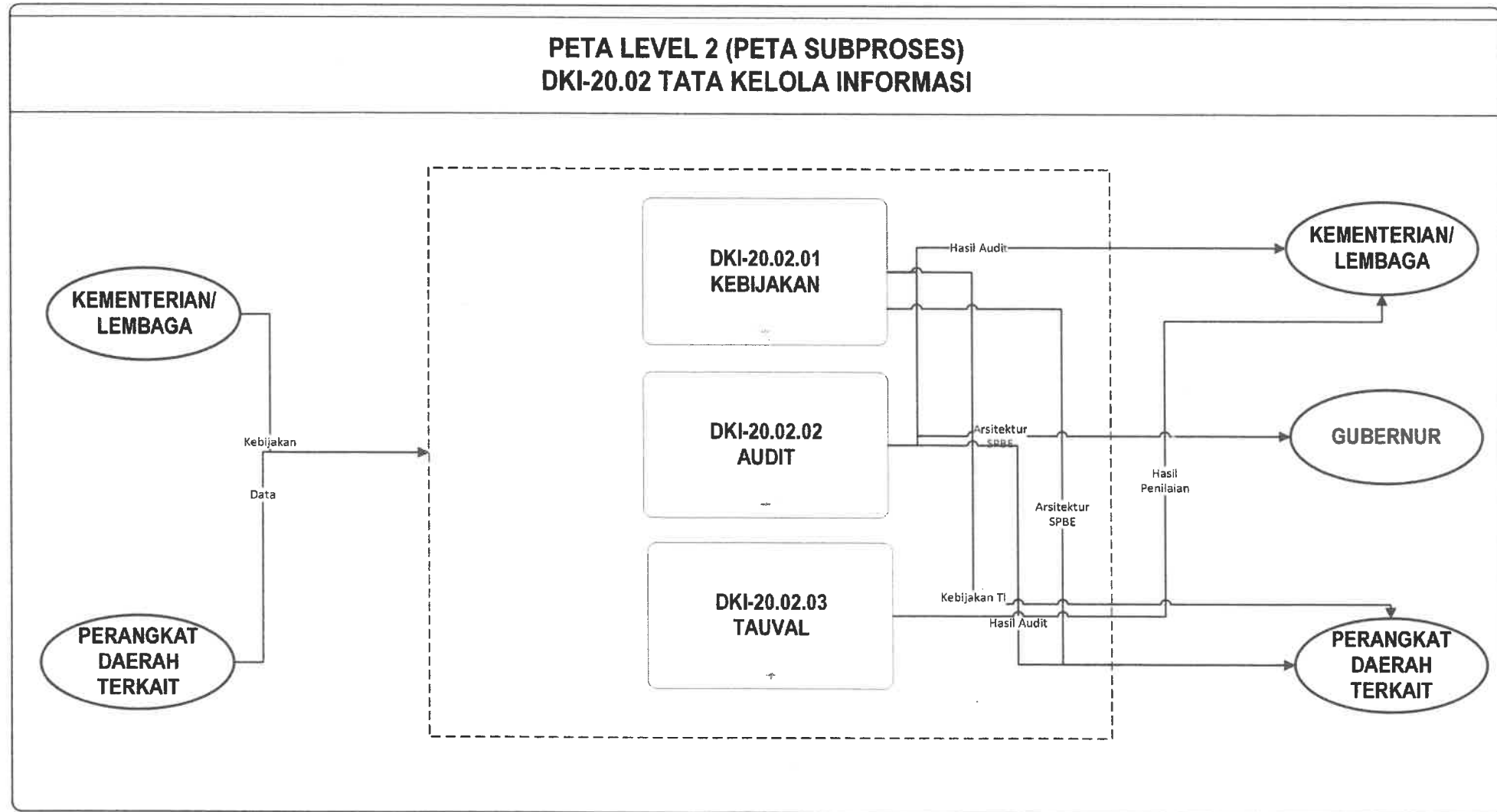
Proses Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka publikasi atas kebijakan/peraturan serta menunjukkan dukungan atas tata kelola pemerintahan terutama Keterbukaan Informasi Publik

SUBPROSES DKI-20 PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

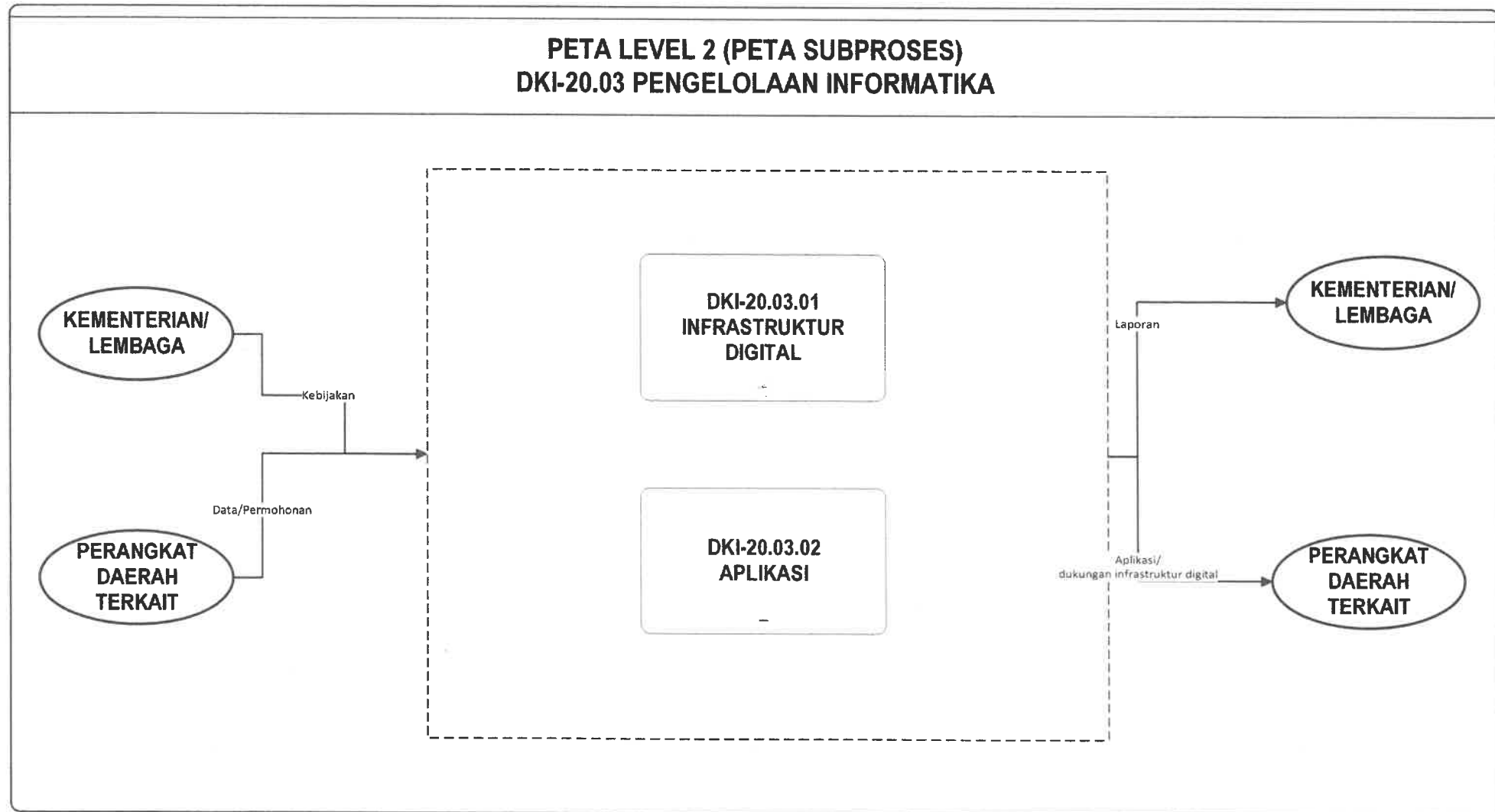
**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-20.01 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK**



SUBPROSES DKI-20.01 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

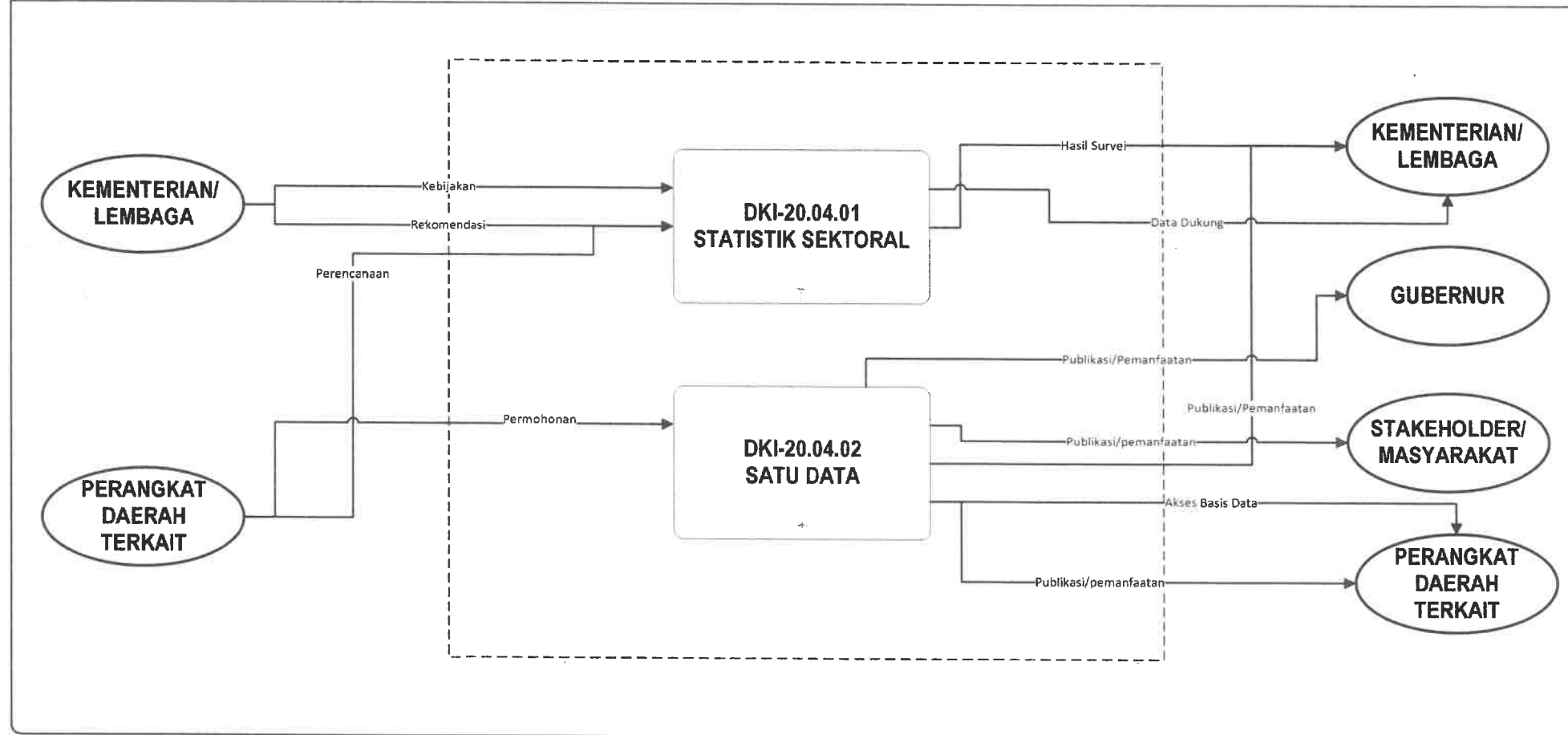


SUBPROSES DKI-20.02 TATA KELOLA INFORMASI



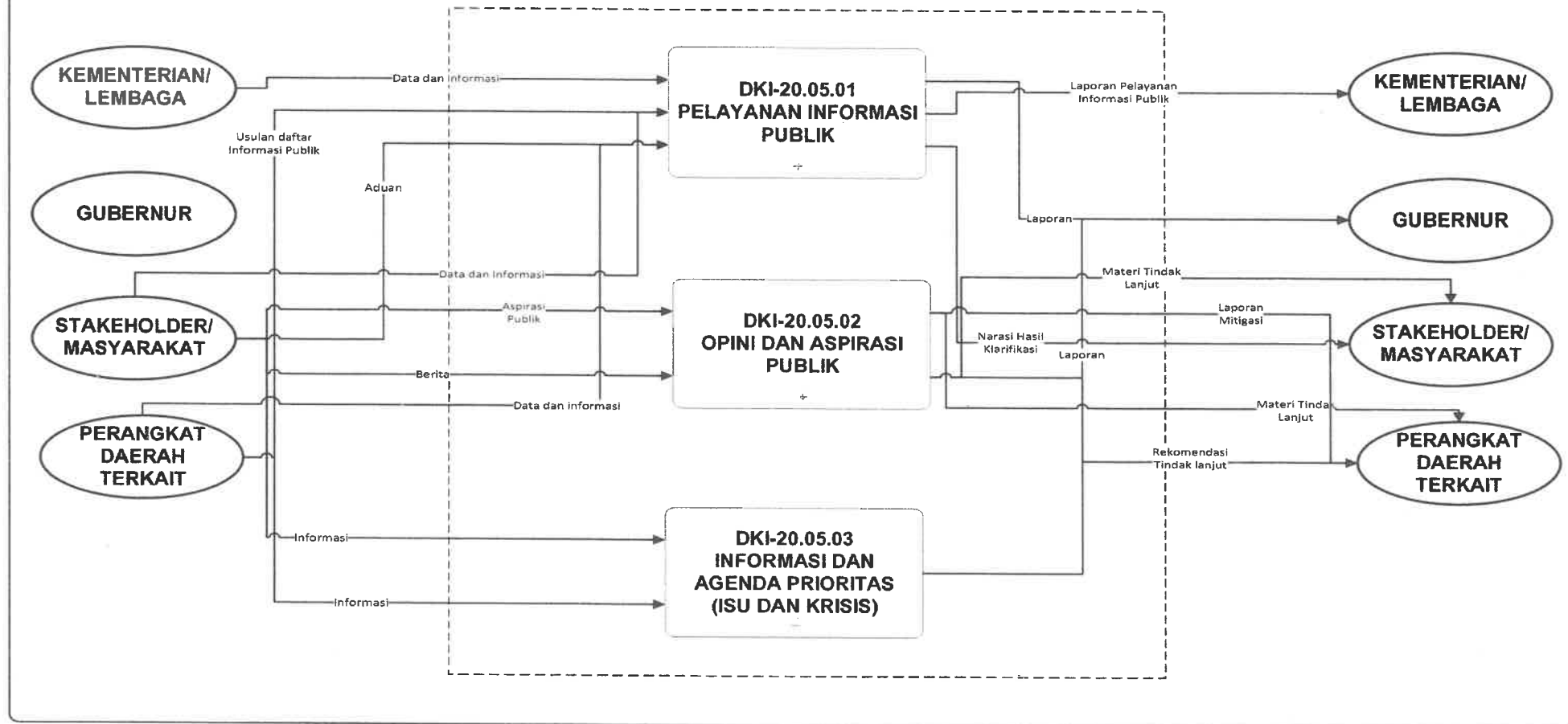
SUBPROSES DKI-20.03 PENGELOLAAN INFORMATIKA

**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-20.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK**

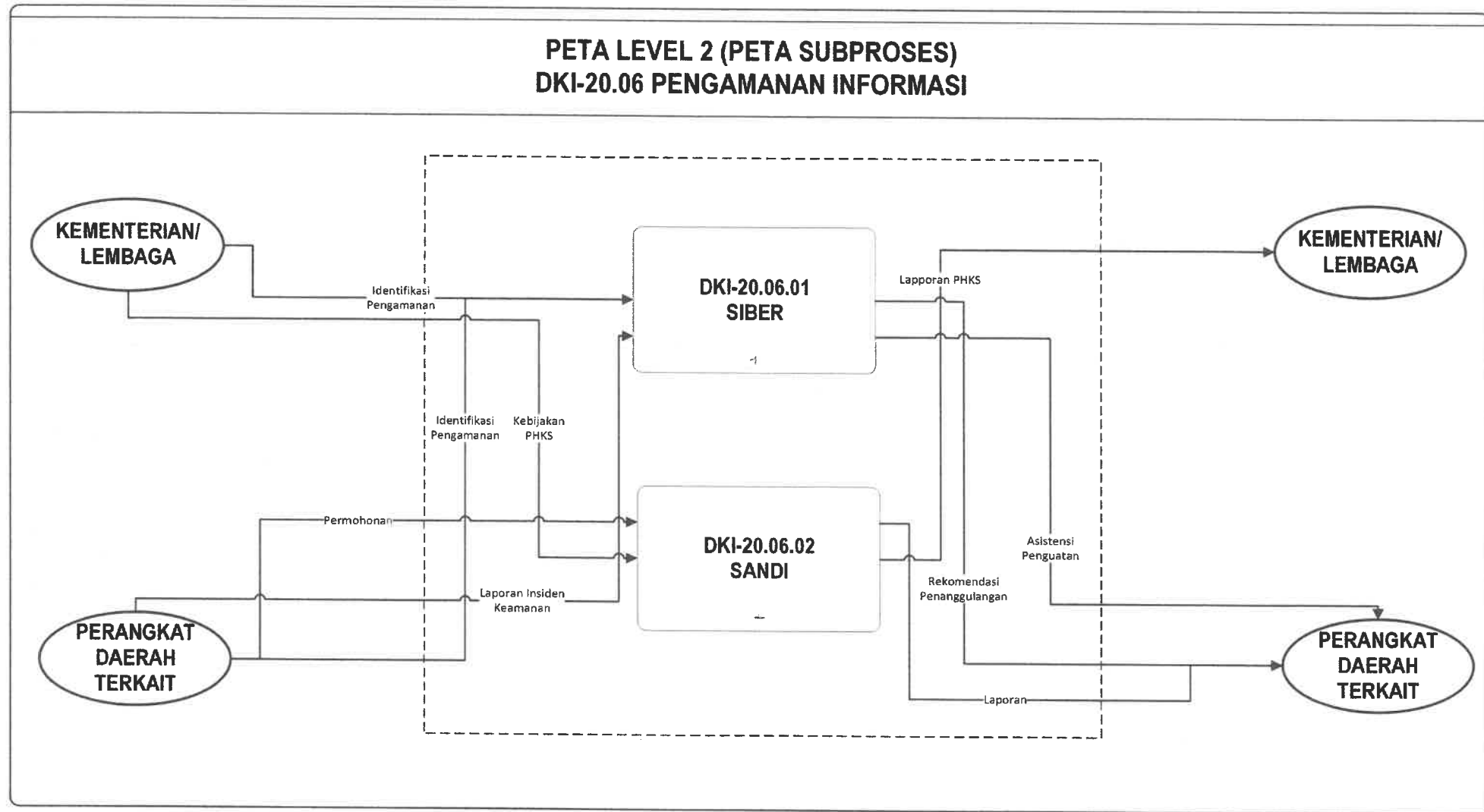


SUBPROSES DKI-20.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK

**PETA LEVEL 2 (PETA SUBPROSES)
DKI-20.05 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

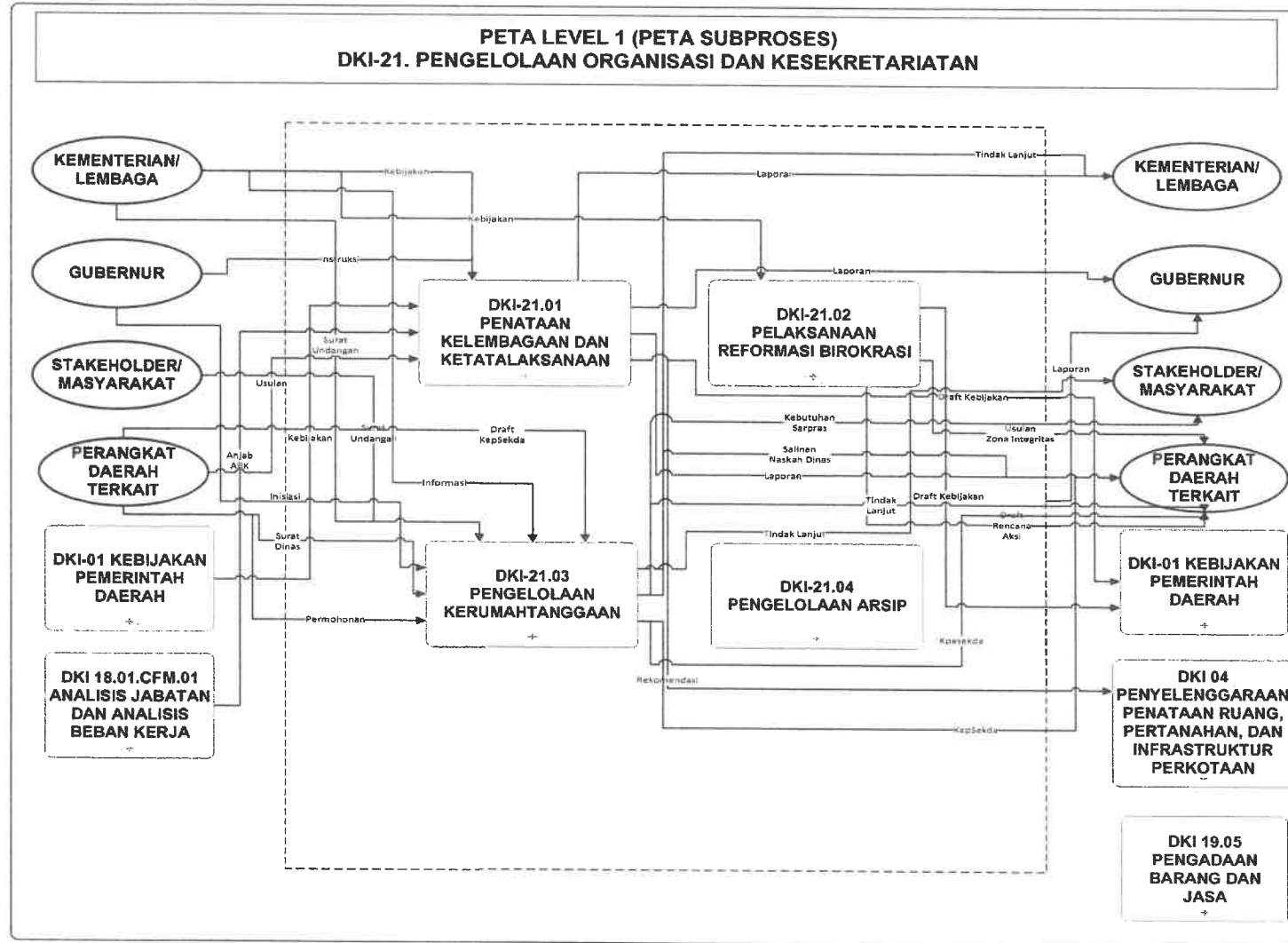


SUBPROSES DKI-20.05 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK



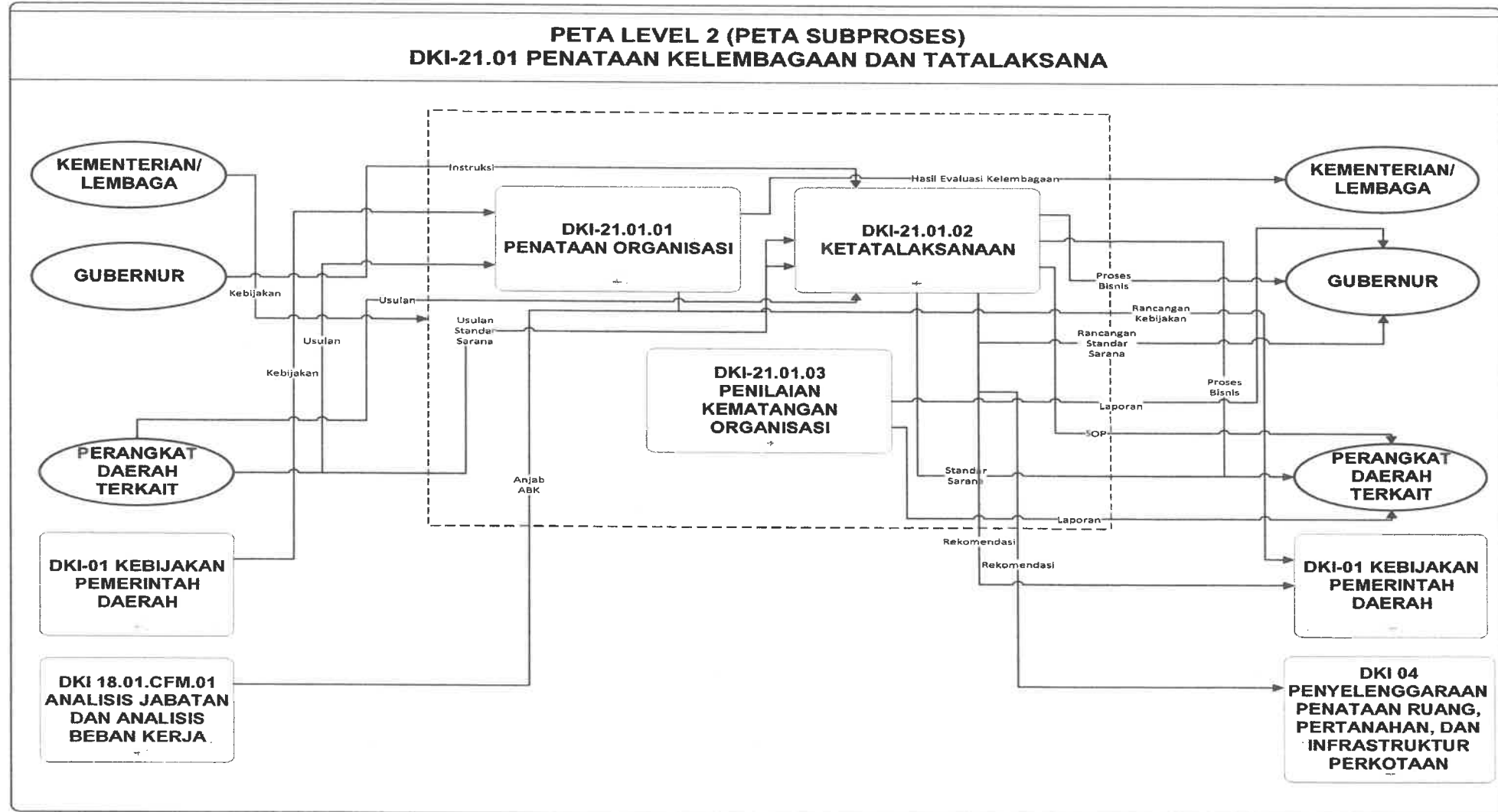
SUBPROSES DKI-20.06 PENGAMANAN INFORMASI

21. DKI-21 PENGELOLAAN ORGANISASI DAN KESEKRETARIATAN

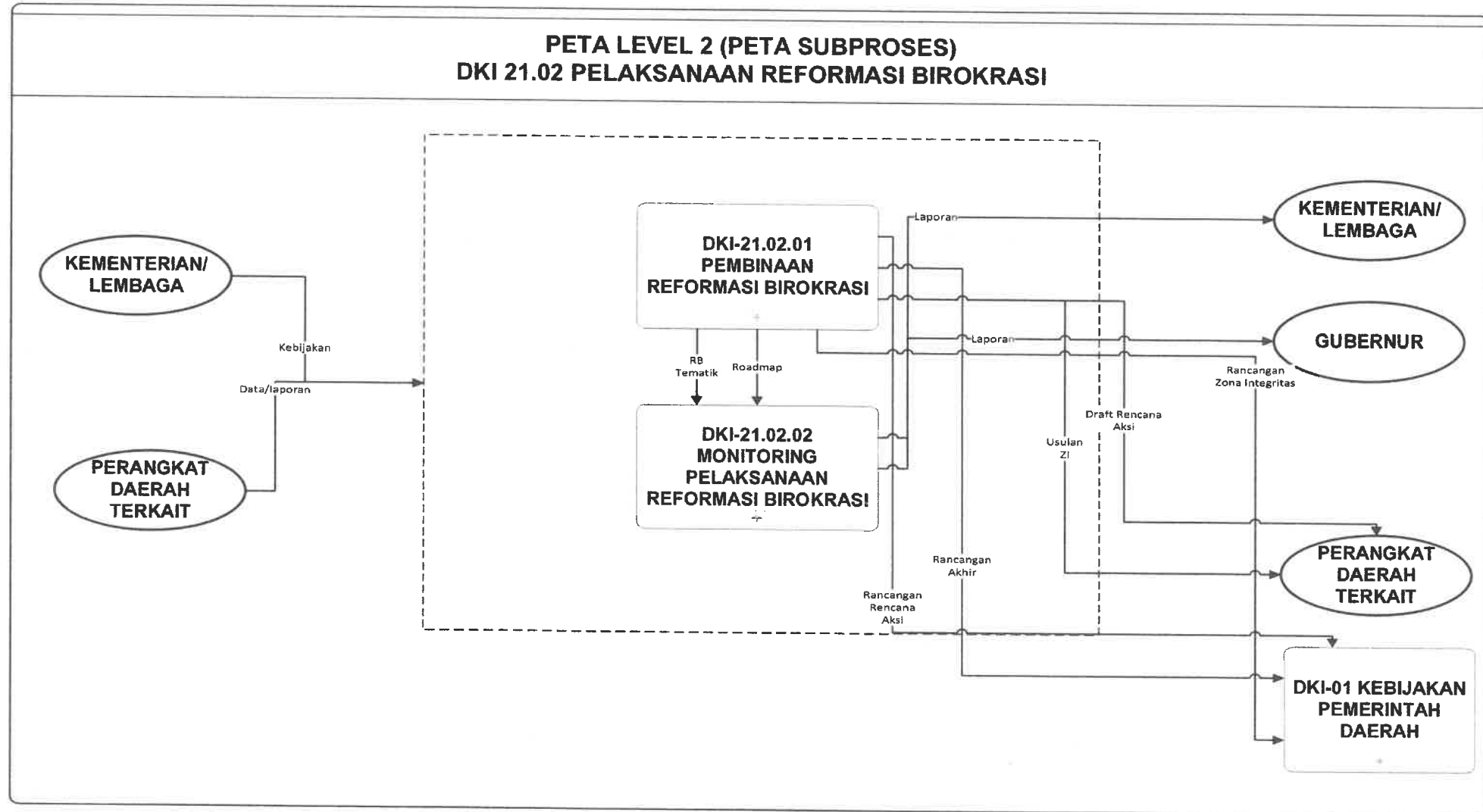


Penjelasan:
Proses Pengelolaan Organisasi dan kesekretariatan adalah proses yang mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penataan lembaga dan tata laksana, implementasi RB, Pengelolan kerumahtanggaan serta Pengelolaan arsip di lingkungan Pemprov DKI Jakarta

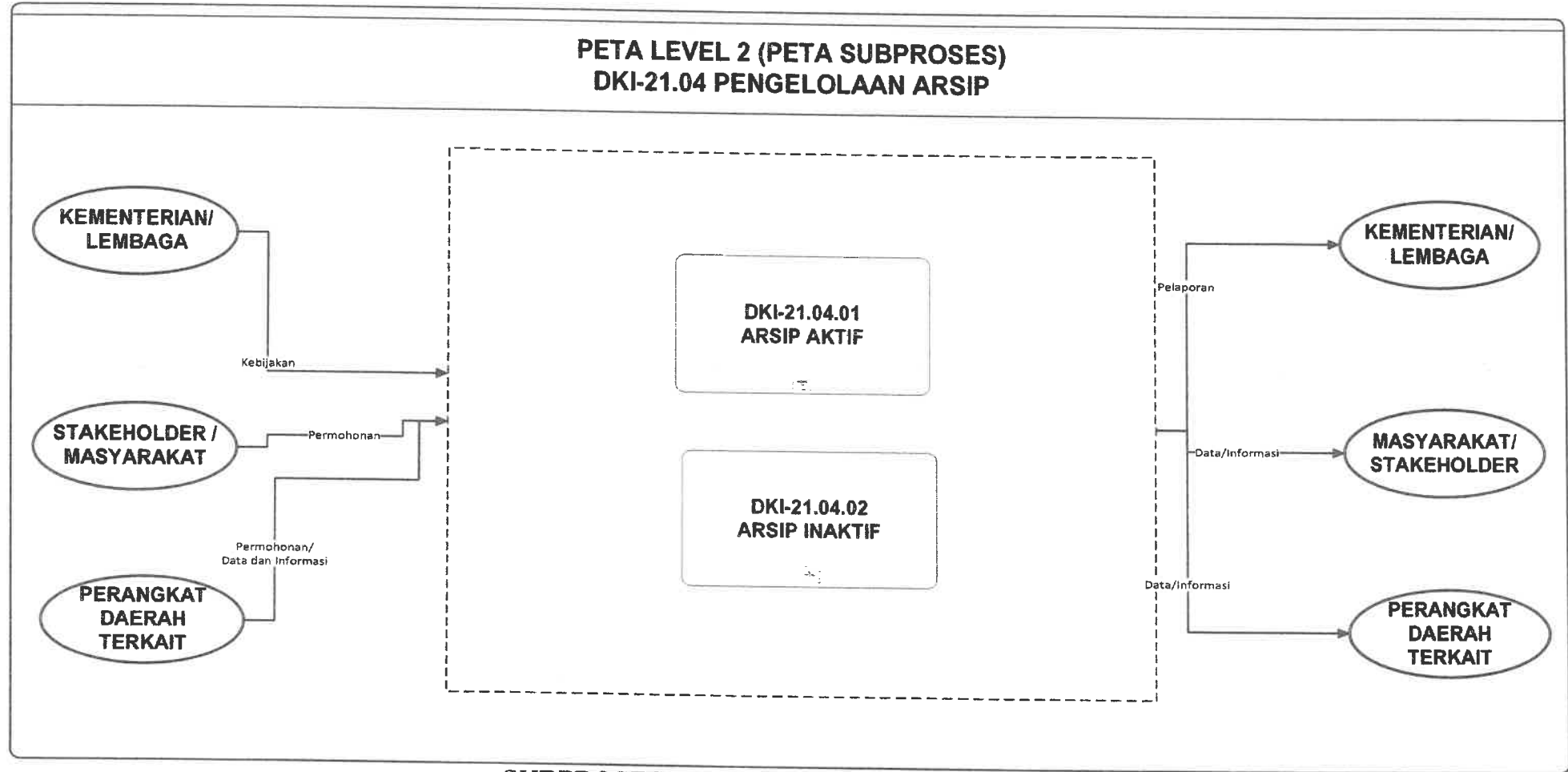
SUBPROSES DKI-21 PENGELOLAAN ORGANISASI DAN KESEKRETARIATAN



SUBPROSES DKI-21.01 PENATAAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA



SUBPROSES DKI-21.02 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



SUBPROSES DKI-21.04 PENGELOLAAN ARSIP

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

